

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1 Pendahuluan

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semua proses pertanggungjawaban publik atas pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus dilaksanakan dalam kerangka dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, segala upaya peningkatan akuntabilitas harus mengacu kepada landasan hukum yang mendasarinya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin komplek, tata kelola keuangan daerah harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara normatif.

Sejalan dengan dinamika regulasi pengelolaan keuangan, diperlukan beberapa langkah antisipatif penyesuaian perangkat pengelolaan keuangan daerah menyikapi perkembangan regulasi yang ada. Tidak terbatas pada pemutakhiran dasar hukum pengelolaan, penataan kelembagaan dan pembenahan sistem dan prosedur, namun juga mencakup lingkungan sistem pengelolaan termasuk peningkatan profesionalisme dan kapabilitas sumber daya manusia di dalamnya.

Perubahan basis kas dalam pengelolaan keuangan menjadi basis akrual, secara tidak langsung merubah paradigma pencatatan akuntansi pemerintahan yang telah berjalan selama ini. Mekanisme pencatatan yang sebelumnya terbatas untuk pemenuhan kewajiban penyusunan laporan keuangan, secara bertahap disempurnakan untuk memaksimalkan hasil dari kinerja pencatatan. Hal ini terlihat dari kebijakan implementasi akuntansi yang secara bertahap dilakukan perubahan berawal dari basis kas, basis kas menuju akrual, dan kebijakan penerapan basis akrual pada tahun 2015.

Kabupaten Natuna mengawali penerapan pelaksanaan basis akrual pada tahun 2015. Serangkaian kebijakan implementasi telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan antara lain Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) dan kebijakan akuntansi untuk mengakomodir perlakuan akuntansi berbasis akrual. SAPD adalah merupakan pedoman penuh penerapan basis akrual, sedangkan kebijakan akuntansi adalah penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku berdasarkan kondisi operasional penyusunan suatu laporan keuangan.

Secara umum pemenuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Penyajian Laporan Keuangan disajikan dalam Bagan Akun Standar berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang mencabut lampiran III dan IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Beberapa penyesuaian yang dilakukan sesuai kondisi lingkungan pengelolaan, pada dasarnya adalah kebijakan pelaksanaan masa transisi yang terkait dengan sistem dan prosedur pengelolaan. Proses dan implementasi penerapan basis akrual dengan segala implikasinya diuraikan pada informasi tambahan terutama terkait dengan penyajian kembali beberapa pos dan pelaksanaan perubahan basis akrual pada laporan keuangan tahun 2022.

Sebagai sarana informasi dan komunikasi dari mutu entitas lingkungan pengendalian intern, laporan keuangan merupakan suatu bentuk penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan operasional, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Secara spesifik informasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas.

7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2022 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakai (*user*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik, keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Pemerintah Kabupaten Natuna.

7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);
12. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 65);

13. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 68).

7.1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan disusun dalam 7 (tujuh) bab yaitu:

7.1 Pendahuluan

- 7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.1.3 Sistematika Penulisan catatan atas Laporan Keuangan

7.2 Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

- 7.2.1 Ekonomi Makro
- 7.2.2 Kebijakan Keuangan
- 7.2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

7.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 7.3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

7.4 Kebijakan Akuntansi

- 7.4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
- 7.4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada pemerintah daerah

7.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah.

- 7.5.1 Laporan Realisasi Anggaran
 - 7.5.1.1 Pendapatan-LRA
 - 7.5.1.2 Belanja
 - 7.5.1.3 Transfer
 - 7.5.1.4 Surplus/Defisit-LRA
 - 7.5.1.5 Pembiayaan
 - 7.5.1.6 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
- 7.5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 7.5.2.1 Saldo Anggaran Lebih awal
 - 7.5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

- 7.5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan
- 7.5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 7.5.3 Neraca
 - 7.5.3.1 Aset Lancar
 - 7.5.3.2 Investasi Jangka Panjang
 - 7.5.3.3 Aset Tetap
 - 7.5.3.4 Aset lainnya
 - 7.5.3.5 Kewajiban
 - 7.5.3.6 Ekuitas
- 7.5.4 Laporan Operasional
 - 7.5.4.1 Pendapatan-LO
 - 7.5.4.2 Beban-LO
 - 7.5.4.3 Surplus/Defisit-LO
- 7.5.5 Laporan Arus Kas
 - 7.5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 7.5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 7.5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 7.5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
 - 7.5.5.5 Kenaikan/Penurunan Bersih Kas
 - 7.5.5.6 Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan
 - 7.5.5.7 Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan
- 7.5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
 - 7.5.6.1 Ekuitas awal
 - 7.5.6.2 Surplus/Defisit-LO
 - 7.5.6.3 Koreksi-koreksi
- 7.5.7 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya.
- 7.6 Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan**
 - 7.6.1 Domisili dan Operasional Entitas
 - 7.6.2 Penerapan IPSAP Nomor 02
- 7.7 Penutup**

7.2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

7.2.1 Ekonomi Makro

Kesejahteraan masyarakat yang baik ditunjang dengan pembangunan yang terus dilaksanakan dari waktu ke waktu oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kinerja pembangunan daerah, dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi yang merupakan dasar penilaian keberhasilan program prioritas yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan daerah, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Perekonomian suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan bila terdapat peningkatan nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB.

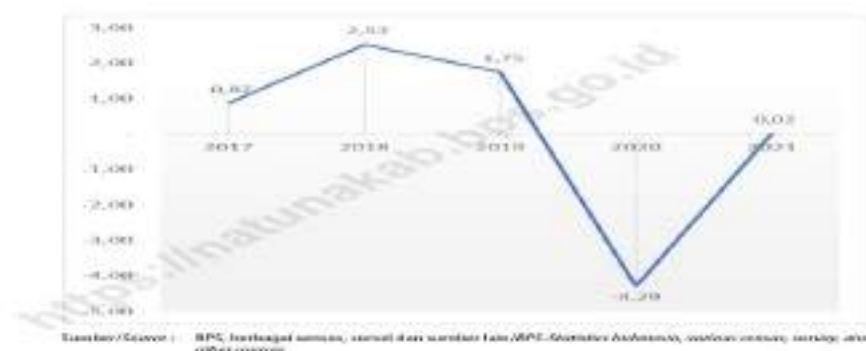
Nilai PDRB Kabupaten Natuna atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2021 mencapai 20,87 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 2,46 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya mencapai 18,40 triliun rupiah. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 14,64 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 14,65 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan selama tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna mengalami pertumbuhan sekitar 0,02 persen.

Selama lima tahun terakhir (2017-2021) struktur perekonomian Kabupaten Natuna menurut PDRB dengan Migas didominasi oleh kategori Pertambangan dan Penggalian. Kategori ini merupakan kontributor terbesar yang mencapai 70,02 persen di tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya. Kategori berikutnya adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, kategori Konstruksi, sementara peranan kategori lainnya di bawah 5 persen.

Kategori Pertambangan dan Penggalian mencakup empat subkategori, yaitu pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam dan pertambangan penggalian lainnya. Secara keseluruhan pada tahun 2021, kategori Pertambangan dan Penggalian menunjukkan kontraksi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja dengan memberikan kontribusi sebesar 12,32 persen ditahun 2021. Sedangkan pada tahun 2021 kategori konstruksi menyumbang sebesar 7,78 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Natuna. Hal ini menunjukkan bahwa peran pembangunan konstruksi semakin penting untuk mendorong perekonomian Kabupaten Natuna secara keseluruhan.

Gambar 7.2.1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
di Kabupaten Natuna Tahun 2017-2021

(dalam persentase)



Tabel 7.2.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna 2017-2021

(dalam miliar rupiah)

	Lapangan Usaha/ Industry	2017	2018	2019	2020	2021
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	2.116,11	2.323,56	2.512,63	2.455,46	2.571,67
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	14.227,34	15.327,88	15.500,97	12.287,84	14.613,86
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	151,17	156,78	161,71	166,70	171,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	16,37	16,93	17,11	17,27	17,37
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	1,17	1,16	1,12	1,17	1,28
F	Konstruksi/Construction	1.480,21	1.573,36	1.749,05	1.664,05	1.624,56
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	652,54	706,20	746,27	716,83	747,51
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	141,96	149,91	163,10	126,28	128,16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	92,99	100,48	106,43	101,04	105,92
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	115,70	125,21	137,67	147,41	157,75
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	26,82	28,83	30,11	30,75	30,20
L	Real Estat/ Real Estate Activities	121,14	129,13	137,44	139,15	147,07
M,N	Jasa Perusahaan/ Business Activities	0,04	0,05	0,05	0,04	0,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	352,75	369,33	409,84	428,20	421,26
P	Jasa Pendidikan/ Education	36,16	38,15	41,62	43,12	45,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	59,58	63,11	66,33	66,25	71,38
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ Other Services Activities	12,94	13,58	14,04	14,35	14,68
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		19.604,99	21.123,65	21.795,49	18.405,91	20.870,16

Tabel 7.2.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna 2017-2021

(dalam miliar rupiah)

	Lapangan Usaha/ Industry	2017	2018	2019	2020	2021
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	1.560,44	1.639,39	1.725,28	1.684,27	1.711,79
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	10.800,18	10.997,31	11.019,31	10.488,44	10.486,60
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	109,61	111,60	112,78	114,67	115,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	11,17	11,35	11,33	11,50	11,55
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang / Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	1,00	0,98	0,94	0,98	1,06
F	Konstruksi/Construction	1.056,92	1.089,02	1.174,68	1.115,27	1.064,91
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	425,51	450,10	470,85	448,48	456,69
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	91,71	94,60	100,73	78,48	79,36
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ ccommodation and Food Service Activities	65,58	69,34	72,80	69,12	72,09
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	105,59	113,25	120,62	130,68	140,38

Lapangan Usaha/ Industry		2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	19,00	20,05	20,31	20,98	21,08
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	90,25	96,12	102,19	105,77	110,52
M,N	Jasa <i>Perusahaan/Business Activities</i>	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	252,59	264,61	286,48	293,62	289,00
P	Jasa <i>Pendidikan/Education</i>	22,75	23,83	24,91	24,82	25,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	43,79	44,96	46,30	45,86	48,62
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	9,32	9,56	9,83	9,79	9,82
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		14.665,44	15.036,10	15.299,37	14.642,76	14.645,40

Tabel 7.2.3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna, 2017-2021

(dalam persen)

Lapangan Usaha/ Industry		2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	10,79	11,00	11,53	13,34	12,32
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	72,57	72,56	71,12	66,76	70,02
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	0,77	0,74	0,74	0,91	0,82
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,08	0,08	0,08	0,09	0,08
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	7,55	7,45	8,02	9,04	7,78
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	3,33	3,34	3,42	3,89	3,58
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	0,72	0,71	0,75	0,69	0,61
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	0,47	0,48	0,49	0,55	0,51
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	0,59	0,59	0,63	0,80	0,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	0,14	0,14	0,14	0,17	0,14
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	0,62	0,61	0,63	0,76	0,70
M,N	Jasa <i>Perusahaan/Business Activities</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	1,80	1,75	1,88	2,33	2,02
P	Jasa <i>Pendidikan/Education</i>	0,18	0,18	0,19	0,23	0,22
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	0,30	0,30	0,30	0,36	0,34
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	0,07	0,06	0,06	0,08	0,07
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 7.2.4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna 2017-2021

(dalam persen)

Lapangan Usaha/ Industry		2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	4,97	5,06	5,24	-2,38	1,63
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	-0,75	1,83	0,20	-4,82	-0,02
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	4,34	1,82	1,05	1,68	1,14
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	3,98	1,58	-0,16	1,49	0,39
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	8,67	-2,27	-3,57	3,75	8,43
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	6,57	3,04	7,87	-5,06	-4,52
G	Perdagangan Besar dan	7,15	5,78	4,61	-4,75	1,83
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	7,92	3,15	6,48	-22,09	1,12
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	6,76	5,72	4,99	-5,05	4,31
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	9,11	7,26	6,51	8,34	7,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	5,68	5,52	1,31	3,31	0,48
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	6,55	6,50	6,32	3,50	4,50
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	3,23	3,01	3,33	-8,13	1,19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	2,34	4,76	8,27	2,49	-1,58
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	4,01	4,75	4,52	-0,36	4,46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	5,34	2,69	2,97	-0,95	6,01
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	3,43	2,58	2,84	-0,40	0,31
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		0,87	2,53	1,75	-4,29	0,02

Tabel 7.2.5 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Natuna 2017-2021

(dalam miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran Type of Expenditure	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga <i>Household Consumption Expenditure</i>	3.513,81	3.743,40	3.939,88	3.976,34	4.071,54
Pengeluaran Konsumsi LNPRT NPISH <i>NPISH Consumption Expenditure</i>	11,03	11,96	12,78	12,88	12,82
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>Government Consumption Expenditure</i>	2.063,18	2.112,62	2.234,69	2.214,14	2.227,49
Pembentukan Modal Tetap Bruto <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	3.182,30	3.337,54	3.571,63	3.524,37	3.421,21
Perubahan Inventori <i>Changes in Inventories</i>	7,31	10,21	25,73	8,53	36,58
Net Ekspor Barang dan Jasa/ <i>Net Exports of Goods and Services</i>	10.827,33	11.907,92	12.010,79	8.669,66	11.100,53
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	19.604,96	21.123,65	21.795,50	18.405,92	20.870,17

Tabel 7.2.6 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Natuna 2017-2021

(dalam miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran <i>Type of Expenditure</i>	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga <i>Household Consumption Expenditure</i>	2.460,72	2.561,05	2.629,36	2.636,34	2.671,24
Pengeluaran Konsumsi LNPRT <i>NPISH Consumption Expenditure</i>	7,45	7,71	7,87	7,83	7,76
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>Government Consumption Expenditure</i>	1.314,68	1.334,77	1.375,71	1.335,79	1.317,17
Pembentukan Modal Tetap Bruto <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	2.080,68	2.143,60	2.242,92	2.210,33	2.103,87
Perubahan Inventori <i>Changes in Inventories</i>	4,21	5,72	14,15	4,7	17,86
Net Ekspor Barang dan Jasa <i>Net Exports of Goods and Services</i>	8.797,69	8.983,23	9.029,34	8.447,77	8.527,50
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	14.665,43	15.036,08	15.299,35	14.642,76	14.645,40

1. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran adalah persentase mereka yang ingin bekerja, namun tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam %. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Secara umum tingkat pengangguran dipengaruhi oleh:

a. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Natuna berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 tahun 2021 berjumlah 83.364 jiwa yang terdiri atas 42.853 jiwa penduduk laki-laki dan 40.511 jiwa penduduk perempuan dengan *sex ratio* 105,78 yang artinya dari 100 perempuan terdapat 105 sampai 106 laki-laki di Kabupaten Natuna. Dari 15 kecamatan, Kecamatan Bunguran Timur merupakan kecamatan yang penduduknya terbanyak. Jumlah penduduk Bunguran Timur tahun 2021 mencapai 28.518 jiwa, dengan persentase sebesar 34,21 persen, dimana Kecamatan Bunguran Timur merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Natuna.

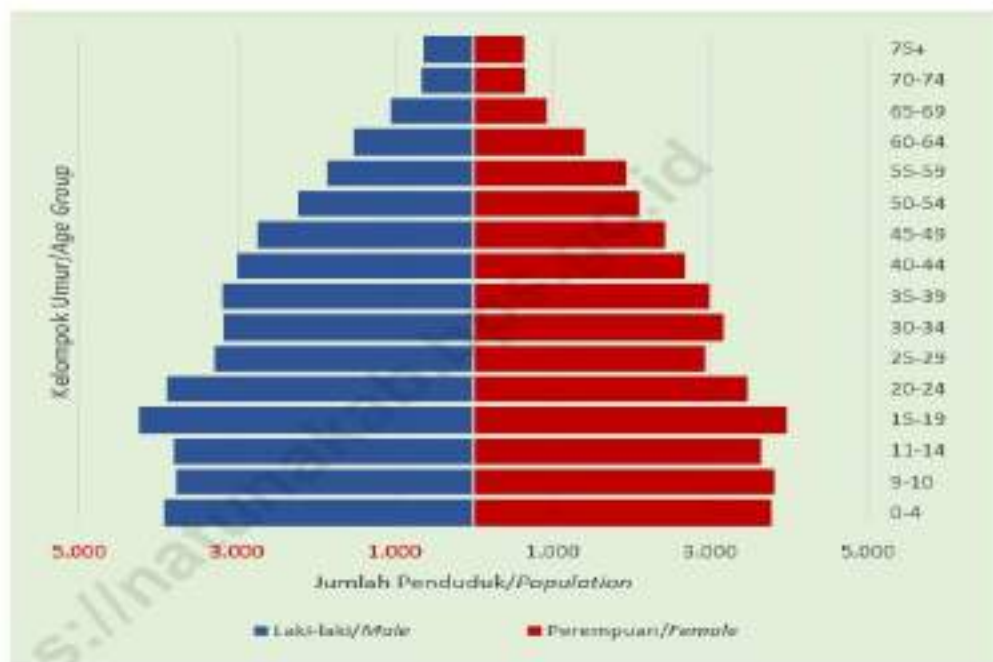
Kepadatan penduduk di Kabupaten Natuna tahun 2021 yaitu 42,14 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 15 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Midai dengan kepadatan sebesar 265,61 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Bunguran Utara sebesar 11,42 jiwa/km². Dilihat dari komposisi kependudukan, penduduk Kabupaten Natuna didominasi oleh penduduk dari empat kelompok usia muda yaitu, 0-4 tahun sebesar 7.681 jiwa, 5-9 tahun sebesar 7.578 jiwa, 10-14 tahun sebesar 7.440 jiwa, dan 15-19 sebesar 8.192 jiwa. *Dependency Ratio* atau biasa disebut Angka Ketergantungan Kabupaten Natuna pada tahun 2021 adalah 47,58 yaitu dari 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung 47 sampai 48 penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun).

b. Ketenagakerjaan

Berbicara mengenai penduduk tidak akan terlepas dengan berbagai masalah kependudukan. Salah satu masalah terkait kependudukan adalah dari sisi ketenagakerjaan, sebagai contoh yaitu tingginya tingkat pertumbuhan penduduk yang akan berpengaruh terhadap penyediaan tenaga kerja. Namun di sisi lain, ketersediaan lapangan pekerjaan masih terbatas.

Kabupaten Natuna pada tahun 2021 memiliki jumlah angkatan kerja sebesar 42.535 jiwa, sedangkan yang bukan merupakan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya) sebesar 16.292 jiwa. Salah satu indikator ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh BPS adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Nilai TPAK di Kabupaten Natuna pada tahun 2021 adalah sebesar 72,31 persen. Angkatan kerja dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu Jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Natuna tahun 2021 sebanyak 40.343 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang menganggur sebesar 2.192 jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka yaitu sebesar 5,15 persen.

Gambar 7.2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Natuna Tahun 2021



Tabel 7.2.7 Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Tahun 2020 dan 2021

Kecamatan Subdistrict	Penduduk Population		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)	
	2020	2021	2010-2020	2020-2021
1	2	3	4	5
Midai	3.604	3.657	0,86	1,1
Suak Midai	1.739	1.753	0,17	0,6
Bunguran Barat	7.854	8.009	1,36	1,48
Bunguran Utara	4.525	4.628	1,66	1,7

Kecamatan Subdistrict	Penduduk Population		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)	
	2020	2021	2010-2020	2020-2021
1	2	3	4	5
Pulau Laut	2.319	2.348	0,65	0,94
Pulau Tiga	3.727	3.837	2,34	2,21
Bunguran Batubi	3.882	3.906	-0,44	0,46
Pulau Tiga Barat	2.109	2.145	1,07	1,28
Bunguran Timur	27.806	28.518	1,94	1,91
Bunguran Timur Laut	5.372	5.522	2,16	2,09
Bunguran Tengah	3.677	3.794	2,55	2,38
Bunguran Selatan	3.349	3.461	2,72	2,5
Serasan	5.266	5.379	1,52	1,61
Subi	3.064	3.135	1,69	1,73
Serasan Timur	3.202	3.272	1,55	1,64
Natuna	81.495	83.364	1,62	1,72

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.2.8 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Natuna Tahun 2021

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
0-4	3.910	3.771	7.681
5-9	3.766	3.812	7.578
10-14	3.800	3.640	7.440
15-19	4.231	3.961	8.192
20-24	3.881	3.466	7.347
25-29	3.277	2.939	6.216
30-34	3.157	3.170	6.327
35-39	3.174	2.986	6.160
40-44	3.005	2.682	5.687
45-49	2.738	2.433	5.171
50-54	2.224	2.102	4.326
55-59	1.845	1.934	3.779
60-64	1.505	1.405	2.910
65-69	1.047	928	1.975
70-74	663	646	1.309
75+	630	636	1.266
Natuna	42.853	40.511	83.364

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai patokan keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia di suatu daerah. IPM disusun berdasarkan tiga dimensi, yaitu dimensi kesehatan, pendidikan dan pengeluaran. Dimensi kesehatan dilihat dari indikator Angka Harapan Hidup, sedangkan dimensi Pendidikan terdiri atas indikator Harapan Lama Sekolah (*Expected Years School*) dan Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years School*).

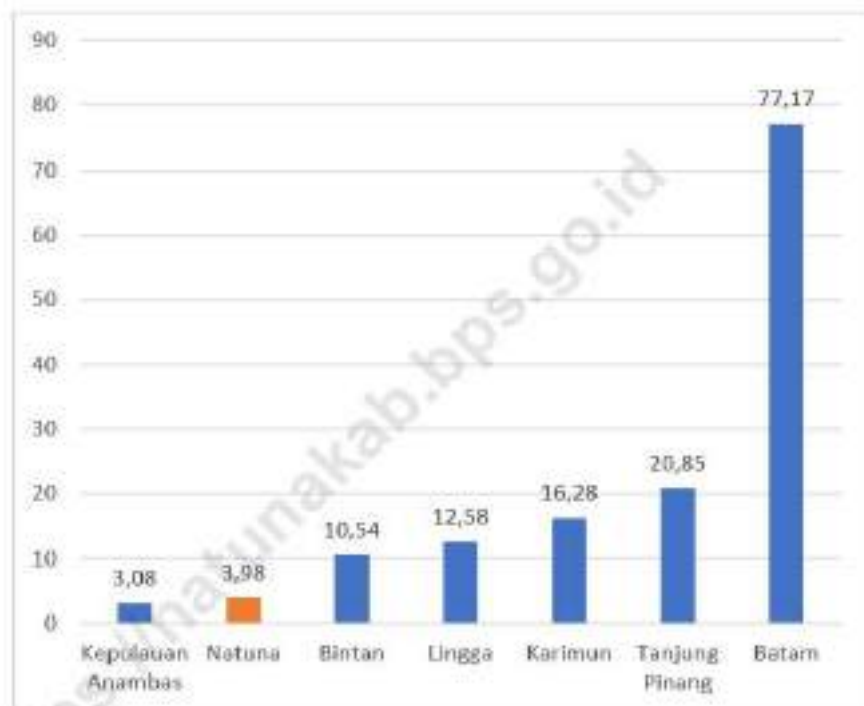
Pada tahun 2021, jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau pada Bulan Juni mencapai 2.118.239 jiwa. Natuna merupakan kabupaten dengan penduduk terkecil kedua setelah Kepulauan Anambas dengan jumlah penduduk sebanyak 83.364 jiwa.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Natuna tahun 2021 sebesar 3,98 ribu orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2020. Peningkatan jumlah penduduk miskin juga terjadi di Provinsi Kepulauan Riau dan seluruh kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren yang meningkat kurun waktu 2017-2021. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan di masing-masing kabupaten/kota. IPM tertinggi berada di Kota Batam sebesar 81,12 dan terendah di Kabupaten Natuna sebesar 65,83. Kabupaten Natuna berada di peringkat keempat dengan nilai 73,09.

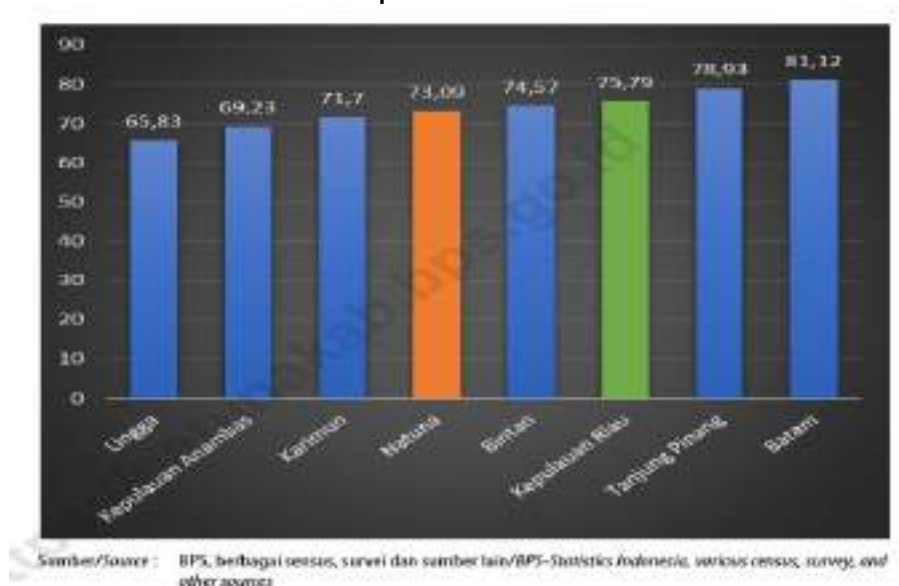
Gambar 7.2.3 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

(dalam ribu)



Sumber/Source : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey March

Gambar 7.2.4 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021



Tabel 7.2.9 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017–2021

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
<i>Kabupaten/Regency</i>					
Karimun	70,26	70,56	71,31	71,76	71,7
Bintan	72,91	73,41	74,08	74,41	74,57
Natuna	71,52	72,1	72,6	72,75	73,09
Natuna	63,45	64,06	65,41	65,11	65,83
Kepulauan Anambas	67,06	67,53	69,02	69,07	69,23
<i>Kota/Municipality</i>					
Batam	80,26	80,54	80,95	81,13	81,12
Tanjung Pinang	78	78,33	78,76	79,09	78,93
Kepulauan Riau	74,45	74,84	75,52	75,73	75,79

7.2.2 Kebijakan Keuangan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka sumber pembiayaan pembangunan daerah secara umum, yakni :

1. Dana Perimbangan yang terdiri dari:
 - a. Dana bagi hasil yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan serta dana bagi hasil dari Sumber Daya Alam;
 - b. Dana Alokasi Umum;
 - c. Dana Alokasi Khusus.
2. Pembiayaan yang bersumber dari:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran;
 - b. Penerimaan pinjaman daerah;
 - c. Dana cadangan daerah;
 - d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain PAD yang sah. Besar kecilnya PAD akan sangat tergantung pada kondisi dan potensi ekonomi daerah. Disamping itu, tingkat efektivitas dan efisiensi aparatur keuangan daerah turut pula menentukan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Natuna pada Tahun 2022 semaksimal mungkin dan di tambah dengan dana perimbangan berupa Dana bagi hasil yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan serta dana bagi hasil dari Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Namun upaya optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah tetap dilakukan. Secara umum kebijakan perencanaan pendapatan keuangan daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Internal

- 1) Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD serta membentuk Tim Intensifikasi PAD
- 2) Peningkatan jumlah penerimaan dari PBB dan membentuk Tim SISMIOP PBB
- 3) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan tugas
- 4) Pengadaan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan PAD
- 5) Peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan up dating data base wajib pajak (aktif dan non aktif)
- 6) Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembukuan dinas dan kecamatan
- 7) Melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait
- 8) Menyusun Perda dan standar penghitungan penerimaan retribusi serta melakukan koordinasi dengan pihak legislative dan SKPD penghasil.

b. Kebijakan Eksternal

- 1) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan upaya sebagai berikut:

- a) Penyuluhan pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan kesadaran wajib pajak.
 - b) Optimalisasi pendapatan wajib pajak dan wajib retribusi.
 - c) Optimalisasi pungutan dan penagihan pajak terhutang.
 - d) Penyusunan potensi pendapatan pajak daerah Kabupaten Natuna.
 - e) Prosedur, teknik dan tata cara perhitungan dan penetapan wajib pajak retribusi dalam rangka peningkatan PAD.
- 2) Peningkatan dan Pengembangan PBB, sebagai berikut:
- a) Pendataan dan pemetaan objek, subjek dan reklasifikasi PBB bagi hasil pajak dan bukan pajak.
 - b) Peningkatan sisdur penagihan PDRD dan PBB.
 - c) Operasional pemungutan PBB.
 - d) Aplikasi teknis pemungutan, pemeriksaan, sisdur administrasi pemungutan.
 - e) Sosialisasi dan himbauan PDRD dan PBB.
 - f) Pelaksanakan pemutakhiran dan updating data PBB.
 - g) Sosialisasi UU terkait dengan PBB.
 - h) Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.
 - i) Pemutakhiran objek pajak.

Terdapat beberapa upaya pemerintah daerah dalam mencapai target kebijakan pendapatan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Pendataan potensi PAD, subjek dan objek pajak serta retribusi daerah
- b. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan sadar pajak kepada seluruh potensi objek pajak
- c. Pemberian reward atau penghargaan kepada wajib pajak yang taat
- d. Rapat koordinasi dan evaluasi pendapatan daerah dengan SKPD penghasil
- e. Penyempurnaan prosedur administrasi dalam pembayaran pajak dan retribusi

2. Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja

adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam penetapan anggaran khususnya menyangkut Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan anggaran belanja dengan prinsip pengalokasian dan pemanfaatan uang daerah secara efektif dan efisien, serta standar kinerja yang jelas (*standard performance measurement*) sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah disusun dan ditetapkan.
- b. Penggunaan belanja daerah diupayakan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan perbaikan pelayanan masyarakat.
- c. Belanja Daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur kinerja yang terukur sampai dengan indikator hasil dan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, program dan kegiatan.

3. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan yang dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD.

4. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan yang lain.

7.2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Sebagai tindaklanjut dari visi dan misi yang telah ditetapkan pada setiap satuan kerja pada Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Natuna menetapkan sasaran dan prioritas bidang pembangunan, yang tertuang dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan DPRD tentang Kebijakan umum Perubahan APBD Kabupaten Natuna tahun 2022 dan selanjutnya dijabarkan dalam Perubahan PPAS yang tersebar pada seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna tahun 2022 memperhatikan berbagai kondisi, baik lokal maupun nasional, yang diperkirakan akan mempengaruhi besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna tahun 2022.

Kondisi tersebut akan menjadi asumsi yang mendasari penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna tahun 2022.

1. Pendapatan

Target kinerja pendapatan pada tahun 2022 tergolong cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari persentase penerimaan pendapatan yang dianggarkan sebesar Rp1.082.256.199.243,26 dan terealisasi sebesar Rp989.275.275.868,02 atau 91,41% dibandingkan pada tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp1.182.675.738.475,00 dan terealisasi sebesar Rp 968.639.262.049,31 atau 81,90%. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan Pendapatan sebesar 2.13% berbanding tahun sebelumnya.

2. Belanja

Belanja Tahun Anggaran 2022, dianggarkan sebesar Rp1.114.635.528.300 terealisasi sebesar Rp1.016.635.365.471,28 atau sebesar 91,21% dibandingkan dengan belanja pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp1.198.702.228.846,83 terealisasi sebesar Rp952.614.019.789,40 atau sebesar 79,47%. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan Belanja sebesar 6.73% berbanding tahun sebelumnya.

Keberhasilan pencapaian target kinerja APBD Tahun Anggaran 2022 tercermin dari indikator kinerja selama Tahun 2022, yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan sebesar 12% dengan capaian target sebesar 84%.
- b. Meningkatnya indeks kualitas kesehatan sebesar 0,013 dengan capaian target sebesar 0,704.
- c. Meningkatnya indeks peran perempuan dalam pembangunan sebesar 0,21 dengan capaian target sebesar 91,95.
- d. Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja sebesar 35% dengan capaian target sebesar 5,15%.
- e. Meningkatnya perekonomian di sektor pariwisata sebesar 115,5% dengan capaian target sebesar 4,31%.
- f. Meningkatnya iklim investasi yang sehat, aman dan kondusif sebesar 11,74% dengan capaian target sebesar rp314.000.000.000,00.
- g. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebesar 83,28% dengan capaian target sebesar 12,5 %.
- h. Meningkatnya pembangunan kawasan perbatasan sebesar 60% dengan capaian target sebesar 40%.
- i. Meningkatnya indeks infrastruktur antar wilayah sebesar 0,49 dengan capaian target sebesar 69,72.
- j. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup yang mendukung kehidupan masyarakat, kualitas air sebesar 12,87% dari pencapaian target sebesar 64%, kualitas udara sebesar 1,78% dari capaian target sebesar 87,49%.

7.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang menjelaskan ruang lingkup aturan dalam Paragraf 21 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Natuna telah menerapkan penganggaran berbasis kas secara lebih luas pada tahun 2022. Artinya, angka-angka yang telah ditetapkan dalam APBD bukan hanya pendapatan dan belanja yang melalui mekanisme kas daerah, namun juga mencakup pendapatan dan belanja yang tidak melalui kas daerah. Sebagai contoh, penganggaran pendapatan dan belanja dana Jaminan Kapitasi Nasional (JKN) pada FKTP yang langsung dikelola oleh Puskesmas dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang pelaksanaannya langsung dikelola oleh masing-masing sekolah negeri di Kabupaten Natuna tanpa melalui rekening kas umum daerah.

Pada Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Natuna menganggarkan Pendapatan sebesar Rp1.082.256.199.243,26 dan terealisasi Rp989.275.275.868,02 atau 91,41%. Dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp968.639.262.049,31, realisasi Pendapatan tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar **Rp20.636.013.818,71** atau 2,13% dari realisasi Pendapatan tahun lalu.

Sementara dari sisi Belanja untuk tahun anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Natuna menganggarkan sebesar Rp1.114.635.528.300,00 terealisasi sebesar Rp1.016.634.841.803,28 atau sebesar 91,21%. Dibandingkan dengan realisasi Belanja pada tahun 2021 sebesar Rp952.614.019.789,40 terjadi kenaikan sebesar Rp64.020.822.013,88 atau sebesar 6,72% dari realisasi Belanja tahun sebelumnya.

**Tabel 7.3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja
Tahun Anggaran 2022 dan 2021**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pendapatan	1.082.256.199.243,26	989.275.275.868,02	91,41	968.639.262.049,31
2	Belanja Daerah	1.114.635.528.300,00	1.016.634.841.803,28	91,21	952.614.019.789,40
	a. Belanja Operasi	788.680.575.295,55	728.446.072.391,69	92,36	692.062.668.247,74
	b. Belanja Modal	216.743.786.900,45	180.851.143.808,59	83,44	124.908.898.038,31
	c. Belanja Tidak Terduga	3.205.403.104,00	1.331.862.663,00	41,55	11.623.472.663,35
	d. Belanja Transfer	106.005.763.000,00	106.005.762.940,00	100,00	124.018.980.840,00

Anggaran dan realisasi Pendapatan setiap SKPD untuk tahun anggaran 2022 dan 2021 dijelaskan pada tabel 7.3.2 di bawah ini:

Tabel 7.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1.02.01.	Dinas Kesehatan	41.914.024.400,00	43.006.462.847,14	102,61	17.606.699.485,09
1.04.01.	Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	18.000.000,00	0,00	0,00	18.250.000,00
2.11.01.	Dinas Lingkungan Hidup	100.000.000,00	104.794.500,00	104,79	114.223.500,00
2.15.01.	Dinas Perhubungan	65.000.000,00	49.800.000,00	76,62	63.600.000,00
2.18.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	63.000.000,00	45.590.940,00	72,37	16.876.567,00
3.31.01.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	20.000.000,00	29.578.000,00	147,89	34.034.000,00
5.02.01.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.040.076.174.843,26	946.039.049.580,88	90,96	950.785.578.497,22
Jumlah		1.082.256.199.243,26	989.275.275.868,02	91,41	968.639.262.049,31

Sedangkan anggaran dan realisasi Belanja setiap SKPD untuk tahun anggaran 2022 dan 2021 dijelaskan pada tabel 7.3.3 di bawah ini:

Tabel 7.3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1.01.01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	197.396.302.645,45	186.817.477.342,77	94,64	177.514.802.650,78
1.02.01.	Dinas Kesehatan	231.277.087.633,90	210.704.794.858,00	91,10	182.263.722.939,62
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	135.018.603.377,00	105.086.374.851,53	77,83	47.552.153.820,77
1.04.01.	Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	43.166.465.652,00	41.696.626.295,00	96,59	53.985.322.351,00
1.05.02.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	16.078.811.839,00	15.764.328.617,00	98,04	16.495.396.477,00
1.05.03.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	8.720.756.157,00	8.015.689.684,00	91,92	8.743.885.914,00
1.05.04.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.002.419.529,00	4.889.695.116,00	97,75	0,00
1.06.01.	Dinas Sosial	7.574.261.735,00	6.519.786.528,00	86,08	5.372.193.379,00
2.07.01.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.563.223.805,00	5.378.964.909,00	96,69	5.583.836.026,00
2.08.01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.855.795.365,00	7.421.595.545,00	83,80	7.686.282.487,66
2.09.01.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14.986.104.387,00	14.049.895.381,00	93,75	15.501.796.341,00
2.11.01.	Dinas Lingkungan Hidup	9.044.844.259,00	8.401.890.018,60	92,89	7.648.331.175,00
2.12.01.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.220.090.938,00	4.586.575.174,00	87,86	5.800.345.185,37
2.13.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.245.188.937,00	7.008.356.634,00	96,73	6.789.667.813,00
2.15.01.	Dinas Perhubungan	12.020.401.811,00	9.777.829.400,00	81,34	10.291.845.060,00
2.16.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.715.052.903,00	13.157.406.120,98	95,93	6.827.584.191,00
2.18.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.373.893.209,00	6.040.641.685,34	94,77	6.464.926.440,00
2.19.02.	Dinas Pemuda dan Olahraga	14.289.045.185,00	12.245.194.793,60	85,70	7.831.438.958,00
2.23.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.412.978.492,00	4.254.410.037,74	96,41	4.520.406.970,00
3.25.01.	Dinas Perikanan	10.593.905.513,00	10.010.593.871,34	94,49	8.652.555.203,00
3.26.01.	Dinas Pariwisata	8.886.650.453,00	6.664.633.089,96	75,00	9.419.901.638,00
3.31.01.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	13.606.897.803,00	12.490.748.905,00	91,80	13.992.694.332,00
4.01.03.	Sekretariat Daerah	53.953.506.749,00	49.626.266.606,00	91,98	51.677.552.956,00
4.02.04.	Sekretariat DPRD	43.318.259.490,00	40.219.893.098,15	92,85	42.790.814.894,00
5.01.01.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	11.614.900.960,00	8.826.863.259,77	76,00	9.504.280.200,00
5.02.01.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	132.550.479.452,95	128.985.276.654,00	97,31	156.898.946.984,10
5.03.01.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.636.448.169,00	7.640.704.589,00	88,47	7.363.217.011,10
5.06.06.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.291.541.277,00	5.089.300.227,00	96,18	5.392.309.449,00

Kode	SKPD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
6.01.05.	Inspektorat Daerah	9.987.161.987,50	9.581.287.652,00	95,94	9.240.580.588,00
7.01.07.	Kecamatan Bunguran Timur	9.889.049.680,00	9.570.259.200,50	96,78	7.937.237.244,00
7.01.08.	Kecamatan Bunguran Barat	6.004.801.383,00	5.501.906.622,00	91,63	5.205.429.813,00
7.01.09.	Kecamatan Bunguran Utara	4.433.358.328,00	4.277.400.426,00	96,48	4.255.498.336,00
7.01.10.	Kecamatan Pulau Laut	3.545.847.018,00	3.395.333.141,00	95,76	2.964.450.570,00
7.01.11.	Kecamatan Midai	4.974.072.092,00	4.914.888.294,00	98,81	4.469.926.084,00
7.01.12.	Kecamatan Serasan	5.374.470.938,00	5.177.836.677,00	96,34	4.345.363.623,00
7.01.13.	Kecamatan Subi	4.445.943.540,00	4.391.232.866,00	98,77	3.992.593.658,00
7.01.14.	Kecamatan Pulau Tiga	2.585.377.247,00	2.501.642.793,00	96,76	3.407.998.785,00
7.01.15.	Kecamatan Bunguran Tengah	2.461.901.545,00	2.161.641.237,00	87,80	2.172.349.347,00
7.01.16.	Kecamatan Bunguran Timur Laut	3.661.828.140,00	3.593.633.794,00	98,14	3.178.881.212,00
7.01.17.	Kecamatan Bunguran Selatan	2.720.340.502,20	2.522.035.769,00	92,71	2.441.226.309,00
7.01.18.	Kecamatan Serasan Timur	3.774.100.077,00	3.712.718.541,00	98,37	2.963.302.320,00
7.01.19.	Kecamatan Suak Midai	2.637.776.221,00	2.596.735.313,00	98,44	2.706.939.398,00
7.01.20.	Kecamatan Bunguran Batubi	2.987.652.657,00	2.674.474.429,00	89,52	2.557.135.201,00
7.01.21.	Kecamatan Pulau Tiga Barat	2.784.596.146,00	2.693.127.861,00	96,72	2.194.746.602,00
7.01.22.	Kecamatan Pulau Panjang	686.907.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.23.	Kecamatan Pulau Seluan	646.608.590,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.619.817.482,00	5.996.873.896,00	90,59	6.014.149.853,00
Jumlah		1.114.635.528.300,00	1.016.634.841.803,28	91,21	952.614.019.789,40

Terhadap besaran anggaran dan realisasi Belanja per SKPD sesuai tabel 7.3.4 tersebut, rincian anggaran dan realisasi Belanja berdasarkan kelompok belanja per SKPD untuk tahun anggaran 2022 dan 2021 yang dibagi dalam kelompok belanja langsung dan tidak langsung disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7.3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1.01.01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	173.223.941.056,00	164.029.586.098,80	94,69	167.260.093.644,48
1.02.01	Dinas Kesehatan	181.507.266.598,80	164.887.496.025,80	90,84	152.452.856.654,04
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29.778.006.370,00	26.342.959.810,00	88,46	11.470.515.617,00
1.04.01.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	24.532.821.270,00	23.074.433.894,00	94,06	24.047.290.994,00
1.05.02.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	16.078.811.839,00	15.764.328.617,00	98,04	16.495.396.477,00
1.05.03	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	8.720.756.157,00	8.015.689.684,00	91,92	7.380.587.014,00
1.05.04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.829.438.349,00	4.717.117.116,00	97,67	0,00
1.06.01.	Dinas Sosial	6.957.861.735,00	5.923.998.697,00	85,14	5.372.193.379,00
2.07.01.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.472.723.805,00	5.378.964.909,00	98,29	5.486.211.026,00
2.08.01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.821.832.065,00	7.387.632.245,00	83,74	6.481.589.568,00
2.09.01.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.178.375.248,00	12.663.376.442,00	96,09	15.413.796.341,00
2.11.01.	Dinas Lingkungan Hidup	9.027.344.259,00	8.384.410.018,60	92,88	7.648.331.175,00
2.12.01.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.209.190.938,00	4.576.125.174,00	87,85	5.603.865.185,37
2.13.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.220.938.937,00	6.984.106.634,00	96,72	6.789.667.813,00
2.15.01.	Dinas Perhubungan	9.855.427.278,00	9.041.658.748,00	91,74	9.234.723.283,00
2.16.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.885.367.903,00	12.444.421.620,98	96,58	6.709.404.191,00
2.18.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.329.893.209,00	5.996.928.171,34	94,74	6.404.441.440,00
2.19.02.	Dinas Pemuda dan Olahraga	12.953.505.478,00	11.161.860.336,60	86,17	7.522.157.123,00
2.23.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.337.978.492,00	4.179.839.426,00	96,35	4.186.641.970,00
3.25.01.	Dinas Perikanan	10.342.008.874,00	9.825.007.232,34	95,00	8.652.555.203,00
3.26.01.	Dinas Pariwisata	8.638.311.053,00	6.615.293.689,96	76,58	7.186.138.238,00
3.31.01.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	8.089.849.203,00	7.295.393.752,00	90,18	6.888.708.078,00
4.01.03.	Sekretariat Daerah	53.005.303.749,00	48.692.813.933,00	91,86	50.236.443.756,00

Kode	SKPD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
4.02.04.	Sekretariat DPRD	41.436.043.507,00	38.581.820.923,00	93,11	39.939.215.994,00
5.01.01.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	11.472.900.960,00	8.826.863.259,77	76,94	9.413.530.200,00
5.02.01.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	22.213.459.893,05	20.733.574.051,00	93,34	21.143.544.480,75
5.03.01.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.474.448.169,00	7.480.397.039,00	88,27	7.363.217.011,10
5.06.06.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.291.541.277,00	5.089.300.227,00	96,18	5.392.309.449,00
6.01.05.	Inspektorat Daerah	9.781.786.987,50	9.476.100.152,00	96,87	9.240.580.588,00
7.01.07.	Kecamatan Bunguran Timur	9.758.519.680,00	9.439.729.200,50	96,73	7.937.237.244,00
7.01.08.	Kecamatan Bunguran Barat	5.829.801.383,00	5.410.006.622,00	92,80	5.205.429.813,00
7.01.09.	Kecamatan Bunguran Utara	4.372.902.378,00	4.217.109.826,00	96,44	4.255.498.336,00
7.01.10.	Kecamatan Pulau Laut	3.545.847.018,00	3.395.333.141,00	95,76	2.964.450.570,00
7.01.11.	Kecamatan Midai	4.969.572.092,00	4.910.392.658,00	98,81	4.469.926.084,00
7.01.12.	Kecamatan Serasan	5.353.870.938,00	5.157.236.677,00	96,33	4.342.463.623,00
7.01.13.	Kecamatan Subi	4.298.643.540,00	4.252.351.707,00	98,92	3.959.177.658,00
7.01.14.	Kecamatan Pulau Tiga	2.585.377.247,00	2.501.642.793,00	96,76	3.407.998.785,00
7.01.15.	Kecamatan Bunguran Tengah	2.461.901.545,00	2.161.641.237,00	87,80	2.122.349.347,00
7.01.16.	Kecamatan Bunguran Timur Laut	3.625.328.140,00	3.557.368.794,00	98,13	3.178.881.212,00
7.01.17.	Kecamatan Bunguran Selatan	2.713.340.502,20	2.522.035.769,00	92,95	2.441.226.309,00
7.01.18.	Kecamatan Serasan Timur	3.698.400.077,00	3.637.029.541,00	98,34	2.963.302.320,00
7.01.19.	Kecamatan Suak Midai	2.588.776.221,00	2.547.975.313,00	98,42	2.706.939.398,00
7.01.20.	Kecamatan Bunguran Batubi	2.946.452.657,00	2.657.074.429,00	90,18	2.557.135.201,00
7.01.21.	Kecamatan Pulau Tiga Barat	2.678.774.146,00	2.588.787.861,00	96,64	2.194.746.602,00
7.01.22.	Kecamatan Pulau Panjang	526.707.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.23.	Kecamatan Pulau Seluan	528.408.590,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.530.817.482,00	5.918.858.896,00	90,63	5.939.899.853,00
Jumlah		788.680.575.295,55	728.446.072.391,69	92,36	692.062.668.247,74

Tabel 7.3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.172.361.589,45	22.787.891.243,97	94,27	10.254.709.006,30
1.02.01	Dinas Kesehatan	49.769.821.035,10	45.817.298.832,20	92,06	29.810.866.285,58
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	105.240.597.007,00	78.743.415.041,53	74,82	36.081.638.203,77
1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	18.633.644.382,00	18.622.192.401,00	99,94	29.938.031.357,00
1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	1.363.298.900,00
1.05.04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	172.981.180,00	172.578.000,00	99,77	0,00
1.06.01	Dinas Sosial	616.400.000,00	595.787.831,00	96,66	0,00
2.07.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	90.500.000,00	0,00	0,00	97.625.000,00
2.08.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	33.963.300,00	33.963.300,00	100,00	1.204.692.919,66
2.09.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.807.729.139,00	1.386.518.939,00	76,70	88.000.000,00
2.11.01	Dinas Lingkungan Hidup	17.500.000,00	17.480.000,00	99,89	0,00
2.12.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.900.000,00	10.450.000,00	95,87	196.480.000,00
2.13.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24.250.000,00	24.250.000,00	100,00	0,00
2.15.01	Dinas Perhubungan	2.164.974.533,00	736.170.652,00	34,00	1.057.121.777,00
2.16.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	829.685.000,00	712.984.500,00	85,93	118.180.000,00
2.18.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	44.000.000,00	43.713.514,00	99,35	60.485.000,00
2.19.02	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.335.539.707,00	1.083.334.457,00	81,12	309.281.835,00
2.23.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	75.000.000,00	74.570.611,74	99,43	333.765.000,00

Kode	SKPD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
3.25.01	Dinas Perikanan	251.896.639,00	185.586.639,00	73,68	0,00
3.26.01	Dinas Pariwisata	248.339.400,00	49.339.400,00	19,87	2.233.763.400,00
3.31.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	5.517.048.600,00	5.195.355.153,00	94,17	7.103.986.254,00
4.01.03.	Sekretariat Daerah	948.203.000,00	933.452.673,00	98,44	1.441.109.200,00
4.02.04	Sekretariat DPRD	1.882.215.983,00	1.638.072.175,15	87,03	2.851.598.900,00
5.01.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	142.000.000,00	0,00	0,00	90.750.000,00
5.02.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.125.853.455,90	914.077.000,00	81,19	112.949.000,00
5.03.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	162.000.000,00	160.307.550,00	98,96	0,00
5.06.06	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.05	Inspektorat Daerah	205.375.000,00	105.187.500,00	51,22	0,00
7.01.07	Kecamatan Bunguran Timur	130.530.000,00	130.530.000,00	100,00	0,00
7.01.08	Kecamatan Bunguran Barat	175.000.000,00	91.900.000,00	52,51	0,00
7.01.09	Kecamatan Bunguran Utara	60.455.950,00	60.290.600,00	99,73	0,00
7.01.10	Kecamatan Pulau Laut	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.11	Kecamatan Midai	4.500.000,00	4.495.636,00	99,90	0,00
7.01.12	Kecamatan Serasan	20.600.000,00	20.600.000,00	100,00	2.900.000,00
7.01.13	Kecamatan Subi	147.300.000,00	138.881.159,00	94,28	33.416.000,00
7.01.14	Kecamatan Pulau Tiga	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.15	Kecamatan Bunguran Tengah	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
7.01.16	Kecamatan Bunguran Timur Laut	36.500.000,00	36.265.000,00	99,36	0,00
7.01.17	Kecamatan Bunguran Selatan	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.18	Kecamatan Serasan Timur	75.700.000,00	75.689.000,00	99,99	0,00
7.01.19	Kecamatan Suak Midai	49.000.000,00	48.760.000,00	99,51	0,00
7.01.20	Kecamatan Bunguran Batubi	41.200.000,00	17.400.000,00	42,23	0,00
7.01.21	Kecamatan Pulau Tiga Barat	105.822.000,00	104.340.000,00	98,60	0,00
7.01.22	Kecamatan Pulau Panjang	160.200.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.23	Kecamatan Pulau Seluan	118.200.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	89.000.000,00	78.015.000,00	87,66	74.250.000,00
Jumlah		216.743.786.900,45	180.851.143.808,59	83,44	124.908.898.038,31

**Tabel 7.3.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2022 dan 2021**

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
5.02.01.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	3.205.403.104,00	1.331.862.663,00	41,55	11.623.472.663,35
Jumlah		3.205.403.104,00	1.331.862.663,00	41,55	11.623.472.663,35

**Tabel 7.3.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer
Tahun Anggaran 2022 dan 2021**

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
5.02.01.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	106.005.763.000,00	106.005.762.940,00	100,00	124.018.980.840,00
Jumlah		106.005.763.000,00	106.005.762.940,00	100,00	124.018.980.840,00

7.3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.

Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan pendapatan daerah selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya terserap sebesar 92,28% dari yang dianggarkan dan ditetapkan Rp126.682.451.000,00 terserap Rp116.901.548.421,00. Dana DAK fisik tidak terserap dikarenakan ada 2 Paket kegiatan DAK Penugasan Bidang Perikanan dan Bidang Pertanian yang gagal lelang/gagal dilaksanakan. Sedangkan untuk DAK Non Fisik penyaluran sesuai dengan ketentuan yaitu dari pagu yang ditetapkan dikurangi dengan SiLPA DAK Non Fisik di RKUD.
2. Dana Bagi Hasil Pajak dana perimbangan terserap sebesar 189,18% dari yang dianggarkan dan ditetapkan Rp44.767.519.000,00 terserap Rp84.693.725.941,00. Dikarenakan tunda salur yang telah ditetapkan yang menjadi komponen Pendapatan dalam APBD tahun 2022 ditransfer oleh Pemerintah Pusat pada Triwulan IV tahun 2022.

Realisasi Belanja hanya terserap 91,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.114.635.528.300,00 terserap sebesar Rp1.016.634.841.803,28. Belanja yang tidak terserap disebabkan oleh beberapa kegiatan DAK Fisik dan Kegiatan DAK Non Fisik yang belum maksimal, disamping itu terdapat sisa anggaran dari hasil efisiensi setiap program dan kegiatan. Terdapat 2 (dua) Kecamatan baru yaitu Kecamatan Pulau Panjang dan Kecamatan Pulau Seluan yang Peraturan Daerahnya sudah ditetapkan dan anggaran belanjanya sudah dianggarkan namun tidak terealisasi disebabkan karena peresmian kecamatan tersebut menunggu nomor register dari Kementerian Dalam Negeri.

Sehubungan adanya hambatan-hambatan tersebut, terdapat beberapa langkah antisipatif yang sudah dilakukan, yaitu:

1. Melakukan perencanaan yang matang pada saat penyusunan anggaran kegiatan yang didasarkan pada perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, sehingga meminimalisir ketidakefektifan pelaksanaan suatu kegiatan.
2. Melakukan pengkajian alternatif pemecahan masalah pengadaan barang/ jasa yang gagal lelang, sehingga ditemukan solusi-solusi yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya kondisi yang serupa.
3. Meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme SDM pengelola keuangan SKPD dengan mengikuti diklat dan kursus yang diselenggarakan oleh lembaga/ instansi lain atau pembinaan secara mandiri.
4. Meningkatkan koordinasi pengelolaan keuangan dengan fasilitasi pembinaan yang dilakukan secara proaktif dan intensif.

7.4 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Natuna sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Pemerintah Kabupaten Natuna memiliki kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

7.4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Tanggungjawab Laporan Keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam aktivitas Laporan Keuangan, entitas dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintah Kabupaten Natuna yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan Laporan Pertanggungjawaban, berupa Laporan Keuangan.

Dalam penetapan Entitas Pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

7.4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan – LO, Beban dan Pos-pos Luar Biasa dalam Laporan Operasional dan basis akrual untuk pengakuan Aset, Kewajiban dan Ekuitas dalam Neraca.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh pemerintah daerah dan Beban diakui pada saat Kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau pemerintah daerah. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa Pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh pemerintah daerah, serta Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau

kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dibayar.

7.4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusun Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

7.4.3.1 Pengukuran Pendapatan

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran). Dalam penerapannya, pendapatan dipilah menjadi 2 (dua), yakni:

1) Pendapatan - LO

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan - LO diakui setelah diterbitkan penetapan Surat Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasi.

2) Pendapatan - LRA

Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan - LRA menggunakan basis kas sehingga Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD.

7.4.3.2 Pengukuran Beban dan Belanja

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

1) Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode Pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi Aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode Pelaporan.

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui berdasarkan basis akuntansi kas, dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

7.4.3.3 Pengukuran Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk atau keluar diukur dan dicatat berdasarkan

jumlah uang yang diterima atau keluar di Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan dana transfer diukur dan dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi dana transfer pada akhir tahun.

7.4.3.4 Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran/biaya) dan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan. Pengukuran Pembiayaan menggunakan mata uang rupiah didasarkan pada nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Sedangkan untuk pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing, dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah bank (Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

7.4.3.5 Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank, sedangkan setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya. Kas dicatat sebesar nilai nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa utang PFK.

Kas dan setara kas dapat diklasifikasikan atas 2 bagian yaitu:

- 1) Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah, terdiri dari:
 - a. Kas di Kas Daerah (Kasda)

Kas di Kasda merupakan kas yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab Bendahara Umum Daerah (BUD) berasal dari Saldo Kas di rekening Giro Daerah dan seluruh Deposito yang ditanamkan pada Bank Persepsi.
 - b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggungjawab/ dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir periode akuntansi, tetapi belum disetor ke Kas Daerah per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas. Apabila masih terdapat uang persediaan yang belum disetorkan ke RKUD sampai dengan tanggal Neraca, maka harus dilaporkan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran.

Dalam pelaksanaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran juga bertindak sebagai wajib pungut atas transaksi keuangan yang dikenakan

pajak Pemerintah seperti PPh 21, PPN dan Pajak lainnya, uang atas potongan pajak tersebut harus segera disetorkan ke RKUN. Apabila sampai dengan tanggal Neraca masih terdapat uang dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang berasal dari potongan pajak Pemerintah, jumlah tersebut dilaporkan di Neraca sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

c. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggungjawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari dana penerimaan yang belum disetor ke Kasda. Meskipun dalam ketentuannya Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening Bendahara Penerimaan. Pencatatan pendapatan-LRA telah dapat dilakukan disaat uang telah berada di tangan Bendahara Penerimaan SKPD yang merupakan bagian dari BUD dalam entitas Pemerintah Kabupaten Natuna.

2) Kas Pemerintah Daerah di Luar Pengelolaan Bendahara Umum Daerah (BUD)

a. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kas di BLUD mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggungjawab SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

b. Kas Dana BOS

Kas Dana Bos mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah dan BLUD serta menjadi tanggungjawab entitas pelaksana teknis.

c. Kas Lainnya

Kas Lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah dan BLUD serta menjadi tanggungjawab entitas pelaksana teknis. Contohnya adalah penerimaan hibah langsung dari donor oleh kementerian negara/lembaga dengan tujuan seperti yang ditetapkan oleh donor, kas dana bergulir.

7.4.3.6 Pengukuran Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

1) Piutang Pajak/Piutang Retribusi

Piutang Pajak/Piutang Retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau Retribusi Daerah yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi.

2) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda 4 (empat) atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada Pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan Aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada Tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk tujuan penyusunan Neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

Untuk mendapatkan saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran, pada saat penyusunan Neraca dihitung berapa Bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan Keuangan Negara/Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Bagian lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain Aset yang berupat Aset Lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan Neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun TP/TGR bukan bagian lancar TP/TGR. TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui sebagai bagian lancar TP/TGR. Bagian lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah TGR yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar TGR. Pada saat penyusunan Neraca perlu dihitung beberapa bagian dari TGR yang akan jatuh tempo tahun depan.

4) Piutang Lainnya

Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D, bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang pajak. Piutang lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

5) Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih adalah bagian dari piutang yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh pihak ketiga. Perlakuan akuntansi terhadap piutang tak tertagih adalah dihapuskan pada tahun anggaran bersangkutan dengan mengurangi jumlah piutang dan mengurangi jumlah ekuitas dana lancar.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Aset berupa piutang di Neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karena itu nilai piutang tidak tertagih merupakan cadangan yang harus terbentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.
- 2) Penyajian nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam Laporan Keuangan pada catatan atas Laporan Keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Besarnya presentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:

a) Piutang Pajak

No.	Uraian	Umur Piutang				Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1.	Piutang Pajak	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
	% penyisihan	0,5%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak baik Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) maupun Pajak yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dapat dipilah dalam beberapa kualifikasi terdiri dari:

1. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

b) Piutang Retribusi

No.	Uraian	Umur Piutang				Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1.	Piutang Retribusi.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
	% penyisihan	0,5%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....

Penggolongan kualitas piutang retribusi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a. Jika umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Jika umur piutang 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Jika umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. jika umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan Piutang Negara.

c) Piutang Lainnya

No.	Uraian	Umur Piutang				Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1.	Piutang Lainnya.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
	% penyisihan	0,5%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....

Penggolongan kualitas piutang lainnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar

Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
2. Kualitas Kurang Lancar

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

3. Kualitas Diragukan
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
4. Kualitas Macet
Apabiladalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan Piutang Negara.
- 4) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan pengurang agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 5) Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
- 6) Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara:
 - a) Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
 - b) Penghapusbukuan (*write down*)

Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:

- (1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian Penghapusbukuan.
 - (2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari Penghapusbukuan pada Neraca Pemerintah, apabila perlu sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan Penghapusbukuan.
 - (3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan Bupati yang menyatakan hapus tagih perdata dan/atau hapus buku. Pengambilan Keputusan Penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapus bukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan Penghapusbukuan tersebut.
- c) Penghapustagihan (*write off*)

Penghapustagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan Keputusan Hapus Tagih bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomi.

Kriteria penghapustagihan sebagai berikut:

- (1) Penghapustagihan dapat menjadi harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Natuna ketika pelaksanaannya dapat menolong pihak

berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya, wajib pajak dan retribusi yang telah bangkrut, meninggal sedangkan ahli waris tidak mampu membayar hutangnya dan sebagainya.

- (2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik.
- (3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
- (4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang.
- (5) Penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin diterapkan.
- (6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya hukum kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
- (7) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk ekstrakomtabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel.

d) Penerimaan Tunai Atas Piutang yang telah dihapus bukukan

Suatu piutang yang telah dihapus bukukan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasan, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari jenis piutang.

e) Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran.

7.4.3.7 Pengukuran Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat berdasarkan metode perpetual dimana fungsi akuntansi selalu mencatat nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit biaya perolehannya. Untuk penerimaan dan pengeluaran fisik barang yang mempunyai kadaluarsa, diterapkan praktek bisnis yang sehat guna meminimalisirkan adanya barang yang rusak/usang, sedangkan pengeluarannya menggunakan metode penilaian.

Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi sebesar jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit biaya perolehannya. Dalam hal terjadi selisih antara catatan persediaan dan hasil stock opname yang disebabkan karena persediaan usang, kadaluarsa atau rusak maka

selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai beban, sedangkan jika dikarenakan persediaan hilang maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Persediaan disajikan sebesar:

1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan Transaksi wajar.

Persediaan Pemerintah Kabupaten Natuna yang disajikan dalam laporan keuangan SKPD dinilai dengan harga pembelian terakhir. Metode tersebut dipilih mengingat banyaknya macam dan jenis persediaan yang harus dicatat sementara Pemerintah Kabupaten Natuna belum didukung oleh sistem informasi yang andal serta jumlah dan kemampuan SDM masih terbatas.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

7.4.3.8 Pengukuran Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan *royalty* atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

1) Pengukuran Investasi dilakukan berdasarkan:

a) Dicatat sebesar nilai perolehan

Investasi jangka pendek dalam bentuk Surat Berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya ditambah penambahan dan pengurangan nilai akibat keuntungan dan kerugian perusahaan tahun berjalan yang dibebankan.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.

b) Dicatat sebesar nilai wajar

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

c) Dicatat sebesar nilai nominal

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

d) Dicatat sebesar nilai tercatat atau nilai wajar lainnya

Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar Aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

2) Penilaian Investasi pemerintah daerah dilakukan dengan 3 metode yaitu:

a) Metode Biaya

Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang dari 20%.

b) Metode Ekuitas

Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari Badan Usaha Penerima Investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ini digunakan apabila:

- 1) kepemilikan investasi pemerintah daerah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan;
- 2) kepemilikan investasi pemerintah daerah lebih dari 50%.

c) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan

Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat non permanen-dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyajian dana bergulir di neraca dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

7.4.3.9 Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset tetap diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

2) Kapitalisasi Aset

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun disajikan sebagai persediaan dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

3) Pengeluaran Setelah Perolehan

Apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:

- bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
- bertambah umur ekonomis, dan/atau
- bertambah volume, dan/atau
- bertambah kapasitas produksi.

b. Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi dapat berupa penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.

4) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

5) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut

berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset tetap yang bersangkutan.

7.4.3.10 Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap merupakan komponen aset operasi pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional Pemerintah. Aset Tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatannya. Oleh karena itu informasi tentang nilai Aset Tetap harus disajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk Pengambilan Keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan masih dipergunakan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam Neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan metode penyusutan per bulan dihitung mulai pada bulan perolehan. Untuk aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2016, bulan perolehan dihitung pada bulan Desember tahun perolehan.

7.4.3.11 Pengukuran Konstruksi/Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, yang meliputi:

1. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola:
 - (a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - (b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - (c) biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
2. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - (a) biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - (b) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - (c) biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - (d) biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - (e) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
3. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - (a) asuransi;
 - (b) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - (c) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi; dan
 - (d) biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua

biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

4. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - (a) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - (b) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
 - (c) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

7.4.3.12 Pengukuran Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan yang memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan.

Aset lainnya dibagi dalam:

- 1) Tagihan Jangka Panjang.
 - a) Tagihan Penjualan Angsuran, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak berita acara penjualan Aset yang bersangkutan.
 - b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - a) Sewa, dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/dokumen yang dipersamakan dengan aset yang bersangkutan.
 - b) Kerjasama Pemanfaatan (KSP), dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - c) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*), dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
 - d) Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*), dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- 3) Aset Tidak Berwujud (ATB)
 - a. Pengukuran Pada Saat Perolehan

Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.

 - 1) Pengukuran ATB Yang Diperoleh Secara Eksternal
 - (a) Pembelian

ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung

nilai per masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian biasanya dapat diukur secara andal, khususnya bila berkenaan dengan pembelian melalui pertukaran kas atau aset moneter lainnya.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:

- Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

(b) Pertukaran

Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

(c) Kerjasama

ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan atau peraturan yang berlaku.

(d) Donasi/Hibah

ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

2) Pengukuran ATB Yang Diperoleh dari Pengembangan Secara Internal

ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

Pengeluaran atas unsur aset tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB dikemudian hari. ATB yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer yang memerlukan tiga tahap sebagaimana dimaksud dalam aspek pengakuan mengenai perlakuan khusus untuk *software* komputer, maka tahap yang dapat dilakukan kapitalisasi adalah tahap pengembangan aplikasi, bila telah memenuhi kriteria dimaksud maka kapitalisasi dinilai sebesar pengeluarannya.

b. Pengukuran Setelah Perolehan

Apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Sementara, pengeluaran atau biaya yang telah dibebankan sebagai beban operasional tidak dapat diakui kembali sebagai aset.

4) Aset Budaya/Bersejarah Tak Berwujud (*Intangible Heritage Asset*)

ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca, namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten, maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

5) Aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksud untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai buku.

7.4.3.13 Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban adalah sebagai berikut:

- 1) Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 2) Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar Surat Utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilainya dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.
- 3) Akun Kewajiban diklasifikasikan menjadi:
 - a) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal Neraca.
 - b) Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar Surat Utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
 - c) Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.
Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban:
 1. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode dan harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
 2. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

3. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
4. Pengukuran Pendapatan Diterima di Muka
Pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai utang adalah selisih antara Pendapatan Diterima di Muka yang telah diterima pemerintah daerah dengan jumlah yang benar-benar menjadi kewajiban (beban) pihak ketiga untuk membayar sampai dengan akhir tahun pelaporan keuangan.
5. Pengukuran Utang Belanja
Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.
6. Pengukuran Kewajiban Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar (yang diharapkan dibayar paling lama 12 bulan) yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban jangka pendek lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran kewajiban jangka pendek lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

4) Dari sifatnya, utang juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Utang Pemerintah yang Tidak Diperjualbelikan
Utang yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.
- b. Utang Pemerintah yang Diperjualbelikan
Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah dan dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo, sedangkan jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

7.4.3.14 Pengukuran Ekuitas

Akun ini terdiri dari:

1) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Saldo ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah/dikurang oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap dan lain-lain.

2) Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup rekening koran PPKD/SKPD.

7.4.4 Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP

7.4.4.1 Koreksi Kesalahan

Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui. Koreksi kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi Laporan Keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang; dan
- b. Kesalahan berulang dan sistemik.

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni:

- i. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya, namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan;
- ii. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya, dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan - LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan - LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya, namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan:

- Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, dan pengembalian secara kas dilakukan pada periode sebelumnya, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban;
- Apabila pengembalian kas terjadi pada tahun penyusunan Laporan Keuangan, maka koreksi tidak dilakukan pada akun periode sebelumnya melainkan dilakukan pada akun pendapatan tahun berjalan.

Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya, dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan:

- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD telah disahkan), maka dilakukan

dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA, dan akun ekuitas di neraca.

- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja sehingga mengakibatkan tambahan pengeluaran belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD telah disahkan), maka dilakukan dengan pembetulan pada akun belanja, dan akun ekuitas di neraca.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

7.4.4.2 Penyajian Kembali (*Restatement*) Neraca

Laporan Keuangan entitas pelaporan harus dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (*trend*) posisi keuangan, kinerja dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Apabila terdapat perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode dan estimasi, maka perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada Laporan Keuangan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Terkait penyajian kembali Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terdapat dua hal pokok dalam tahapan pelaksanaannya yaitu:

- 1) Melakukan perhitungan ulang terhadap akun yang mengalami perubahan untuk menentukan Nilai Buku pada periode berkenaan sesuai perubahan kebijakan akuntansi.
- 2) Menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang baru untuk semua periode yang dilaporkan dan mengungkapkan perbedaan yang terjadi antara Laporan Keuangan baru dibandingkan dengan Laporan Keuangan yang telah diterbitkan periode sebelumnya.
- 3) Bagan Akun Standar yang digunakan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang mencabut lampiran III dan IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Penyajian Laporan Keuangan menggunakan konsep pemetaan/*Mapping* dari akun basis kas ke akun basis akrual. *Mapping* akun yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan sebagaimana tabel berikut ini:

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
1	2.1.01.01.01.001.	Utang Taspen	2.1.01.01.01.001.	Utang Taspen		
2	2.1.01.02.01.001.	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	2.1.01.02.01.001.	Utang Iuran Jaminan Kesehatan		
3	2.1.01.03.01.001.	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.1.01.03.01.001.	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		
4	2.1.01.04.01.001.	Utang Iuran Jaminan Kematian	2.1.01.04.01.001.	Utang Iuran Jaminan Kematian		
5	2.1.01.05.01.001.	Utang PPh 21	2.1.01.05.01.001.	Utang PPh 21		
6	2.1.01.05.02.001.	Utang PPh 22	2.1.01.05.02.001.	Utang PPh 22		
7	2.1.01.05.03.001.	Utang PPh 23	2.1.01.05.03.001.	Utang PPh 23		
8	2.1.01.05.04.001.	Utang PPh 25	2.1.01.05.04.001.	Utang PPh 25		
9	2.1.01.06.01.001.	Utang PPN Pusat	2.1.01.06.01.001.	Utang PPN Pusat		

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
10	2.1.01.07.01.0001.	Utang Taperum	2.1.01.07.01.0001.	Utang Taperum		
11	2.1.01.08.01.0001.	Utang Iuran Wajib Pegawai	2.1.01.08.01.0001.	Utang Iuran Wajib Pegawai		
12	2.1.03.01.01.0001.	Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah-Jangka Pendek	2.1.03.01.01.0001.	Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah-Jangka Pendek		
13	4.1.01.06.01.0001.	Pajak Hotel	1.1.03.06.01.0001.	Piutang Pajak Hotel	7.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel-LO
14	4.1.01.07.01.0001.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.1.03.07.01.0001.	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	7.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO
15	4.1.01.08.05.0001.	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1.1.03.08.05.0001.	Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	7.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO
16	4.1.01.08.07.0001.	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	1.1.03.08.07.0001.	Piutang Pajak Permainan Biliar dan Bowling	7.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO
17	4.1.01.08.09.0001.	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.1.03.08.09.0001.	Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	7.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO
18	4.1.01.09.01.0001.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.1.03.09.01.0001.	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	7.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO
19	4.1.01.09.02.0001.	Pajak Reklame Kain	1.1.03.09.02.0001.	Piutang Pajak Reklame Kain	7.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain-LO
20	4.1.01.09.03.0001.	Pajak Reklame Melekat/Stiker	1.1.03.09.03.0001.	Piutang Pajak Reklame Melekat/Stiker	7.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO
21	4.1.01.09.05.0001.	Pajak Reklame Berjalan	1.1.03.09.05.0001.	Piutang Pajak Reklame Berjalan	7.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan-LO
22	4.1.01.10.01.0001.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.1.03.10.01.0001.	Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	7.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO
23	4.1.01.10.02.0001.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1.1.03.10.02.0001.	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	7.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO
24	4.1.01.11.01.0001.	Pajak Parkir	1.1.03.11.01.0001.	Piutang Pajak Parkir	7.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir-LO
25	4.1.01.12.01.0001.	Pajak Air Tanah	1.1.03.12.01.0001.	Piutang Pajak Air Tanah	7.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah-LO
26	4.1.01.14.05.0001.	Pajak Batu Apung	1.1.03.14.05.0001.	Piutang Pajak Batu Apung	7.1.01.14.05.0001	Pajak Batu Apung-LO
27	4.1.01.14.12.0001.	Pajak Granit/Andesit	1.1.03.14.12.0001.	Piutang Pajak Granit/Andesit	7.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit-LO
28	4.1.01.14.23.0001.	Pajak Pasir dan Kerikil	1.1.03.14.23.0001.	Piutang Pajak Pasir dan Kerikil	7.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil-LO
29	4.1.01.14.24.0001.	Pajak Pasir Kuarsa	1.1.03.14.24.0001.	Piutang Pajak Pasir Kuarsa	7.1.01.14.24.0001	Pajak Pasir Kuarsa-LO
30	4.1.01.14.28.0001.	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	1.1.03.14.28.0001.	Piutang Pajak Tanah Serap (Fullers earth)	7.1.01.14.28.0001	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)-LO
31	4.1.01.14.29.0001.	Pajak Tanah Diatome	1.1.03.14.29.0001.	Piutang Pajak Tanah Diatome	7.1.01.14.29.0001	Pajak Tanah Diatome-LO
32	4.1.01.14.30.0001.	Pajak Tanah Liat	1.1.03.14.30.0001.	Piutang Pajak Tanah Liat	7.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat-LO
33	4.1.01.14.37.0001.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.1.03.14.37.0001.	Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	7.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO
34	4.1.01.15.01.0001.	PBBP2	1.1.03.15.01.0001.	Piutang PBBP2	7.1.01.15.01.0001	PBBP2-LO
35	4.1.01.16.01.0001.	BPHTB-Pemindahan Hak	1.1.03.16.01.0001.	Piutang BPHTB-Pemindahan Hak	7.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak-LO
36	4.1.01.16.02.0001.	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.1.03.16.02.0001.	Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru	7.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO
37	4.1.02.01.01.0001.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.1.04.01.01.0001.	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	7.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO
38	4.1.02.01.02.0001.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.1.04.01.02.0001.	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	7.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO
39	4.1.02.01.09.0001.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	1.1.04.01.09.0001.	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau	7.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
				Penyedotan Kakus		Penyedotan Kakus-LO
40	4.1.02.01.11.0001.	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	1.1.04.01.11.0001.	Piutang Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	7.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO
41	4.1.02.02.10.0001.	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	1.1.04.02.10.0001.	Piutang Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	7.1.02.02.10.0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang-LO
42	4.1.02.03.01.0001.	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	1.1.04.03.01.0001.	Piutang Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	7.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO
43	4.1.03.01.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	1.1.05.01.01.0001.	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	7.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO
44	4.1.03.02.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.1.05.02.01.0001.	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	7.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO
45	4.1.04.01.02.0002.	Hasil Penjualan Alat Angkutan	1.1.06.01.02.0002.	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan	7.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan-LO
46	4.1.04.03.01.0001.	Hasil Sewa BMD	1.1.06.03.01.0001.	Piutang Hasil Sewa BMD	7.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD-LO
47	4.1.04.05.01.0001.	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.1.06.05.01.0001.	Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah	7.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO
48	4.1.04.05.02.0001.	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	1.1.06.05.02.0001.	Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara	7.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO
49	4.1.04.05.04.0001.	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	1.1.06.05.04.0001.	Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	7.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO
50	4.1.04.05.05.0001.	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	1.1.06.05.05.0001.	Piutang Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	7.1.04.05.05.0001	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO
51	4.1.04.06.01.0001.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.1.06.06.01.0001.	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	7.1.04.06.01.0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO
52	4.1.04.07.01.0001.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.1.06.07.01.0001.	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	7.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO
53	4.1.04.08.01.0001.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.1.06.08.01.0001.	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	7.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO
54	4.1.04.08.02.0001.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.1.06.08.02.0001.	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	7.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO
55	4.1.04.11.01.0001.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.1.06.11.01.0001.	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	7.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
56	4.1.04.12.06.0001.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.1.06.12.06.0001.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	7.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO
57	4.1.04.12.07.0001.	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.1.06.12.07.0001.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	7.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO
58	4.1.04.12.08.0005.	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1.1.06.12.08.0005.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	7.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO
59	4.1.04.12.08.0009.	Pendapatan Denda Pajak Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness)	1.1.06.12.08.0009.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness)	7.1.04.12.08.0009	Pendapatan Denda Pajak Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness)-LO

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
		Center)		Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (fitness center)		Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO
60	4.1.04.12.09.0001.	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.1.06.12.09.0001.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	7.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO
61	4.1.04.12.11.0001.	Pendapatan Denda Pajak Parkir	1.1.06.12.11.0001.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir	7.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO
62	4.1.04.12.12.0001.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.1.06.12.12.0001.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	7.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO
63	4.1.04.12.14.0037.	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.1.06.12.14.0037.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	7.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO
64	4.1.04.12.15.0001.	Pendapatan Denda PBBP2	1.1.06.12.15.0001.	Piutang Pendapatan Denda (PBBP2)-Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan	7.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2-LO
65	4.1.04.12.16.0001.	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	1.1.06.12.16.0001.	Piutang Pendapatan Denda (BPHTB)-Pemindahan Hak	7.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak-LO
66	4.1.04.12.16.0002.	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.1.06.12.16.0002.	Piutang Pendapatan Denda (BPHTB)-Pemberian Hak Baru	7.1.04.12.16.0002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO
67	4.1.04.15.03.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.1.06.15.03.0001.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	7.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO
68	4.1.04.15.04.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	1.1.06.15.04.0001.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	7.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO
69	4.1.04.15.04.0002.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Tetap	1.1.06.15.04.0002.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Tetap	7.1.04.15.04.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Tetap-LO
70	4.1.04.15.04.0004.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.1.06.15.04.0004.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.1.04.15.04.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota-LO
71	4.1.04.15.04.0005.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.1.06.15.04.0005.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.1.04.15.04.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota-LO
72	4.1.04.16.01.0001.	Pendapatan BLUD	1.1.06.16.01.0001.	Piutang Pendapatan BLUD	7.1.04.16.01.0001	Pendapatan dari BLUD-LO
73	4.1.04.18.01.0001.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.1.06.18.01.0001.	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO
74	4.1.04.19.01.0001.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.1.06.19.01.0001.	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	7.1.04.19.01.0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO
75	4.2.01.01.01.0001.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.1.07.01.01.0001.	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB	7.2.01.01.01.0001	DBH PBB-LO

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
76	4.2.01.01.01.0002.	DBH PPh Pasal 21	1.1.07.01.01.0002.	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21	7.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21-LO
77	4.2.01.01.01.0003.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.1.07.01.01.0003.	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	7.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO
78	4.2.01.01.01.0004.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.1.07.01.01.0004.	Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT	7.2.01.01.01.0004	DBH CHT-LO
79	4.2.01.01.01.0005.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	1.1.07.01.01.0005.	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi	7.2.01.01.01.0005	DBH SDA Minyak Bumi-LO
80	4.2.01.01.01.0006.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	1.1.07.01.01.0006.	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi	7.2.01.01.01.0006	DBH SDA Gas Bumi-LO
81	4.2.01.01.01.0008.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.1.07.01.01.0008.	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	7.2.01.01.01.0008	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO
82	4.2.01.01.01.0009.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.1.07.01.01.0009.	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	7.2.01.01.01.0009	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO
83	4.2.01.01.01.0010.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.1.07.01.01.0010.	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH	7.2.01.01.01.0010	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO
84	4.2.01.01.01.0013.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.1.07.01.01.0013.	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Perikanan	7.2.01.01.01.0013	DBH SDA Perikanan-LO
85	4.2.01.01.02.0001.	DAU	1.1.07.01.02.0001.	Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU	7.2.01.01.02.0001	DAU-LO
86	4.2.01.01.03.0002.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.1.07.01.03.0002.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	7.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO
87	4.2.01.01.03.0003.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.1.07.01.03.0003.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	7.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO
88	4.2.01.01.03.0006.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	1.1.07.01.03.0006.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	7.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO
89	4.2.01.01.03.0011.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	1.1.07.01.03.0011.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	7.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO
90	4.2.01.01.03.0013.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	1.1.07.01.03.0013.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	7.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar-LO
91	4.2.01.01.03.0014.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	1.1.07.01.03.0014.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	7.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO
92	4.2.01.01.03.0015.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	1.1.07.01.03.0015.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	7.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian-LO
93	4.2.01.01.03.0018.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1.1.07.01.03.0018.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total	7.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
				Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat		Berbasis Masyarakat-LO
94	4.2.01.01.03.0024.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas	1.1.07.01.03.0024.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas	7.2.01.01.03.0024	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas-LO
95	4.2.01.01.03.0025.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.1.07.01.03.0025.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	7.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO
96	4.2.01.01.03.0027.	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	1.1.07.01.03.0027.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	7.2.01.01.03.0028	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya-LO
97	4.2.01.01.03.0030.	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	1.1.07.01.03.0030.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	7.2.01.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM-LO
98	4.2.01.01.03.0031.	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1.1.07.01.03.0031.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	7.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO
99	4.2.01.01.03.0032.	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	1.1.07.01.03.0032.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	7.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO
100	4.2.01.01.03.0033.	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	1.1.07.01.03.0033.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	7.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan-LO
101	4.2.01.01.03.0034.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	1.1.07.01.03.0034.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	7.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO
102	4.2.01.01.03.0035.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	1.1.07.01.03.0035.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	7.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO
103	4.2.01.01.03.0037.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	1.1.07.01.03.0037.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO
104	4.2.01.01.03.0039.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	1.1.07.01.03.0039.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	7.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO
105	4.2.01.01.03.0040.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	1.1.07.01.03.0040.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	7.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO
106	4.2.01.01.03.0042.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	1.1.07.01.03.0042.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	7.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO
107	4.2.01.01.03.0043.	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	1.1.07.01.03.0043.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	7.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO
108	4.2.01.01.03.0047.	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	1.1.07.01.03.0047.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	7.2.01.01.03.0047	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi-LO

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
109	4.2.01.01.04.0001.	DAK Non Fisik-BOS Reguler			7.2.01.01.04.0001.	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO
110	4.2.01.01.04.0003.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja			7.2.01.01.04.0003.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO
111	4.2.01.01.04.0004.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	1.1.07.01.04.0004.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-TPG PNSD	7.2.01.01.04.0004.	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO
112	4.2.01.01.04.0005.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.1.07.01.04.0005.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	7.2.01.01.04.0005.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO
113	4.2.01.01.04.0006.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.1.07.01.04.0006.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-TKG PNSD	7.2.01.01.04.0006.	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO
114	4.2.01.01.04.0007.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.1.07.01.04.0007.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP PAUD	7.2.01.01.04.0007.	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO
115	4.2.01.01.04.0008.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.1.07.01.04.0008.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	7.2.01.01.04.0008.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO
116	4.2.01.01.04.0011.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1.1.07.01.04.0011.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-BOK	7.2.01.01.04.0011.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO
117	4.2.01.01.04.0012.	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	1.1.07.01.04.0012.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		
118	4.2.01.01.04.0013.	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	1.1.07.01.04.0013.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	7.2.01.01.04.0013.	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas-LO
119	4.2.01.01.04.0014.	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	1.1.07.01.04.0014.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	7.2.01.01.04.0014.	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan-LO
120	4.2.01.01.04.0015.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1.1.07.01.04.0015.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-BOKB	7.2.01.01.04.0015.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO
121	4.2.01.01.04.0016.	DAK Non Fisik-PK2UKM	1.1.07.01.04.0016.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-PK2UKM	7.2.01.01.04.0016.	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO
122	4.2.01.01.04.0017.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.1.07.01.04.0017.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	7.2.01.01.04.0017.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO
123	4.2.01.01.04.0018.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	1.1.07.01.04.0018.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	7.2.01.01.04.0018.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata-LO
124	4.2.01.01.04.0019.	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	1.1.07.01.04.0019.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	7.2.01.01.04.0019.	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS-LO
125	4.2.01.02.01.0001.	DID	1.1.07.02.01.0001.	Piutang DID	7.2.01.02.01.0001.	DID-LO
126	4.2.01.05.01.0001.	Dana Desa	1.1.07.05.01.0001.	Piutang Dana Desa	7.2.01.05.01.0001.	Dana Desa-LO
127	4.2.02.01.01.0001.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.1.08.01.01.0001.	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	7.2.02.01.01.0001.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO
128	4.2.02.01.01.0002.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.1.08.01.01.0002.	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.2.02.01.01.0002.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO
129	4.2.02.01.01.0003.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.1.08.01.01.0003.	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.2.02.01.01.0003.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO
130	4.2.02.01.01.0004.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.1.08.01.01.0004.	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	7.2.02.01.01.0004.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO
131	4.2.02.01.01.0005.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	1.1.08.01.01.0005.	Piutang Bagi Hasil	7.2.02.01.01.0005.	Pendapatan Bagi

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
		Rokok		Pajak Rokok	.	Hasil Pajak Rokok-LO
132	4.2.02.02.02.0001.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	1.1.08.02.02.0001.	Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	7.2.02.02.02.0001.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
133	4.3.01.02.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah			7.3.01.02.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO
134	4.3.01.05.01.0001.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis			7.3.01.05.01.0001.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO
135	4.3.03.01.01.0001.	Pendapatan Hibah Dana BOS			7.3.03.01.01.0001.	Pendapatan Hibah Dana BOS-LO
136	4.3.03.01.02.0005.	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	1.1.06.15.34.0001.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.3.03.01.02.0005.	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO
137	5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS			8.1.01.01.01.0001.	Beban Gaji Pokok PNS
138	5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK			8.1.01.01.01.0002.	Beban Gaji Pokok PPPK
139	5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS			8.1.01.01.02.0001.	Beban Tunjangan Keluarga PNS
140	5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK			8.1.01.01.02.0002.	Beban Tunjangan Keluarga PPPK
141	5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS			8.1.01.01.03.0001.	Beban Tunjangan Jabatan PNS
142	5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS			8.1.01.01.04.0001.	Beban Tunjangan Fungsional PNS
143	5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK			8.1.01.01.04.0002.	Beban Tunjangan Fungsional PPPK
144	5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			8.1.01.01.05.0001.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS
145	5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK			8.1.01.01.05.0002.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK
146	5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS			8.1.01.01.06.0001.	Beban Tunjangan Beras PNS
147	5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK			8.1.01.01.06.0002.	Beban Tunjangan Beras PPPK
148	5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			8.1.01.01.07.0001.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
149	5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS			8.1.01.01.08.0001.	Beban Pembulatan Gaji PNS
150	5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK			8.1.01.01.08.0002.	Beban Pembulatan Gaji PPPK
151	5.1.01.01.09.0001.	Belanja iuran Jaminan Kesehatan PNS			8.1.01.01.09.0001.	Beban iuran Jaminan Kesehatan PNS
152	5.1.01.01.09.0002.	Belanja iuran Jaminan Kesehatan PPPK			8.1.01.01.09.0002.	Beban iuran Jaminan Kesehatan PPPK
153	5.1.01.01.10.0001.	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			8.1.01.01.10.0001.	Beban iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
154	5.1.01.01.10.0002.	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			8.1.01.01.10.0002.	Beban iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK
155	5.1.01.01.11.0001.	Belanja iuran Jaminan Kematian PNS			8.1.01.01.11.0001.	Beban iuran Jaminan Kematian PNS
156	5.1.01.01.11.0002.	Belanja iuran Jaminan Kematian PPPK			8.1.01.01.11.0002.	Beban iuran Jaminan Kematian PPPK
157	5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS			8.1.01.02.01.0001.	Beban Tambahan Penghasilan

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
						berdasarkan Beban Kerja PNS
158	5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK			8.1.01.02.01.0002.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK
159	5.1.01.02.02.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS			8.1.01.02.02.0001.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS
160	5.1.01.02.02.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK			8.1.01.02.02.0002.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK
161	5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS			8.1.01.02.03.0001.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS
162	5.1.01.02.03.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK			8.1.01.02.03.0002.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK
163	5.1.01.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS			8.1.01.02.04.0001.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS
164	5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS			8.1.01.02.05.0001.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS
165	5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK			8.1.01.02.05.0002.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK
166	5.1.01.03.02.0001.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan			8.1.01.03.02.0001.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
167	5.1.01.03.03.0001.	Belanja TPG PNSD			8.1.01.03.03.0001.	Beban TPG PNSD
168	5.1.01.03.04.0001.	Belanja TKG PNSD			8.1.01.03.04.0001.	Beban TKG PNSD
169	5.1.01.03.05.0001.	Belanja Tamsil Guru PNSD			8.1.01.03.05.0001.	Beban Tamsil Guru PNSD
170	5.1.01.03.06.0001.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN			8.1.01.03.06.0001.	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
171	5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			8.1.01.03.07.0001.	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
172	5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			8.1.01.03.07.0002.	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
173	5.1.01.03.07.0003.	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)			8.1.01.03.07.0003.	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
174	5.1.01.03.08.0001.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan			8.1.01.03.08.0001.	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
175	5.1.01.03.08.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan			8.1.01.03.08.0002.	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
176	5.1.01.04.01.0001.	Belanja Uang Representasi DPRD			8.1.01.04.01.0001.	Beban Uang Representasi DPRD
177	5.1.01.04.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD			8.1.01.04.02.0001.	Beban Tunjangan Keluarga DPRD
178	5.1.01.04.03.0001.	Belanja Tunjangan Beras DPRD			8.1.01.04.03.0001.	Beban Tunjangan Beras DPRD
179	5.1.01.04.04.0001.	Belanja Uang Paket DPRD			8.1.01.04.04.0001.	Beban Uang Paket DPRD

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
180	5.1.01.04.05.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD			8.1.01.04.05.0001 .	Beban Tunjangan Jabatan DPRD
181	5.1.01.04.06.0001.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD			8.1.01.04.06.0001 .	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
182	5.1.01.04.07.0001.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD			8.1.01.04.07.0001 .	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
183	5.1.01.04.08.0001.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD			8.1.01.04.08.0001 .	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
184	5.1.01.04.09.0001.	Belanja Tunjangan Reses DPRD			8.1.01.04.09.0001 .	Beban Tunjangan Reses DPRD
185	5.1.01.04.10.0001.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD			8.1.01.04.10.0001 .	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
186	5.1.01.04.12.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD			8.1.01.04.12.0001 .	Beban Jaminan Kesehatan DPRD
187	5.1.01.04.12.0002.	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD			8.1.01.04.12.0002 .	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD
188	5.1.01.04.12.0003.	Belanja Jaminan Kematian DPRD			8.1.01.04.12.0003 .	Beban Jaminan Kematian DPRD
189	5.1.01.04.12.0004.	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD			8.1.01.04.12.0004 .	Beban Tunjangan Perumahan DPRD
190	5.1.01.04.13.0001.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD			8.1.01.04.13.0001 .	Beban Tunjangan Transportasi DPRD
191	5.1.01.04.14.0001.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD			8.1.01.04.14.0001 .	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD
192	5.1.01.05.01.0001.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH			8.1.01.05.01.0001 .	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH
193	5.1.01.05.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH			8.1.01.05.02.0001 .	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
194	5.1.01.05.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH			8.1.01.05.03.0001 .	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
195	5.1.01.05.04.0001.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH			8.1.01.05.04.0001 .	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH
196	5.1.01.05.05.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH			8.1.01.05.05.0001 .	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
197	5.1.01.05.06.0001.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH			8.1.01.05.06.0001 .	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH
198	5.1.01.05.07.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH			8.1.01.05.07.0001 .	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH
199	5.1.01.05.08.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH			8.1.01.05.08.0001 .	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
200	5.1.01.05.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH			8.1.01.05.09.0001 .	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
201	5.1.01.05.10.0006.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel			8.1.01.05.10.0006 .	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel
202	5.1.01.05.10.0007.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran			8.1.01.05.10.0007 .	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran
203	5.1.01.05.10.0008.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan			8.1.01.05.10.0008 .	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan
204	5.1.01.05.10.0009.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame			8.1.01.05.10.0009 .	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame
205	5.1.01.05.10.0010.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan			8.1.01.05.10.0010 .	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
206	5.1.01.05.10.0011.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir			8.1.01.05.10.0011 .	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
207	5.1.01.05.10.0012.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah			8.1.01.05.10.0012 .	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah
208	5.1.01.05.10.0014.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan			8.1.01.05.10.0014 .	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan-Logam dan Batuan
209	5.1.01.05.10.0015.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan			8.1.01.05.10.0015 .	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
210	5.1.01.05.10.0016.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan			8.1.01.05.10.0016 .	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
211	5.1.01.06.01.0001.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD			8.1.01.06.01.0001 .	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD
212	5.1.01.06.02.0001.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH			8.1.01.06.02.0001 .	Beban Dana Operasional KDH/WKDH
213	5.1.01.88.88.8888.	Belanja Pegawai BOS			8.1.01.88.88.8888 .	Beban Pegawai BOS
214	5.1.01.99.99.9999.	Belanja Pegawai BLUD			8.1.01.99.99.9999 .	Beban Pegawai BLUD
215	5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi			8.1.02.01.01.0001 .	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
216	5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia			8.1.02.01.01.0002 .	Beban Bahan-Bahan Kimia
217	5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			8.1.02.01.01.0004 .	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
218	5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku			8.1.02.01.01.0005 .	Beban Bahan-Bahan Baku
219	5.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman			8.1.02.01.01.0008 .	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman
220	5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas			8.1.02.01.01.0010 .	Beban Bahan-Isi Tabung Gas
221	5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya			8.1.02.01.01.0012 .	Beban Bahan-Bahan Lainnya
222	5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan			8.1.02.01.01.0013 .	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan
223	5.1.02.01.01.0019.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian			8.1.02.01.01.0019 .	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian
224	5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya			8.1.02.01.01.0023 .	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya
225	5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			8.1.02.01.01.0024 .	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
226	5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			8.1.02.01.01.0025 .	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
227	5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			8.1.02.01.01.0026 .	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
228	5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			8.1.02.01.01.0027 .	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
229	5.1.02.01.01.0028.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender			8.1.02.01.01.0028 .	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
						asi Tender
230	5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			8.1.02.01.01.0029 .	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
231	5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			8.1.02.01.01.0031 .	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
232	5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas			8.1.02.01.01.0032 .	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
233	5.1.02.01.01.0034.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga			8.1.02.01.01.0034 .	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga
234	5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata			8.1.02.01.01.0035 .	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata
235	5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			8.1.02.01.01.0036 .	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
236	5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat			8.1.02.01.01.0037 .	Beban Obat-Obatan-Obat
237	5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya			8.1.02.01.01.0038 .	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya
238	5.1.02.01.01.0039.	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat			8.1.02.01.01.0039 .	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
239	5.1.02.01.01.0040.	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya			8.1.02.01.01.0040 .	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
240	5.1.02.01.01.0043.	Belanja Natura dan Pakan-Natura			8.1.02.01.01.0043 .	Beban Natura dan Pakan-Natura
241	5.1.02.01.01.0045.	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya			8.1.02.01.01.0045 .	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya
242	5.1.02.01.01.0049.	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya			8.1.02.01.01.0049 .	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya
243	5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			8.1.02.01.01.0052 .	Beban Makanan dan Minuman Rapat
244	5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			8.1.02.01.01.0053 .	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
245	5.1.02.01.01.0056.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan			8.1.02.01.01.0056 .	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan
246	5.1.02.01.01.0057.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial			8.1.02.01.01.0057 .	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial
247	5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			8.1.02.01.01.0058 .	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
248	5.1.02.01.01.0061.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)			8.1.02.01.01.0061 .	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)
249	5.1.02.01.01.0062.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)			8.1.02.01.01.0062 .	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
250	5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)			8.1.02.01.01.0063 .	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)
251	5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)			8.1.02.01.01.0064 .	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
252	5.1.02.01.01.0065.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)			8.1.02.01.01.0065 .	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)
253	5.1.02.01.01.0066.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)			8.1.02.01.01.0066 .	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
254	5.1.02.01.01.0067.	Belanja Pakaian Penyelamatan			8.1.02.01.01.0067.	Beban Pakaian Penyelamatan
255	5.1.02.01.01.0068.	Belanja Pakaian Siaga			8.1.02.01.01.0068.	Beban Pakaian Siaga
256	5.1.02.01.01.0070.	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja			8.1.02.01.01.0070.	Beban Pakaian Pelatihan Kerja
257	5.1.02.01.01.0074.	Belanja Pakaian Adat Daerah			8.1.02.01.01.0074.	Beban Pakaian Adat Daerah
258	5.1.02.01.01.0075.	Belanja Pakaian Batik Tradisional			8.1.02.01.01.0075.	Beban Pakaian Batik Tradisional
259	5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga			8.1.02.01.01.0076.	Beban Pakaian Olahraga
260	5.1.02.01.01.0077.	Belanja Pakaian Paskibraka			8.1.02.01.01.0077.	Beban Pakaian Paskibraka
261	5.1.02.01.02.0003.	Belanja Komponen-Komponen Peralatan			8.1.02.01.02.0003.	Beban Komponen-Komponen Peralatan
262	5.1.02.02.01.0001.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan			8.1.02.02.01.0001.	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
263	5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			8.1.02.02.01.0003.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
264	5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			8.1.02.02.01.0004.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
265	5.1.02.02.01.0005.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara			8.1.02.02.01.0005.	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara
266	5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan			8.1.02.02.01.0006.	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan
267	5.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan			8.1.02.02.01.0007.	Beban Honorarium Rohaniwan
268	5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website			8.1.02.02.01.0008.	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website
269	5.1.02.02.01.0009.	Honorarium Penyelenggara Ujian			8.1.02.02.01.0009.	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian
270	5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan			8.1.02.02.01.0011.	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
271	5.1.02.02.01.0013.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan			8.1.02.02.01.0013.	Beban Jasa Tenaga Pendidikan
272	5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan			8.1.02.02.01.0014.	Beban Jasa Tenaga Kesehatan
273	5.1.02.02.01.0015.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium			8.1.02.02.01.0015.	Beban Jasa Tenaga Laboratorium
274	5.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum			8.1.02.02.01.0016.	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum
275	5.1.02.02.01.0023.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan			8.1.02.02.01.0023.	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
276	5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan			8.1.02.02.01.0025.	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan
277	5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi			8.1.02.02.01.0026.	Beban Jasa Tenaga Administrasi
278	5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator			8.1.02.02.01.0027.	Beban Jasa

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
		Komputer			.	Tenaga Operator Komputer
279	5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum			8.1.02.02.01.0028.	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum
280	5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli			8.1.02.02.01.0029.	Beban Jasa Tenaga Ahli
281	5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			8.1.02.02.01.0030.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan
282	5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan			8.1.02.02.01.0031.	Beban Jasa Tenaga Keamanan
283	5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir			8.1.02.02.01.0033.	Beban Jasa Tenaga Supir
284	5.1.02.02.01.0034.	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak			8.1.02.02.01.0034.	Beban Jasa Tenaga Juru Masak
285	5.1.02.02.01.0035.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik			8.1.02.02.01.0035.	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik
286	5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan			8.1.02.02.01.0037.	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan
287	5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi			8.1.02.02.01.0039.	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
288	5.1.02.02.01.0041.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik			8.1.02.02.01.0041.	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik
289	5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan			8.1.02.02.01.0042.	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan
290	5.1.02.02.01.0043.	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan			8.1.02.02.01.0043.	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan
291	5.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi			8.1.02.02.01.0046.	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi
292	5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara			8.1.02.02.01.0047.	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara
293	5.1.02.02.01.0048.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi			8.1.02.02.01.0048.	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi
294	5.1.02.02.01.0049.	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga			8.1.02.02.01.0049.	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
295	5.1.02.02.01.0050.	Belanja Jasa Kalibrasi			8.1.02.02.01.0050.	Beban Jasa Kalibrasi
296	5.1.02.02.01.0051.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah			8.1.02.02.01.0051.	Beban Jasa Pengolahan Sampah
297	5.1.02.02.01.0052.	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi			8.1.02.02.01.0052.	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi
298	5.1.02.02.01.0053.	Belanja Jasa Pengukuran Tanah			8.1.02.02.01.0053.	Beban Jasa Pengukuran Tanah
299	5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan			8.1.02.02.01.0055.	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
300	5.1.02.02.01.0057.	Belanja Jasa Operator Kapal			8.1.02.02.01.0057.	Beban Jasa Operator Kapal
301	5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon			8.1.02.02.01.0059.	Beban Tagihan Telepon
302	5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air			8.1.02.02.01.0060.	Beban Tagihan Air
303	5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik			8.1.02.02.01.0061.	Beban Tagihan Listrik
304	5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah			8.1.02.02.01.0062.	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
305	5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan			8.1.02.02.01.0063.	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
						Berlangganan
306	5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman			8.1.02.02.01.0064 .	Beban Paket/Pengiriman
307	5.1.02.02.01.0066.	Belanja Registrasi/Keanggotaan			8.1.02.02.01.0066 .	Beban Registrasi/Keanggotaan
308	5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			8.1.02.02.01.0067 .	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
309	5.1.02.02.01.0073.	Belanja Medical Check Up			8.1.02.02.01.0073 .	Beban Medical Check Up
310	5.1.02.02.02.0003.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3			8.1.02.02.02.0003 .	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3
311	5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			8.1.02.02.02.0005 .	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
312	5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			8.1.02.02.02.0006 .	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
313	5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			8.1.02.02.02.0007 .	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN
314	5.1.02.02.04.0003.	Belanja Sewa Excavator			8.1.02.02.04.0003 .	Beban Sewa Excavator
315	5.1.02.02.04.0034.	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya			8.1.02.02.04.0034 .	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya
316	5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			8.1.02.02.04.0036 .	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang
317	5.1.02.02.04.0037.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang			8.1.02.02.04.0037 .	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
318	5.1.02.02.04.0038.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua			8.1.02.02.04.0038 .	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua
319	5.1.02.02.04.0043.	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya			8.1.02.02.04.0043 .	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
320	5.1.02.02.04.0045.	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang			8.1.02.02.04.0045 .	Beban Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
321	5.1.02.02.04.0049.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang			8.1.02.02.04.0049 .	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
322	5.1.02.02.04.0052.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya			8.1.02.02.04.0052 .	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
323	5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)			8.1.02.02.04.0115 .	Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)
324	5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya			8.1.02.02.04.0117 .	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya
325	5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel			8.1.02.02.04.0118 .	Beban Sewa Mebel
326	5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			8.1.02.02.04.0123 .	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
327	5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio			8.1.02.02.04.0132 .	Beban Sewa Peralatan Studio Audio
328	5.1.02.02.04.0137.	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya			8.1.02.02.04.0137 .	Beban Sewa Alat Studio Lainnya
329	5.1.02.02.04.0145.	Belanja Sewa Alat Komunikasi Khusus			8.1.02.02.04.0145 .	Beban Sewa Alat Komunikasi Khusus
330	5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum			8.1.02.02.04.0355 .	Beban Sewa Peralatan Umum
331	5.1.02.02.04.0406.	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya			8.1.02.02.04.0406 .	Beban Sewa Komputer Unit Lainnya
332	5.1.02.02.04.0411.	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya			8.1.02.02.04.0411 .	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
333	5.1.02.02.04.0416.	Belanja Sewa Elektronik/Electric			8.1.02.02.04.0416	Beban Sewa Elektronik/Electric
334	5.1.02.02.04.0444.	Belanja Sewa Suara			8.1.02.02.04.0444	Beban Sewa Suara
335	5.1.02.02.05.0001.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor			8.1.02.02.05.0001	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor
336	5.1.02.02.05.0002.	Belanja Sewa Bangunan Gudang			8.1.02.02.05.0002	Beban Sewa Bangunan Gudang
337	5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan			8.1.02.02.05.0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
338	5.1.02.02.05.0014.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool			8.1.02.02.05.0014	Beban Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool
339	5.1.02.02.05.0030.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya			8.1.02.02.05.0030	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
340	5.1.02.02.05.0038.	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I			8.1.02.02.05.0038	Beban Sewa Rumah Negara Golongan I
341	5.1.02.02.05.0042.	Belanja Sewa Asrama			8.1.02.02.05.0042	Beban Sewa Asrama
342	5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel			8.1.02.02.05.0043	Beban Sewa Hotel
343	5.1.02.02.05.0049.	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun			8.1.02.02.05.0049	Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun
344	5.1.02.02.05.0050.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya			8.1.02.02.05.0050	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
345	5.1.02.02.06.0131.	Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya			8.1.02.02.06.0131	Beban Sewa Jaringan Telepon Lainnya
346	5.1.02.02.07.0028.	Belanja Sewa Alat Musik			8.1.02.02.07.0028	Beban Sewa Alat Musik
347	5.1.02.02.07.0030.	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian			8.1.02.02.07.0030	Beban Sewa Alat Peraga Kesenian
348	5.1.02.02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural			8.1.02.02.09.0001	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural
349	5.1.02.02.08.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung			8.1.02.02.09.0003	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung
350	5.1.02.02.08.0004.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior			8.1.02.02.09.0004	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior
351	5.1.02.02.08.0005.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya			8.1.02.02.09.0005	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya
352	5.1.02.02.08.0007.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan			8.1.02.02.09.0007	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
353	5.1.02.02.08.0008.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air			8.1.02.02.09.0008	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air
354	5.1.02.02.08.0011.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi			8.1.02.02.09.0011	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi
355	5.1.02.02.08.0013.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya			8.1.02.02.09.0013	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya
356	5.1.02.02.08.0016.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape			8.1.02.02.09.0016	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape
357	5.1.02.02.08.0018.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur			8.1.02.02.09.0018	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur
358	5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung			8.1.02.02.09.0019	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
359	5.1.02.02.08.0032.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan			8.1.02.02.09.0032	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan
360	5.1.02.02.08.0033.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan			8.1.02.02.09.0033	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan
361	5.1.02.02.08.0037.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya			8.1.02.02.09.0037	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya
362	5.1.02.02.09.0001.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan			8.1.02.02.10.0001	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan
363	5.1.02.02.09.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika			8.1.02.02.10.0003	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika
364	5.1.02.02.09.0011.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei			8.1.02.02.10.0011	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei
365	5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik			8.1.02.02.10.0012	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik
366	5.1.02.02.09.0014.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus			8.1.02.02.10.0014	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
						Khusus
367	5.1.02.02.09.0015.	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata			8.1.02.02.10.0015	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata
368	5.1.02.02.09.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataa-an			8.1.02.02.10.0019	Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataa-an
369	5.1.02.02.11.0001.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1			8.1.02.02.12.0001	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1
370	5.1.02.02.11.0002.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2			8.1.02.02.12.0002	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2
371	5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan			8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan
372	5.1.02.02.12.0002.	Belanja Sosialisasi			8.1.02.02.13.0002	Beban Sosialisasi
373	5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis			8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis
374	5.1.02.02.12.0004.	Belanja Diklat Kepemimpinan			8.1.02.02.13.0004	Beban Diklat Kepemimpinan
375	5.1.02.03.01.0001.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal			8.1.02.03.01.0001	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
376	5.1.02.03.01.0005.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga			8.1.02.03.01.0005	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
377	5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
378	5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang			8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
379	5.1.02.03.02.0037.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang			8.1.02.03.02.0037	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
380	5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua			8.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
381	5.1.02.03.02.0043.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya			8.1.02.03.02.0043	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
382	5.1.02.03.02.0049.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang			8.1.02.03.02.0049	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
383	5.1.02.03.02.0050.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus			8.1.02.03.02.0050	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
384	5.1.02.03.02.0062.	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis			8.1.02.03.02.0062	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service
385	5.1.02.03.02.0086.	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi			8.1.02.03.02.0086	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
386	5.1.02.03.02.0103.	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman			8.1.02.03.02.0103	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
387	5.1.02.03.02.0113.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik			8.1.02.03.02.0113	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
388	5.1.02.03.02.0114.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah			8.1.02.03.02.0114	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
389	5.1.02.03.02.0115.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)			8.1.02.03.02.0115	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
390	5.1.02.03.02.0116.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor			8.1.02.03.02.0116	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
391	5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya			8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
392	5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel			8.1.02.03.02.0118	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
393	5.1.02.03.02.0120.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih			8.1.02.03.02.0120	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
394	5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin			8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
395	5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			8.1.02.03.02.0123	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
396	5.1.02.03.02.0126.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat			8.1.02.03.02.0126	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
397	5.1.02.03.02.0132.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio			8.1.02.03.02.0132	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
398	5.1.02.03.02.0133.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film			8.1.02.03.02.0133	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
399	5.1.02.03.02.0204.	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum			8.1.02.03.02.0204	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
400	5.1.02.03.02.0218.	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic			8.1.02.03.02.0218	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic
401	5.1.02.03.02.0237.	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya			8.1.02.03.02.0237	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
402	5.1.02.03.02.0293.	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain			8.1.02.03.02.0293	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
403	5.1.02.03.02.0335.	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja			8.1.02.03.02.0335	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
404	5.1.02.03.02.0404.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan			8.1.02.03.02.0404	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
405	5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer			8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer
406	5.1.02.03.02.0406.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya			8.1.02.03.02.0406	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
407	5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer			8.1.02.03.02.0409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer
408	5.1.02.03.02.0410.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan			8.1.02.03.02.0410	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
409	5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya			8.1.02.03.02.0411	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
410	5.1.02.03.02.0446.	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman			8.1.02.03.02.0446	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
						Pengaman
411	5.1.02.03.02.0494.	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya			8.1.02.03.02.0494	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
412	5.1.02.03.02.0502.	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut			8.1.02.03.02.0502	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
413	5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor			8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
414	5.1.02.03.03.0002.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang			8.1.02.03.03.0002	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
415	5.1.02.03.03.0003.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar			8.1.02.03.03.0003	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
416	5.1.02.03.03.0004.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi			8.1.02.03.03.0004	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
417	5.1.02.03.03.0006.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan			8.1.02.03.03.0006	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
418	5.1.02.03.03.0007.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium			8.1.02.03.03.0007	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Obser vatorium
419	5.1.02.03.03.0008.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah			8.1.02.03.03.0008	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
420	5.1.02.03.03.0009.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan			8.1.02.03.03.0009	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
421	5.1.02.03.03.0010.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan			8.1.02.03.03.0010	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
422	5.1.02.03.03.0011.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga			8.1.02.03.03.0011	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
423	5.1.02.03.03.0018.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara			8.1.02.03.03.0018	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
						Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
424	5.1.02.03.03.0020.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan			8.1.02.03.03.0020	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
425	5.1.02.03.03.0021.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan			8.1.02.03.03.0021	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
426	5.1.02.03.03.0026.	Belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam			8.1.02.03.03.0026	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
427	5.1.02.03.03.0030.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya			8.1.02.03.03.0030	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
428	5.1.02.03.03.0041.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan			8.1.02.03.03.0041	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
429	5.1.02.03.03.0042.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama			8.1.02.03.03.0042	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
430	5.1.02.03.03.0050.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya			8.1.02.03.03.0050	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
431	5.1.02.03.03.0054.	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya			8.1.02.03.03.0054	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya
432	5.1.02.03.03.0055.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai			8.1.02.03.03.0055	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
433	5.1.02.03.03.0057.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi			8.1.02.03.03.0057	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
434	5.1.02.03.04.0003.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten			8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten
435	5.1.02.03.04.0010.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya			8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya
436	5.1.02.03.04.0015.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa			8.1.02.03.04.0015	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
						Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
437	5.1.02.03.04.0031.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya			8.1.02.03.04.0031	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
438	5.1.02.03.04.0035.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut			8.1.02.03.04.0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
439	5.1.02.03.04.0048.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam			8.1.02.03.04.0048	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
440	5.1.02.03.04.0103.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya			8.1.02.03.04.0103	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
441	5.1.02.03.04.0123.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya			8.1.02.03.04.0123	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
442	5.1.02.03.04.0125.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi			8.1.02.03.04.0125	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
443	5.1.02.03.04.0126.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya			8.1.02.03.04.0126	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
444	5.1.02.03.05.0001.	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum			8.1.02.03.05.0001	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
445	5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa
446	5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
447	5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
448	5.1.02.04.02.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri			8.1.02.04.02.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri
449	5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan			8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan
450	5.1.02.05.01.0003.	Belanja Beasiswa			8.1.02.05.01.0003	Beban Beasiswa
451	5.1.02.05.01.0005.	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)			8.1.02.05.01.0005	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)
452	5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain			8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
453	5.1.02.05.02.0002.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat			8.1.02.05.02.0002	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
454	5.1.02.88.88.8888.	Belanja Barang dan Jasa BOS			8.1.02.88.88.8888.	Beban Barang dan Jasa BOS
455	5.1.02.99.99.9999.	Belanja Barang dan Jasa BLUD			8.1.02.99.99.9999.	Beban Barang dan Jasa BLUD
456	5.1.05.01.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat			8.1.05.01.01.0001.	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
457	5.1.05.01.02.0001.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat			8.1.05.01.02.0001.	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
458	5.1.05.01.03.0001.	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat			8.1.05.01.03.0001.	Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat
459	5.1.05.04.02.0001.	Belanja Hibah Barang kepada BUMD			8.1.05.04.02.0001.	Beban Hibah Barang kepada BUMD
460	5.1.05.05.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan			8.1.05.05.01.0001.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
461	5.1.05.05.01.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan			8.1.05.05.01.0002.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
462	5.1.05.05.02.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar			8.1.05.05.02.0001.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
463	5.1.05.05.02.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar			8.1.05.05.02.0002.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
464	5.1.05.05.03.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan			8.1.05.05.03.0001.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
465	5.1.05.05.03.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan			8.1.05.05.03.0002.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
466	5.1.05.07.01.0001.	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik			8.1.05.07.01.0001.	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
467	5.1.06.01.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu			8.1.06.01.01.0001.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu
468	5.1.06.01.02.0001.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu			8.1.06.01.02.0001.	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu
469	5.1.06.02.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga			8.1.06.02.01.0001.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga
470	5.1.06.02.02.0001.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga			8.1.06.02.02.0001.	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
471	5.1.06.03.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat			8.1.06.03.01.0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
472	5.1.06.03.02.0001.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat			8.1.06.03.02.0001	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
473	5.2.01.01.01.0002.	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	1.3.01.01.01.0002.	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan		
474	5.2.01.01.01.0004.	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.3.01.01.01.0004.	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja		
475	5.2.01.01.01.0005.	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	1.3.01.01.01.0005.	Tanah untuk Bangunan Gedung sarana Olahraga		
476	5.2.01.01.01.0007.	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1.3.01.01.01.0007.	Tanah Persil Lainnya		
477	5.2.01.01.03.0007.	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	1.3.01.01.03.0007.	Tanah untuk Jalan		
478	5.2.01.01.03.0008.	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	1.3.01.01.03.0008.	Tanah untuk Bangunan Air		
479	5.2.01.01.03.0012.	Belanja Modal Tanah untuk Makam	1.3.01.01.03.0012.	Tanah untuk Makam		
480	5.2.01.01.03.0019.	Belanja Modal Lapangan Lainnya	1.3.01.01.03.0019.	Lapangan Lainnya		
481	5.2.02.01.02.0006.	Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya	1.3.02.01.02.0006.	Alat Besar Apung Lainnya		
482	5.2.02.01.03.0005.	Belanja Modal Pompa	1.3.02.01.03.0005.	Pompa		
483	5.2.02.01.03.0016.	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	1.3.02.01.03.0016.	Alat Bantu Lainnya		
484	5.2.02.02.01.0001.	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.3.02.02.01.0001.	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		
485	5.2.02.02.01.0002.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.3.02.02.01.0002.	Kendaraan Bermotor Penumpang		
486	5.2.02.02.01.0003.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.3.02.02.01.0003.	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		
487	5.2.02.02.01.0004.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.3.02.02.01.0004.	Kendaraan Bermotor Beroda Dua		
488	5.2.02.02.01.0005.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.3.02.02.01.0005.	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga		
489	5.2.02.02.01.0006.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.3.02.02.01.0006.	Kendaraan Bermotor Khusus		
490	5.2.02.02.01.0009.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.3.02.02.01.0009.	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya		
491	5.2.02.02.02.0001.	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1.3.02.02.02.0001.	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang		
492	5.2.02.02.03.0002.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.3.02.02.03.0002.	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang		
493	5.2.02.03.01.0006.	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	1.3.02.03.01.0006.	Perkakas Bengkel Kayu		
494	5.2.02.03.01.0010.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	1.3.02.03.01.0010.	Alat Bengkel Bermesin Lainnya		
495	5.2.02.03.02.0005.	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	1.3.02.03.02.0005.	Perkakas Standard (Standard Tools)		
496	5.2.02.03.02.0007.	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	1.3.02.03.02.0007.	Perkakas Bengkel Kerja		
497	5.2.02.03.02.0013.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	1.3.02.03.02.0013.	Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya		
498	5.2.02.03.03.0001.	Belanja Modal Alat Ukur Universal	1.3.02.03.03.0001.	Alat Ukur Universal		
499	5.2.02.03.03.0008.	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	1.3.02.03.03.0008.	Alat Ukur/Pembanding		
500	5.2.02.03.03.0010.	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	1.3.02.03.03.0010.	Alat Timbangan/Biara		

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
501	5.2.02.03.03.0021.	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	1.3.02.03.03.0021.	Alat Ukur Lainnya		
502	5.2.02.04.01.0001.	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1.3.02.04.01.0001.	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman		
503	5.2.02.04.01.0002.	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1.3.02.04.01.0002.	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak		
504	5.2.02.04.01.0005.	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	1.3.02.08.01.0041.	Alat Laboratorium Pertanian		
505	5.2.02.04.01.0010.	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	1.3.02.04.01.0010.	Alat Pengolahan Lainnya		
506	5.2.02.05.01.0002.	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1.3.02.05.01.0002.	Mesin Hitung/Mesin Jumlah		
507	5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.3.02.05.01.0004.	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor		
508	5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.3.02.05.01.0005.	Alat Kantor Lainnya		
509	5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	1.3.02.05.02.0001.	Mebel		
510	5.2.02.05.02.0002.	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	1.3.02.05.02.0002.	Alat Pengukur Waktu		
511	5.2.02.05.02.0003.	Belanja Modal Alat Pembersih	1.3.02.05.02.0003.	Alat Pembersih		
512	5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	1.3.02.05.02.0004.	Alat Pendingin		
513	5.2.02.05.02.0005.	Belanja Modal Alat Dapur	1.3.02.05.02.0005.	Alat Dapur		
514	5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.3.02.05.02.0006.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		
515	5.2.02.05.02.0007.	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.3.02.05.02.0007.	Alat Pemadam Kebakaran		
516	5.2.02.05.03.0001.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	1.3.02.05.03.0001.	Meja Kerja Pejabat		
517	5.2.02.05.03.0002.	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	1.3.02.05.03.0002.	Meja Rapat Pejabat		
518	5.2.02.05.03.0003.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	1.3.02.05.03.0003.	Kursi Kerja Pejabat		
519	5.2.02.05.03.0004.	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	1.3.02.05.03.0004.	Kursi Rapat Pejabat		
520	5.2.02.05.03.0006.	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	1.3.02.05.03.0006.	Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat		
521	5.2.02.05.03.0007.	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	1.3.02.05.03.0007.	Lemari dan Arsip Pejabat		
522	5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1.3.02.06.01.0001.	Peralatan Studio Audio		
523	5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.3.02.06.01.0002.	Peralatan Studio Video dan Film		
524	5.2.02.06.01.0003.	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	1.3.02.06.01.0003.	Peralatan Studio Gambar		
525	5.2.02.06.01.0004.	Belanja Modal Peralatan Cetak	1.3.02.06.01.0004.	Peralatan Cetak		
526	5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	1.3.02.06.01.0006.	Alat Studio Lainnya		
527	5.2.02.06.02.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	1.3.02.06.02.0001.	Alat Komunikasi Telephone		
528	5.2.02.06.02.0003.	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	1.3.02.06.02.0003.	Alat Komunikasi Radio HF/FM		
529	5.2.02.06.02.0010.	Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit	1.3.02.06.02.0010.	Alat Komunikasi Satelit		
530	5.2.02.06.02.0011.	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	1.3.02.06.02.0011.	Alat Komunikasi Lainnya		
531	5.2.02.06.03.0024.	Belanja Modal Peralatan Antena Penerima VHF	1.3.02.06.03.0024.	Peralatan Antena Penerima VHF		
532	5.2.02.06.03.0047.	Belanja Modal Sumber Tenaga	1.3.02.06.03.0047.	Sumber Tenaga		

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
533	5.2.02.07.01.0001.	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.3.02.07.01.0001.	Alat Kedokteran Umum		
534	5.2.02.07.01.0002.	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	1.3.02.07.01.0002.	Alat Kedokteran Gigi		
535	5.2.02.07.01.0005.	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.3.02.07.01.0005.	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan		
536	5.2.02.07.01.0011.	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	1.3.02.07.01.0011.	Alat Kedokteran Poliklinik		
537	5.2.02.07.01.0017.	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	1.3.02.07.01.0017.	Alat Kedokteran Transfusi Darah		
538	5.2.02.07.01.0021.	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	1.3.02.07.01.0021.	Alat Kedokteran Gawat Darurat		
539	5.2.02.07.01.0024.	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	1.3.02.07.01.0024.	Alat Kedokteran ICU		
540	5.2.02.07.01.0029.	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	1.3.02.07.01.0029.	Alat Kedokteran Lainnya		
541	5.2.02.07.02.0005.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.3.02.07.02.0005.	Alat Kesehatan Umum Lainnya		
542	5.2.02.08.01.0002.	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	1.3.02.08.01.0002.	Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan		
543	5.2.02.08.01.0007.	Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	1.3.02.08.01.0007.	Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia		
544	5.2.02.08.01.0011.	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	1.3.02.08.01.0011.	Alat Laboratorium Umum		
545	5.2.02.08.01.0017.	Belanja Modal Alat Laboratorium Film	1.3.02.08.01.0017.	Alat Laboratorium Film		
546	5.2.02.08.01.0019.	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	1.3.02.08.01.0019.	Alat Laboratorium Farmasi		
547	5.2.02.08.01.0020.	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	1.3.02.08.01.0020.	Alat Laboratorium Fisika		
548	5.2.02.08.01.0033.	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	1.3.02.08.01.0033.	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas		
549	5.2.02.08.01.0034.	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	1.3.02.08.01.0034.	Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil		
550	5.2.02.08.01.0056.	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	1.3.02.08.01.0056.	Alat Laboratorium Lain		
551	5.2.02.08.01.0064.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	1.3.02.08.01.0064.	Unit Alat Laboratorium Lainnya		
552	5.2.02.08.02.0003.	Belanja Modal General Laboratory Tool	1.3.02.08.02.0003.	General Laboratory Tool		
553	5.2.02.08.02.0005.	Belanja Modal Laboratory Safety Equipment	1.3.02.08.02.0005.	Laboratory Safety Equipment		
554	5.2.02.08.03.0002.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika	1.3.02.08.03.0002.	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika		
555	5.2.02.08.03.0003.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	1.3.02.08.03.0003.	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar		
556	5.2.02.08.03.0004.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	1.3.02.08.03.0004.	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan		
557	5.2.02.08.03.0006.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	1.3.02.08.03.0006.	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Atas		
558	5.2.02.08.03.0009.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	1.3.02.08.03.0009.	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan		
559	5.2.02.08.03.0010.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	1.3.02.08.03.0010.	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian		

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
560	5.2.02.08.03.0015.	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	1.3.02.08.03.0015.	Alat Peraga PAUD/TK		
561	5.2.02.08.03.0016.	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	1.3.02.08.03.0016.	Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya		
562	5.2.02.08.08.0006.	Belanja Modal Peralatan Umum	1.3.02.08.08.0006.	Peralatan Umum		
563	5.2.02.08.09.0005.	Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	1.3.02.08.09.0005.	Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu		
564	5.2.02.10.01.0001.	Belanja Modal Komputer Jaringan	1.3.02.10.01.0001.	Komputer Jaringan		
565	5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	1.3.02.10.01.0002.	Personal Computer		
566	5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.3.02.10.01.0003.	Komputer Unit Lainnya		
567	5.2.02.10.02.0001.	Belanja Modal Peralatan Mainframe	1.3.02.10.02.0001.	Peralatan Mainframe		
568	5.2.02.10.02.0002.	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	1.3.02.10.02.0002.	Peralatan Mini Computer		
569	5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.3.02.10.02.0003.	Peralatan Personal Computer		
570	5.2.02.10.02.0004.	Belanja Modal Peralatan Jaringan	1.3.02.10.02.0004.	Peralatan Jaringan		
571	5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.3.02.10.02.0005.	Peralatan Komputer Lainnya		
572	5.2.02.11.02.0002.	Belanja Modal Elektronik/Electric	1.3.02.11.02.0002.	Elektronik/Electric		
573	5.2.02.15.02.0001.	Belanja Modal Baju Pengaman	1.3.02.15.02.0001.	Baju Pengaman		
574	5.2.02.18.01.0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.3.02.18.01.0003.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		
575	5.2.02.18.03.0001.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	1.3.02.18.03.0001.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut		
576	5.2.02.18.03.0002.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya	1.3.02.18.03.0002.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya		
577	5.2.02.19.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Permainan	1.3.02.19.01.0002.	Peralatan Permainan		
578	5.2.02.19.01.0003.	Belanja Modal Peralatan Senam	1.3.02.19.01.0003.	Peralatan Senam		
579	5.2.02.19.01.0006.	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	1.3.02.19.01.0006.	Peralatan Olahraga Lainnya		
580	5.2.02.88.88.8888.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.3.02.08.03.0001.	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia		
581	5.2.02.99.99.9999.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.3.02.07.01.0001.	Alat Kedokteran Umum		
582	5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.3.03.01.01.0001.	Bangunan Gedung Kantor		
583	5.2.03.01.01.0004.	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	1.3.03.01.01.0004.	Bangunan Gedung Instalasi		
584	5.2.03.01.01.0005.	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	1.3.03.01.01.0005.	Bangunan Gedung Laboratorium		
585	5.2.03.01.01.0006.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	1.3.03.01.01.0006.	Bangunan Kesehatan		
586	5.2.03.01.01.0008.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.3.03.01.01.0008.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah		
587	5.2.03.01.01.0009.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.3.03.01.01.0009.	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		
588	5.2.03.01.01.0010.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.3.03.01.01.0010.	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan		

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
589	5.2.03.01.01.0011.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.3.03.01.01.0011.	Bangunan Gedung Tempat Olahraga		
590	5.2.03.01.01.0016.	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	1.3.03.01.01.0016.	Bangunan Gedung Perpustakaan		
591	5.2.03.01.01.0018.	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1.3.03.01.01.0018.	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara		
592	5.2.03.01.01.0030.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.03.01.01.0030.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		
593	5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.3.03.01.01.0032.	Bangunan Fasilitas Umum		
594	5.2.03.01.01.0036.	Belanja Modal Taman	1.3.03.01.01.0036.	Taman		
595	5.2.03.01.01.0037.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.03.01.01.0037.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		
596	5.2.03.01.02.0002.	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	1.3.03.01.02.0002.	Rumah Negara Golongan II		
597	5.2.03.01.02.0003.	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	1.3.03.01.02.0003.	Rumah Negara Golongan III		
598	5.2.03.01.02.0013.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1.3.03.01.02.0013.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya		
599	5.2.03.04.01.0004.	Belanja Modal Pagar	1.3.03.04.01.0004.	Pagar		
600	5.2.03.04.01.0005.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	1.3.03.04.01.0005.	Tugu/Tanda Batas Lainnya		
601	5.2.04.01.01.0003.	Belanja Modal Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.	Jalan Kabupaten		
602	5.2.04.01.01.0010.	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.3.04.01.01.0010.	Jalan Lainnya		
603	5.2.04.01.02.0013.	Belanja Modal Jembatan Lainnya	1.3.04.01.02.0013.	Jembatan Lainnya		
604	5.2.04.02.01.0004.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	1.3.04.02.01.0004.	Bangunan Pembuang Irigasi		
605	5.2.04.02.01.0005.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	1.3.04.02.01.0005.	Bangunan Pengaman Irigasi		
606	5.2.04.02.01.0006.	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	1.3.04.02.01.0006.	Bangunan Pelengkap Irigasi		
607	5.2.04.02.01.0008.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.3.04.02.01.0008.	Bangunan Air Irigasi Lainnya		
608	5.2.04.02.02.0004.	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	1.3.04.02.02.0004.	Saluran Pembuang Pasang Surut		
609	5.2.04.02.04.0001.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.3.04.02.04.0001.	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam		
610	5.2.04.02.04.0005.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	1.3.04.02.04.0005.	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai		
611	5.2.04.02.04.0007.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	1.3.04.02.04.0007.	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya		
612	5.2.04.02.05.0004.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	1.3.04.02.05.0004.	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air		
613	5.2.04.02.06.0006.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.3.04.02.06.0006.	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya		
614	5.2.04.02.07.0003.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	1.3.04.02.07.0003.	Bangunan Pembuang Air Kotor		
615	5.2.04.02.07.0004.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	1.3.04.02.07.0004.	Bangunan Pengaman Air Kotor		
616	5.2.04.03.01.0005.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.3.04.03.01.0005.	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya		

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
617	5.2.04.03.03.0002.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	1.3.04.03.03.0002.	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik		
618	5.2.04.03.03.0003.	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	1.3.04.03.03.0003.	Bangunan Penampung Sampah		
619	5.2.04.03.03.0004.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	1.3.04.03.03.0004.	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya		
620	5.2.04.03.04.0004.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	1.3.04.03.04.0004.	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya		
621	5.2.04.03.05.0012.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	1.3.04.03.05.0012.	Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya		
622	5.2.04.03.09.0004.	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	1.3.04.03.09.0004.	Instalasi Pengaman Lainnya		
623	5.2.04.04.01.0005.	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	1.3.04.04.01.0005.	Jaringan Air Minum Lainnya		
624	5.2.04.04.02.0003.	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.3.04.04.02.0003.	Jaringan Listrik Lainnya		
625	5.2.05.01.01.0001.	Belanja Modal Buku Umum	1.3.05.01.01.0001.	Buku Umum		
626	5.2.05.01.01.0003.	Belanja Modal Buku Agama	1.3.05.01.01.0003.	Buku Agama		
627	5.2.05.01.01.0004.	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	1.3.05.01.01.0004.	Buku Ilmu Sosial		
628	5.2.05.01.01.0005.	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	1.3.05.01.01.0005.	Buku Ilmu Bahasa		
629	5.2.05.01.01.0006.	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	1.3.05.01.01.0006.	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam		
630	5.2.05.01.01.0007.	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	1.3.05.01.01.0007.	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis		
631	5.2.05.01.01.0008.	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	1.3.05.01.01.0008.	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga		
632	5.2.05.01.01.0009.	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	1.3.05.01.01.0009.	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah		
633	5.2.05.01.01.0012.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.3.05.01.01.0012.	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya		
634	5.2.05.01.02.0001.	Belanja Modal Audio Visual	1.3.05.01.02.0001.	Audio Visual		
635	5.2.05.02.01.0001.	Belanja Modal Alat Musik	1.3.05.02.01.0001.	Alat Musik		
636	5.2.05.02.01.0003.	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	1.3.05.02.01.0003.	Alat Peraga Kesenian		
637	5.2.05.04.01.0001.	Belanja Modal Ikan Budidaya	1.3.05.04.01.0001.	Ikan Budidaya		
638	5.2.05.08.01.0005.	Belanja Modal Software	1.5.03.01.01.0005.	Software		
639	5.2.05.08.01.0006.	Belanja Modal Kajian	1.5.03.01.01.0006.	Kajian		
640	5.2.05.88.88.8888.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.3.05.01.01.0005.	Buku Ilmu Bahasa		
641	5.3.01.01.01.0001.	Belanja Tidak Terduga			8.4.01.01.01.0001 .	Beban Tidak Terduga
642	5.4.01.01.03.0001.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa			8.2.01.01.03.0001 .	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
643	5.4.01.02.01.0001.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa			8.2.01.02.01.0001 .	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
644	5.4.02.05.01.0001.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa			8.2.02.05.01.0001	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
645	5.4.02.05.02.0001.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa			8.2.02.05.02.0001	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
646	6.2.02.02.01.0001.	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD			3.1.02.04.01.0001	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan

7.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

7.5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan realisasi anggaran merupakan perbandingan antara anggaran dengan realisasi pada satu tahun anggaran, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan.

7.5.1.1 Pendapatan-LRA

Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Sisa Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	989.275.275.868,02	968.639.262.049,31

Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2022. Anggaran pendapatan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.082.256.199.243,26 dengan realisasi sebesar Rp989.275.275.868,02 atau sebesar 91,41% dari anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2021, realisasi pendapatan pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 20.636.013.818,17 atau sebesar 2,13%.

Sementara rincian anggaran dan realisasi pendapatan Tahun 2022 dan 2021 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Asli Daerah	99.493.173.919,26	66.678.873.457,02	67,02	42.613.221.800,31	24.065.651.656,71	56,47
2	Pendapatan Transfer	982.763.025.324,00	922.596.402.411,00	93,88	906.392.990.843,00	16.203.411.568,00	1,79
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	19.633.049.406,00	(19.633.049.406,00)	(100,00)
Jumlah		1.082.256.199.243,26	989.275.275.868,02	91,41	968.639.262.049,31	20.636.013.818,71	2,13

7.5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pendapatan asli daerah Tahun 2022 adalah sebesar Rp66.678.873.457,02, Realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp 24.065.651.656,71 atau (56,47)%. Berikut ini disajikan rincian anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 7.5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	36.496.435.316,26	12.561.988.365,52	34,42	13.107.684.837,31	(545.696.471,79)	(4,16)
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	666.000.000,00	963.777.940,00	144,71	738.367.467,00	225.410.473,00	30,53
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	7.043.060.400,00	7.043.060.400,00	100,00	8.585.266.888,00	(1.542.206.488,00)	(17,96)
4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	55.287.678.203,00	46.110.046.751,50	83,40	20.181.902.608,00	25.928.144.143,50	128,47
Jumlah		99.493.173.919,26	66.678.873.457,02	67,02	42.613.221.800,31	24.065.651.656,71	56,47

7.5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Natuna pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp12.561.988.365,52 atau sebesar 34,42% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Hotel-LRA	117.000.000,00	174.549.315,00	149,19	136.675.120,00	37.874.195,00	27,71
2	Pajak Restoran-LRA	1.800.000.000,00	2.240.043.747,00	124,45	2.244.890.362,00	(4.846.615,00)	(0,22)
3	Pajak Hiburan-LRA	17.100.000,00	8.943.600,00	52,30	11.462.800,00	(2.519.200,00)	(21,98)
4	Pajak Reklame-LRA	126.450.000,00	110.915.800,00	87,72	82.488.000,00	28.427.800,00	34,46
5	Pajak Penerangan Jalan-LRA	7.049.000.000,00	7.607.124.621,00	107,92	7.333.290.770,00	273.833.851,00	3,73
6	Pajak Parkir-LRA	6.750.000,00	5.251.500,00	77,80	6.042.000,00	(790.500,00)	(13,08)
7	Pajak Air Tanah-LRA	2.700.000,00	3.800.000,00	140,74	2.900.000,00	900.000,00	31,03
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LRA	25.307.435.316,26	279.702.646,00	1,11	453.821.907,50	(174.119.261,50)	(38,37)
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) -LRA	1.170.000.000,00	1.383.397.684,00	118,24	1.286.415.715,00	96.981.969,00	7,54
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) -LRA	900.000.000,00	748.259.452,52	83,14	1.549.698.162,81	(801.438.710,29)	(51,72)
	Jumlah	36.496.435.316,26	12.561.988.365,52	34,42	13.107.684.837,31	(545.696.471,79)	(4,16)

Pendapatan pajak di Pemerintah Kabupaten Natuna dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Berdasarkan pengelolaan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir dipungut dengan sistem *self assessment* yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang, dimana pajak-pajak tersebut pada umumnya terealisasi lebih besar dari target yang ditetapkan. Sebagai gambaran pendapatan pajak hotel yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebesar Rp174.549.315,00 atau sebesar 149,2% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021, realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp(545.696.471,79) atau sebesar (4,16)%. Diantara pajak yang mengalami penurunan realisasi dari tahun sebelumnya adalah Pajak Restoran mengalami penurunan sebesar Rp(4.846.615,00) atau sebesar (0,22)%. Pajak Hiburan mengalami penurunan sebesar Rp(2.519.200,00) atau sebesar (21,98)% dari realisasi pendapatan Tahun 2021. Pajak Parkir mengalami penurunan sebesar Rp(790.500,00) atau sebesar (13,08)%. Sedangkan Pajak yang mengalami peningkatan diantaranya Pajak Penerangan Jalan mengalami kenaikan sebesar Rp273.833.851,00 atau sebesar 3,37%. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) mengalami kenaikan sebesar Rp96.981.969,00 atau sebesar 7,54 dari Tahun 2021.

Sedangkan pajak reklame dan pajak air tanah dipungut dengan sistem *official assesment*, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun pendapatan Pajak Reklame yang dipungut Pemerintah Kabupaten Natuna pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp110.915.800,00 atau sebesar 8,72% dari anggaran yang telah ditetapkan. Sementara pendapatan Pajak Air Tanah pada Tahun 2022 yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebesar

Rp3.800.000,00 mengalami kenaikan sebesar 140,7% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.383.397.684,00, Sedangkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terealisasi sebesar Rp748.259.452,52 atau sebesar 83,14%, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp279.702.646,00 atau sebesar 1,11%.

7.5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Natuna pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp963.777.940,00 atau sebesar 144,71% dari anggaran yang telah ditetapkan. Dibanding dengan pendapatan retribusi Tahun 2021, pendapatan Retribusi 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 225,410,473.00 atau sebesar 30,53%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan / Penurunan	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA	400.000.000,00	718.864.500,00	179,72	491.383.400,00	227.481.100,00	46,29
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LRA	100.000.000,00	104.794.500,00	104,79	114.223.500,00	(9.429.000,00)	(8,25)
3	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LRA	18.000.000,00	15.150.000,00	84,17	18.250.000,00	(3.100.000,00)	(16,99)
4	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LRA	20.000.000,00	29.578.000,00	147,89	34.034.000,00	(4.456.000,00)	(13,09)
5	Retribusi Penyeberangan Air – LRA	65.000.000,00	49.800.000,00	76,62	63.600.000,00	(13.800.000,00)	(21,70)
6	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LRA	63.000.000,00	45.590.940,00	72,37	16.876.567,00	28.714.373,00	170,14
Jumlah		666.000.000,00	963.777.940,00	144,71	738.367.467,00	225.410.473,00	30,53

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Anggaran pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp400.000.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp718.864.500,00 atau sebesar 179,72% dari anggaran yang ditargetkan. Retribusi Pelayanan Kesehatan mengalami peningkatan sebesar Rp227.481.100,00 dibanding Tahun 2021 atau sebesar 46,29%. Retribusi pelayanan kesehatan didapatkan dari pelayanan kesehatan di Puskesmas dan dicatat pada Dinas Kesehatan.

b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Anggaran pendapatan Retribusi Persampahan/Kebersihan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp100.000.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp104.794.500,00 atau sebesar 104,79% dari anggaran yang ditargetkan. Retribusi Persampahan/Kebersihan mengalami penurunan sebesar Rp(9.429.000,00), dibanding Tahun 2021 atau sebesar (8,25)%. Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

c) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Anggaran pendapatan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp18.000.000,00. sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp15.150.000,00 atau sebesar 84,17% dari anggaran. Realisasi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dibanding Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp(3.100.000,00) atau sebesar (16,99)%. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus secara teknis dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

d) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Anggaran pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp20.000.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp29.578.000,00 atau sebesar 147,89% dari anggaran yang ditargetkan. Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dibanding Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp(4.456.000,00) atau sebesar (13,09)%. Pendapatan pelayanan tera-tera ulang ini secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro.

e) Retribusi Penyeberangan Air

Anggaran pendapatan Retribusi Penyeberangan Air pada Tahun 2021 adalah sebesar 65.000.000,00. sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp49.800.000,00 atau sebesar 76,62% dari anggaran yang ditargetkan. Realisasi Retribusi Penyeberangan Air dibanding Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp(13.800.000,00) atau sebesar (21,70)%. Pendapatan retribusi penyeberangan air dikelola oleh Dinas perhubungan.

f) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Anggaran pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp63.000.000,00, sedangkan realisasi sebesar Rp45.590.940,00 atau sebesar 72,37% dari anggaran yang ditargetkan. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dibanding Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp28.714.373,00 atau sebesar 170,14%. Retribusi izin mendirikan bangunan dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sebagian pendapatan retribusi daerah pada Tahun 2022 terealisasi lebih besar dari anggaran yang ditetapkan, dan sebagiannya lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan.

7.5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Natuna pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp7.043.060.400,00 atau sebesar 100% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Rincian anggaran dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.5 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan / Penurunan	%
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LRA	7.043.060.400,00	7.043.060.400,00	100,00	8.585.266.888,00	(1.542.206.488,00)	(17,96)
Jumlah		7.043.060.400,00	7.043.060.400,00	100,00	8.585.266.888,00	(1.542.206.488,00)	(17,96)

7.5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Natuna pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp46.110.046.751,50 atau sebesar 83,40% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dibanding Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp25.928.144.143,50 atau sebesar 128,47%. Rincian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.6 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan / Penurunan	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LRA	629.946.000,00	517.743.762,00	82,19	217.032.889,00	300.710.873,00	138,56
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LRA	0,00	0,00	0,00	78.600.000,00	(78.600.000,00)	(100,00)
3	Jasa Giro - LRA	4.603.227.800,00	563.696.705,63	12,25	400.309.172,44	163.387.533,19	40,82
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LRA	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	(2.100.000,00)	(100,00)
5	Pendapatan Bunga	2.250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LRA	3.275.000.003,00	2.161.140.529,64	65,99	544.983.183,53	1.616.157.346,11	296,55
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	540.000.000,00	219.504.780,91	40,65	574.695.926,28	(355.191.145,37)	(61,81)
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah - LRA	1.010.480.000,00	62.597.813,25	6,19	148.803.213,66	(86.205.400,41)	(57,93)
9	Pendapatan dari Pengembalian - LRA	865.000.000,00	266.255.541,93	30,78	1.127.403.352,00	(861.147.810,07)	(76,38)
10	Pendapatan BLUD - LRA	34.610.820.000,00	36.344.883.376,14	105,01	13.047.658.631,09	23.297.224.745,05	178,55
11	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) - LRA	6.903.204.400,00	5.941.494.107,00	86,07	4.036.762.799,00	1.904.731.308,00	47,18
12	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LRA	600.000.000,00	32.730.135,00	5,46	3.553.441,00	29.176.694,00	821,08
Jumlah		55.287.678.203,00	46.110.046.751,50	83,40	20.181.902.608,00	25.928.144.143,50	128,47

a) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp629.946.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp517.743.762,00 atau sebesar 82,19% dari anggaran yang ditargetkan. Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dibanding Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp300.710.873,00 atau sebesar 138,56%. Kenaikan Pendapatan hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan disebabkan karena adanya penjualan peralatan dan mesin berupa kendaraan roda empat yang dilaksanakan oleh KPKNL Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

b) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan pada Tahun 2022 tidak dianggarkan, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00% dari anggaran yang ditargetkan. Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dibanding Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp78.600.000,00 atau sebesar 100,00%.

c) Penerimaan Jasa Giro

Anggaran Penerimaan Jasa Giro pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp4.603.227.800,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp563.696.705,63 atau sebesar 12,25% dari anggaran yang ditargetkan. Dibanding dengan Tahun 2021, Realisasi Penerimaan Jasa Giro mengalami kenaikan sebesar Rp163.387.533,19 atau sebesar 40,82% Adapun rincian penerimaan jasa giro sebagai berikut:

Tabel 7.5.7 Penerimaan Jasa Giro*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Jasa Giro pada Kas Daerah – LRA	4.543.227.800,00	534.542.488,00	11,77	335.002.474,49	199.540.013,51	59,56
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara – LRA	50.000.000,00	27.755.995,00	55,51	34.412.042,95	(6.656.047,95)	(19,34)
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS – LRA	0,00	177.358,63	0,00	0,00	177.358,63	0,00
4	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP – LRA	10.000.000,00	1.220.864,00	12,21	30.894.655,00	(29.673.791,00)	(96,05)
Jumlah		4.603.227.800,00	563.696.705,63	12,25	400.309.172,44	163.387.533,19	40,82

d) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Anggaran Hasil Pengelolaan Dana Bergulir pada Tahun 2022 tidak dianggarkan. sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00% dari anggaran yang telah ditetapkan. Dibanding dengan Tahun 2021. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir mengalami penurunan sebesar Rp2.100.000.00 atau sebesar 100,00%.

e) Pendapatan Bunga

Anggaran Pendapatan Bunga pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.250.000.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp0,00, Jika dibandingkan dengan Tahun 2021, Pendapatan Bunga mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau sebesar (0,00)%.

f) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp3.275.000.003,00. sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp2.161.140.529,64 atau sebesar 65,99% dari anggaran yang ditargetkan. Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dibanding Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.616.157.346,11 atau sebesar 296,55%. Adapun rincian penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagai berikut:

Tabel 7.5.8 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah*(dalam Rupiah)*

No	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan / Penurunan	%
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara – LRA	100.000.000,00	147.691.250,00	147,69	300.000,00	147.391.250,00	49.130,42
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - LRA	3.175.000.003,00	2.013.449.279,64	63,42	544.683.183,53	1.468.766.096,11	269,66
Jumlah		3.275.000.003,00	2.161.140.529,64	65,99	544.983.183,53	1.616.157.346,11	296,55

g) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp540.000.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp219.504.780,91 atau sebesar 40,65% dari anggaran yang ditetapkan. Dibanding Tahun 2021 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan mengalami penurunan sebesar Rp(355.191.145,37) atau sebesar (61,81)%.

h) Pendapatan Denda Pajak

Anggaran Pendapatan Denda Pajak pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.010.480.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp62.597.813,25 atau sebesar 6,19% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan Tahun 2021, realisasi Pendapatan Denda Pajak mengalami penurunan sebesar Rp (86.205.400,41) atau sebesar 57,93 %. Rincian pendapatan denda pajak sebagai berikut:

Tabel 7.5.9 Pendapatan Denda Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LRA	100.000,00	184.587,00	184,59	3.203.747,00	(3.019.160,00)	(94,24)
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran – LRA	300.000,00	4.062.132,00	1.354,04	2.193.144,75	1.868.987,25	85,22
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LRA	60.000,00	44.896,00	74,83	175.212,00	(130.316,00)	(74,38)
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame – LRA	0,00	689.420,00	0,00	3.126.700,00	(2.437.280,00)	(77,95)
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LRA	20.000,00	69.000,00	345,00	21.000,00	48.000,00	228,57
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
7	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	18.686,00	0,00	0,00	18.686,00	0,00
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) – LRA	1.000.000.000,00	56.805.744,00	5,68	109.045.148,00	(52.239.404,00)	(47,91)
9	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	10.000.000,00	671.348,25	6,71	31.038.261,91	(30.366.913,66)	(97,84)
Jumlah		1.010.480.000,00	62.597.813,25	6,19	148.803.213,66	(86.205.400,41)	(57,93)

1) Pendapatan Denda Pajak Hotel

Anggaran Pendapatan Denda Pajak Hotel pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp100.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp184.587,00 atau sebesar 184,59% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan Tahun 2021, realisasi Pendapatan Denda Pajak Hotel mengalami penurunan sebesar Rp(3.019.160,00) atau sebesar (94,24)%.

2) Pendapatan Denda Pajak Restoran

Anggaran Pendapatan Denda Pajak Restoran pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp300.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp4.062.132,00 atau sebesar 1.354,04% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan Tahun 2021, realisasi Pendapatan Denda Pajak Restoran mengalami kenaikan sebesar Rp1.868.987,25 atau sebesar 85,22%.

3) Pendapatan Denda Pajak Hiburan

Anggaran Pendapatan Denda Pajak Hiburan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp60.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp44.896,00. Dibandingkan dengan Tahun 2021, realisasi pendapatan denda pajak hiburan mengalami penurunan sebesar Rp(130.316,00) atau sebesar (74,38)%. Rincian Pendapatan Denda Pajak Hiburan sebagai berikut:

Tabel 7.5.10 Pendapatan Denda Pajak Hiburan*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya – LRA	50.000,00	41.596,00	83,19	152.212,00	(110.616,00)	(72,67)
2	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) - LRA	10.000,00	3.300,00	33,00	23.000,00	(19.700,00)	(85,65)
Jumlah		60.000,00	44.896,00	74,83	175.212,00	(130.316,00)	(74,38)

4) Pendapatan Denda Pajak Reklame

Anggaran Pendapatan Denda Pajak Reklame pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp689.420,00 atau sebesar 0,00% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan Tahun 2021, realisasi Pendapatan Denda Pajak Reklame mengalami penurunan sebesar Rp(2.437.280,00) atau sebesar (77,95)%.

5) Pendapatan Denda Pajak Parkir

Anggaran Pendapatan Denda Pajak Parkir pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp20.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp69.000,00. Dibandingkan dengan Tahun 2021, realisasi Pendapatan Denda Pajak Parkir mengalami kenaikan sebesar Rp48.000,00 atau sebesar 228,57%.

6) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Air Tanah pada Tahun 2022 tidak di anggarkan, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp52.000,00. Dibandingkan dengan Tahun 2021, realisasi Pendapatan Denda Pajak Air Tanah mengalami kenaikan sebesar Rp 52.000,00 atau sebesar 0,00%.

7) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Tahun 2022 tidak di anggarkan, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp18.686,000. Dibandingkan dengan Tahun 2021, realisasi Pendapatan Denda Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami kenaikan sebesar Rp18.686,00 atau sebesar 0,00%.

8) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Anggaran Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.000.000.000,00. sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp56.805.744,00 atau sebesar 5,68% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan Tahun 2021, realisasi Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mengalami penurunan sebesar Rp(52.239.404,00) atau sebesar 47,91%.

9) Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Anggaran Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp10.000.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp671.348,25 atau sebesar 6,71% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan Tahun 2021, realisasi Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mengalami penurunan sebesar Rp(30.366.913,66) atau sebesar (97,84)%. Rincian Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai berikut:

Tabel 7.5.11 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Denda BPHTB- Pemindahan Hak - LRA	9.000.000,00	262.500,00	2,92	751.398,63	(488.898,63)	(65,07)
2	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru - LRA	1.000.000,00	408.848,25	40,88	30.286.863,28	(29.878.015,03)	(98,65)
Jumlah		10.000.000,00	671.348,25	6,71	31.038.261,91	(30.366.913,66)	(97,84)

i) Pendapatan dari Pengembalian

Anggaran Pendapatan dari Pengembalian pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp865.000.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp266.255.541,93 atau sebesar 30,78% dari anggaran yang telah ditetapkan. Dibanding dengan Tahun 2021. Pendapatan dari Pengembalian mengalami penurunan sebesar Rp (861.147.810,07) atau sebesar (76,38)%. Adapun rincian Pendapatan dari Pengembalian sebagai berikut:

Tabel 7.5.12 Pendapatan dari Pengembalian

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LRA	800.000.000,00	211.673.430,93	26,46	72.326.328,00	139.347.102,93	192,66
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa - LRA	50.000.000,00	48.769.911,00	97,54	1.054.914.224,00	(1.006.144.313,00)	(95,38)
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Tetap - LRA	0,00	0,00	0,00	162.800,00	(162.800,00)	(100,00)
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - LRA	5.000.000,00	1.990.000,00	39,80	0,00	1.990.000,00	100,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10.000.000,00	3.822.200,00	38,22	0,00	3.822.200,00	100,00
Jumlah		865.000.000,00	266.255.541,93	30,78	1.127.403.352,00	(861.147.810,07)	(76,38)

j) Pendapatan BLUD

Anggaran Pendapatan BLUD pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp34.610.820.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp36.344.883.376,14 atau sebesar 105,01% dari anggaran yang telah ditetapkan. Dibanding Tahun 2021 Pendapatan BLUD mengalami kenaikan sebesar Rp23.297.224.745,05 atau sebesar 178,55%. Pendapatan BLUD merupakan pendapatan yang berasal dari jasa layanan umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna yang menjalankan pengelolaan keuangan BLUD.

k) Pendapatan Dana Kapitasi JKN

Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi JKN Tahun 2022 adalah sebesar Rp6.903.204.400,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp5.941.494.107,00 atau 86,07% dari anggaran. Dibanding dengan Tahun 2021, Pendapatan Dana Kapitasi JKN mengalami kenaikan sebesar Rp1.904.731.308,00 atau 47,18%. Pendapatan Dana

Kapitasi JKN merupakan pendapatan dana kapitasi yang berasal dari BPJS Kesehatan untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) yang belum menerapkan pengelolaan keuangan BLUD.

l) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Anggaran pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir Tahun 2022 sebesar Rp600.000.00,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp32.730.135,00. Dibanding dengan Tahun 2021, pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir mengalami kenaikan sebesar Rp29.176.694,00 atau 821,08%.

7.5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022 adalah sebesar Rp922.596.402.411,00 atau sebesar 93,88% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp982.763.025.324,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021, Pendapatan Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp16.203.411.568,00 atau sebesar 1,79%. Kenaikan Pendapatan Transfer terjadi karena adanya tunda salur tahun anggaran 2021 yang direalisasikan penyalurannya di tahun 2022. Rincian Pendapatan Transfer sebagai berikut:

Tabel 7.5.13 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan / Penurunan	%
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA	861.445.454.190,00	813.001.270.286,00	94,38	737.997.664.393,00	75.003.605.893,00	10,16
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	54.851.547.000,00	54.851.547.000,00	100,00	107.610.275.000,00	(52.758.728.000,00)	(49,03)
3	Transfer Pemerintah Provinsi - LRA	66.466.024.134,00	54.743.585.125,00	82,36	60.785.051.450,00	(6.041.466.325,00)	(9,94)
Jumlah		982.763.025.324,00	922.596.402.411,00	93,88	906.392.990.843,00	16.203.411.568,00	1,79

7.5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah-Pusat Dana Perimbangan Tahun 2022 adalah sebesar Rp813.001.270.286,00 atau sebesar 94,38% dari yang dianggarkan. Dibanding Tahun 2021, Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp75.003.605.893,00 atau sebesar 10,16%. Kenaikan pendapatan transfer terjadi karena adanya tunda salur tahun anggaran 2021 yang direalisasikan penyalurannya di tahun 2022. Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.5.14 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak - LRA	78.822.523.828,00	74.298.556.387,00	94,26	109.006.826.516,00	(34.708.270.129,00)	(31,84)
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) – LRA	264.048.021.362,00	240.346.392.264,00	91,02	131.315.460.570,00	109.030.931.694,00	83,03
3	Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	392.551.408.000,00	390.559.258.000,00	99,49	390.697.487.000,00	(138.229.000,00)	(0,04)
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	126.023.501.000,00	107.797.063.635,00	85,54	106.977.890.307,00	819.173.328,00	0,77
Jumlah		861.445.454.190,00	813.001.270.286,00	94,38	737.997.664.393,00	75.003.605.893,00	10,16

7.5.1.1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak

Anggaran pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 adalah sebesar Rp78,822,523,828.00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp74,298,556,387.00 atau sebesar 94,26% dari anggaran. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.15 Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan / Penurunan	%
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan – LRA	64.788.447.730,00	62.946.704.957,00	97,16	95.998.896.613,00	(33.052.191.656,00)	(34,43)
2	DBH PPh Pasal 21 - LRA	0,00	0,00	0,00	12.358.905.400,00	(12.358.905.400,00)	(100,00)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPON – LRA	14.023.118.362,00	11.342.265.000,00	80,88	627.961.000,00	10.714.304.000,00	1.706,21
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) – LRA	10.957.736,00	9.586.430,00	87,49	21.063.503,00	(11.477.073,00)	(54,49)
Jumlah		78.822.523.828,00	74.298.556.387,00	94,26	109.006.826.516,00	(34.708.270.129,00)	(31,84)

7.5.1.1.2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Anggaran pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) adalah sebesar Rp264.048.021.362,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp240.346.392.264,00 atau sebesar 91,02% dari anggaran. Dibanding dengan Tahun 2021, Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp109.030.931.694,00 atau sebesar 83,03%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.16 Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan / Penurunan	%
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi - LRA	66.398.696.064,00	64.903.826.392,00	97,75	8.158.507.996,00	56.745.318.396,00	695,54
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi - LRA	191.831.769.162,00	169.949.951.587,00	88,59	119.583.794.406,00	50.366.157.181,00	42,12
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent - LRA	0,00	0,00	0,00	329.836.000,00	(329.836.000,00)	(100,00)
4	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty - LRA	3.804.604.136,00	3.479.622.285,00	91,46	1.504.660.050,00	1.974.962.235,00	131,26
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) - LRA	54.641.000,00	54.681.000,00	100,07	64.161.968,00	(9.480.968,00)	(14,78)
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan - LRA	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.674.500.150,00	283.810.850,00	16,95
Jumlah		264.048.021.362,00	240.346.392.264,00	91,02	131.315.460.570,00	109.030.931.694,00	83,03

7.5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Anggaran pendapatan Dana Alokasi Umum Tahun 2022 sebesar Rp392.551.408.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp390.559.258.000,00 atau sebesar 99,49%. Dibanding dengan Tahun 2021, Dana Alokasi Umum mengalami penurunan sebesar Rp (138.229.000,00) atau sebesar (0,04)%, dimana penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun 2021 adalah sebesar Rp390.697.487.000,00.

7.5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Anggaran pendapatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2022 adalah sebesar Rp126.023.501.000,00 sedangkan realisasinya adalah Rp107.797.063.635,00 atau sebesar

85.54% dari anggaran. Dana Alokasi Khusus dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

1. Dana Alokasi Khusus Fisik

Anggaran Dana Alokasi khusus (DAK) Fisik Rp63.369.996.000,00 dengan realisasinya sebesar Rp57.090.150.721,00 atau sebesar 90,09% dari anggaran. Dibanding dengan Tahun 2021, Dana Alokasi Khusus Fisik mengalami penurunan sebesar Rp(15.179.742.907,00) atau sebesar 21,00%. Adapun rincian Dana Alokasi Khusus Fisik adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.17 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan / Penurunan	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.378.240.000,00	3.160.024.074,00	93,54	2.817.729.388,00	342.294.686,00	12,15
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.316.918.000,00	3.854.777.484,00	89,29	1.479.610.016,00	2.375.167.468,00	160,53
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	1.045.047.000,00	763.625.702,00	73,07	0,00	763.625.702,00	100,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	179.000.000,00	(179.000.000,00)	(100,00)
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	9.887.084.000,00	8.846.552.972,00	89,48	15.763.695.553,00	(6.917.142.581,00)	(43,88)
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	2.739.266.080,00	(2.739.266.080,00)	(100,00)
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	4.169.526.000,00	3.564.988.978,00	85,5	3.514.117.343,00	50.871.635,00	1,45
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	736.358.000,00	583.802.556,00	79,28	0,00	583.802.556,00	100,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas	16.892.572.000,00	14.685.729.157,00	86,94	0,00	14.685.729.157,00	100,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	94.159.000,00	94.072.500,00	99,91	1.256.842.270,00	(1.162.769.770,00)	(92,52)
11	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	0,00	1.070.703.000,00	(1.070.703.000,00)	(100,00)
12	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0,00	0,00	0,00	7.438.573.204,00	(7.438.573.204,00)	(100,00)
13	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1.671.138.000,00	1.170.791.504,00	70,06	700.000.000,00	470.791.504,00	67,26
16	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	2.560.000.000,00	2.163.832.346,00	84,52	1.138.326.339,00	1.025.506.007,00	90,09
14	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	0,00	0,00	0,00	2.184.424.000,00	(2.184.424.000,00)	(100,00)
15	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	8.752.489.000,00	8.430.609.354,00	96,32	8.785.509.612,00	(354.900.258,00)	(4,04)
16	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	3.417.549.185,00	(3.417.549.185,00)	(100,00)
17	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	4.245.941.000,00	4.245.200.000,00	99,98	0,00	4.245.200.000,00	100,00
18	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	5.311.242.141,00	(5.311.242.141,00)	(100,00)
19	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.083.429.000,00	5.083.429.000,00	100,00	0,00	5.083.429.000,00	100,00
20	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	7.313.796.000,00	(7.313.796.000,00)	(100,00)

No	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan / Penurunan	%
21	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	537.095.000,00	442.715.094,00	82,43	2.346.971.698,00	(1.904.256.604,00)	(81,14)
22	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	0,00	0,00	0,00	4.812.537.799,00	(4.812.537.799,00)	(100,00)
Jumlah		63.369.996.000,00	57.090.150.721,00	90,09	72.269.893.628,00	(15.179.742.907,00)	(21,00)

2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2022 adalah sebesar Rp62.653.505.000,00 dengan realisasi sebesar Rp50.706.912.914,00 atau sebesar 80,93% dari anggaran. Dibanding dengan Tahun 2021, Dana Alokasi Khusus Non Fisik mengalami kenaikan sebesar Rp15.998.916.235,00 atau sebesar 46,10%. Rincian anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.18 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan / Penurunan	%
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	16.078.630.000,00	14.156.066.940,00	88,04	0,00	14.156.066.940,00	100,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	560.000.000,00	560.000.000,00	100,00	0,00	560.000.000,00	100,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	20.031.809.000,00	18.708.385.360,00	93,39	20.503.877.000,00	(1.795.491.640,00)	(8,76)
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.113.000.000,00	1.016.000.000,00	91,28	1.041.328.000,00	(25.328.000,00)	(2,43)
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.337.965.000,00	1.282.824.400,00	95,88	778.163.900,00	504.660.500,00	64,85
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.497.500.000,00	2.300.299.000,00	92,10	2.074.825.000,00	225.474.000,00	10,87
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan	163.500.000,00	163.500.000,00	100,00	152.311.800,00	11.188.200,00	7,35
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	15.676.162.000,00	10.140.727.429,00	64,69	5.241.424.389,00	4.899.303.040,00	93,47
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	117.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.021.849.000,00	1.180.876.075,00	39,08	1.409.150.100,00	(228.274.025,00)	(16,20)
12	DAK Non Fisik-PK2UKM	404.200.000,00	317.418.680,00	78,53	371.355.132,00	(53.936.452,00)	(14,52)
13	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	1.597.740.358,00	(1.597.740.358,00)	(100,00)
14	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	606.600.000,00	467.528.580,00	77,07	816.839.000,00	(349.310.420,00)	(42,76)
15	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	638.373.000,00	413.286.450,00	64,74	720.982.000,00	(307.695.550,00)	(42,68)
Jumlah		62.653.505.000,00	50.706.912.914,00	80,93	34.707.996.679,00	15.998.916.235,00	46,10

7.5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun 2022 adalah sebesar Rp54,851,547,000.00 atau sebesar 100,00% dari yang dianggarkan. Dibanding Tahun 2021 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp(52.758.728.000,00) atau sebesar 49,03%. Penurunan ini bersumber dari Dana Insentif Daerah yang diperoleh Kabupaten Natuna pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp3.893.265.000,00 dan Dana Desa sebesar Rp50.958.282.000,00, Rincian Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.19 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dana Penyesuaian – LRA	3.893.265.000,00	3.893.265.000,00	100,00	41.587.990.000,00	(37.694.725.000,00)	(90,64)
2	Dana Desa – LRA	50.958.282.000,00	50.958.282.000,00	100,00	66.022.285.000,00	(15.064.003.000,00)	(22,82)
Jumlah		54.851.547.000,00	54.851.547.000,00	100,00	107.610.275.000,00	(52.758.728.000,00)	(49,03)

7.5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2022 adalah sebesar Rp54.743.585.125,00 atau sebesar 82,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp66.466.024.134,00. Dibanding dengan Tahun 2021, Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi mengalami penurunan sebesar Rp(6.041.466.325,00) atau sebesar 9,94%. Rincian Transfer Pemerintah Provinsi merupakan transfer dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.20 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	12.724.797.151,00	10.967.683.161,00	86,19	10.013.530.296,00	954.152.865,00	9,53
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	6.674.309.683,00	6.852.824.208,00	102,67	5.357.791.916,00	1.495.032.292,00	27,90
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	35.052.437.200,00	25.259.290.881,00	72,06	36.589.827.008,00	(11.330.536.127,00)	(30,97)
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan - LRA	50.651.700,00	33.380.992,00	65,90	36.633.045,00	(3.252.053,00)	(8,88)
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LRA	10.675.328.400,00	10.341.905.883,00	96,88	8.787.269.185,00	1.554.636.698,00	17,69
6	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi - LRA	1.288.500.000,00	1.288.500.000,00	100,00	0,00	1.288.500.000,00	100,00
Jumlah		66.466.024.134,00	54.743.585.125,00	82,36	60.785.051.450,00	(6.041.466.325,00)	(9,94)

7.5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022 adalah sebesar Rp0,00 atau sebesar (0,00)% dari yang dianggarkan Rp0,00. Dibanding dengan Tahun 2021, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar Rp(19.633.049.406,00) atau sebesar (100,00)%. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.21 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah Dana BOS - LRA	0,00	0,00	0,00	15.977.462.000,00	(15.977.462.000,00)	(100,00)
2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah - LRA	0,00	0,00	0,00	3.655.587.406,00	(3.655.587.406,00)	(100,00)
Jumlah		0,00	0,00	0,00	19.633.049.406,00	(19.633.049.406,00)	(100,00)

7.5.1.2 Belanja

Belanja	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	910.629.078.863,28	828.595.038.949,40

Realisasi Belanja tahun 2022 sebesar Rp910.629.078.863,28 atau 90,28% dari anggaran Belanja sebesar Rp1.008.629.765.300,00. Dibanding tahun 2021 realisasi Belanja mengalami kenaikan sebesar Rp82.034.039.913,88 atau sebesar 9,90% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.22 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Belanja Operasi	788.680.575.295,55	728.446.072.391,69	92,36	692.062.668.247,74	36.383.404.143,95	5,26
2.	Belanja Modal	216.743.786.900,45	180.851.143.808,59	83,44	124.908.898.038,31	55.942.245.770,28	44,79
3.	Belanja Tak Terduga	3.205.403.104,00	1.331.862.663,00	41,55	11.623.472.663,35	(10.291.610.000,35)	(88,54)
Total		1.008.629.765.300,00	910.629.078.863,28	90,28	828.595.038.949,40	82.034.039.913,88	9,90

7.5.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi tahun 2022 sebesar Rp728.446.072.391,69 atau sebesar 92,36% dari anggaran yang sudah ditetapkan Rp788.680.575.295,55. Dibanding dengan tahun 2021, realisasi Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp36.383.404.143,95 atau sebesar 5,26% Realisasi Belanja Operasi sebagai berikut:

Tabel 7.5.23 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan/Penurunan	%
1.	Belanja Pegawai	392.881.440.981,25	380.605.113.177,00	96,88	395.339.136.561,75	(14.734.023.384,75)	(3,73)
2.	Belanja Barang dan Jasa	357.885.231.566,30	314.912.697.738,35	87,99	277.840.642.734,99	37.072.055.003,36	13,34
3.	Belanja Hibah	31.826.402.328,00	27.753.967.108,00	87,20	8.640.230.595,00	19.113.736.513,00	221,22
4.	Belanja Bantuan Sosial	6.087.500.420,00	5.174.294.368,34	85,00	10.242.658.356,00	(5.068.363.987,66)	(49,48)
Total		788.680.575.295,55	728.446.072.391,69	92,36	692.062.668.247,74	36.383.404.143,95	5,26

Rincian masing-masing jenis Belanja Operasi tersebut diuraikan sebagai berikut:

7.5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp380.605.113.177,00 atau sebesar 96,88% dari anggaran yang sudah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar Rp(14.734.023.384,75), atau sebesar (3,37)%. Rincian Belanja Pegawai sebagai berikut:

Tabel 7.5.24 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan/Penurunan	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	189.252.853.659,55	186.773.568.379,00	98,69	177.403.991.867,00	9.369.576.512,00	5,28
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	155.165.595.071,20	149.810.979.191,00	96,55	164.469.048.894,00	(14.658.069.703,00)	(8,91)
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	40.562.075.393,50	36.318.228.138,00	89,54	42.232.981.639,00	(5.914.753.501,00)	(14,01)
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	6.259.990.000,00	6.204.427.787,00	99,11	8.163.765.424,00	(1.959.337.637,00)	(24,00)
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	829.306.657,00	747.932.682,00	90,19	805.247.519,75	(57.314.837,75)	(7,12)
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	511.620.200,00	510.880.000,00	99,86	699.180.000,00	(188.300.000,00)	(26,93)
7	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	1.346.010.218,00	(1.346.010.218,00)	(100,00)
8	Belanja Pegawai BLUD	300.000.000,00	239.097.000,00	79,7	218.911.000,00	20.186.000,00	9,22
Jumlah		392.881.440.981,25	380.605.113.177,00	96,88	395.339.136.561,75	(14.734.023.384,75)	(3,73)

7.5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 sebesar Rp314.912.697.738,35 atau 87,99% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp357.885.231.566,30. Dibanding dengan tahun 2021. Belanja Barang dan Jasa mengalami peningkatan sebesar Rp37.072.055.003,36 atau sebesar 13,34%. Rincian Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut:

Tabel 7.5.25 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	163.000.000,00	159.599.360,00	97,91	74.885.000,00	84.714.360,00	113,13
2.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	318.725.000,00	316.278.500,00	99,23	179.630.000,00	136.648.500,00	76,07
3.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.903.996.571,86	5.140.988.151,50	87,08	4.708.562.358,00	432.425.793,50	9,18
4.	Belanja Bahan-Bahan Baku	9.700.000,00	9.679.000,00	99,78	4.360.000,00	5.319.000,00	122,00
5.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	294.180.000,00	294.177.000,00	100,00	363.000.000,00	(68.823.000,00)	(18,96)
6.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	21.000.000,00	10.428.000,00	49,66	32.525.000,00	(22.097.000,00)	(67,94)
7.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.823.268.501,00	3.354.382.860,00	87,74	2.344.582.210,00	1.009.800.650,00	43,07
8.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.341.385.240,00	1.876.744.811,00	80,16	1.642.417.398,00	234.327.413,00	14,27
9.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	50.000.000,00	45.715.000,00	91,43	0,00	45.715.000,00	100,00
10.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	287.480.000,00	170.533.400,00	59,32	18.572.000,00	151.961.400,00	818,23
11.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.081.864.458,00	4.748.111.512,00	93,43	5.205.059.938,66	(456.948.426,66)	(8,78)
12.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00	2.500.000,00	100,00
13.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.035.000.757,00	9.542.696.547,93	86,48	16.199.742.952,38	(6.657.046.404,45)	(41,09)
14.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	768.449.108,00	673.439.200,00	87,64	675.538.300,00	(2.099.100,00)	(0,31)
15.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	22.465.000,00	11.697.600,00	52,07	2.765.000,00	8.932.600,00	323,06
16.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	762.450.378,00	619.984.014,00	81,31	476.651.069,00	143.332.945,00	30,07
17.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	759.127.154,00	413.479.900,00	54,47	20.548.500,00	392.931.400,00	1.912,21
18.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	264.587.000,00	245.167.844,00	92,66	0,00	245.167.844,00	100,00
19.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	157.380.000,00	109.030.000,00	69,28	1.500.000,00	107.530.000,00	7.168,67
20.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.022.535.200,00	980.027.100,00	95,84	21.660.200,00	958.366.900,00	4.424,55
21.	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.128.030.124,00	3.214.620.298,88	77,87	6.513.386.336,62	(3.298.766.037,74)	(50,65)
22.	Belanja Obat-Obatan-Obat Lainnya	2.970.744.419,14	2.735.556.479,70	92,08	7.483.338.559,61	(4.747.782.079,91)	(63,44)

No.	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
23.	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	317.320.000,00	250.220.280,00	78,85	0,00	250.220.280,00	100,00
24.	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	48.000.000,00	41.849.324,00	87,19	0,00	41.849.324,00	100,00
25.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.565.510.900,00	4.334.982.300,00	77,89	4.742.593.992,00	(407.611.692,00)	(8,59)
26.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.687.366.750,00	9.186.228.670,00	94,83	6.948.531.500,00	2.237.697.170,00	32,20
27.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.018.737.800,00	943.031.125,00	92,57	17.952.000,00	925.079.125,00	5.153,07
28.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.877.650.220,00	4.512.820.670,00	76,78	2.590.433.700,00	1.922.386.970,00	74,21
30.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	127.980.000,00	126.510.000,00	98,85	24.000.000,00	102.510.000,00	427,13
31.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	14.400.000,00	14.250.000,00	98,96	27.500.000,00	(13.250.000,00)	(48,18)
32.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	289.743.000,00	211.998.000,00	73,17	208.042.700,00	3.955.300,00	1,90
33.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	435.805.000,00	151.513.000,00	34,77	320.561.700,00	(169.048.700,00)	(52,74)
34.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	99.940.000,00	97.565.000,00	97,62	0,00	97.565.000,00	100,00
35.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	17.100.000,00	16.950.000,00	99,12	0,00	16.950.000,00	100,00
36.	Belanja Pakaian Siaga	69.880.000,00	69.774.600,00	99,85	0,00	69.774.600,00	100,00
37.	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	150.275.000,00	149.925.000,00	99,77	195.019.750,00	(45.094.750,00)	(23,12)
38.	Belanja Pakaian Adat Daerah	551.925.000,00	527.786.010,00	95,63	256.429.370,00	271.356.640,00	105,82
39.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.250.000,00	10.000.000,00	97,56	9.000.000,00	1.000.000,00	11,11
40.	Belanja Pakaian Olahraga	657.892.500,00	654.018.004,00	99,41	40.750.000,00	613.268.004,00	1.504,95
41.	Belanja Pakaian Paskibraka	420.190.000,00	419.202.825,00	99,77	295.049.600,00	124.153.225,00	42,08
42.	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	32.789.490,00	32.789.409,00	100,00	0,00	32.789.409,00	100,00
43.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	10.780.000,00	9.800.000,00	90,91	0,00	9.800.000,00	100,00
44.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.312.540.100,00	4.150.384.880,00	78,12	6.659.428.875,00	(2.509.043.995,00)	(37,68)
45.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.887.213.000,00	3.990.956.000,00	81,66	680.190.000,00	3.310.766.000,00	486,74
46.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
47.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.060.510.000,00	1.846.960.000,00	89,64	151.100.000,00	1.695.860.000,00	1.122,34
48.	Honorarium Rohaniwan	110.000.000,00	7.200.000,00	6,55	6.000.000,00	1.200.000,00	20,00
49.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	25.550.000,00	4.200.000,00	16,44	20.100.000,00	(15.900.000,00)	(79,10)

No.	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
50.	Honorarium Penyelenggara Ujian	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
51.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	25.750.000,00	22.750.000,00	88,35	0,00	22.750.000,00	100,00
52.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	10.584.150.000,00	10.433.350.000,00	98,58	3.000.000,00	10.430.350.000,00	347.678,33
53.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	27.724.356.163,00	25.589.042.425,00	92,30	15.355.092.365,00	10.233.950.060,00	66,65
54.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	88.200.000,00	31.465.000,00	35,67	21.350.000,00	10.115.000,00	47,38
55.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.297.150.000,00	1.291.400.000,00	99,56	37.800.000,00	1.253.600.000,00	3.316,40
56.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	108.000.000,00	108.000.000,00	100,00	0,00	108.000.000,00	100,00
57.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	254.900.000,00	46.150.000,00	18,11	0,00	46.150.000,00	100,00
58.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	34.251.087.457,00	33.170.243.602,00	96,84	80.221.302.142,00	(47.051.058.540,00)	(58,65)
59.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	22.000.000,00	(2.000.000,00)	(9,09)
60.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18.150.965.000,00	16.986.565.000,00	93,58	0,00	16.986.565.000,00	100,00
61.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.492.919.600,00	1.290.119.600,00	86,42	1.409.250.000,00	(119.130.400,00)	(8,45)
62.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.769.395.000,00	2.731.321.896,00	98,63	4.811.965.300,00	(2.080.643.404,00)	(43,24)
63.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	408.100.000,00	353.450.000,00	86,61	42.400.000,00	311.050.000,00	733,61
64.	Belanja Jasa Tenaga Supir	832.500.000,00	827.500.000,00	99,40	0,00	827.500.000,00	100,00
65.	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	99.000.000,00	63.750.000,00	64,39	0,00	63.750.000,00	100,00
66.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	180.000.000,00	159.000.000,00	88,33	0,00	159.000.000,00	100,00
67.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
68.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.542.955.000,00	1.521.455.000,00	98,61	127.287.500,00	1.394.167.500,00	1.095,29
69.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	38.000.000,00	28.236.500,00	74,31	52.773.884,00	(24.537.384,00)	(46,50)
70.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	959.802.974,00	82.729.048,00	8,62	1.002.271.320,00	(919.542.272,00)	(91,75)
71.	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
72.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	6.200.000,00	4.866.651,34	78,49	32.500.685,10	(27.634.033,76)	(85,03)
73.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	51.909.000,00	51.909.000,00	100,00	42.000.000,00	9.909.000,00	23,59
74.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	15.300.000,00	15.300.000,00	100,00	0,00	15.300.000,00	100,00
75.	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	27.400.000,00	26.456.000,00	96,55	23.700.000,00	2.756.000,00	11,63
76.	Belanja Jasa Kalibrasi	0,00	0,00	0,00	199.244.100,00	(199.244.100,00)	(100,00)
77.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.315.400.000,00	1.301.800.000,00	98,97	1.208.200.000,00	93.600.000,00	7,75
78.	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	10.384.276,00	7.384.676,00	71,11	0,00	7.384.676,00	100,00
79.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	4.931.672.000,00	4.883.920.000,00	99,03	41.710.000,00	4.842.210.000,00	11.609,23

No.	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
80.	Belanja Jasa Operator Kapal	894.000.000,00	862.500.000,00	96,48	0,00	862.500.000,00	100,00
81.	Belanja Tagihan Telepon	157.230.713,00	113.825.949,00	72,39	117.322.719,00	(3.496.770,00)	(2,98)
82.	Belanja Tagihan Air	980.593.846,00	798.461.707,00	81,43	583.283.740,00	215.177.967,00	36,89
83.	Belanja Tagihan Listrik	6.138.832.163,00	5.348.769.588,00	87,13	4.530.769.598,00	817.999.990,00	18,05
84.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	579.776.000,00	480.029.000,00	82,80	497.638.000,00	(17.609.000,00)	(3,54)
85.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.697.394.850,00	3.563.574.745,00	96,38	3.170.977.124,00	392.597.621,00	12,38
86.	Belanja Paket/Pengiriman	2.150.539.000,00	186.822.264,00	8,69	114.826.440,00	71.995.824,00	62,70
87.	Belanja Registrasi/Keanggotaan	111.000.000,00	108.000.000,00	97,30	0,00	108.000.000,00	100,00
88.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	704.977.500,00	356.257.253,00	50,53	399.034.921,00	(42.777.668,00)	(10,72)
89.	Belanja Medical Check Up	235.886.000,00	101.416.000,00	42,99	0,00	101.416.000,00	100
90.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	26.625.530.300,00	26.565.911.900,00	99,78	8.906.830.400,00	17.659.081.500,00	198,26
91.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.361.003.090,00	4.092.148.815,00	93,84	2.504.257.477,36	1.587.891.337,64	63,41
92.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	174.220.594,00	114.476.314,60	65,71	22.933.200,00	91.543.114,60	399,17
93.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	196.154.019,00	129.260.758,00	65,90	28.666.500,00	100.594.258,00	350,91
94.	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	19.500.000,00	4.500.000,00	23,08	0,00	4.500.000,00	100,00
95.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	495.437.500,00	388.657.000,00	78,45	1.434.093.480,00	(1.045.436.480,00)	(72,90)
96.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00	4.000.000,00	1.700.000,00	42,50
97.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	19.880.000,00	15.220.000,00	76,56	0,00	15.220.000,00	100,00
98.	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	270.147.000,00	180.389.000,00	66,77	21.325.000,00	159.064.000,00	745,90
99.	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00	4.000.000,00	100,00
100.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.349.639.000,00	1.189.611.400,00	88,14	262.143.340,00	927.468.060,00	353,80
101.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	2.245.000,00	795.000,00	35,41	0,00	795.000,00	100,00
103.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	254.000.000,00	208.250.000,00	81,99	2.500.000,00	205.750.000,00	8.230,00
104.	Belanja Sewa Mebel	12.500.000,00	2.500.000,00	20,00	0,00	2.500.000,00	100,00
105.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	2.000.000,00	100,00
106.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	128.000.000,00	124.700.000,00	97,42	0,00	124.700.000,00	100,00
107.	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	62.750.000,00	15.250.000,00	24,30	1.000.000,00	14.250.000,00	1.425,00
108.	Belanja Sewa Alat Komunikasi Khusus	11.500.000,00	11.196.407,00	97,36	9.200.000,00	1.996.407,00	21,70
109.	Belanja Sewa Peralatan Umum	7.000.000,00	4.000.000,00	57,14	0,00	4.000.000,00	100,00
110.	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	41.090.000,00	37.972.622,00	92,41	0,00	37.972.622,00	100,00
111.	Belanja Sewa Peralatan Komputer	1.970.955,00	1.970.955,00	100,00	10.793.706,00	(8.822.751,00)	(81,74)

No.	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	Lainnya						
112.	Belanja Sewa Suara	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	641.572.000,00	551.342.000,00	85,94	831.652.000,00	(280.310.000,00)	(33,71)
114.	Belanja Sewa Bangunan Gudang	241.500.000,00	210.500.000,00	87,16	139.800.000,00	70.700.000,00	50,57
115.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	146.010.000,00	128.380.000,00	87,93	45.500.000,00	82.880.000,00	182,15
116.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	0,00	7.200.000,00	100,00
117.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	108.000.000,00	108.000.000,00	100,00	0,00	108.000.000,00	100,00
118.	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	193.500.000,00	178.434.000,00	92,21	54.000.000,00	124.434.000,00	230,43
119.	Belanja Sewa Asrama	517.204.000,00	516.950.000,00	99,95	0,00	516.950.000,00	100,00
120.	Belanja Sewa Hotel	716.418.000,00	608.376.410,00	84,92	190.505.480,00	417.870.930,00	219,35
121.	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	34.958.380,00	11.000.000,00	31,47	0,00	11.000.000,00	100
122.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	121.000.000,00	104.500.000,00	86,36	65.000.000,00	39.500.000,00	60,77
123.	Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya	0,00	0,00	0,00	650.000,00	(650.000,00)	(100,00)
124.	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	66.800.000,00	39.800.000,00	59,58	26.000.000,00	13.800.000,00	53,08
125.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	79.180.740,00	79.180.740,00	100,00	0,00	79.180.740,00	100,00
126.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00	23.969.000,00	116.031.000,00	484,09
127.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	3.000.000,00	2.985.900,00	99,53	0,00	2.985.900,00	100,00
128.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	0,00	0,00	587.660.700,00	(587.660.700,00)	(100,00)
129.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	1.131.738.270,00	1.070.940.578,00	94,63	228.920.285,00	842.020.293,00	367,82
130.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	0,00	0,00	0,00	199.353.000,00	(199.353.000,00)	(100,00)
131.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	1.257.000.000,00	1.252.069.660,00	99,61	50.000.000,00	1.202.069.660,00	2.404,14
132.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas	89.707.940,00	89.707.940,00	100,00	473.697.400,00	(383.989.460,00)	(81,06)

No.	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung						
134.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya- Jasa Konsultansi Lingkungan	1.789.510.000,00	1.499.416.960,00	83,79	99.880.000,00	1.399.536.960,00	1.401,22
135.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya- Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	301.715.900,00	301.376.100,00	99,89	0,00	301.376.100,00	100,00
136.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya- Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	300.000.000,00	194.472.000,00	64,82	0,00	194.472.000,00	100,00
137.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	302.178.840,00	282.294.000,00	93,42	0,00	282.294.000,00	100,00
138.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Telematika	355.100.000,00	305.051.329,98	85,91	0,00	305.051.329,98	100,00
139.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	100.000.000,00	99.470.932,00	99,47	0,00	99.470.932,00	100,00
140.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	180.000.000,00	179.820.000,00	99,90	0,00	179.820.000,00	100,00
141.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00	100.000.000,00	100,00
142.	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	200.000.000,00	198.830.232,96	99,42	0,00	198.830.232,96	100,00
143.	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataa-an	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	30.000.000,00	40.000.000,00	133,33
144.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	(48.000.000,00)	(100,00)
145.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00	135.000.000,00	0,00	0,00
146.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	406.899.920,00	379.782.000,00	93,34	592.389.404,00	(212.607.404,00)	(35,89)
147.	Belanja Sosialisasi	120.500.000,00	88.136.500,00	73,14	203.416.000,00	(115.279.500,00)	(56,67)
148.	Belanja Bimbingan Teknis	138.900.000,00	83.350.000,00	60,01	126.368.300,00	(43.018.300,00)	(34,04)
149.	Belanja Diklat Kepemimpinan	4.000.000,00	2.650.000,00	66,25	151.319.500,00	(148.669.500,00)	(98,25)
150.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	0,00	0,00	0,00	19.987.000,00	(19.987.000,00)	(100,00)
151.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.212.226.191,00	992.415.023,00	81,87	1.134.244.300,00	(141.829.277,00)	(12,50)
152.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	195.742.500,00	142.068.000,00	72,58	6.000.000,00	136.068.000,00	2.267,80
153.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan	46.359.200,00	24.889.200,00	53,69	73.458.000,00	(48.568.800,00)	(66,12)

No.	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	Barang						
154.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.000.000,00	5.885.000,00	98,08	0,00	5.885.000,00	100,00
155.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	750.000,00	(750.000,00)	(100,00)
156.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	181.440.000,00	180.885.000,00	99,69	159.445.000,00	21.440.000,00	13,45
157.	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	28.860.000,00	18.725.000,00	64,88	0,00	18.725.000,00	100,00
158.	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	4.000.000,00	3.670.000,00	91,75	12.800.000,00	(9.130.000,00)	(71,33)
159.	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	16.500.000,00	3.800.000,00	23,03	0,00	3.800.000,00	100,00
160.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	40.000.000,00	39.975.000,00	99,94	0,00	39.975.000,00	100,00
161.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	0,00	0,00	402.480.840,00	(402.480.840,00)	(100,00)
162.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00	250.000,00	(250.000,00)	(100,00)
163.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	642.957.289,00	598.393.421,77	93,07	228.377.557,00	370.015.864,77	162,02
164.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	759.257.246,00	702.199.001,00	92,48	802.315.781,00	(100.116.780,00)	(12,48)
165.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	26.700.000,00	13.050.000,00	48,88	9.750.000,00	3.300.000,00	33,85
166.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	20.000.000,00	12.527.500,00	62,64	1.000.000,00	11.527.500,00	1.152,75
167.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	291.800.000,00	281.934.600,00	96,62	111.204.100,00	170.730.500,00	153,53
168.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	42.350.000,00	36.755.000,00	86,79	0,00	36.755.000,00	100,00
169.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00	0,00	4.900.000,00	100,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
170.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	5.000.000,00	100,00
171.	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0,00	0,00	0,00	404.967.700,00	(404.967.700,00)	(100)
172.	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	78.498.300,00	78.498.300,00	100,00	299.009.000,00	(220.510.700,00)	(73,75)
173.	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	107.000.000,00	82.605.000,00	77,20	9.650.000,00	72.955.000,00	756,01
175.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	8.780.000,00	8.780.000,00	100,00	0,00	8.780.000,00	100,00
176.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	27.500.000,00	26.840.000,00	97,60	21.370.000,00	5.470.000,00	25,60
177.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	230.392.000,00	216.213.000,00	93,85	68.822.250,00	147.390.750,00	214,16
178.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	33.500.000,00	20.990.000,00	62,66	50.017.000,00	(29.027.000,00)	(58,03)
179.	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	0,00	0,00	0,00	24.256.800,00	(24.256.800,00)	(100,00)
180.	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	138.912.700,00	136.028.085,00	97,92	209.066.418,00	(73.038.333,00)	(34,94)
181.	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	100.000.000,00	98.207.000,00	98,21	0,00	98.207.000,00	100,00
182.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.753.911.000,00	1.616.474.049,00	92,16	2.322.647.093,37	(706.173.044,37)	(30,40)
183.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	(150.000.000,00)	(100,00)
184.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	0,00	0,00	0,00	10.975.000,00	(10.975.000,00)	(100,00)
185.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	634.676.734,80	605.128.734,00	95,34	237.082.600,00	368.046.134,00	155,24

No.	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
186.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium	22.923.000,00	22.493.000,00	98,12	16.774.000,00	5.719.000,00	34,09
187.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.585.000.000,00	1.582.512.391,00	99,84	0,00	1.582.512.391,00	100,00
188.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	488.403.039,00	456.703.942,00	93,51	49.184.242,00	407.519.700,00	828,56
189.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.100.938.982,00	1.046.601.082,00	95,06	1.494.923.637,48	(448.322.555,48)	(29,99)
190.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	100.000.000,00	99.260.907,60	99,26	0,00	99.260.907,60	100,00
191.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	0,00	0,00	69.459.913,00	(69.459.913,00)	(100,00)
192.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan	15.000.000,00	15.000.000,00	100	0,00	15.000.000,00	100,00
193.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan	0,00	0,00	0,00	109.847.100,00	(109.847.100,00)	(100,00)
194.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
195.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	125.400.000,00	115.114.000,00	91,80	41.396.000,00	73.718.000,00	178,08
196.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	100.000.000,00	64.335.860,00	64,34	0,00	64.335.860,00	100,00
197.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	21.750.000,00	19.950.000,00	91,72	0,00	19.950.000,00	100,00
198.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	186.903.659,00	186.903.659,00	100,00	83.730.322,00	103.173.337,00	123,22
199.	Belanja	2.271.851.339,00	2.271.411.340,00	99,98	777.290.293,00	1.494.121.047,00	192,22

No.	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten						
200.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	945.350.000,00	386.064.542,00	40,84	29.926.908,00	356.137.634,00	1.190,02
201.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	10.641.125,00	10.641.125,00	100,00	188.011.433,00	(177.370.308,00)	(94,34)
202.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	177.153.557,00	177.153.557,00	100,00	13.915.000,00	163.238.557,00	1.173,11
203.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10.930.150,00	10.930.150,00	100,00	199.486.635,00	(188.556.485,00)	(94,52)
204.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	2.900.000,00	2.700.000,00	93,10	0,00	2.700.000,00	100,00
205.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	10.944.600,00	7.284.100,00	66,55	129.293.422,00	(122.009.322,00)	(94,37)
206.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	93.145.000,00	81.286.600,00	87,27	106.500.182,40	(25.213.582,40)	(23,67)
207.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60.054.445.020,50	44.243.286.700,00	73,67	36.789.700.352,00	7.453.586.348,00	20,26
208.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.616.276.620,00	1.830.735.116,00	69,97	672.412.400,00	1.158.322.716,00	172,26
209.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	357.408.750,00	222.606.500,00	62,28	189.780.000,00	32.826.500,00	17,30
210.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	27.437.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	644.450.000,00	592.025.225,00	91,87	92.730.000,00	499.295.225,00	538,44
212.	Belanja Beasiswa	435.000.000,00	387.700.000,00	89,13	575.500.000,00	(187.800.000,00)	(32,63)
213.	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	940.000.000,00	(865.000.000,00)	(92,02)
214.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	267.950.000,00	262.450.000,00	97,95	38.300.000,00	224.150.000,00	585,25
215.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216.	Belanja Barang dan Jasa BOS	12.405.360.353,00	11.751.546.711,80	94,73	9.202.290.465,00	2.549.256.246,80	27,70
217.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	21.900.000.000,00	21.513.065.281,29	98,23	18.520.331.971,00	2.992.733.310,29	16,16
Jumlah		357.885.231.566,30	314.912.697.738,35	87,99	277.840.642.734,99	37.072.055.003,36	13,34

7.5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi tahun 2022 terealisasi sebesar Rp0.00. Pemerintah Kabupaten Natuna tidak menganggarkan Belanja Subsidi pada tahun 2022.

7.5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Belanja Hibah tahun 2022 terealisasi sebesar Rp27.753.967.108,00 atau sebesar 87,20%. Dibanding dengan tahun 2021 Belanja Hibah naik sebesar Rp 19.113.736.513,00 atau sebesar 221,22%. Rincian Belanja Hibah disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.5.26 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	463.140.000,00	463.140.000,00	100,00	0,00	463.140.000,00	100,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	5.235.096.165,00	4.666.818.301,00	89,14	1.353.099.742,00	3.313.718.559,00	244,90
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.517.288.300,00	1.114.072.500,00	73,43	130.000.000,00	984.072.500,00	756,98
4	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	12.844.552.020,00	11.082.930.035,00	86,29	4.672.712.332,00	6.410.217.703,00	137,18
5	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	11.242.893.000,00	9.903.573.429,00	88,09	1.960.985.678,00	7.942.587.751,00	405,03
6	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	523.432.843,00	523.432.843,00	100,00	523.432.843,00	0,00	0,00
TOTAL		31.826.402.328,00	27.753.967.108,00	87,20	8.640.230.595,00	19.113.736.513,00	221,22

Belanja Hibah pada tahun 2022 tidak terealisasi secara baik, ini disebabkan keterbatasan arus kas masuk dari pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran belanja hibah.

7.5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2022 sebesar Rp5.174.294.368,34 atau sebesar 85,00% dari anggaran yang ditetapkan. Dibanding dengan tahun 2021, Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan sebesar Rp(5.068.363.987,66) atau (49,48)% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.27 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	524.400.000,00	522.000.000,00	99,54	1.747.900.000,00	(1.225.900.000,00)	(70,14)
2.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	200.280.000,00	119.255.200,00	59,54	107.690.000,00	11.565.200,00	10,74
3.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	2.824.500.000,00	2.074.800.000,00	73,46	0,00	2.074.800.000,00	100,00
4.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
5.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.458.320.420,00	2.458.239.168,34	100,00	8.387.068.356,00	(5.928.829.187,66)	(70,69)
TOTAL		6.087.500.420,00	5.174.294.368,34	85,00	10.242.658.356,00	(5.068.363.987,66)	(49,48)

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu sebesar Rp522.000.000,00, terdiri dari Pemberian bantuan sosial tunai pada kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro kepada beberapa kelompok Usaha Mikro di beberapa Kecamatan di Kabupaten Natuna yang terdiri dari dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp136.200.000,00 dan tahap kedua sebesar Rp385.800.000,00.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp119.255.200,00 terdiri dari Pemberian Belanja Bantuan sosial Kaki Palsu sebesar Rp74.500.000,00 dan Belanja Bantuan Sosial Pembelian Kursi Roda Sebesar Rp44.755.200,00.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp2.074.800.000,00 terdiri dari pemberian Bantuan Sosial Kepada Keluarga ODGJ sebesar Rp336.000.000,00, Belanja Bantuan Sosial Tunai (BST) dampak Kenaikan BBM Sebesar Rp1.500.000.000,00 dan Belanja Bantuan Langsung Tunai Penanganan Dampak Inflasi yang Bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp250.800.000,00.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Rp2.458.239.168,34 merupakan belanja bantuan sosial untuk kelompok masyarakat yang bersumber dari DAK Bidang Perumahan dan Permukiman tahun anggaran 2022.

7.5.1.2.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal tahun 2022 sebesar Rp180.851.143.808,59 atau sebesar 83,44% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp216.743.786.900,45. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi belanja modal tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar Rp55.942.245.770,28 atau sebesar 44,79% yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.28 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Belanja Modal Tanah	20.807.682.700,00	14.947.363.488,00	71,84	3.524.035.600,00	11.423.327.888,00	324,15
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.353.411.474,85	36.673.771.470,56	86,59	31.700.356.343,36	4.973.415.127,20	15,69
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.680.895.955,45	35.255.591.251,14	91,14	20.532.700.088,84	14.722.891.162,30	71,70
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	114.138.738.559,15	93.570.889.388,89	81,98	67.929.465.806,11	25.641.423.582,78	37,75
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	763.058.211,00	403.528.210,00	52,88	1.222.340.200,00	(818.811.990,00)	(66,99)
JUMLAH		216.743.786.900,45	180.851.143.808,59	83,44	124.908.898.038,31	55.942.245.770,28	44,79

7.5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal pengadaan tanah tahun 2022 sebesar Rp14.947.363.488,00 atau sebesar 71,84% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.807.682.700,00, dibandingkan dengan tahun 2021, Belanja Modal Tanah mengalami Kenaikan yang sangat signifikan sebesar Rp11.423.327.888,00 atau sebesar 324,15% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.29 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tanah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	4.702.848.600,00	4.702.848.600,00	100,00	0,00	4.702.848.600,00	100,00
2.	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	846.000.000,00	836.404.088,00	98,87	0,00	836.404.088,00	100,00
3.	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	3.915.884.100,00	3.733.000.000,00	95,33	3.230.235.600,00	502.764.400,00	15,56
4.	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	4.220.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	6.567.950.000,00	5.321.407.086,00	81,02	293.800.000,00	5.027.607.086,00	1.711,23
6.	Belanja Modal Lapangan Lainnya	555.000.000,00	353.703.714,00	63,73	0,00	353.703.714,00	100,00
TOTAL		20.807.682.700,00	14.947.363.488,00	71,84	3.524.035.600,00	11.423.327.888,00	324,15

7.5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2022 sebesar Rp36.673.771.470,56 atau sebesar 86,59% dari anggaran yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar Rp4.973.415.127,20 atau sebesar 15,69% yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.30 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Modal Pompa	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	15.000.000,00	100,00
2	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	100.310.000,00	100.290.000,00	99,98	18.520.000,00	81.770.000,00	441,52
3	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	75.000.000,00	64.015.000,00	85,35	0,00	64.015.000,00	100,00
4	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	591.140.000,00	(591.140.000,00)	(100,00)
5	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	263.950.500,00	263.950.500,00	100,00	0,00	263.950.500,00	100,00
6	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	339.318.600,00	256.273.600,00	75,53	224.135.500,00	32.138.100,00	14,34
7	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	0,00	0,00	34.980.000,00	(34.980.000,00)	(100,00)
8	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	549.427.800,00	549.427.800,00	100,00	1.363.298.900,00	(813.871.100,00)	(59,70)
9	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	405.800.000,00	405.800.000,00	100,00	0,00	405.800.000,00	100,00
10	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	15.000.000,00	100,00
11	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	105.500.000,00	0,00	0,00	56.980.000,00	(56.980.000,00)	(100,00)
12	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	23.500.000,00	22.420.000,00	95,40	44.900.000,00	(22.480.000,00)	(50,07)
13	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	650.000.000,00	473.000.000,00	72,77	1.423.752.700,00	(950.752.700,00)	(66,78)
14	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	0,00	0,00	88.275.000,00	(88.275.000,00)	(100,00)
15	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	0,00	0,00	81.793.500,00	(81.793.500,00)	(100,00)

No	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
16	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	738.146.532,00	602.563.846,74	81,63	168.523.600,36	434.040.246,38	257,55
17	Belanja Modal Mebel	805.478.729,00	797.477.592,00	99,01	173.362.000,00	624.115.592,00	360,01
18	Belanja Modal Alat Pembersih	6.742.999,00	6.026.035,00	89,37	0,00	6.026.035,00	100,00
19	Belanja Modal Alat Pendingin	464.292.255,00	441.212.331,00	95,03	520.190.355,00	(78.978.024,00)	(15,18)
20	Belanja Modal Alat Dapur	11.738.250,00	11.738.250,00	100,00	2.871.819,00	8.866.431,00	308,74
21	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.017.997.449,88	975.034.572,00	95,78	1.258.789.889,00	(283.755.317,00)	(22,54)
22	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	4.200.000,00	3.600.000,00	85,71	4.455.000,00	(855.000,00)	(19,19)
23	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	513.242.000,00	455.241.000,00	88,70	291.349.500,00	163.891.500,00	56,25
24	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	61.000.000,00	10.000.000,00	16,39	96.890.000,00	(86.890.000,00)	(89,68)
25	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	601.950.000,00	564.349.278,00	93,75	418.535.500,00	145.813.778,00	34,84
26	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	101.850.000,00	101.787.000,00	99,94	58.770.000,00	43.017.000,00	73,20
27	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
28	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	21.000.000,00	20.995.000,00	99,98	121.340.000,00	(100.345.000,00)	(82,70)
29	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	132.900.000,00	132.283.785,00	99,54	280.646.000,00	(148.362.215,00)	(52,86)
30	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	3.200.000,00	0,00	0,00	14.784.090,00	(14.784.090,00)	(100,00)
31	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	91.520.000,00	91.520.000,00	100,00	71.500.000,00	20.020.000,00	28,00
32	Belanja Modal Peralatan Cetak	42.500.000,00	41.850.000,00	98,47	0,00	41.850.000,00	100,00
33	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	109.316.659,00	109.296.659,00	99,98	534.737.500,00	(425.440.841,00)	(79,56)
34	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	0,00	0,00	0,00	22.050.000,00	(22.050.000,00)	(100,00)
35	Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit	0,00	0,00	0,00	8.101.500,00	(8.101.500,00)	(100,00)
36	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	337.772.900,08	337.572.900,00	99,94	0,00	337.572.900,00	100,00
37	Belanja Modal Sumber Tenaga	98.450.000,00	98.450.000,00	100,00	0,00	98.450.000,00	100,00
38	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	2.022.091.326,00	1.905.801.107,82	94,25	3.943.440.656,00	(2.037.639.548,18)	(51,67)
39	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	2.618.110,00	2.000.000,00	76,39	0,00	2.000.000,00	100,00
40	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.879.621.475,99	1.871.914.554,00	99,59	0,00	1.871.914.554,00	100,00
41	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	0,00	0,00	0,00	1.717.372.164,00	(1.717.372.164,00)	(100,00)
42	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	0,00	0,00	0,00	107.561.100,00	(107.561.100,00)	(100,00)
43	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	254.719.737,00	254.719.737,00	100,00	0,00	254.719.737,00	100,00
44	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	1.400.091.484,00	1.400.091.484,00	100,00	0,00	1.400.091.484,00	100,00
45	Belanja Modal Alat Kesehatan Lainnya	2.400.000.000,00	316.170.000,00	13,17	0,00	316.170.000,00	100,00
46	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	6.071.265.000,00	(6.071.265.000,00)	(100,00)

No	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
47	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	0,00	0,00	0,00	189.222.000,00	(189.222.000,00)	(100,00)
48	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	50.623.000,00	50.623.000,00	100,00	0,00	50.623.000,00	100,00
49	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	(2.250.000,00)	(100,00)
50	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	123.689.798,00	100.689.798,00	81,41	0,00	100.689.798,00	100,00
51	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	184.481.987,00	184.481.987,00	100,00	0,00	184.481.987,00	100,00
52	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	199.958.730,00	199.958.730,00	100,00	0,00	199.958.730,00	100,00
53	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	575.000.000,00	564.990.000,00	98,26	0,00	564.990.000,00	100,00
54	Belanja Modal Peralatan Umum	85.981.200,00	53.586.136,00	62,32	40.043.700,00	13.542.436,00	33,82
55	Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	(2.750.000,00)	(100,00)
56	Belanja Modal Komputer Jaringan	329.250.000,00	322.287.969,00	97,89	19.036.455,00	303.251.514,00	1.593,00
57	Belanja Modal Personal Computer	1.080.185.227,00	736.231.767,00	68,16	910.879.211,00	(174.647.444,00)	(19,17)
58	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	3.235.465.014,00	3.074.218.734,00	95,02	1.376.662.437,00	1.697.556.297,00	123,31
59	Belanja Modal Peralatan Mainframe	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
61	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	181.770.000,00	150.695.236,00	82,90	105.405.454,00	45.289.782,00	42,97
62	Belanja Modal Peralatan Jaringan	328.025.000,00	221.503.100,00	67,53	118.180.000,00	103.323.100,00	87,43
63	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	422.444.775,90	350.433.401,00	82,95	238.374.820,00	112.058.581,00	47,01
64	Belanja Modal Elektronik/Electric	0,00	0,00	0,00	211.266.000,00	(211.266.000,00)	(100,00)
65	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	29.975.000,00	29.975.000,00	100,00	0,00	29.975.000,00	100,00
66	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	23.952.000,00	23.952.000,00	100,00	167.613.627,00	(143.661.627,00)	(85,71)
67	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	88.731.500,00	88.731.500,00	100,00	6.963.000,00	81.768.500,00	1.174,33
68	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.778.811.436,00	3.199.900.401,00	84,68	4.709.134.931,00	(1.509.234.530,00)	(32,05)
69	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	15.910.820.000,00	14.604.640.680,00	91,79	3.788.263.435,00	10.816.377.245,00	285,52
Jumlah		42.353.411.474,85	36.673.771.470,56	86,59	31.700.356.343,36	4.973.415.127,20	15,69

7.5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan tahun 2022 sebesar Rp35.255.591.251,14 atau 91,14% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp38.680.895.955,45. Jika dibanding dengan tahun 2021, Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp14.722.891.162,30 atau sebesar 71,70%. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.31 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.235.885.989,00	935.532.522,94	75,70	1.034.173.725,00	(98.641.202,06)	(9,54)
2.	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	138.000.000,00	125.819.296,00	91,17	0,00	125.819.296,00	100,00
3.	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	295.191.154,00	295.191.152,26	100,00	0,00	295.191.152,26	100,00
4.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	17.492.354.003,15	17.360.031.907,38	99,24	5.175.367.724,28	12.184.664.183,10	235,44
5.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	208.327.599,16	208.327.599,16	100,00	0,00	208.327.599,16	100,00
6.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	7.252.832.387,97	6.886.872.913,03	94,95	2.956.916.224,20	3.929.956.688,83	132,91
8.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	803.308.207,00	803.002.957,00	99,96	302.318.835,00	500.684.122,00	165,61
9.	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1.473.424.440,00	69.719.100,00	4,73	298.368.150,00	(228.649.050,00)	(76,63)
10.	Belanja Modal Bangunan Terbuka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	431.545.000,00	429.625.680,00	99,56	5.640.294.134,00	(5.210.668.454,00)	(92,38)
12.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	2.146.391.587,00	1.911.326.621,00	89,05	1.721.194.450,00	190.132.171,00	11,05
13.	Belanja Modal Taman	611.692.844,00	219.692.844,00	35,92	311.064.881,00	(91.372.037,00)	(29,37)
14.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	99.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	211.032.682,00	211.032.682,00	100,00	0,00	211.032.682,00	100,00
16.	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	2.356.149.298,00	2.356.149.298,00	100,00	0,00	2.356.149.298,00	100,00
17.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1.545.975.997,00	1.543.518.911,20	99,84	2.851.594.618,36	(1.308.075.707,16)	(45,87)
18.	Belanja Modal Pagar	2.309.584.767,17	1.889.757.767,17	81,82	241.407.347,00	1.648.350.420,17	682,81
19.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	10.000.000,00	9.990.000,00	99,9	0,00	9.990.000,00	100,00
Jumlah		38.680.895.955,45	35.255.591.251,14	91,14	20.532.700.088,84	14.722.891.162,30	71,70

7.5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Anggaran Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp114.138.738.559,15 dengan realisasi sebesar Rp93.570.889.388,89 atau sebesar 81,98% dari anggaran yang ditetapkan. Jika dibanding dengan tahun 2021, realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami kenaikan sebesar Rp 25.641.423.582,78 atau sebesar 37,75 % dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.32 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Belanja Modal Jalan Kabupaten	48.298.809.669,00	45.051.487.227,53	93,28	28.308.191.168,77	16.743.296.058,76	59,15
2.	Belanja Modal Jalan Lainnya	24.592.751.914,00	14.911.274.857,00	60,63	7.235.546.328,00	7.675.728.529,00	106,08
3.	Belanja Modal Jembatan Lainnya	6.393.489.644,00	6.112.678.887,00	95,61	3.538.298.906,00	2.574.379.981,00	72,76
4.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	442.933.751,00	442.933.751,00	100,00	0,00	442.933.751,00	100,00
5.	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	151.611.488,24	151.611.488,24	100,00	181.222.057,00	(29.610.568,76)	(16,34)
6.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	518.647.594,00	492.647.594,00	94,99	2.237.698.700,00	(1.745.051.106,00)	(77,98)
7.	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	11.310.615.566,00	11.309.858.076,00	99,99	4.320.456.725,00	6.989.401.351,00	161,77
8.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	192.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	0,00	0,00	0,00	193.834.450,00	(193.834.450,00)	(100,00)
10.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	6.091.300.000,00	1.631.954.288,00	26,79	0,00	1.631.954.288,00	100,00
12.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	890.000.000,00	890.000.000,00	100,00	0,00	890.000.000,00	100,00
13.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	1.575.551.686,00	1.570.586.286,00	99,68	3.204.523.874,00	(1.633.937.588,00)	(50,99)
14.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	150.000.000,00	149.570.865,21	99,71	0,00	149.570.865,21	100,00
15.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.105.637.339,00	1.099.241.170,00	52,2	6.243.575.835,00	(5.144.334.665,00)	(82,39)
17.	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	0,00	0,00	0,00	12.056.000,00	(12.056.000,00)	(100,00)
19.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	2.158.479.744,91	2.060.317.016,91	95,45	6.223.117.232,34	(4.162.800.215,43)	(66,89)
20.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00	20.000.000,00	100,00
21.	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	6.093.679.584,00	4.937.393.095,00	81,02	6.163.360.638,00	(1.225.967.543,00)	(19,89)
22.	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	40.000.000,00	19.877.839,00	49,69	0,00	19.877.839,00	100,00
23.	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	2.737.230.579,00	2.719.456.948,00	99,35	67.583.892,00	2.651.873.056,00	3.923,82
.Jumlah		114.138.738.559,15	93.570.889.388,89	81,98	67.929.465.806,11	25.641.423.582,78	37,75

7.5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Anggaran Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2022 sebesar Rp763.058.211,00 dengan realisasi sebesar Rp403.528.210,00 atau sebesar 52,88%. Jika dibanding dengan tahun 2021, realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp(818.811.990,00) atau sebesar (66,99)% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.33 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Modal Buku Umum	0,00	0,00	0,00	149.900.000,00	(149.900.000,00)	(100,00)
2	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	0,00	0,00	0,00	22.240.000,00	(22.240.000,00)	(100,00)
3	Belanja Modal Alat Musik	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	0,00	0,00	0,00	9.110.000,00	(9.110.000,00)	(100,00)
5	Belanja Modal Ikan Budidaya	15.000.000,00	4.950.000,00	33,00	0,00	4.950.000,00	100,00
6	Belanja Modal Software	93.600.000,00	40.466.651,00	43,23	71.200.000,00	(30.733.349,00)	(43,16)
7	Belanja Modal Kajian	0,00	0,00	0,00	209.275.000,00	(209.275.000,00)	(100,00)
8	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	454.458.211,00	358.111.559,00	78,80	760.615.200,00	(402.503.641,00)	(52,92)
Total		763.058.211,00	403.528.210,00	52,88	1.222.340.200,00	(818.811.990,00)	(66,99)

7.5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Pada tahun 2022, realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.331.862.663,00 atau sebesar 41,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.205.403.104,00. Penggunaan Belanja Tidak Terduga digunakan untuk:

- Penanganan Bidang Kesehatan Covid-19 sebesar Rp534.599.480,00;
- Pemberian bantuan sosial tidak terencana sebesar Rp113.895.683,00;
- Penanggulangan Bencana tidak terencana sebesar Rp683.367.500,00

7.5.1.3 Transfer

Transfer	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	106.005.762.940,00	124.018.980.840,00

Realisasi Transfer Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2022 sebesar Rp106.005.762.940,00 yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.34 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	1.250.700.000,00	1.250.699.940,00	100,00	500.279.990,00	750.419.950,00	150,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	104.755.063.000,00	104.755.063.000,00	100,00	123.518.700.850,00	(18.763.637.850,00)	(15,19)
Jumlah		106.005.763.000,00	106.005.762.940,00	100,00	124.018.980.840,00	(18.013.217.900,00)	(14,52)

7.5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Realisasi transfer bagi hasil pendapatan sebesar Rp1.250.699.940,00 atau sebesar 100,00% yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.35 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.200.000.000,00	1.199.999.990,00	100,00	480.000.010,00	719.999.980,00	150,00
2	Transfer Bagi Hasil Retribusi	50.700.000,00	50.699.950,00	100,00	20.279.980,00	30.419.970,00	150,00
JUMLAH		1.250.700.000,00	1.250.699.940,00	100,00	500.279.990,00	750.419.950,00	150,00

7.5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp104.755.063.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.36 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	53.796.781.000,00	53.796.781.000,00	100,00	57.496.415.850,00	(3.699.634.850,00)	(6,43)
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	50.958.282.000,00	50.958.282.000,00	100,00	66.022.285.000,00	(15.064.003.000,00)	(22,82)
Jumlah		104.755.063.000,00	104.755.063.000,00	100,00	123.518.700.850,00	(18.763.637.850,00)	(15,19)

Transfer bantuan keuangan ke desa sebesar Rp104.755.063.000,00 terdiri dari:

- Transfer Alokasi Dana Desa yang merupakan 10% dari Bantuan Dana Perimbangan selain DAK sebesar Rp53.796.781.000,00.
- Transfer dana desa sebesar Rp50.958.282.000,00.

7.5.1.4 Surplus/Defisit LRA

Surplus/Defisit LRA	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	(27.359.565.935,26)	16.025.242.259,91

Surplus/defisit Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Natuna tahun Anggaran 2022 sebesar Rp(27.359.565.935,26) dengan perhitungan:

Tabel 7.5.37 Surplus/Defisit LRA*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan/Penurunan	%
1.	Pendapatan	1.082.256.199.243,26	989.275.275.868,02	91,41	968.639.262.049,31	20.636.013.818,71	2,13
2.	Belanja	1.008.629.765.300,00	910.629.078.863,28	90,28	828.595.038.949,40	82.034.039.913,88	9,90
3.	Transfer	106.005.763.000,00	106.005.762.940,00	100	124.018.980.840,00	(18.013.217.900,00)	(14,52)
Surplus (Defisit)		(32.379.329.056,74)	(27.359.565.935,26)	84,50	16.025.242.259,91	(43.384.808.195,17)	(270,73)

7.5.1.5 Pembiayaan**7.5.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan**

Realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp32.327.191.732,15 atau sebesar 99,84% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp32.379.329.056,74 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.38 Penggunaan SiLPA*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Penggunaan SiLPA	32.379.329.056,74	32.327.191.732,15	99,84	16.018.514.944,83	16.308.676.787,32	101,81
2.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	335.571.852,00	(335.571.852,00)	(100,00)
TOTAL		32.379.329.056,74	32.327.191.732,15	99,84	16.354.086.796,83	15.973.104.935,32	97,67

Realisasi Penggunaan SILPA TA 2022 sebesar Rp32.327.191.732,15 atau 99,84 % dari anggaran sebesar Rp32.379.329.056,74. Perbedaan anggaran dan realisasi Penggunaa SiLPA TA 2022 sebesar Rp52.137.324,59 merupakan koreksi kesalahan pembukuan Selisih perhitungan pendapatan dan belanja dana BOS tahun sebelumnya.

7.5.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.39 Penyertaan Modal*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)

7.5.1.6 Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

SiLPA	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	4.967.625.796,89	32.379.329.056,74

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.967.625.796,89 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.5.40 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan	1.082.256.199.243,26	989.275.275.868,02	91,41	968.639.262.049,31	20.636.013.818,71	2,13
2	Belanja	1.008.629.765.300,00	910.629.078.863,28	90,28	828.595.038.949,40	82.034.039.913,88	9,90
3	Transfer	106.005.763.000,00	106.005.762.940,00	100,00	124.018.980.840,00	(18.013.217.900,00)	(14,52)
4	Surplus (Defisit)	(32.379.329.056,74)	(27.359.565.935,26)	84,50	16.025.242.259,91	(43.384.808.195,17)	(270,73)
5	Pembiayaan Netto	32.379.329.056,74	32.327.191.732,15	99,84	16.354.086.796,83	15.973.104.935,32	97,67
SILPA		0,00	4.967.625.796,89	0,00	32.379.329.056,74	(27.411.703.259,85)	(84,66)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2022 sebesar Rp4.967.625.796,89 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.41 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran*(Dalam Rupiah)*

Uraian	Jumlah Kas
Kas di Kas Daerah	2.558.162.476,75
Kas di BLUD	1.859.924.388,90
Kas Dana BOS	161.388.786,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	386.955.981,24
Kas Lainnya	1.194.164,00
SILPA	4.967.625.796,89

Perbedaan antara Saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2022 sebesar Rp4.967.625.796,89 dengan saldo Kas dan setara kas di Neraca sebesar Rp112.874.315,00 yang terdiri dari Utang PFK sebesar Rp77.132,00 dan Saldo Kas

Dana Bergulir yang masih berada pada rekening dana bergulir yang dicatat pada Kas Lainnya sebesar Rp112.797.183,00.

7.5.2. LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat terjadi keadaan yang menyebabkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Adapun rincian perhitungan perubahan SAL tahun 2022 adalah sebagai berikut:

7.5.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	Tahun 2022	Tahun 2021
		(Rp)	(Rp)
		32.379.329.056,74	16.026.490.371,83

Nilai SAL awal sebesar Rp32.379.329.056,74 merupakan saldo anggaran lebih akhir tahun 2021. Saldo tersebut adalah penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup anggaran defisit tahun 2022.

7.5.2.2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun Berjalan	Tahun 2022	Tahun 2021
		(Rp)	(Rp)
		32.327.191.732,15	16.026.490.371,83

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2022 adalah seluruh SAL akhir tahun 2021. SAL tahun sebelumnya yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2022 adalah sebesar Rp 32.327.191.732,15.

7.5.2.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Tahun 2022	Tahun 2021
		(Rp)	(Rp)
		4.967.625.796,89	32.387.304.483,74

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam laporan realisasi anggaran. Nilai SiLPA pada akhir tahun 2022 sebelum dilakukan koreksi pencatatan adalah sebesar Rp4.967.625.796,89.

Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	(52.137.324,59)	7.975.427,00

Untuk tahun 2022 terdapat ada koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya atau koreksi kesalahan tahun sebelumnya adalah Rp(52.137.324,59). Koreksi ini merupakan Koreksi pencatatan saldo Awal Dana BOS pada sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

7.5.2.4	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Tahun 2022	Tahun 2021
		(Rp)	(Rp)
		4.967.625.796,89	32.379.329.056,74

SAL Akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan nilai akumulatif SAL akhir pada tahun 2022 adalah sebesar Rp4.967.625.796,89.

7.5.3 NERACA

7.5.3.1 Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	79.337.316.724,46	115.995.538.469,98

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Natuna per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp79.337.316.724,46 terdiri dari kas, piutang, penyisihan piutang, persediaan dan beban dibayar dimuka, dengan penjelasan sebagai berikut:

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kas dan Bank	5.125.743.882,89	32.575.559.406,74
Piutang	99.296.686.051,96	71.820.259.536,09
Penyisihan Piutang	(47.758.915.754,79)	(45.981.535.016,11)
Beban Dibayar Dimuka	284.791.666,66	171.250.000,01
Persediaan	22.389.010.877,74	57.410.004.543,25
Jumlah	79.337.316.724,46	115.995.538.469,98

Kas dan Bank

Kas dan Bank	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	5.125.743.882,89	32.575.559.406,74

Nilai saldo Kas dan Bank per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.125.743.882,89 merupakan saldo di Kas Daerah ditambah dengan Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kas Dana BOS dan Kas Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kas di Kas Daerah	2.558.239.608,75	29.896.697.590,30
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	1.859.924.388,90	1.871.843.974,05
Kas Dana BOS	194.546.712,00	807.017.842,39
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	386.955.981,24	0,00
Kas Lainnya	126.077.192,00	0,00
Jumlah	5.125.743.882,89	32.575.559.406,74

Kas dan Bank per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.125.743.882,89 terdiri dari:

7.5.3.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	2.558.239.608,75	29.896.697.590,30

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.558.239.608,75 terdiri dari:

Tabel 7.5.42 Rincian Kas di Kas Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022
A.	BANK RIAU KEPRI KCP RANAI NATUNA	
1	Rekening Kas Umum Daerah (No. Rek. 117-02-00010)	2.526.477.657,75
2	Rekening Penerimaan Daerah (No. Rek. 117-02-22222)	31.761.951,00
3	Rekening Pengeluaran Daerah (No. Rek. 11-70-23333-3)	0,00
	Jumlah Kas di Kas Daerah	2.558.239.608,75

Saldo Rekening Kas Umum Daerah (No. Rek. 117-02-00010) secara pembukuan Rp2.526.477.657,75 dan saldo rekening koran (No. Rek. 117-02-00010) sebesar Rp34.630.547.913,89. Perbedaan saldo kas buku dan saldo bank sebesar Rp32.104.070.256,14 yang merupakan selisih antara penerimaan yang telah dicatat tetapi belum diterima oleh Bank sebesar Rp192.102.868,00 dan pengeluaran SP2D yang telah dicatat pengeluaran belanjanya pada buku kas dan belum diposting oleh Bank Riau Kepri sebesar Rp29.104.322.660,14 dan penyetoran utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp3.191.927.596 yang belum diposting oleh Bank. Saldo tersebut termasuk Utang PFK Iuran Wajib Pegawai yang belum diterbitkan dokumen pembayaran sebesar Rp77.132,00 sampai dengan 31 Desember 2022.

7.5.3.1.2 Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kas di BLUD	1.859.924.388,90	1.871.843.974,05

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.859.924.388,90 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.43 Rincian Kas di BLUD

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Kas di Rekening Bank Riau (No.Rek. 11-70-20213-9)	1.859.924.388,90
Kas di Rekening Bank Mandiri (No.Rek. 109-00-1378157-0)	0,00
Jumlah Kas di BLUD RSUD Natuna	1.859.924.388,90

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2022 merupakan saldo yang berada di rekening bank. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan adalah Rp0,00. Rekening Bank Mandiri 109-00-1378157-0 telah dilakukan penutupan dan tidak digunakan lagi dalam proses operasional BLUD, dan semua saldo yang terdapat pada rekening tersebut telah dipindahkan ke Rekening Bank Riau Kepri Syariah dengan nomor 11-70-20213-9.

7.5.3.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

7.5.3.1.4 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

7.5.3.1.5 Kas Dana BOS

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kas Dana BOS	194.546.712,00	807.017.842,39

Saldo Kas Dana BOS Per 31 Desember 2022 sebesar Rp 194.546.712,00.
Perhitungan Saldo Dana BOS sebagai berikut:

Tabel 7.5.44 Perhitungan Posisi Kas Dana BOS Pada Dinas Pendidikan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2021	Koreksi Saldo Awal	Pendapatan 2022	Utang PFK yang Belum Disetor	Pungutan Pajak Restoran yang belum disetor	Belanja 2022	Saldo 31 Desember 2022
1	Dana BOS SD	497.376.434,81	52.137.313,01	10.230.677.222,00	22.006.615,00	6.117.200,00	10.649.819.697,80	54.220.461,00
2	Dana BOS SMP	309.641.407,58	11,58	4.485.389.718,00	4.632.331,00	401.780,00	4.659.738.974,00	140.326.251,00
JUMLAH		807.017.842,39	52.137.324,59	14.716.066.940,00	26.638.946,00	6.518.980,00	15.309.558.671,80	194.546.712,00

Koreksi Pencatatan sebesar Rp52.137.324,59 merupakan koreksi pencatatan atas pembulatan kas tunai saldo akhir tahun 2021 dan koreksi belanja tahun 2021 yang telah dibayarkan tetapi belum tercatat sampai dengan akhir tahun 2021. Terdapat Utang PFK yang belum disetor ke rekening Kas Negara Rp26.638.946,00 yang terdiri dari Utang PFK PPN Rp23.652.532,00, Utang PFK PPh 21 Rp969.340,00 dan Utang PFK PPh 21 Rp 2.017.074,00. Kemudian terdapat kewajiban atas Penyetoran Pajak Restoran yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp6.518.980,00.

Rincian Saldo Dana BOS tingkat SD sebagai berikut:

Tabel 7.5.45 Posisi Kas Dana BOS Tingkat SD

(dalam rupiah)

No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah Saldo Kas
1	11.002.363	SD Negeri 001 Sabang Barat	Midai	847.143,00
2	11.001.175	SD Negeri 002 Air Putih	Midai	1.043,00
3	11.001.185	SD Negeri 003 Sabang Barat	Midai	5.543,00
4	11.001.196	SD Negeri 004 Gunung Sebelat	Midai	5.000,00
5	11.001.161	SD Negeri 001 Sedanau	Bunguran Barat	38.209,00
6	11.001.173	SD Negeri 002 Sedanau	Bunguran Barat	66.000,00
7	11.001.314	SD Negeri 003 Sedanau	Bunguran Barat	1.600,00
8	11.001.332	SD Negeri 004 Pian Tengah	Bunguran Barat	2.053.350,00
9	11.001.341	SD Negeri 005 Sedanau	Bunguran Barat	45.500,00
10	11.001.347	SD Negeri 006 Sedanau	Bunguran Barat	546.110,00
11	11.001.353	SD Negeri 007 Selaut	Bunguran Barat	99.500,00
12	11.001.359	SD Negeri 008 Binjai	Bunguran Barat	1.977.499,00
13	11.001.375	SD Negeri 009 Mekar Jaya	Bunguran Barat	50.291,00
14	11.001.380	SD Negeri 010 Sedanau	Bunguran Barat	171.794,00
15	11.001.160	SD Negeri 001 Ranai	Bunguran Timur	30.250,00
16	11.001.172	SD Negeri 002 Ranai	Bunguran Timur	479,00
17	11.001.190	SD Negeri 003 Sungai Ulu	Bunguran Timur	0,00
18	11.001.308	SD Negeri 004 Ranai	Bunguran Timur	1.066,00
19	11.001.326	SD Negeri 005 Sepempang	Bunguran Timur	3.124,00
20	11.001.350	SD Negeri 006 Bandarsyah	Bunguran Timur	326,00
21	11.001.357	SD Negeri 007 Ranai Darat	Bunguran Timur	4.115.500,00
22	11.001.368	SD Negeri 008 Batu Gajah	Bunguran Timur	0,00
23	11.001.378	SD Negeri 009 Bandarsyah	Bunguran Timur	0,00
24	11.001.383	SD Negeri 010 Batu Gajah	Bunguran Timur	0,00
25	11.002.764	SD Negeri 011 Ranai	Bunguran Timur	0,00
26	69.964.075	SD Negeri 012 Ranai	Bunguran Timur	89.000,00
27	11.002.364	SD Negeri 001 Serasan	Serasan	528,00
28	11.001.165	SD Negeri 002 Serasan	Serasan	120.189,00
29	11.001.191	SD Negeri 003 Tanjung Balau	Serasan	1.768.104,00
30	11.001.197	SD Negeri 004 Jermalik	Serasan	0,00
31	11.001.311	SD Negeri 005 Pangkalan	Serasan	1.820,00
32	11.001.316	SD Negeri 006 Batu Berian	Serasan	1.577.058,00
33	11.001.328	SD Negeri 007 Hilir	Serasan	0,00
34	11.001.162	SD Negeri 001 Subi	Subi	2.875.134,00
35	11.002.509	SD Negeri 002 Meliah	Subi	138.000,00
36	11.001.181	SD Negeri 003 Subi Besar	Subi	31.629,00
37	11.001.186	SD Negeri 004 Pulau Panjang	Subi	7.320.000,00
38	11.001.198	SD Negeri 005 Kerdau	Subi	0,00

No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah Saldo Kas
39	11.002.358	SD Negeri 001 Kelarik Air Mali	Bunguran Utara	0,00
40	11.001.168	SD Negeri 002 Kelarik	Bunguran Utara	0,00
41	11.001.178	SD Negeri 003 Kelarik Utara	Bunguran Utara	0,00
42	11.001.189	SD Negeri 004 Kelarik Barat	Bunguran Utara	0,00
43	11.001.302	SD Negeri 005 Teluk Buton	Bunguran Utara	1.426.731,00
44	11.002.448	SD Negeri 001 Air Payang	Pulau Laut	3.509.426,00
45	11.001.174	SD Negeri 002 Tanjung Pala	Pulau Laut	2.443.354,00
46	11.001.177	SD Negeri 003 Kadur	Pulau Laut	1.182.140,00
47	11.001.192	SD Negeri 001 Tanjung Batang	Pulau Tiga	616.000,00
48	11.001.300	SD Negeri 002 Sededap	Pulau Tiga	0,00
49	11.001.304	SD Negeri 003 Sabang Mawang	Pulau Tiga	0,00
50	11.001.327	SD Negeri 004 Serantas	Pulau Tiga	123.790,00
51	11.001.182	SD Negeri 001 Tanjung	Bunguran Timur Laut	817.601,00
52	11.001.312	SD Negeri 002 Kelanga	Bunguran Timur Laut	0,00
53	11.001.319	SD Negeri 003 Pengadah	Bunguran Timur Laut	0,00
54	11.001.335	SD Negeri 004 Ceruk	Bunguran Timur Laut	0,00
55	11.001.372	SD Negeri 005 Limau Manis	Bunguran Timur Laut	2.000,00
56	11.001.381	SD Negeri 006 Selemam	Bunguran Timur Laut	1.000,00
57	11.001.382	SD Negeri 007 Sebadai Hulu	Bunguran Timur Laut	0,00
58	11.001.360	SD Negeri 001 Harapan Jaya	Bunguran Tengah	5.059.954,00
59	11.001.365	SD Negeri 002 Tapau	Bunguran Tengah	461.520,00
60	11.001.370	SD Negeri 003 Air Lengit	Bunguran Tengah	270.081,00
61	11.001.195	SD Negeri 001 Cemaga	Bunguran Selatan	3.171.739,00
62	11.001.330	SD Negeri 002 Cemaga Tengah	Bunguran Selatan	0,00
63	11.001.345	SD Negeri 003 Cemaga Utara	Bunguran Selatan	0,00
64	11.001.346	SD Negeri 004 Cemaga Selatan	Bunguran Selatan	139.050,00
65	11.001.376	SD Negeri 005 Cemaga Selatan	Bunguran Selatan	65.000,00
66	11.001.384	SD Negeri 006 Cemaga Selatan	Bunguran Selatan	450.000,00
67	11.001.176	SD Negeri 001 Arung Ayam	Serasan Timur	259.200,00
68	11.001.303	SD Negeri 002 Air Nusa	Serasan Timur	1.049.719,00
69	11.001.325	SD Negeri 003 Payak	Serasan Timur	217.200,00
70	69.893.603	SD Negeri 004 Air Ringau	Serasan Timur	2.195.592,00
71	11.001.338	SD Negeri 001 Sedanau Timur	Bunguran Batubi	685.207,00
72	11.001.366	SD Negeri 002 Batubi Jaya	Bunguran Batubi	1.443.753,00
73	11.001.369	SD Negeri 003 Gunung Putri	Bunguran Batubi	14.000,00
74	11.001.371	SD Negeri 004 Sedarat Baru	Bunguran Batubi	33.600,00
75	11.001.374	SD Negeri 005 Batubi Jaya	Bunguran Batubi	1.369.350,00
76	11.001.183	SD Negeri 001 Pulau Tiga	Pulau Tiga Barat	510.000,00
77	11.001.321	SD Negeri 002 Selading	Pulau Tiga Barat	2.412.964,00
78	11.001.358	SD Negeri 003 Setumuk	Pulau Tiga Barat	50.000,00
79	11.001.167	SD Negeri 001 Batu Belanak	Suak Midai	259.701,00
80	11.001.305	SD Negeri 002 Gunung Jambat	Suak Midai	0,00
Jumlah				54.220.461,00

Rincian Dana BOS tingkat SMP sebagai berikut:

Tabel 7.5.46 Posisi Kas Dana BOS Tingkat SMP

(dalam rupiah)				
No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah Saldo Kas
1	11000324	SMP Negeri 1 Midai	Midai	5.144.111,00
2	11000318	SMP Negeri 1 Bunguran Barat	Bunguran Barat	4.209.437,00
3	69980325	SMP Negeri 3 Satu Atap Bunguran Barat	Bunguran Barat	200,00
4	11002503	SMP Negeri Satu Atap Pian Tengah	Bunguran Barat	2.000,00
5	11000317	SMP Negeri 1 Bunguran Timur	Bunguran Timur	96.475.241,00
6	11002054	SMP Negeri 2 Bunguran Timur	Bunguran Timur	754.500,00
7	11002498	SMP Negeri 3 Bunguran Timur	Bunguran Timur	24.937.600,00
8	11000325	SMP Negeri 1 Serasan	Serasan	0,00
9	69978814	SMP Negeri 2 Satu Atap Serasan	Serasan	908.500,00
10	69978813	SMP Negeri 3 Satap Serasan	Serasan	0,00
11	11001399	SMP Negeri 1 Subi	Subi	115.300,00
12	11002057	SMP Negeri Satu Atap Pulau Panjang	Subi	0,00
13	11001396	SMP Negeri 1 Bunguran Utara	Bunguran Utara	449.700,00
14	11002508	SMP Negeri 2 Bunguran Utara	Bunguran Utara	3.080,00
15	69978868	SMP Negeri 3 Satu Atap Bunguran Utara	Bunguran Utara	291.000,00
16	11001398	SMP Negeri 1 Pulau Laut	Pulau Laut	84,00
17	11001405	SMP Negeri 1 Pulau Tiga	Pulau Tiga	0,00

No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah Saldo Kas
18	11001403	SMP Negeri 1 Bunguran Timur Laut	Bunguran Timur Laut	0,00
19	11002055	SMP Negeri Satu Atap Pengadah	Bunguran Timur Laut	0,00
20	11000329	SMP Negeri 1 Bunguran Tengah	Bunguran Tengah	212.840,00
21	11001404	SMP Negeri 1 Bunguran Selatan	Bunguran Selatan	899.099,00
22	69978815	SMP Negeri 2 Satu Atap Bunguran Selatan	Bunguran Selatan	0,00
23	11002053	SMP Negeri 1 Serasan Timur	Serasan Timur	0,00
24	11000328	SMP Negeri 1 Bunguran Batubi	Bunguran Batubi	170.000,00
25	11001402	SMP Negeri 1 Pulau Tiga Barat	Pulau Tiga Barat	5.753.559,00
Jumlah				140.326.251,00

7.5.3.1.6 Kas Dana Kapitasi Pada FKTP

Kas Dana Kapitasi pada FKTP	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	386.955.981,24	0,00

Saldo Kas Dana Kapitasi Pada FKTP per 31 Desember 2021 disajikan bagian dalam Kas di KasDa sejumlah Rp742.939.596,57. Pada Tahun 2022 Kas Dana Kapitasi Pada FKTP disajikan tersendiri. Saldo Kas Dana Kapitasi Pada FKTP per 31 Desember 2022 sebesar Rp386.955.981,24. Saldo pada Bendahara Dana Kapitasi FKTP Puskesmas dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.47 Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP

(dalam rupiah)		
No.	Nama FKTP	Saldo Akhir
1	Puskesmas Ranai	32.947,00
2	Puskesmas Bunguran Timur Laut	24.155.277,00
3	Puskesmas Bunguran Tengah	7,00
4	Puskesmas Bunguran Selatan	4.914.472,00
5	Puskesmas Kelarik	7.806.260,00
6	Puskesmas Sedanau	81.156.395,57
7	Puskesmas Pulau Tiga	96.566.372,00
8	Puskesmas Pulau Laut	0,00
9	Puskesmas Midai	119.738.721,00
10	Puskesmas Serasan	9.127.712,46
11	Puskesmas Serasan Timur	1.877.342,00
12	Puskesmas Subi	10.563.225,00
13	Puskesmas Batubi Jaya	30.058.750,21
14	Puskesmas Pulau Tiga Barat	958.500,00
Jumlah		386.955.981,24

7.5.3.1.7 Kas Lainnya

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Saldo Kas Lainnya	126.077.192,00	0,00

Saldo Kas Lainnya Per 31 Desember 2022 sebesar Rp126.077.192,00. Saldo Kas Lainnya dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.48 Daftar Saldo Kas Lainnya*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo Dana BOP PAUD pada Sekolah	1.194.164,00,
2	Saldo Kas Piutang Dana Bergulir	111.603.019,00
3	Saldo Kas Dana BROS	13.280.009,00
	Jumlah	126.077.192,00

Saldo Dana BOP PAUD pada Sekolah merupakan saldo kas dari pengelolaan DAK Non Fisik BOP PAUD Tahun 2022 yang dtransfer langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Sekolah. Saldo Dana BOP PAUD pada Sekolah Rp1.194.164,00 berada pada TK Negeri 002 Bunguran Timur.

Saldo Kas Piutang Dana Bergulir Rp111.603.019,00 merupakan Saldo Pengembalian dari piutang dana bergulir yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Rincian Saldo Pengelolaan Dana Bergulir Per 31 Desember 2022 Sebagai berikut:

Tabel 7.5.49 Daftar Saldo Kas Lainnya Dana Bergulir*(dalam rupiah)*

No.	Jenis Dana Bergulir	Nama Rekening	Nomor Rekening	Jumlah
1	UKM	Peng. Pokok Dana Bergulir Kab. Natuna 2007	11-70-20087-1	111.603.019,00
		Jumlah		111.603.019,00

Saldo Kas Dana BROS Rp13.280.009,00 merupakan Saldo sisa dari belanja dana BROS Tahun Sebelumnya yang masih terdapat di Rekening BROS sekolah. Saldo tersebut merupakan saldo yang bisa dipindahkan ke rekening Kas Umum Daerah setelah dikurangi perhitungan biaya penutupan rekening yang dibebankan oleh Bank.

Piutang

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Piutang	(Rp)	(Rp)
	99.296.686.051,96	71.820.259.536,09

Piutang tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

Tabel 7.5.50 Saldo Piutang*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022	Saldo per 31 Desember 2021
1	Piutang Pajak	20.616.125.160,06	18.090.739.272,19
2	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	41.608.034.416,90	47.096.992.713,90
3	Piutang Transfer Antar Daerah	37.072.526.475,00	6.632.527.550,00
4	Piutang Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	99.296.686.051,96	71.820.259.536,09

7.5.3.1.8 Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp20.616.125.160,06 merupakan nilai piutang pajak yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Saldo Piutang Pajak tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.51 Daftar Mutasi Saldo Piutang Pajak Tahun 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2021	Penambahan 2022	Pengurangan 2022		Saldo per 31 Desember 2022
				Pembayaran	Koreksi Pencatatan	
1	Piutang Pajak Reklame	47.145.000,00	111.250.800,00	110.915.800,00	0,00	47.480.000,00
2	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	17.915.401.140,00	4.027.123.449,00	1.383.332.276,00	117.726.782,00	20.441.465.531,00
3	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	128.193.132,19	747.245.949,39	748.259.452,52	0,00	127.179.629,06
Jumlah		18.090.739.272,19	4.885.620.198,39	2.242.507.528,52	117.726.782,00	20.616.125.160,06

- 1) Piutang Pajak Reklame sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp47.480.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.52 Rincian Piutang Pajak Reklame

(dalam rupiah)

Tahun	Saldo per 31 Des 2021 (Rp)	Ketetapan baru (Piutang 2022)	Pembayaran 2022 (Rp)	Saldo per 31 Des 2022 (Rp)
2015	17.832.000,00	0,00	0,00	17.832.000,00
2016	7.172.000,00	0,00	0,00	7.172.000,00
2017	2.908.000,00	0,00	0,00	2.908.000,00
2018	3.738.000,00	0,00	0,00	3.738.000,00
2019	7.364.000,00	0,00	0,00	7.364.000,00
2020	3.832.000,00	0,00	0,00	3.832.000,00
2021	4.299.000,00	0,00	1.563.000,00	2.736.000,00
2022	0,00	111.250.800,00	109.352.800,00	1.898.000,00
Jumlah	47.145.000,00	111.250.800,00	110.915.800,00	47.480.000,00

- 2) Piutang pajak bumi dan bangunan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp20.441.465.531,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.53 Rincian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

(dalam rupiah)

Tahun Pajak	Saldo per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan Ketetapan TA 2022 (Rp)		Pengurangan				Saldo per 31 Des 2022 (Rp)
		Ketetapan Tahun 2022	Koreksi Pencatatan	Pembayaran 2022 (Rp)	Relaksasi	Pembetulan	Koreksi Pencatatan	
2010	433.063.538,00	0,00	353.693.885,00	9.122.178,00	2.042.007,00	5.772.208,00	0,00	769.821.030,00
2011	933.919.113,00	0,00	0,00	8.168.064,00	2.772.404,00	5.772.208,00	131.253.977,00	785.952.460,00
2012	849.873.434,00	0,00	0,00	9.078.444,00	2.625.216,00	5.772.208,00	25.098.885,00	807.298.681,00
2013	894.732.990,00	0,00	0,00	11.061.095,00	2.921.315,00	5.792.208,00	11.461.860,00	863.496.512,00
2014	900.873.893,00	0,00	0,00	11.230.778,00	1.502.976,00	5.792.208,00	40.338.316,00	842.009.615,00
2015	903.143.385,00	0,00	0,00	11.587.770,00	1.747.782,00	5.792.208,00	942.444,00	883.073.181,00
2016	874.271.989,00	0,00	21.791.970,00	12.724.153,00	1.706.952,00	5.792.208,00	0,00	875.840.646,00
2017	1.793.530.621,00	0,00	0,00	25.409.065,00	2.480.552,00	9.647.234,00	5.587.506,00	1.750.406.264,00
2018	2.242.814.452,00	0,00	0,00	37.913.346,00	4.562.264,00	9.647.234,00	160.802.867,00	2.029.888.741,00
2019	2.331.030.849,00	0,00	0,00	59.494.137,00	6.643.688,00	9.647.234,00	0,00	2.255.245.790,00
2020	2.701.338.137,00	0,00	0,00	88.907.994,00	0,00	9.647.234,00	0,00	2.602.782.909,00
2021	3.056.808.739,00	0,00	0,00	175.068.511,00	0,00	9.647.234,00	0,00	2.872.092.994,00
2022	0,00	4.027.123.449,00	0,00	923.566.741,00	0,00	0,00	0,00	3.103.556.708,00
Jumlah	17.915.401.140,00	4.027.123.449,00	375.485.855,00	1.383.332.276,00	29.005.156,00	88.721.626,00	375.485.855,00	20.441.465.531,00

Terdapat selisih antara Pembayaran 2022 dengan Realisasi PBB-P2 dalam laporan realisasi anggaran sejumlah Rp65.408,00 yang merupakan pembetulan pembayaran PBB-P2 selama tahun 2022. Kemudian terdapat kebijakan relaksasi pembayaran PBB-P2 selama tahun 2022 yang mempengaruhi dari pengurangan piutang PBB-P2 tahun sebelumnya sebesar Rp29.005.156,00, dan terdapat pembetulan dari ketetapan yang telah terbit tahun sebelumnya sejumlah Rp88.721.626,00. Koreksi pencatatan sejumlah Rp375.485.855,00 pada posisi penambahan dan pengurangan merupakan koreksi atas pembetulan transaksi tahun-tahun sebelumnya yang telah dicatat oleh aplikasi Income Poin PBB-P2 tetapi belum dilakukan koreksi dan pengungkapan pada Laporan keuangan.

- 3) Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp127.179.629,06 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.54 Rincian Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(dalam rupiah)

Tahun	Saldo 31 Desember 2021	Ketetapan baru (Piutang 2022)	Pembayaran 2022 (Rp)	Saldo Akhir per 31 Desember 2022
2017	308.939,38	0,00	0,00	308.939,38
2018	44.264.150,51	0,00	0,00	44.264.150,51
2019	41.150.158,49	0,00	242.653,13	40.907.505,36
2020	33.164.604,18	0,00	636.501,25	32.528.102,93
2021	9.305.279,63	0,00	235.568,75	9.069.710,88
2022	0,00	747.245.949,39	747.144.729,39	101.220,00
Jumlah	128.193.132,19	747.245.949,39	748.259.452,52	127.179.629,06

7.5.3.1.9 Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan piutang pajak yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Piutang dalam neraca disajikan dengan metode penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyisihan piutang pajak tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang pajak yang tidak tertagih dikecualikan untuk piutang yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Penyisihan piutang tidak tertagih per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.55 Rincian Perhitungan Piutang Tak Tertagih Atas Piutang Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	Umur Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
		< 1 THN	< 1 S.D 3THN	3 S.D 5 THN	> 5 THN	
1	Piutang Pajak Reklame	1.898.000,00	6.568.000,00	11.102.000,00	27.912.000,00	47.480.000,00
	% Penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	9.490,00	1.642.000,00	5.551.000,00	27.912.000,00	35.114.490,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	1.888.510,00	4.926.000,00	5.551.000,00	0,00	12.365.510,00
2	Piutang PBB-P2	3.103.556.708,00	5.474.875.903,00	4.285.134.531,00	7.577.898.389,00	20.441.465.531,00
	% Penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	15.517.783,54	1.368.718.975,75	2.142.567.265,50	7.577.898.389,00	11.104.702.413,79
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	3.088.038.924,46	4.106.156.927,25	2.142.567.265,50	0,00	9.336.763.117,21
3	Piutang BPHTB	101.220,00	41.597.813,81	85.171.655,87	308.939,38	127.179.629,06
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	506,10	10.399.453,45	42.585.827,94	308.939,38	53.294.726,87
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	100.713,90	31.198.360,36	42.585.827,94	0,00	73.884.902,19
	JUMLAH NRV	3.090.028.148,36	4.142.281.287,61	2.190.704.093,44	0,00	9.423.013.529,40
	JUMLAH PIUTANG TAK TERTAGIH	15.527.779,64	1.380.760.429,20	2.190.704.093,44	7.606.119.328,38	11.193.111.630,66

7.5.3.1.10 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp41.608.034.416,90 terdiri dari:

Tabel 7.5.56 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah

(dalam rupiah)

Jenis Piutang Lainnya	Saldo per 31 Des 2021	Penambahan Tahun 2022	Pengurangan		Saldo per 31 Des 2022
			Pembayaran tahun 2022	Koreksi Pencatatan	
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Piutang Dana Pensiun PNS)	84.650.000,00	0,00	29.250.000,00	30.900.000,00	24.500.000,00

Jenis Piutang Lainnya	Saldo per 31 Des 2021	Penambahan Tahun 2022	Pengurangan		Saldo per 31 Des 2022
			Pembayaran tahun 2022	Koreksi Pencatatan	
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta (Piutang SKY Aviation)	258.664.750,00	0,00	0,00	0,00	258.664.750,00
Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	10.261.918.852,00	5.035.530.445,00	9.779.242.159,00	446.533.342,00	5.071.673.796,00
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	36.491.759.111,90	0,00	145.573.759,00	92.989.482,00	36.253.195.870,90
Jumlah	47.096.992.713,90	5.035.530.445,00	9.954.065.918,00	570.422.824,00	41.608.034.416,90

- 1) Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Piutang Dana Pensiun PNS) merupakan piutang yang terjadi akibat terlambatnya penyampaian SK pensiun oleh pensiunan PNS, sehingga menyebabkan gaji pensiunan PNS tersebut masih terbayarkan di atas tanggal SK pensiun. Pengembalian atas piutang tersebut dilakukan Oleh PT. Taspen (Persero) selaku pengelola dana pensiunan PNS dengan memotong uang pensiunan bulanan PNS. Jumlah piutang dana pensiun per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 7.5.57 Rincian Piutang Dana Pensiun PNS

(dalam rupiah)

No	Nama	Nomor Ketetapan	Saldo Per 31 Desember 2022
1	AWALUDDIN	049/KEU/SKPP/II/2016	6.000.000,00
2	Drs. CHAIDIR CHAR, M.Si	047/KEU/SKPP/X/2017	17.500.000,00
3	YULI HAMSAR	013/KEU/SKPP/V/2020	1.000.000,00
Jumlah			24.500.000,00

Terdapat koreksi pencatatan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Piutang Dana Pensiun PNS) sebesar Rp30.900.000,00 atas nama Drs. H. Taslim dan Drs. Chaidir Char, M.Si yang dibayarkan tahun sebelumnya melalui PT. Taspen (Persero).

- 2) Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta (Piutang SKY Aviation) merupakan piutang yang timbul dikarenakan masih terdapat belanja subsidi penerbangan yang diberikan kepada PT. Sky Aviation yang belum dipertanggungjawabkan. Sampai dengan tahun 2022 masih belum terdapat pelunasan dan jumlahnya masih sebesar Rp258.664.750,00.
- 3) Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.071.673.796,00 merupakan piutang yang berasal dari RSUD selaku BLUD di Kabupaten Natuna dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.58 Rincian Piutang Pendapatan RSUD – BLUD

(dalam rupiah)

Jenis Piutang Lainnya	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)		Saldo per 31 Des 2022 (Rp)
			Koreksi Pencatatan	Pembayaran tahun 2022 (Rp)	
Piutang BPJS Kesehatan	10.131.870.900,00	5.031.023.283,00	418.315.800,00	9.713.555.100,00	5.031.023.283,00
Piutang BPJS Ketenagakerjaan	66.009.911,00	2.006.347,00	28.217.542,00	37.792.369,00	2.006.347,00

Jenis Piutang Lainnya	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)		Saldo per 31 Des 2022 (Rp)
			Koreksi Pencatatan	Pembayaran tahun 2022 (Rp)	
PT. Jasa Raharja	18.444.690,00	35.000,00	0	18.444.690,00	35.000,00
PT. Pegadaian	0	2.068.000,00	0	0	2.068.000,00
PT. Bank Riau Kepri Syariah	0	397.815,00	0	0	397.815,00
PT. Patra Jasa	9.450.000,00	0	0	9.450.000,00	0
Piutang PeruSDa	31.649.078,00	0	0	0	31.649.078,00
Piutang TNI AL	4.494.273,00	0	0	0	4.494.273,00
Jumlah	10.261.918.852,00	5.035.530.445,00	446.533.342,00	9.779.242.159,00	5.071.673.796,00

Koreksi Pencatatan Piutang BLUD sebesar Rp446.533.342,00 terdiri dari koreksi piutang BPJS kesehatan yang tidak diakui berdasarkan hasil verifikasi oleh BPJS Kesehatan sebesar Rp418.315.800,00 dan Kelebihan Pencatatan piutang BPJS Ketenagakerjaan Rp28.217.542,00 yang telah dibayarkan pada tahun sebelumnya.

- 4) Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan piutang yang timbul dari pengelolaan dana bergulir yang dihentikan pelaksanaan programnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 278 Tahun 2021 tentang Penghentian Program Dana Bergulir pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, dan Dinas Perikanan. Program dana bergulir yang dihentikan dan dialihkan pencatatannya ke piutang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.59 Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2021	Pengurangan		Saldo Akhir Per 31 Desember 2022
			Pembayaran	Koreksi Pencatatan	
1	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan UKM	29.257.205.176,90	125.249.684,00	92.989.482,00	29.038.966.010,90
2	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Perikanan Tahun 2002	3.984.829.775,00	0,00	0,00	3.984.829.775,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Perikanan Tahun 2003	3.249.724.160,00	20.324.075,00	0,00	3.229.400.085,00
Jumlah		36.491.759.111,90	145.573.759,00	92.989.482,00	36.253.195.870,90

Terdapat koreksi pencatatan sebesar Rp92.989.482,00 yang merupakan Pelunasan Piutang dana bergulir yang penagihannya dilakukan oleh KPKNL Wilayah Kepri yang belum dikonsolidasi Lapornya dalam Laporan Dana Bergulir Dari Bank sebelum tahun 2022. Pembayaran Piutang Dana Bergulir yang dilakukan oleh KPKNL Wilayah Kepri sebesar Rp13.646.665,00, dan telah disetor ke Kasda sebesar Rp12.406.059,09 dan sisanya sebesar Rp1.240.605,90/ 10% dari Total Pembayaran diserahkan sebagai biaya administrasi pemungutan ke KPKNL Wilayah Kepri.

Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan UKM per wilayah sebagai berikut:

Tabel 7.5.60 Rincian Piutang Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi dan UKM

(dalam rupiah)

No	Rekapan Piutang	Jumlah
1	Bunguran Timur	10.717.295.719,00
2	Bunguran Timur Laut	1.508.677.122,00
3	Bunguran Tengah	305.839.259,00
4	Bunguran Utara	1.254.867.403,00
5	Bunguran Barat	5.627.943.783,00
6	Pulau Tiga	3.407.776.970,00
7	Serasan	1.914.233.600,00
8	Subi	519.260.512,00
9	Midai	870.236.463,00
10	Pulau Laut	676.466.558,90
11	Koperasi	2.181.418.621,00
12	Bunguran Selatan	54.950.000,00
Jumlah		29.038.966.010,90

Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Perikanan Tahun 2002 dan 2003 per wilayah sebagai berikut:

Tabel 7.5.61 Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Perikanan Tahun 2002 dan 2003

(dalam rupiah)

No	Rekapan Penerima Dana Bergulir	Baki Debet
A	Piutang Pengelolaan Dana Bergulir Perikanan Tahun 2002	
1	Bunguran Timur	863.403.755,00
2	Bunguran Barat	1.654.740.775,00
3	Serasan	678.000.020,00
4	Midai	444.074.110,00
5	Subi	198.500.000,00
6	Bunguran Utara	46.111.115,00
7	Pulau Laut	100.000.000,00
Jumlah		3.984.829.775,00
B	Piutang Pengelolaan Dana Bergulir Perikanan Tahun 2003	
1	Bunguran Timur	1.005.972.275
2	Bunguran Barat	718.703.715
3	Serasan	668.851.860
4	Midai	361.798.155
5	Subi	57.592.595
6	Bunguran Utara	219.629.630
7	Pulau Laut	196.851.855
Jumlah		3.229.400.085
Jumlah A + B		7.214.229.860,00

7.5.3.1.11 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Piutang dalam neraca disajikan dengan metode penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyisihan piutang pajak tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang pajak yang tidak tertagih dikecualikan untuk piutang yang bersumber dari Pemerintah Provinsi. Penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.62 Rincian Perhitungan Piutang Tak Tertagih Atas Piutang Lain-Lain PAD yang sah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Umur Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar <1 THN	Kurang Lancar <1 S.D 3 THN	Diragukan 3 S.D 5 THN	Macet > 5 THN	
1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Piutang Dana Pensiun PNS)	24.500.000,00	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00
	% penyesihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyesihan Piutang Tidak Tertagih	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	24.377.500,00	0,00	0,00	0,00	24.377.500,00
2	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta (Piutang SKY Aviation)	0,00	0,00	0,00	258.664.750,00	258.664.750,00
	% penyesihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyesihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	258.664.750,00	258.664.750,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BPJS Kesehatan	5.031.023.283,00	0,00	0,00	0,00	5.031.023.283,00
	% penyesihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyesihan Piutang Tidak Tertagih	25.155.116,42	0,00	0,00	0,00	25.155.116,42
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	5.005.868.166,59	0,00	0,00	0,00	5.005.868.166,59
4	BPJS Kenetagakerjaan	2.006.347,00	0,00	0,00	0,00	2.006.347,00
	% penyesihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyesihan Piutang Tidak Tertagih	10.031,74	0,00	0,00	0,00	10.031,74
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	1.996.315,27	0,00	0,00	0,00	1.996.315,27
5	PT. Jasa Raharja	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	% penyesihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyesihan Piutang Tidak Tertagih	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	34.825,00	0,00	0,00	0,00	34.825,00
6	Piutang Pegadaian	2.068.000,00	0,00	0,00	0,00	2.068.000,00
	% penyesihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyesihan Piutang Tidak Tertagih	10.340,00	0,00	0,00	0,00	10.340,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	2.057.660,00	0,00	0,00	0,00	2.057.660,00
7	Piutang Bank Riau Kepri	397.815,00	0,00	0,00	0,00	397.815,00
	% penyesihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyesihan Piutang Tidak Tertagih	1.989,08	0,00	0,00	0,00	1.989,08
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	395.825,93	0,00	0,00	0,00	395.825,93
8	Piutang PeruSDa	0,00	0,00	0,00	31.649.078,00	31.649.078,00
	% penyesihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyesihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	31.649.078,00	31.649.078,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Piutang TNI AL	0,00	0,00	0,00	4.494.273,00	4.494.273,00
	% penyesihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyesihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	4.494.273,00	4.494.273,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH NRV	5.034.730.292,78	0,00	0,00	0,00	5.034.730.292,78
	JUMLAH PIUTANG TAK TERTAGIH	25.300.152,23	0,00	0,00	294.808.101,00	320.108.253,23

Penyesihan piutang tidak tertagih atas piutang hasil pengelolaan dana bergulir adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.63 Rincian Perhitungan Piutang Tak Tertagih Atas Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

(dalam rupiah)

No	Uraian	Umur Piutang				
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah (Rp)
		< 1 THN	< 1 S.D 3THN	3 S.D 5 THN	> 5 THN	
1	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan UKM	0,00	0,00	15.000.000,00	29.023.966.010,90	29.038.966.010,90
	% Penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	7.500.000,00	29.023.966.010,90	29.031.466.010,90
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
2	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Perikanan Tahun 2002	0,00	0,00	0,00	3.984.829.775,00	3.984.829.775
	% Penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	3.984.829.775,00	3.984.829.775,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Perikanan Tahun 2002	0,00	0,00	0,00	3.229.400.085,00	3.229.400.085,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	3.229.400.085,00	3.229.400.085,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH NRV	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
	JUMLAH PIUTANG TAK TERTAGIH	0,00	0,00	7.500.000,00	36.238.195.870,90	36.245.695.870,90

7.5.3.1.12 Piutang Transfer Antar Daerah

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp37.072.526.475,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.64 Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak

(dalam rupiah)

Jenis Piutang Lainnya	Saldo per 31 Des 2021	Penambahan	Pembayaran tahun 2022	Saldo per 31 Des 2022
Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.027.705.006,00	3.180.416.314,00	3.027.705.006,00	3.180.416.314,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.587.882.917,00	2.477.914.314,00	1.587.882.917,00	2.477.914.314,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	8.846.634,00	10.710.338,00	8.846.634,00	10.710.338,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.008.092.993,00	31.403.485.509,00	2.008.092.993,00	31.403.485.509,00
JUMLAH	6.632.527.550,00	37.072.526.475,00	6.632.527.550,00	37.072.526.475,00

Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2022 merupakan kurang bayar bagi hasil dari Pemerintah Provinsi pada Tahun 2022 berdasarkan dari SK Gubernur Kepri Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penghitungan Tunda Salur Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.

7.5.3.1.13 Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

7.5.3.1.14 Penyisihan Piutang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

7.5.3.1.15 Beban Dibayar Dimuka

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Beban Dibayar Dimuka	284.791.666,66	171.250.000,01

Pada akhir tahun 2022 terdapat saldo Beban Dibayar Muka sebesar Rp284.791.666,66 yang dirinci sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp 171.250.000,01
Penambahan tahun 2022	Rp 284.791.666,66
Jumlah	Rp 456.041.666,67
Pengurangan tahun 2022	Rp 171.250.000,01
Saldo per 31 Desember 2022	Rp 284.791.666,66

Jumlah tersebut merupakan Beban Dibayar Dimuka yang terdiri dari:

Tabel 7.5.65 Rincian Beban Dibayar Dimuka

(dalam rupiah)

Jenis	31 Desember 2021	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2022
Beban Dibayar Dimuka	3.333.333,34	3.416.666,66	6.750.000,00	0,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	91.333.333,33	91.416.666,67	87.916.666,67	94.833.333,33
Beban Sewa Bangunan Gudang	57.833.333,34	40.416.666,67	57.833.333,34	40.416.666,67
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	4.083.333,33	0,00	4.083.333,33
Beban Sewa Rumah Negara Golongan I	18.750.000,00	58.375.000,00	18.750.000,00	58.375.000,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	87.083.333,33	0,00	87.083.333,33
Jumlah	171.250.000,01	284.791.666,66	171.250.000,01	284.791.666,66

Saldo akhir Beban Sewa Dibayar Dimuka Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp94.833.333,33 berada di beberapa SKPD dengan rincian:

Tabel 7.5.66 Rincian Beban Sewa Dibayar Dimuka Bangunan Gedung Kantor

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.416.666,66
2	Dinas Perhubungan	16.666.666,67
3	Sekretariat Daerah	74.750.000,00
Jumlah		94.833.333,33

Saldo akhir Beban Sewa Dibayar Dimuka Bangunan Gudang sebesar Rp40.416.666,67 terdiri dari beban sewa Gudang pada Sekretariat Daerah sebesar Rp37.500.000,00 dan beban sewa Gudang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.916.666,67.

Saldo akhir Beban Sewa Gedung tempat Pertemuan merupakan beban sewa untuk sekretariat UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp4.083.333,33.

Saldo akhir Beban Sewa Rumah Negara Golongan I sebesar Rp 58.375.000,00 merupakan beban sewa yang berasal dari sewa rumah dokter pada Dinas Kesehatan Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.

Saldo akhir Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya sebesar Rp87.083.333,33 merupakan beban untuk sewa rumah singgah bertempat di Batam yang diperuntukkan untuk membantu masyarakat Kabupaten Natuna yang mendapat rujukan berobat ke Batam dan keperluan sosial lainnya yang tercatat pada Sekretariat Daerah.

7.5.3.1.16 Persediaan

Persediaan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	22.389.010.877,74	57.410.004.543,25

Pada tahun 2022, Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi, Bahan-Bahan Kimia, Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Bahan-Bahan Baku, Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan, Bahan-Isi Tabung Gas, Bahan-Bahan Lainnya, Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan, Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran, Suku Cadang Alat Laboratorium, Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, Obat-Obatan-Obat, Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya, Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain, Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya, Makanan dan Minuman Rapat, Makanan dan Minuman Jamuan Tamu, Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan, Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Pelatihan Kerja, Pakaian Adat Daerah, Pakaian Batik Tradisional, Pakaian Olahraga, dan Pakaian Paskibraka dicatat dengan metode periodik dengan pendekatan beban.

Saldo persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp22.389.010.877,74 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.5.67 Nilai Keseluruhan Mutasi Persediaan

(dalam rupiah)				
Sumber persediaan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Barang Persediaan APBD	Rp57.410.004.543,24	Rp65.668.003.345,81	Rp100.688.997.011,31	Rp22.389.010.877,74
Jumlah	Rp57.410.004.543,24	Rp65.668.003.345,81	Rp100.688.997.011,31	Rp22.389.010.877,74

Penambahan persediaan sebesar Rp65.668.003.345,81 terdiri dari:

Belanja Tahun 2022	Rp	57.743.426.021,01
Pendapatan Hibah LO	Rp	3.260.622.411,09
Reklas Dari Beban Hibah	Rp	3.204.247.184,00
Reklas dari Beban Beban Tidak Terduga	Rp	1.009.244.480,00
Penambahan Dari Peralatan dan Mesin	Rp	58.021.153,04
Penambahan Utang 2022	Rp	42.620.000,00
Reklas dari Beban BLUD	Rp	170.894.696,67
Penyesuaian Harga	Rp	255.300,00
Reklas dari Beban Pemeliharaan	Rp	89.910.000,00
Koreksi Pencatatan Saldo Awal Persediaan	Rp	88.762.100,00
Jumlah	Rp	65.668.003.345,81

Pengurangan persediaan sebesar Rp100.688.997.011,31 terdiri dari:		
Menjadi Beban	Rp	59.382.215.958,38
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Rp	34.782.583.916,00
Reklas Ke Peralatan dan Mesin	Rp	139.808.300,00
Kekurangan Volume Pekerjaan (Temuan BPK)	Rp	66.550.419,93
Pelunasan Utang	Rp	6.317.838.417,00
Jumlah	Rp	100.688.997.011,31

Penjelasan atas nilai mutasi persediaan di atas adalah:

Tabel 7.5.68 Daftar Mutasi Masuk dan Keluar

(dalam rupiah)

No.	Unsur persediaan	Saldo Awal	Penambahan										Pengurangan					Saldo Akhir
			Belanja	Pendapatan Hibah LO	Reklas Dari Beban Hibah	Reklas dari Beban Tidak Terduga	Reklas dari Peralatan dan Mesin	Penambahan Dari Utang	Reklas dari Beban Pemeliharaan	Reklas dari Belanja Peralatan dan Mesin BLUD	Penyesuaian Harga	Koreksi Atas Utang Tahun Sebelumnya	Menjadi Beban	Beban Hibah barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Reklas dari Peralatan dan Mesin	Kekurangan Volume Pekerjaan (Temuan BPK RI)	Pelunasan Utang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	116.419.600,00	159.599.360,00	0,00	0,00	0,00	7.548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.899.460,00	0,00	2.667.500,00	0,00	0,00	0,00
2	Bahan-Bahan Kimia	753.008.520,00	336.278.500,00	0,00	0,00	0,00	333.042.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.337.019,93	0,00	0,00	0,00	198.825.000,00	423.187.480,07
3	Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	5.140.988.151,50	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00	0,00	4.320.000,00	0,00	0,00	0,00	4.805.435.132,50	0,00	0,00	0,00	313.173.019,00	34.900.000,00
4	Bahan-Bahan Baku	0,00	9.679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	693.057.785,00	294.177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.177.000,00	0,00	0,00	0,00	279.180.000,00	877.785,00
6	Bahan/Bibit Ternak/Sabit Ikan	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.300,00
7	Bahan-Bahan Takung Gas	0,00	10.428.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.628.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
8	Bahan-Bahan Lainnya	48.657.300,00	3.354.382.860,00	0,00	0,00	0,00	3.140.000,00	0,00	0,00	86.116.366,67	0,00	0,00	2.696.838.906,50	0,00	62.434.800,00	0,00	205.606.000,00	527.416.820,17
9	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkut	0,00	1.676.744.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.037.951,00	0,00	0,00	0,00	363.006.860,00	0,00
10	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	45.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	170.533.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.533.400,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
12	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	324.692.740,00	4.748.111.512,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136.983.204,00	0,00	0,00	0,00	742.382.498,00	196.438.550,00
13	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	171.839.400,00	9.542.698.547,93	26.455.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.918.098.307,93	0,00	0,00	0,00	683.775.390,00	140.217.250,00
15	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	205.000,00	673.439.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.358.000,00	0,00	0,00	0,00	23.282.200,00	3.004.000,00
16	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi / Index	0,00	11.697.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.967.600,00	0,00	0,00	0,00	4.730.000,00	0,00
17	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	200.000,00	619.984.014,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	830.000,00	0,00	14.061.480,00	0,00	0,00	549.221.094,00	0,00	0,00	0,00	87.654.400,00	0,00
19	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Pertengkapan Dinas	25.321.745,00	413.479.900,00	18.180.000,00	0,00	0,00	156.500.000,00	0,00	0,00	70.716.850,00	0,00	0,00	396.176.150,00	0,00	74.706.000,00	0,00	10.000.000,00	203.316.345,00
20	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Pertengkapan Pendukung Lainnya	0,00	245.167.844,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.817.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	0,00	109.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.050.000,00	0,00	0,00	0,00	13.980.000,00	0,00
22	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.000.000,00	980.027.100,00	0,00	0,00	0,00	24.913.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.969.500,00	0,00	0,00	0,00	915.971.500,00	0,00
23	Obat-Obatan-Obat	18.229.500.951,24	3.214.620.298,88	3.139.943.643,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.273.995.075,78	0,00	0,00	0,00	9.940.000,00	16.300.129.817,43
24	Obat-Obatan-Obat Lainnya	0,00	2.735.596.479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20.304.253,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985.866.732,74	0,00	0,00	0,00	769.994.000,00	0,00
25	Persediaan untuk Dijual/Disehankan kepada Masyarakat	20.251.897.538,00	250.220.280,00	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.762.100,00	1.223.874.280,00	16.674.967.988,00	0,00	0,00	0,00	703.737.650,00
26	Persediaan Untuk Dijual/Disehankan Lainnya	16.746.309.364,00	0,00	0,00	0,00	3.204.247.184,00	0,00	0,00	89.910.000,00	0,00	0,00	0,00	102.100.889,00	16.107.615.928,00	0,00	66.550.419,93	0,00	3.764.199.311,07
27	Natura	38.714.600,00	0,00	77.043.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.587.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.170.569,00
28	Natura dan Pakan Lainnya	0,00	41.849.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.849.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Makanan dan Minuman Siap Saji	0,00	4.334.982.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955.802.100,00	0,00	0,00	0,00	379.180.200,00	0,00
30	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	9.186.228.670,00	0,00	0,00	0,00	175.637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.059.367.930,00	0,00	0,00	0,00	302.497.750,00	0,00
31	Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Jasa/Kesehatan	0,00	943.031.125,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.835.525,00	0,00	0,00	0,00	64.955.600,00	0,00
32	Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Usaha Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	4.512.820.670,00	0,00	0,00	0,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773.470.670,00	0,00	0,00	0,00	741.836.000,00	0,00
34	Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	126.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.530.000,00	0,00	0,00	0,00	45.980.000,00	0,00
35	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	14.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	211.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.050.000,00	0,00	0,00	0,00	24.948.000,00	0,00
37	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	151.513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.513.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00
38	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00	97.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.625.000,00	0,00	0,00	0,00	49.940.000,00	0,00
39	Pakaian Dinas Usacara (PDU)	0,00	16.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Pakaian Segi	0,00	69.774.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.774.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Pakaian Pakaian Kerja	0,00	149.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.925.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
42	Pakaian Adat Daerah	0,00	527.786.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.786.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Pakaian Batik Tradisional	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian persediaan	Saldo Awal	Penambahan										Pengurangan					Saldo Akhir
			Belanja	Pendapatan Hibah LO	Reklas Dari Beban Hibah	Reklas dari Beban Tidak Terduga	Reklas dari Peralatan dan Mesin	Penambahan Dari Utang	Reklas dari Beban Pemeliharaan	Reklas dari Beban peralatan dan Mesin BLUD	Penyesuaian Harga	Koreksi Atas Utang Tahun Sebelumnya	Menjadi Beban	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Tidak Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Reklas dari Peralatan dan Mesin	Kekurangan Volume Pekerjaan (Peman BPK RI)	Pelunasan Utang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
44	Pakaian Olahraga	0,00	654.018.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.018.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Pakaian Pasok/buka	0,00	419.202.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.202.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Komponen- Komponen Peralatan	0,00	32.789.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.789.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Hadiah yang Bersifat Persembahan	0,00	592.025.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.525.225,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00
48	Beban	0,00	387.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Beban Penanganan Dampak Sosial Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	63.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transfer Kewajiban Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain	0,00	262.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		57.410.094.543,24	57.743.426.021,01	3.260.622.411,09	3.294.247.194,00	1.009.244.480,00	58.021.153,04	42.620.000,00	89.910.000,00	170.894.696,67	295.300,00	88.762.100,00	59.382.215.958,38	34.782.583.916,00	139.808.300,00	66.550.419,93	6.317.838.417,00	22.389.010.877,74

Koreksi pencatatan yang menambah nilai persediaan sebesar Rp88.762.100,00 merupakan koreksi atas kurang catat Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang merupakan koreksi atas Utang Belanja Tahun 2021. Penyesuaian Harga yang menambah nilai persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan sebesar Rp255.300,00 merupakan selisih harga jual bibit ikan pada Dinas Perikanan karena perubahan ukuran. Jumlah persediaan sebesar Rp Rp22.389.010.877,74 per 31 Desember 2022 terdiri dari:

Tabel 7.5.69 Daftar Saldo Persediaan

(dalam rupiah)		
No.	Uraian Persediaan	Saldo Akhir
1	Bahan Kimia	423.167.480,07
2	Bahan Bakar dan Pelumas	34.900.000,00
3	Bahan/Bibit Tanaman	877.785,00
4	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	435.300,00
5	Bahan Lainnya	527.416.820,17
6	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	196.438.550,00
7	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	140.217.250,00
8	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.004.000,00
9	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	203.316.345,00
10	Obat	16.300.129.817,43
11	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	703.737.650,00
12	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	3.764.199.311,07
13	Natura	91.170.569,00
JUMLAH		Rp22.389.010.877,74

1. Bahan-Bahan Kimia
Saldo Bahan-Bahan Kimia per 31 Desember 2022 sebesar Rp423.167.480,07 berada pada Rumah Sakit Umum Daerah.
2. Bahan Bakar dan Pelumas
Saldo Bahan Bakar dan Pelumas per 31 Desember 2022 sebesar Rp34.900.000,00 berada pada Rumah Sakit Umum Daerah.
3. Bahan-Bahan/Bibit Tanaman
Saldo Bahan-Bahan/Bibit Tanaman per 31 Desember 2022 sebesar Rp877.785,00 berada pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
4. Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
Saldo Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp435.300,00 berada pada Dinas Perikanan.

5. Bahan-Bahan Lainnya
Saldo Bahan-Bahan Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp527.416.820,17 berada pada SKPD sebagai berikut:

Tabel 7.5.70 Daftar Saldo Persediaan Bahan-Bahan Lainnya

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah
1.	Rumah Sakit Umum Daerah	502.033.587,17
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.540.000,00
3.	Dinas Sosial	4.790.233,00
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.639.000,00
5.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.585.000,00
6.	Dinas Perikanan	829.000,00
Jumlah		527.416.820,17

6. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor per 31 Desember 2022 sebesar Rp196.438.550,00 berada pada:

Tabel 7.5.71 Daftar Saldo Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	123.000,00
2.	Dinas Lingkungan Hidup	52.000,00
3.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	184.266.550,00
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.193.000,00
5.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	900.000,00
6.	Dinas Perikanan	3.784.000,00
7.	Sekretariat Daerah	4.310.000,00
8.	Inspektorat	570.000,00
9.	Kecamatan Bunguran Barat	240.000,00
Jumlah		196.438.550,00

7. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Kantor per 31 Desember 2022 sebesar Rp140.217.250,00 berada pada:

Tabel 7.5.72 Daftar Saldo Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Rumah Sakit Umum Daerah	38.822.100,00
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	80.511.150,00
3.	Dinas Perhubungan	1.740.000,00
4.	Dinas Perikanan	3.244.000,00
5.	Dinas Pariwisata	15.900.000,00
Jumlah		140.217.250,00

8. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos

Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.004.000,00 berada:

Tabel 7.5.73 Daftar Saldo Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Lingkungan Hidup	60.000,00
2.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.500.000,00
3.	Dinas Perikanan	444.000,00
Jumlah		3.004.000,00

9. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas

Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas per 31 Desember 2022 sebesar Rp203.316.345,00 berada pada:

Tabel 7.5.74 Daftar Saldo Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Rumah Sakit Umum Daerah	18.636.345,00
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	174.680.000,00
3.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.000.000,00
Jumlah		203.316.345,00

10. Obat-Obatan-Obat

Saldo Obat-Obatan-Obat per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.300.129.817,43 berada pada:

Tabel 7.5.75 Daftar Saldo Persediaan Obat-Obatan-Obat

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Kesehatan	11.837.210.010,43
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	4.456.323.261,00
3.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.856.546,00
4.	Dinas Perikanan	1.740.000,00
Jumlah		16.300.129.817,43

Persediaan obat yang tercatat diatas adalah persediaan obat diluar obat/alat kesehatan/bahan habis pakai yang sudah kadaluarsa sebesar Rp13.284.637.130,48. Obat/alat kesehatan/bahan habis pakai yang telah kadaluarsa berada pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp 4.153.335.779,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp9.131.301.351,48.

11. Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

Saldo Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2022 sebesar Rp703.737.650,00 berada pada:

Tabel 7.5.76 Daftar Saldo Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.379.350,00
2.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	454.963.300,00
3.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	196.395.000,00

No.	SKPD	Jumlah
4.	Dinas Pariwisata	45.000.000,00
Jumlah		703.737.650,00

12. Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain

Saldo Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.764.199.311,07 berada pada:

Tabel 7.5.77 Daftar Saldo Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2.026.865.602,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.733.898.398,07
3.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.435.311,00
Jumlah		3.764.199.311,07

13. Natura dan Pakan-Natura

Saldo Natura dan Pakan-Natura per 31 Desember 2022 sebesar Rp91.170.569,00 berada pada:

Tabel 7.5.78 Daftar Saldo Persediaan Natura

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Rumah Sakit Umum Daerah	23.401.850,00
2.	Puskesmas Ranai	12.258.729,00
3.	Puskesmas Bunguran Timur Laut	741.258,00
4.	Puskesmas Bunguran Tengah	4.011.651,00
5.	Puskesmas Bunguran Selatan	3.065.265,00
6.	Puskesmas Kelarik	6.039.621,00
7.	Puskesmas Sedanau	2.248.971,00
8.	Puskesmas Pulau Tiga	7.631.916,00
9.	Puskesmas Pulau Laut	3.565.986,00
10.	Puskesmas Midai	3.320.565,00
11.	Puskesmas Serasan	4.362.189,00
12.	Puskesmas Serasan Timur	3.641.133,00
13.	Puskesmas Subi	2.779.662,00
14.	Puskesmas Batubi Jaya	7.992.333,00
15.	Puskesmas Pulau Tiga Barat	6.109.440,00
Jumlah		91.170.569,00

7.5.3.2 Investasi Jangka Panjang

7.5.3.2.1 Investasi Non Permanen

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Rp.0,00. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Pemerintah Daerah sebelum tahun 2021 berupa Dana bergulir. Dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 278 Tahun 2021 tentang Penghentian Program Dana Bergulir Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro dan Dinas Perikanan, maka seluruh investasi Non Permanen Dana Bergulir telah dialihkan pencatatannya ke Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.

7.5.3.2.2 Investasi Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	60.078.154.512,00	59.863.540.548,00

Investasi permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp60.078.154.512,00 merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah, yang terdiri dari :

Tabel 7.5.79 Rincian Investasi Permanen

(dalam rupiah)

No	Investasi Permanen	Saldo per 31 Desember 2021	Penambahan tahun 2022	Pengurangan 2022	Saldo per 31 Desember 2022
1	Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit	5.215.863.729,00	0,00	697.977.336,00	4.517.886.393,00
2	Penyertaan Modal Kepada PT Bank Riau Kepri Syariah	33.938.100.000,00	2.080.000.000,00	0,00	36.018.100.000,00
3	Penyertaan Modal Kepada PT Riau Air Lines	9.500.000.000,00	0,00	0,00	9.500.000.000,00
4	Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Nusa	11.209.576.819,00	0,00	1.167.408.700,00	10.042.168.119,00
Jumlah		59.863.540.548,00	2.080.000.000,00	1.865.386.036,00	60.078.154.512,00

Metode penilaian investasi permanen Pemerintah Kabupaten Natuna pada setiap investasi per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.80 Metode Penilaian Investasi Permanen

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022	Metode Penilaian
1	PERUMDA SRI SERINDIT	4.517.886.393,00	Metode Ekuitas
2	PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH	36.018.100.000,00	Metode Biaya
3	PT. RIAU AIR LINES	9.500.000.000,00	Metode Biaya
4	PERUMDA TIRTA NUSA	10.042.168.119,00	Metode Ekuitas
Jumlah		60.078.154.512,00	

(1) Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit

Perusahaan Daerah Kabupaten Natuna didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah. Pada tahun 2022 Perusahaan Daerah berubah bentuk dan nama menjadi Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit Kabupaten Natuna. Kepemilikan Saham Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna pada Perusahaan umum Daerah Sri Serindit adalah 100% dengan penyertaan modal sebesar Rp39.687.472.016,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.81 Rekapitulasi Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Sri Serindit

(dalam rupiah)

Dasar Hukum	Bentuk Investasi	Nama Badan/Lembaga	Jumlah
APBD 2001	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	500.000.000,00
APBD 2002	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	500.000.000,00
APBD 2003	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	500.000.000,00
APBD 2004	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	500.000.000,00
APBD 2004	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	4.187.472.016,00
APBD 2006	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	5.000.000.000,00
APBD 2007	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	25.500.000.000,00
APBD 2013	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	3.000.000.000,00
Total			39.687.472.016,00

Sampai dengan tahun 2011 penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit disajikan dengan menggunakan metode biaya, namun mulai tahun 2012

menggunakan metode ekuitas. Sesuai Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit Kabupaten Natuna tahun 2022 (*unaudited*) disajikan rugi tahun 2022 adalah sebesar Rp697.977.336,00. Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebesar Rp4.517.886.393,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.82 Rincian Perhitungan Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit Kabupaten Natuna (Metode Ekuitas) Tahun 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah Penyertaan Modal 100% (Metode Ekuitas)		Penambahan/ (Pengurangan)
	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2022	
Modal Disetor	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
Modal Donasi	4.187.472.016,00	4.187.472.016,00	0,00
Modal Penyertaan	33.500.000.000,00	33.500.000.000,00	0,00
Laba (Rugi) Ditahan	(34.471.608.287,00)	(33.569.609.579,00)	(901.998.708,00)
Laba (Rugi) tahun Berjalan	(697.977.336,00)	(901.998.708,00)	204.021.372,00
Jumlah Ekuitas	4.517.886.393,00	5.215.863.729,00	(697.977.336,00)

(2) PT Bank Riau Kepri Syariah

Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Natuna di PT. Bank Riau Kepri Syariah adalah sebesar Rp36.018.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.83 Rekapitulasi Penyertaan Modal pada PT Bank Riau Kepri Syariah

(dalam rupiah)

Dasar Hukum	Bentuk Investasi	Nama Badan/Lembaga	Jumlah (Rp)
APBD 2003	Saham	PT Bank Riau Kepri Syariah	6.000.000.000,00
APBD 2006	Saham	PT Bank Riau Kepri Syariah	9.000.000.000,00
APBD 2010	Penyertaan Modal	PT Bank Riau Kepri Syariah	3.154.600.000,00
APBD 2017	Penyertaan Modal	PT Bank Riau Kepri Syariah	5.000.000.000,00
2017	Deviden Saham	PT Bank Riau Kepri Syariah	783.500.000,00
APBD 2018	Penyertaan Modal	PT Bank Riau Kepri Syariah	5.000.000.000,00
APBD 2019	Penyertaan Modal	PT Bank Riau Kepri Syariah	5.000.000.000,00
2022	Penyertaan Modal BMD	PT Bank Riau Kepri Syariah	2.080.000.000,00
Total			36.018.100.000,00

Pada tahun 2022 terdapat penambahan nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Natuna pada PT. Bank Riau Kepri Syariah sebesar Rp2.080.000.000,00. Pencatatan penyertaan modal menggunakan metode biaya karena persentase kepemilikan dibawah 20%. Berdasarkan metode tersebut nilai penyertaan diakui sebesar Rp36.018.100.000,00.

(3) PT Riau Airlines

Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Natuna di PT. Riau Airlines adalah sebesar 5,19% dengan nilai penyertaan sebesar Rp9.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.84 Rekapitulasi Penyertaan Modal pada PT Riau Airlines*(dalam rupiah)*

Dasar Hukum	Bentuk Investasi	Nama Badan/ Lembaga	Jumlah
APBD 2001	Saham	PT Riau Air Lines	1.500.000.000,00
APBD 2007	Saham	PT Riau Air Lines	8.000.000.000,00
Total			9.500.000.000,00

Pada tahun 2022 tidak terdapat perubahan nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Natuna pada PT. Riau Airlines. Pencatatan penyertaan modal menggunakan metode biaya karena persentase kepemilikan hanya sebesar 5,19% berdasarkan metode tersebut nilai penyertaan diakui sebesar Rp9.500.000.000,00.

(4) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa

Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa (PDAM Tirta Nusa) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2004 tentang Pendirian PDAM. Pada tahun 2021 Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Natuna (100%) dengan nilai penyertaan modal sebesar Rp24.444.169.005,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.85 Rekapitulasi Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Tirta Nusa*(dalam rupiah)*

Dasar Hukum	Bentuk Investasi	Nama Badan/ Lembaga	Jumlah
APBD 2004	Modal Awal	Perumda Tirta Nusa	3.326.337.005,00
APBD 2009	Modal Donasi	Perumda Tirta Nusa	617.842.000,00
APBD 2010	Penyertaan Modal	Perumda Tirta Nusa	15.000.000.000,00
APBD 2013	Modal Donasi	Perumda Tirta Nusa	1.500.000.000,00
APBD 2014	Modal Donasi	Perumda Tirta Nusa	499.990.000,00
APBD 2015	Penyertaan Modal	Perumda Tirta Nusa	3.500.000.000,00
Total			24.444.169.005,00

Sampai dengan tahun 2011 penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa disajikan dengan menggunakan metode biaya, namun mulai tahun 2012 menggunakan metode ekuitas karena persentase kepemilikan pemerintah adalah 100%. Sesuai Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Tirta Nusa tahun 2022 penurunan Investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp1.167.408.700,00, yang terdiri dari kerugian tahun berjalan sebesar Rp792.515.240,00, dan kesalahan pencatatan nilai investasi tahun sebelumnya sebesar Rp374.893.460,00. Kesalahan pencatatan terjadi karena pada saat perhitungan nilai investasi pada tahun 2021 masih menggunakan Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa yang belum diaudit oleh KAP. Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Natuna sampai dengan 2022 adalah sebesar Rp10.042.168.119,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5.86 Rincian Perhitungan Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Tirta
Nusa
(Metode Ekuitas)**

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah Penyertaan Modal 100% (Metode Ekuitas)		Penambahan/ (Pengurangan)
	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2022	
Modal Disetor	18.326.337.005,00	18.326.337.005,00	0,00
Modal Donasi	6.117.832.000,00	6.117.832.000,00	0,00
Modal Penyertaan	0,00	0,00	0,00
Laba (Rugi) Ditahan	(13.180.080.879,00)	(13.609.485.646,00)	(429.404.767,00)
Laba (Rugi) tahun Berjalan	(54.511.307,00)	(792.515.240,00)	(738.003.933,00)
Jumlah Ekuitas	11.209.576.819,00	10.042.168.119,00	(1.167.408.700,00)

7.5.3.3 Aset Tetap

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Aset Tetap	2.570.260.990.874,87	2.573.636.136.945,30

Nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	4.254.983.615.752,35
Penambahan tahun 2022	287.490.035.208,75
Jumlah	4.542.473.650.961,10
Pengurangan tahun 2022	158.411.168.252,05
Aset Tetap per 31 Desember 2022	4.384.062.482.709,05
Penyusutan s/d tahun 2022	(1.813.801.491.834,18)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	2.570.260.990.874,87

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Natuna per 31 Desember 2022 tersebut meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan akumulasi penyusutan. Jenis dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.87 Rincian Aset Tetap

(dalam rupiah)

Jenis Aset	31 Desember 2021	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2022
Tanah	343.489.039.307,38	22.638.859.514,00	3.303.367.724,50	362.824.531.096,88
Peralatan dan Mesin	455.705.957.151,01	46.632.314.471,56	29.730.632.625,36	472.607.638.997,21
Gedung dan Bangunan	1.311.867.468.000,47	101.960.789.838,94	21.982.440.601,66	1.391.845.817.237,75
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.002.601.694.073,74	112.369.473.780,25	84.582.752.121,90	2.030.388.415.732,09
Aset Tetap Lainnya	70.059.198.316,12	623.251.846,00	1.336.667.951,00	69.345.782.211,12
Konstruksi Dalam Pengerjaan	71.260.258.903,63	3.265.345.758,00	17.475.307.227,63	57.050.297.434,00
Nilai Aset	4.254.983.615.752,35	287.490.035.208,75	158.411.168.252,05	4.384.062.482.709,05
Akumulasi Penyusutan	(1.681.347.478.807,05)	(166.154.355.040,12)	(33.700.342.012,99)	(1.813.801.491.834,18)
Nilai Buku	2.573.636.136.945,30	121.335.680.168,63	124.710.826.239,06	2.570.260.990.874,87

Penambahan dan pengurangan nilai aset tetap disajikan sesuai dengan klasifikasi data aset pada dokumen administrasi penatausahaan barang milik daerah. Penyajian atas penyesuaian data pada dokumen administrasi penatausahaan barang milik daerah dilakukan koreksi pencatatan antar rincian objek aset tetap. Saldo dan mutasi dari masing-

masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2022 tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.5.3.3.1 Tanah

Perhitungan nilai Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2022 sebesar Rp362.824.531.096,88 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp 343.489.039.307,38
Penambahan TA 2022	Rp 22.638.859.514,00
Jumlah	Rp 366.127.898.821,38
Pengurangan TA 2022	Rp 3.303.367.724,50
Nilai Aset Tetap Tanah Tahun 2022	Rp 362.824.531.096,88

Aset Tetap berupa Tanah senilai Rp362.824.531.096,88 tersebut terdiri 617 bidang tanah diantaranya 521 bidang tanah yang sudah bersertifikat, 96 bidang tanah yang belum bersertifikat dan masih dalam proses sertifikasi.

Aset Tetap berupa Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2022 senilai Rp362.824.531.096,88 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.88 Rincian Aset Tetap Tanah

Rincian	Saldo Akhir 2022
Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	152.809.607.463,30
Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	14.199.733.507,58
Tanah untuk Bangunan Industri	109.723.000,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	109.475.959.153,60
Tanah untuk Bangunan Gedung sarana Olahraga	1.878.060.000,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	315.690.000,00
Tanah Basah	964.652.600,00
Tanah Kering	6.685.926.000,00
Tanah Perkebunan	11.299.146.500,00
Tanah Hutan	9.167.161.000,00
Tanah Lapangan Olahraga	7.455.337.600,00
Tanah Lapangan Parkir	725.306.000,00
Tanah Lapangan Penimbunan Barang	14.235.098.000,00
Tanah untuk Jalan	12.069.359.400,00
Tanah untuk Bangunan Air	5.668.276.546,00
Tanah untuk Bangunan Jaringan	882.801.800,00
Tanah untuk Makam	2.331.083.000,01
Lapangan Lainnya	12.551.609.526,39
JUMLAH	362.824.531.096,88

Aset Tetap berupa Tanah mengalami peningkatan sebesar Rp19.335.491.789,50 dari tahun 2021 sebesar Rp343.489.039.307,38 menjadi Rp362.824.531.096,88. Peningkatan nilai Aset Tanah tahun 2022 terdiri dari:

Tabel 7.5.89 Daftar Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tanah

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SALDO AKHIR 2021	PENAMBAHAN						PENGURANGAN						SALDO AKHIR 2022
			REALISASI BELANJA	KOREKSI KURANG CATAT TAHUN SEBELUMNYA	REVALUASI	BEBAN JASA	REKLAS DARI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	REKLAS ANTAR ASET TETAP TANAH	KOREKSI LEBIH CATAT TAHUN SEBELUMNYA	HIBAH	REVALUASI	PENGHAPUSAN	REKLAS ANTAR ASET TETAP TANAH	REKLAS KE KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
1	Tanah Bangunan Perumahan Gedung Tempat Tinggal	146.582.919.593,30	0,00	161.350.000,00	5.978.866.870,00	0,00	86.471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.809.607.463,30
2	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	9.128.132.443,58	4.702.848.600,00	208.050.000,00	0,00	0,00	0,00	160.702.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.199.733.507,58
3	Tanah untuk Bangunan Industri	309.723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.723.000,00
4	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	104.973.084.007,10	836.404.088,00	970.223.696,00	0,00	0,00	0,00	3.733.000.000,00	0,00	929.412.137,50	107.340.500,00	0,00	0,00	0,00	109.475.959.153,60
5	Tanah untuk Bangunan Gedung Negara Olahraga	1.878.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878.060.000,00
6	Tanah untuk Bangunan Tempat Basah	315.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.690.000,00
7	Tanah Candi Lainnya	0,00	3.733.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733.000.000,00	0,00	0,00
8	Tanah Basah	731.187.600,00	0,00	233.466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.652.600,00
9	Tanah Kemiri	6.069.426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.800.000,00	0,00	0,00	215.600.000,00	0,00	0,00	6.085.926.000,00
10	Tanah Perkebunan	11.299.146.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.299.146.500,00
11	Tanah Hutan	9.651.561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.651.561.000,00
12	Tanah Padang Alang Alang/Dumput	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Tanah Lapangan Olahraga	7.456.337.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.456.337.600,00
14	Tanah Lapangan Pagar	725.306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.306.000,00
15	Tanah Lapangan Peremburan Basah	14.440.811.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.713.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.235.098.000,00
16	Tanah untuk jalan	12.069.369.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.069.369.400,00
17	Tanah untuk Bangunan Air	293.800.000,00	5.321.407.086,00	2.219.360,00	0,00	49.850.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668.276.546,00
18	Tanah untuk Bangunan Industri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Tanah untuk Bangunan Jembatan	882.801.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.801.800,00
20	Tanah untuk Makam	2.331.083.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331.083.000,01
21	Lapangan Lainnya	12.551.609.526,39	893.703.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.702.464,00	193.001.250,00	12.551.609.526,39	13.595.014.240,39
Jumlah Air		343.489.639.307,38	14.947.261.488,00	1.576.308.056,00	5.978.866.870,00	49.850.100,00	86.471.000,00	3.893.702.464,00	205.713.837,00	2.097.312.137,50	107.340.500,00	700.000.000,00	3.893.702.464,00	193.001.250,00	362.824.531.096,38

Penambahan nilai Aset Tetap Tanah sebesar Rp22.638.859.514,00 pada tabel di atas terdiri dari:

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2022	Rp	14.947.363.488,00
Koreksi Pencatatan Aset Tetap Tanah	Rp	1.576.308.056,00
Revaluasi Aset Tetap Tanah	Rp	5.978.866.870,00
Reklasifikasi dari Beban Jasa (Utang 2022)	Rp	49.850.100,00
Reklasifikasi dari Konstruksi dalam pengerjaan	Rp	86.471.000,00
Jumlah	Rp	22.638.859.514,00

Realisasi belanja modal tanah tahun anggaran 2022 di Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp14.947.363.488,00 berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.733.000.000,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp836.404.088,00, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp5.321.407.086,00 dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro sebesar Rp5.056.552.314,00. Koreksi Pencatatan Aset Tetap Tanah sebesar Rp1.576.308.056,00 merupakan Aset Tetap Tanah yang tidak tercatat tahun sebelumnya. Revaluasi Aset Tetap Tanah sebesar Rp5.978.866.870,00 berasal dari Sekretariat Daerah sebesar Rp1.831.964.416,00, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp4.146.902.454,00. Dan reklasifikasi sebesar Rp49.850.100,00 berasal dari penambahan utang 2022 atas Beban Jasa Konsultansi Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp86.471.000,00 berasal dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pengurangan nilai Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2022 sebesar Rp2.981.612.724,50 terdiri dari :

Penyertaan Modal Tanah ke Bank Riau Kepri Syariah	Rp	700.000.000,00
Hibah Aset Tetap Tanah	Rp	1.533.094.545,50
Kelebihan Pencatatan Aset Tanah yang telah dihibahkan tahun Sebelumnya	Rp	564.217.592,00
Revaluasi Aset Tetap Tanah	Rp	107.340.500,00
Koreksi Pencatatan Aset Tetap Tanah	Rp	205.713.837,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	193.001.250,00
Jumlah	Rp	3.303.367.724,50

Pengurangan Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna terdiri dari penyertaan modal kepada PT Bank Riau Kepri Syariah sebesar Rp700.000.000,00. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Natuna memberi hibah aset tetap tanah ke

BASARNAS sebesar Rp 1.167.900.000,00. Hibah Aset Tetap Tanah ke Pemerintah Desa sebesar Rp43.439.545,50, serta Hibah Aset Tetap Tanah ke PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau berdasarkan SK Bupati Natuna Nomor 470 Tahun 2022 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp321.755.000,00. Terdapat hibah aset tetap tanah yang telah diberikan pada tahun 2021 tetapi masih tercatat di neraca Pemerintah Daerah yang telah dikeluarkan pada tahun 2022 terdiri dari hibah aset tetap tanah ke Pusat Analisis Dan Data Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sebesar Rp75.323.376,00, hibah aset tetap tanah ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau Resort Natuna sebesar Rp414.316.616,00, dan hibah aset tetap tanah ke Kantor Urusan Agama sebesar Rp74.577.600,00. Kemudian terdapat penurunan nilai Aset tetap tanah berdasarkan hasil Revaluasi Aset Tetap Tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp107.340.500,00.

Koreksi Pencatatan Aset Tetap Tanah sebesar Rp205.713.837,00 merupakan salah pencatatan tahun sebelumnya pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Reklasifikasi ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp193.001.250,00 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro. Reklas Antar Aset Tetap Tanah merupakan perbaikan pencatatan antar sub rincian objek Aset Tetap Tanah sesuai dengan *output* dan menyamakan informasi yang disajikan dengan dokumen administrasi penatausahaan aset tetap.

Berikut adalah Aset Tetap Tanah yang berada pada SKPD di Pemerintahan Kabupaten Natuna sampai dengan 31 Desember 2022:

Tabel 7.5.90 Rincian Aset Tanah per SKPD

<i>(dalam rupiah)</i>		
No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	71.346.334.166,00
2	Dinas Kesehatan	5.480.403.408,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.570.041.546,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	50.024.588.754,00
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.466.795.000,00
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.246.683.000,00
7	Dinas Perhubungan	1.353.945.450,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	67.993.800,00
9	Dinas Pemuda dan Olahraga	4.971.710.000,00
10	Dinas Perikanan	480.971.000,00
11	Dinas Pariwisata	1.794.800.000,00
12	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	5.005.908.564,00
13	Sekretariat Daerah	189.221.877.763,26
14	Sekretariat DPRD	6.576.147.000,00
15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	4.151.991.534,00
16	Kecamatan Bunguran Timur	3.462.781.000,00
17	Kecamatan Bunguran Barat	372.463.000,00
18	Kecamatan Bunguran Utara	341.400.000,00
19	Kecamatan Pulau Laut	168.000.000,00
20	Kecamatan Midai	131.400.000,00
21	Kecamatan Serasan	110.220.000,00

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah
22	Kecamatan Subi	280.200.000,00
23	Kecamatan Pulau Tiga	558.207.000,00
24	Kecamatan Bunguran Tengah	131.670.807,62
25	Kecamatan Bunguran Timur Laut	3.281.348.304,00
26	Kecamatan Serasan Timur	226.650.000,00
Jumlah		362.824.531.096,88

7.5.3.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp472.607.638.997,21 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp 455.705.957.151,01
Penambahan Tahun 2022	Rp 46.632.314.471,56
Jumlah	Rp 502.338.271.622,57
Pengurangan Tahun 2022	Rp 29.730.632.625,36
Nilai Aset Tetap Tahun 2022	Rp 472.607.638.997,21

Jumlah tersebut merupakan Aset Tetap Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Natuna yang terdiri dari:

Tabel 7.5.91 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal 2022	Penambahan		Pengurangan		Saldo Akhir 2022
			Penambahan 2022	Koreksi Pencatatan	Pengurangan 2022	Koreksi Pencatatan	
1	Tractor	460.713.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.713.550,00
2	Mesin Proses	609.695.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.695.625,00
3	Electric Generating Set	53.275.000,00	0,00	0,00	18.525.000,00	0,00	34.750.000,00
4	Pompa	464.081.748,00	19.980.000,00	0,00	29.830.000,00	1.188.000,00	453.043.748,00
5	Mesin Bor	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
6	Unit Pemeliharaan Lapangan	199.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.490.000,00
7	Perlengkapan Kebakaran Hutan	7.975.000,00	21.800.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	28.275.000,00
8	Peralatan Selam	206.404.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	205.004.000,00
9	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.542.628.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542.628.850,00
10	Kendaraan Bermotor Penumpang	24.149.118.936,00	0,00	332.580.000,00	3.125.827.750,00	1.473.362.000,00	19.882.509.186,00
11	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	16.178.006.216,00	388.950.500,00	405.800.000,00	1.522.320.500,00	0,00	15.450.436.216,00
12	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	12.960.564.698,67	355.288.600,00	69.330.600,00	248.018.016,67	261.459.600,00	12.875.706.282,00
13	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.539.235.500,00	0,00	0,00	76.599.500,00	0,00	1.462.636.000,00
14	Kendaraan Bermotor Khusus	18.065.930.215,00	1.016.727.800,00		1.789.799.965,00	711.855.000,00	16.581.003.050,00
15	Alat Angkutan Kereta Rel	2.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530.000,00
16	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	864.280.000,00	13.700.000,00	4.400.000,00	1.500.000,00	4.400.000,00	876.480.000,00
17	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	10.894.228.000,00	0,00	0,00	1.272.000.000,00	0,00	9.622.228.000,00
18	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	34.987.112.710,00	0,00	5.096.957.800,00	327.142.750,00	0,00	39.756.927.760,00
19	Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	372.525.000,00	0,00	0,00	372.525.000,00	0,00	0,00
20	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	149.949.900,00	0,00	0,00	149.949.900,00	0,00	0,00

No	Uraian	Saldo Awal 2022	Penambahan		Pengurangan		Saldo Akhir 2022
			Penambahan 2022	Koreksi Pencatatan	Pengurangan 2022	Koreksi Pencatatan	
21	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	0,00	296.400.000,00	0,00	0,00	0,00	296.400.000,00
22	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	19.975.000,00	0,00	0,00	19.975.000,00	0,00	0,00
23	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	1.194.986.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.986.400,00
24	Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	77.452.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.452.950,00
25	Perkakas Bengkel Listrik	796.526.800,00	0,00	0,00	11.550.000,00	0,00	784.976.800,00
26	Perkakas Bengkel Service	29.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700.000,00
27	Perkakas Bengkel Kayu	6.049.400,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.049.400,00
28	Peralatan Las	71.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.752.000,00
29	Perkakas Pabrik Es	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00
30	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	34.913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.913.000,00
31	Perkakas Pengangkat	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00
32	Perkakas Standard (Standard Tools)	91.222.383,00	300.000,00	3.972.433,00	2.950.000,00	3.972.433,00	88.572.383,00
33	Peralatan Tukang Besi	6.077.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077.100,00
34	Peralatan Ukur, Gip dan Feeting	30.460.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	-	30.460.000,00
35	Peralatan Bengkel Khusus Peladam	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
36	Alat Ukur Universal	282.137.480,00	73.852.400,00	107.215.625,00	20.150.000,00	0,00	443.055.505,00
37	Alat Ukur/Pembanding	40.612.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	40.612.000,00
38	Alat Ukur Lain-Lain	11.968.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	11.968.000,00
39	Alat Timbangan/Biara	403.340.948,00	10.221.000,00	0,00	101.000,00	0,00	413.460.948,00
40	Anak Timbangan/Biara	124.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.960.000,00
41	Alat Pengukur Penglihatan	5.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720.000,00
42	Alat Ukur Lainnya	627.020.000,00	22.420.000,00	0,00	22.420.000,00	0,00	627.020.000,00
43	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	2.035.261.670,00	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	0,00	2.035.261.670,00
44	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1.500.000,00	2.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	2.500.000,00
45	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	1.073.215.000,00	0,00	0,00	0,00	81.950.000,00	991.265.000,00
46	Alat Laboratorium Pertanian	290.469.530,00	15.000.001,65	0,00	0,00	115.364.930,00	190.104.601,65
47	Alat Processing	400.761.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.761.613,00
48	Alat Pasca Panen	355.297.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.297.900,00
49	Alat Produksi Perikanan	1.173.998.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173.998.410,00
50	Alat-Alat Peternakan	149.575.545,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	148.575.545,00
51	Alat Pengolahan Lainnya	600.000,00	473.000.000,00	0,00	473.000.000,00	600.000,00	0,00
52	Mesin Ketik	117.412.800,00	0,00	0,00	71.568.800,00	0,00	45.844.000,00
53	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	131.511.100,00	212.000,00	4.422.000,00	27.859.600,00	88.275.000,00	20.010.500,00
54	Alat Reproduksi (Penggandaan)	27.454.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.454.630,00
55	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	8.691.827.209,96	288.458.000,00	668.868.010,00	180.794.000,00	258.183.600,00	9.210.175.619,96
56	Alat Kantor Lainnya	10.907.395.114,36	1.443.502.346,74	720.404.779,50	1.195.315.400,00	451.048.347,10	11.424.938.493,50
57	Mebel	30.226.275.932,00	932.047.592,00	1.346.688.408,74	6.632.371.275,00	576.287.282,00	25.296.353.375,74
58	Alat Pengukur Waktu	54.602.500,00	21.337.000,00	1.256.520,00	22.593.520,00	475.000,00	54.127.500,00
59	Alat Pembersih	1.056.183.673,33	6.626.035,00	464.384.966,67	158.513.007,00	245.202.000,00	1.123.479.668,00
60	Alat Pendingin	8.847.905.983,00	1.459.112.331,00	1.226.575.300,00	450.664.165,00	320.667.746,14	10.762.261.702,86
61	Alat Dapur	657.485.917,67	31.366.431,00	173.961.349,67	21.248.101,00	80.876.806,67	760.688.790,67
62	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	22.356.004.750,97	2.471.307.995,43	636.015.717,58	2.496.941.503,50	445.933.427,01	22.520.453.533,47

No	Uraian	Saldo Awal 2022	Penambahan		Pengurangan		Saldo Akhir 2022
			Penambahan 2022	Koreksi Pencatatan	Pengurangan 2022	Koreksi Pencatatan	
63	Alat Pemadam Kebakaran	379.168.820,00	44.382.000,00	131.512.000,00	26.589.500,00	111.622.500,00	416.850.820,00
64	Meja Kerja Pejabat	6.429.107.690,10	547.458.884,00	261.137.336,00	582.179.695,00	88.696.500,00	6.566.827.715,10
65	Meja Rapat Pejabat	555.020.000,00	60.893.500,00	4.107.000,00	48.070.000,00	10.000.000,00	561.950.500,00
66	Kursi Kerja Pejabat	5.422.505.378,65	736.357.958,00	88.844.392,00	623.375.522,00	133.493.680,00	5.490.838.526,65
67	Kursi Rapat Pejabat	386.884.700,00	101.787.000,00	19.980.000,00	97.370.225,00	15.600.000,00	395.681.475,00
68	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	37.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.510.000,00
69	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	489.455.060,00	20.995.000,00	0,00	20.217.500,00	0,00	490.232.560,00
70	Lemari dan Arsip Pejabat	3.587.443.985,00	189.126.623,00	32.361.800,00	182.650.000,00	50.338.217,00	3.575.944.191,00
71	Peralatan Studio Audio	1.641.423.116,00	122.744.155,00	142.476.839,00	104.145.090,00	402.581.794,00	1.399.917.226,00
72	Peralatan Studio Video dan Film	2.765.479.643,00	713.123.825,00	504.671.204,00	239.011.900,00	0,00	3.744.262.772,00
73	Peralatan Studio Gambar	30.288.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.288.550,00
74	Peralatan Cetak	91.255.000,00	53.850.000,00	7.458.000,00	16.850.000,00	65.482.000,00	70.231.000,00
75	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	4.617.541.500,00	0,00	59.495.000,00	11.605.000,00	0,00	4.665.431.500,00
76	Alat Studio Lainnya	57.995.000,00	109.296.659,00	0,00	89.316.659,00	69.975.000,00	8.000.000,00
77	Alat Komunikasi Telephone	983.294.350,00	0,00	32.667.550,00	167.159.550,00	157.264.000,00	691.538.350,00
78	Alat Komunikasi Radio SSB	237.875.000,00	3.795.000,00	0,00	35.625.000,00	0,00	206.045.000,00
79	Alat Komunikasi Radio VHF	209.100.000,00	0,00	0,00	9.955.000,00	0,00	199.145.000,00
80	Alat Komunikasi Sosial	171.340.000,00	0,00	14.682.636,00	0,00	0,00	186.022.636,00
81	Alat Komunikasi Lainnya	0,00	337.572.900,00	3.850.000,00	0,00	337.572.900,00	3.850.000,00
82	Peralatan Pemancar SHF	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
83	Peralatan Antena UHF	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
84	Peralatan Antena SHF/Parabola	3.500.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.750,00
85	Switcher Antena	5.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.464.000,00
86	Program Input Equipment	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
87	Peralatan Antena Penerima VHF	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
88	Sumber Tenaga	5.212.188.920,00	98.450.000,00	0,00	303.775.000,00	0,00	5.006.863.920,00
89	Peralatan Pemancar Lainnya	15.774.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.774.000,00
90	Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	44.279.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	43.199.000,00
91	Alat Kedokteran Umum	83.663.691.292,77	17.199.185.717,82	9.083.395.153,50	257.214.858,69	33.566.533.869,90	76.122.523.435,50
92	Alat Kedokteran Gigi	588.653.737,00	2.000.000,00	672.250.134,95	9.697.688,96	2.322.500,00	1.250.883.682,99
93	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	148.533.000,00	0,00	324.828.149,97	5.726.000,00	75.658.000,00	391.977.149,97
94	Alat Kedokteran Bedah	5.700.703.180,99	0,00	1.199.134.000,76	656.000,00	1.631.765.157,00	5.267.416.024,75
95	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	6.165.696.739,00	1.877.515.397,92	702.243.475,24	6.423.743,92	1.842.000.040,00	6.897.031.828,24
96	Alat Kedokteran THT	636.265.954,00	0,00	676.472.999,94	69.999,98	336.175.000,00	976.493.953,96
97	Alat Kedokteran Mata	2.620.342.400,00	0,00	30.480.961,00	149.165.088,00	0,00	2.501.658.273,00
98	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	2.822.404.499,00	0,00	5.060.860.308,05	9.798.155,05	1.787.918.400,00	6.085.548.252,00
99	Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	0,00	0,00	719.121.728,00	0,00	359.560.864,00	359.560.864,00
100	Alat Kedokteran Anak	1.044.964.000,00	0,00	1.290.415.736,20	0,00	386.100.000,00	1.949.279.736,20
101	Alat Kedokteran Poliklinik	1.862.793.134,00	0,00	278.069.475,00	22.831.300,00	1.709.404.639,00	408.626.670,00
102	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	16.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.390.000,00
103	Alat Kedokteran Neurologi (saraf)	1.906.937.037,00	0,00	1.130.607.448,00	0,00	64.500.000,00	2.973.044.485,00
104	Alat Kedokteran Jantung	0,00	0,00	3.556.147.136,20	0,00	790.897.756,60	2.765.249.379,60

No	Uraian	Saldo Awal 2022	Penambahan		Pengurangan		Saldo Akhir 2022
			Penambahan 2022	Koreksi Pencatatan	Pengurangan 2022	Koreksi Pencatatan	
105	Alat Kedokteran Radiodiagnostic	50.000.000,00	0,00	13.337.858.500,00	0,00	0,00	13.387.858.500,00
106	Alat Kedokteran Patologi Anatomy	0,00	0,00	86.488.000,00	0,00	0,00	86.488.000,00
107	Alat Kedokteran Transfusi Darah	107.561.100,00	0,00	0,00	0,00	107.561.100,00	0,00
108	Alat Kedokteran Nuklir	87.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.100.000,00
109	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	130.500.000,00	0,00	4.912.920,00	523.920,00	2.194.500,00	132.694.500,00
110	Alat Kedokteran Gawat Darurat	1.461.907.914,00	254.719.737,00	312.545.184,00	0,00	254.719.737,00	1.774.453.098,00
111	Alat Kedokteran Jiwa	97.256.944,00	0,00	0,00	0,00	97.256.944,00	0,00
112	Alat Kedokteran ICCU	0,00	27.600.000,00	6.075.613.333,33	35.923.333,33	0,00	6.067.290.000,00
113	Alat Kedokteran Bedah Jantung	0,00	0,00	19.994.546,00	150.000,00	0,00	19.844.546,00
114	Alat Kedokteran Anestesi	0,00	0,00	1.778.380.643,00	0,00	0,00	1.778.380.643,00
115	Alat Kedokteran Lainnya	3.498.492.123,00	2.370.661.671,00	57.943.700,00	25.395.700,00	5.756.182.084,00	145.519.710,00
116	Alat Kesehatan Matra Laut	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
117	Alat Kesehatan Umum Lainnya	12.894.678.678,50	1.552.003.120,00	2.618.582.525,76	31.595.419,65	7.808.542.687,00	9.225.126.217,61
118	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	139.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.650.000,00
119	Alat Laboratorium Mikrobiologi Teknik Penyehatan	1.066.991.255,20	0,00	0,00	0,00	894.089.739,20	172.901.516,00
120	Alat Laboratorium Batuan/Geologi	3.806.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806.334,00
121	Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	105.920.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	105.920.000,00
122	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	106.924.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.924.776,00
123	Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	261.633.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.633.810,00
124	Alat Laboratorium Umum	650.817.350,00	5.750.000,00	1.349.046.019,00	31.797.258,00	0,00	1.973.816.111,00
125	Alat Laboratorium Mikrobiologi	1.201.280.298,00	0,00	846.596.924,45	0,00	0,00	2.047.877.222,45
126	Alat Laboratorium Kimia	181.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.060.000,00
127	Alat Laboratorium Patologi	44.553.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.553.720,00
128	Alat Laboratorium Imunologi	812.053.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.053.185,00
129	Alat Laboratorium Hematologi	28.710.000,00	0,00	152.709.091,79	0,00	0,00	181.419.091,79
130	Alat Laboratorium Film	11.815.440,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	11.815.440,00
131	Alat Laboratorium Makanan	83.510.824,00	0,00	37.881.784,00	0,00	8.681.784,00	112.710.824,00
132	Alat Laboratorium Farmasi	21.151.000,00	50.623.000,00	24.423.232,00	21.641.700,00	46.893.000,00	27.662.532,00
133	Alat Laboratorium Fisika	387.393.387,00	800.000,00	91.992.128,00	800.000,00	0,00	479.385.515,00
134	Alat Laboratorium Pembuatan Pola	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
135	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	0,00	2.663.700,00	0,00	0,00	0,00	2.663.700,00
136	Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	0,00	24.194.100,00	0,00	0,00	0,00	24.194.100,00
137	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
138	Alat Laboratorium Pertanian	106.683.650,00	650.000,00	125.009.929,21	21.249.430,00	0,00	211.094.149,21
139	Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	15.088.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.088.150,00
140	Alat Laboratorium Oseanografi	41.122.980,00	0,00	0,00	0,00	15.672.000,00	25.450.980,00
141	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00
142	Alat Laboratorium Biologi Perairan	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
143	Alat Laboratorium Biologi	11.100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1.100.000,00
144	Alat Laboratorium Geofisika	49.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800.000,00
145	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	68.016.055,00	0,00	0,00	0,00	18.115.625,00	49.900.430,00
146	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	98.689.000,00	0,00	30.681,00	0,00	97.339.000,00	1.380.681,00

No	Uraian	Saldo Awal 2022	Penambahan		Pengurangan		Saldo Akhir 2022
			Penambahan 2022	Koreksi Pencatatan	Pengurangan 2022	Koreksi Pencatatan	
147	Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	2.572.732.723,00	0,00	355.730.976,00	0,00	0,00	2.928.463.699,00
148	Alat Laboratorium Lain	53.473.084,00	100.689.798,00	551.628.028,00	13.121.798,10	88.899.999,90	603.769.112,00
149	Unit Alat Laboratorium Lainnya	15.543.000,00	184.481.987,00	0,00	0,00	200.024.987,00	0,00
150	General Laboratory Tool	125.535.300,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	127.535.300,00
151	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	102.270.000,00	3.199.900.401,00	0,00	0,00	3.199.900.401,00	102.270.000,00
152	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika	4.437.508.037,00	8.000.000,00	0,00	960.000,00	0,00	4.444.548.037,00
153	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	705.871.280,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	705.871.280,00
154	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan	107.868.274,00	0,00	9.700.000,00	5.700.000,00	0,00	111.868.274,00
155	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah	430.275.864,00	0,00	0,00	0,00	96.000.000,00	334.275.864,00
156	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Atas	10.587.490,00	16.040.000,00	5.000.000,00	730.000,00	0,00	30.897.490,00
157	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Agama	154.457.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.457.820,00
158	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian	224.982.704,00	601.586.245,00	0,00	166.341.000,00	0,00	660.227.949,00
159	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: PKN	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
160	Alat Peraga PAUD/TK	24.923.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.923.800,00
161	Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	2.394.488.749,00	0,00	600.000,00	600.000,00	18.590.550,00	2.375.898.199,00
162	Recorder Display	41.662.000,00	0,00	12.457.500,00	0,00	12.457.500,00	41.662.000,00
163	System/Power Supply	27.873.300,00	0,00	0,00	0,00	27.873.300,00	0,00
164	Measuring/Testing Device	0,00	0,00	14.450.000,00	0,00	0,00	14.450.000,00
165	Radiation Application Equipment	94.260.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.260.166,00
166	Peralatan Hidrologi	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
167	Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	429.200.000,01	0,00	0,00	39.900.000,00	0,00	389.300.000,01
168	Alat Laboratorium Kualitas Udara	67.357.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.357.660,00
169	Alat Laboratorium Penunjang	415.642.857,59	0,00	26.500.000,00	160.886.990,00	0,00	281.255.867,59
170	Pemesinan: Model Ship Workshop	8.215.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.215.625,00
171	Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	0,00	0,00	38.500.000,00	0,00	0,00	38.500.000,00
172	Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
173	Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	0,00	0,00	1.963.636,00	0,00	0,00	1.963.636,00
174	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	0,00	0,00	2.530.000,00	0,00	0,00	2.530.000,00
175	Alat Laboratorium Uji Perangkat	0,00	0,00	27.691.000,00	0,00	0,00	27.691.000,00
176	Senjata Lain-Lain	5.313.000,00	0,00	0,00	0,00	5.313.000,00	0,00
177	Alat Keamanan	29.319.000,00	0,00	0,00	0,00	29.319.000,00	0,00
178	Alat Nuklir, Biologi Dan Kimia	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
179	Komputer Jaringan	3.950.904.311,00	314.410.828,00	613.391.841,00	269.770.239,00	668.818.936,00	3.940.117.805,00
180	Personal Computer	35.777.535.680,88	1.793.989.807,00	4.433.675.059,00	2.765.585.497,51	224.879.000,99	39.014.736.048,38
181	Komputer Unit Lainnya	1.147.016.223,00	2.958.245.911,00	119.972.823,00	167.742.177,00	3.905.749.380,00	151.743.400,00
182	Peralatan Mainframe	598.154.780,00	4.950.000,00	0,00	94.809.150,00	213.332.000,00	294.963.630,00
183	Peralatan Mini Computer	1.506.698.918,00	4.800.000,00	42.121.999,00	53.762.000,00	139.559.821,00	1.360.299.096,00
184	Peralatan Personal Computer	5.408.063.438,00	753.904.613,00	338.816.373,00	578.897.859,00	181.367.239,00	5.740.519.326,00
185	Peralatan Jaringan	2.107.234.603,00	280.468.000,00	260.363.391,00	65.828.814,00	209.614.366,00	2.372.622.814,00
186	Peralatan Komputer Lainnya	45.590.820,00	350.433.401,00	45.590.820,00	41.168.600,00	400.446.441,00	0,00

No	Uraian	Saldo Awal 2022	Penambahan		Pengurangan		Saldo Akhir 2022
			Penambahan 2022	Koreksi Pencatatan	Pengurangan 2022	Koreksi Pencatatan	
187	Optik	93.151.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.151.856,00
188	Sumur Pemboran	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
189	Alat Pelindung Lainnya	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00
190	Alat Penolong	61.112.500,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	86.112.500,00
191	Alat Peraga Pelatihan	1.604.000,00		127.435.550,00	0,00	0,00	129.039.550,00
192	Alat Peraga Percontohan	113.798.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.798.260,00
193	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	233.882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.882.000,00
194	Solid Material Handling Equipment	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
195	Heat Generating Equipment	136.125.000,00	0,00	1.813.000.000,00	0,00	0,00	1.949.125.000,00
196	Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	1.245.490.011,00	0,00	0,00	1.245.490.011,00	0,00	0,00
197	Rambu Tidak Bersuar	6.869.468.411,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.869.468.411,36
198	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	1.110.490.746,00	23.952.000,00	0,00	23.952.000,00	0,00	1.110.490.746,00
199	Peralatan Olahraga Atletik	103.208.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.208.320,00
200	Peralatan Permainan	44.855.000,00	8.500.000,00	730.730.000,00	0,00	0,00	784.085.000,00
201	Peralatan Senam	36.867.000,00	7.350.000,00	3.996.000,00	3.996.000,00	0,00	44.217.000,00
202	Peralatan Olahraga Lainnya	88.468.440,00	88.731.500,00	48.400.000,00	88.731.500,00	0,00	136.868.440,00
JUMLAH		455.705.957.151,01	46.632.314.471,56	73.855.958.111,51	29.730.632.625,36	73.855.958.111,51	472.607.638.997,21

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022 terdiri dari:

Belanja Modal Tahun 2022	Rp	36.673.771.470,56
Penambahan Utang Belanja Modal Tahun 2022	Rp	2.150.185.171,00
Koreksi pencatatan Tahun sebelumnya	Rp	958.740.080,00
Koreksi Pendapatah Hibah Peralatan dan Mesin Tahun sebelumnya yang belum tercatat	Rp	847.652.000,00
Pendapatan Hibah tahun 2022	Rp	4.707.199.450,00
Penambahan dari Belanja Tidak Terduga	Rp	159.250.000,00
Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp	139.808.300,00
Reklasifikasi dari Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp	750.205.000,00
Reklasifikasi dari Aset Lain-lain	Rp	45.672.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	Rp	199.831.000,00
Jumlah	Rp	46.632.314.471,56

Penambahan aset peralatan dan mesin selama tahun 2022 selain realisasi dari belanja dengan rincian penambahan utang belanja modal peralatan dan mesin tahun 2022 sebesar Rp2.150.185.171,00 yang telah diakui sebagai aset tetap peralatan dan mesin, terdapat koreksi pencatatan nilai aset tetap peralatan dan mesin yang belum tercatat tahun sebelumnya sebesar Rp 958.740.080,00, terdapat koreksi pendapatah hibah peralatan dan mesin tahun sebelumnya yang belum tercatat di Dinas Kesehatan Rp847.652.000,00. Selain itu terdapat pendapatan hibah tahun anggaran 2022 Rp4.707.199.450,00 yang terdiri dari hibah yang berasal dari hibah Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar Rp3.117.510.000,00 dan hibah dari Kemeterian Kesehatan Rp1.398.289.450, dan hibah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp191.400.000,00, penambahan dari belanja tidak terduga yang menghasilkan aset peralatan dan mesin Rp159.250.000,00, reklasifikasi dari beban barang dan jasa Rp139.808.300,00. Terdapat reklasifikasi dari aset kemitraan dengan pihak ketiga yang telah berakhir perjanjian kerjasamanya dengan Perindo (Persero) dan tidak dihibahkan ke Pemerintah Pusat pada Dinas Perikanan Rp750.205.000,00, terdapat

reklasifikasi dari aset lain-lain yang rusak berat setelah dilakukan perbaikan dapat digunakan dalam proses operasional Pemerintah Daerah Rp45.672.000,00, dan reklasifikasi dari aset tetap lainnya Rp199.831.000,00.

Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2022 terdiri dari:

Koreksi Pencatatan Tahun sebelumnya	Rp	147.685.480,00
Pelunasan Utang Belanja Modal Tahun 2021	Rp	2.454.091.171,00
Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	17.686.994.981,25
Hibah	Rp	2.183.047.465,00
Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	Rp	1.483.799.511,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	Rp	19.892.636,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	Rp	3.172.560.967,93
Reklasifikasi ke Ekstrakomtable	Rp	1.860.902.563,47
Reklasifikasi Ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	473.000.000,00
Reklasifikasi ke Persediaan/Beban Persediaan	Rp	228.915.849,71
Reklasifikasi ke Beban Jasa	Rp	19.742.000,00
Jumlah	Rp	29.730.632.625,36

Penghapusan peralatan dan mesin sebesar Rp17.686.994.981,25 merupakan penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna berupa Kendaraan Dinas Operasional dengan cara dilelang dan penghapusan Barang Milik Daerah berupa Aset lain-lain yang berkondisi aset rusak berat serta penghapusan Barang Milik Daerah aset tetap peralatan dan mesin hasil inventarisasi. Nilai hibah sebesar Rp2.183.047.465,00 merupakan hibah yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Natuna ke Tim penggerak PKK sebesar Rp24.250.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan hibah ke Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Ranai sebesar Rp 2.183.047.465,00 pada Dinas Perhubungan. Koreksi pencatatan nilai aset tetap peralatan dan mesin merupakan koreksi kelebihan pencatatan tahun sebelumnya senilai Rp147.685.480,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pelunasan utang tahun 2021 senilai Rp2.454.091.171,00 merupakan perolehan dari utang tahun 2021 yang dilakukan pembayaran pada tahun 2022. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp472.607.638.997,21 yang berada pada:

Tabel 7.5.92 Rincian Peralatan dan Mesin Per SKPD

<i>(dalam rupiah)</i>		
No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	64.109.059.988,00
2	Dinas Kesehatan	57.711.707.857,47
3	Rumah Sakit Umum Daerah	134.970.112.643,72
4	Puskesmas Ranai	459.868.249,78
5	Puskesmas Bunguran Timur Laut	240.703.352,67
6	Puskesmas Bunguran Tengah	243.669.674,67
7	Puskesmas Bunguran Selatan	220.038.511,66
8	Puskesmas Kelarik	350.403.619,78
9	Puskesmas Sedanau	375.399.932,77
10	Puskesmas Pulau Tiga	420.100.896,78
11	Puskesmas Pulau Laut	322.686.338,11
12	Puskesmas Midai	440.430.264,77
13	Puskesmas Serasan	982.516.696,78
14	Puskesmas Serasan Timur	423.902.996,78

No	SKPD	Jumlah
15	Puskesmas Subi	316.523.181,78
16	Puskesmas Batubi Jaya	211.320.807,90
17	Puskesmas Pulau Tiga Barat	76.095.616,00
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.941.521.636,00
19	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5.783.840.630,00
20	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	1.766.271.405,00
21	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.879.159.124,00
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.117.243.980,00
23	Dinas Sosial	1.267.146.165,00
24	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.808.193.500,00
25	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.702.571.360,00
26	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	7.618.100.982,00
27	Dinas Lingkungan Hidup	6.459.467.833,00
28	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.206.457.500,00
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.437.002.910,00
30	Dinas Perhubungan	19.961.353.139,36
31	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.904.993.580,00
32	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.985.868.746,00
33	Dinas Pemuda dan Olahraga	2.676.803.065,00
34	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.496.553.542,39
35	Dinas Perikanan	9.085.345.588,07
36	Dinas Pariwisata	4.487.778.267,00
37	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	4.815.259.495,75
38	UPTD Metrologi Legal	44.900.000,00
39	Bagian Organisasi	188.163.400,00
40	Bagian Administrasi Pembangunan	6.900.000,00
41	Bagian Umum	65.073.834.551,50
42	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	56.370.000,00
43	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	453.117.500,00
44	Sekretariat DPRD	14.032.757.948,72
45	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.223.785.890,00
46	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	6.562.597.400,00
47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.861.641.448,00
48	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	893.915.600,00
49	Inspektorat Daerah	1.756.885.850,00
50	Kecamatan Bunguran Timur	1.467.584.565,00
51	Kecamatan Bunguran Barat	1.016.401.112,00
52	Kecamatan Bunguran Utara	1.054.759.650,00
53	Kecamatan Pulau Laut	2.613.339.531,00
54	Kecamatan Midai	3.323.605.736,00
55	Kecamatan Serasan	1.416.775.065,00
56	Kecamatan Subi	2.124.913.777,00
57	Kecamatan Pulau Tiga	1.008.870.468,00

No	SKPD	Jumlah
58	Kecamatan Bunguran Tengah	586.841.548,00
59	Kecamatan Bunguran Timur Laut	546.091.571,00
60	Kecamatan Bunguran Selatan	590.568.184,00
61	Kecamatan Serasan Timur	713.254.024,00
62	Kecamatan Suak Midai	405.029.500,00
63	Kecamatan Bunguran Batubi	579.810.000,00
64	Kecamatan Pulau Tiga Barat	523.068.500,00
65	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.206.383.100,00
JUMLAH		472.607.638.997,21

Jumlah Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp 472.607.638.997,21 termasuk aset yang masa manfaatnya telah habis dan mempunyai nilai buku Rp0,00 sebanyak 19.319 unit aset yang masih digunakan dalam operasional Pemerintah Daerah.

7.5.3.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp 1 391 845 817 237,75 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	1.311.867.468.000,47
Penambahan tahun 2022	Rp	101.960.789.838,94
Jumlah	Rp	1.413.828.257.839,41
Pengurangan tahun 2022	Rp	21.982.440.601,66
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	1.391.845.817.237,75

Jumlah tersebut merupakan rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Natuna yang terdiri dari:

Tabel 7.5.93 Daftar Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan
(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SALDO AWAL 2022	PENAMBAHAN													PENGURANGAN													SALDO AKHIR 2022
			REALISASI BELANJA	KEMERDIAAN TAWAN SEBELUM NYA	KEMERDIAAN ATAS UTMANG TAWAN SEBELUM NYA	UTMANG 2022	HEWAN	REKONSTRUKSI	REKLAS DARI BANGUNAN	REKLAS DARI TUGAS DAN MESIN	REKLAS DARI SAL. AL. BANGUNAN DAN MESIN	REKLAS DARI SAL. AL. BANGUNAN DAN MESIN	REKLAS DARI KONTAKSI DAN MESIN	REKLAS DARI KONTAKSI DAN MESIN	REKLAS DARI KONTAKSI DAN MESIN	REKLAS DARI KONTAKSI DAN MESIN	REKLAS DARI KONTAKSI DAN MESIN	REKLAS DARI KONTAKSI DAN MESIN	REKLAS DARI KONTAKSI DAN MESIN	REKLAS DARI KONTAKSI DAN MESIN	REKLAS DARI KONTAKSI DAN MESIN	REKLAS DARI KONTAKSI DAN MESIN	REKLAS DARI KONTAKSI DAN MESIN	REKLAS DARI KONTAKSI DAN MESIN	REKLAS DARI KONTAKSI DAN MESIN	REKLAS DARI KONTAKSI DAN MESIN			
1	Bangunan Gedung Kantor	225.242.071.235,00	922.522.522,36	0,00	0,00	0,00	2.125.251.251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.211.250.882,36		
2	Bangunan Gedung	17.885.265.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.856.490.317,00		
3	Bangunan Gedung	0,00	225.522.522,36	0,00	0,00	0,00	11.934.251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.753.045,00		
4	Bangunan Gedung	3.079.485.868,31	255.191.152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334.677.020,57		
5	Bangunan Gedung	98.588.522.250,00	17.362.522.522,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.951.044.772,36		
6	Bangunan Gedung	180.881.148.737,36	255.191.152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.072.890,62		
7	Bangunan Gedung	98.574.427.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.574.427.534,00		
8	Bangunan Gedung	255.191.152,26	6.886.872.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.868.025,26		
9	Bangunan Gedung	24.777.422.488,75	922.522.522,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.699.945.011,11		
10	Bangunan Gedung	14.172.524.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.172.524.273,00		
11	Bangunan Gedung	2.529.124.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529.124.692,00		
12	Bangunan Gedung	8.952.884.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.952.884.557,00		
13	Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Bangunan Gedung	30.184.456.646,00	68.734.125,26	0,00	0,00	0,00	1.868.125.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.952.580.971,26		
15	Bangunan Gedung	5.059.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.059.480.000,00		
16	Bangunan Gedung	41.181.587.426,12	429.625.680,00	0,00	0,00	0,00	158.893.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.761.233.082,12		
17	Bangunan Gedung	122.373.455.254,25	1.361.233.622,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.734.688.876,61		
18	Bangunan Gedung	225.178.518,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.178.518,23		
19	Tanah	23.882.780.126,00	233.622.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.116.402.970,00		
20	Bangunan Gedung	708.488.895,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.488.895,47		
21	Bangunan Gedung	65.382.579.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.382.579.420,00		

No.	URAIAN	SALDO AWAL 2021	PENAMBAHAN											PENGURANGAN											SALDO AKHIR 2021		
			REALISASI BELANJA	KOREKSI TAHUN SEBELUMNYA	KOREKSI ATAS SALDO TAHUN SEBELUMNYA	UTANG 2022	HIBAH	REVALUASI	REKLASIFIKASI DARI BEBAN HIBAH	REKLASIFIKASI DARI PERALATAN DAN MESIN	REKLASIFIKASI DARI JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN	REKLASIFIKASI DARI ASSET TETAP LAINNYA	REKLASIFIKASI DARI KONSTRUKSI DALAM PENGUNCIAN	REKLASIFIKASI DARI GEDUNG DAN BANGUNAN	PELUNGAN UTANG 2021	KELEMAHAN PENGICATAN UTANG 2021	TEMBUNYI BPK	HIBAH	REKLASIFIKASI DARI JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN	REKLASIFIKASI DARI KONSTRUKSI DALAM PENGUNCIAN	REKLASIFIKASI DARI EKSTRAKURANT BUKU	REKLASIFIKASI DARI ASSET LAIN-LAIN	TEMBUNYI BPK ATAS KELEMAHAN PENGICATAN	PENGHAMPIRAN		REKLASIFIKASI DARI GEDUNG DAN BANGUNAN	
22	Rumah Negeri Cilegon	24.536.940.074,35	211.022.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.654.565.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978.737.280,00	211.022.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.478.212.194,35	
23	Rumah Negeri Cilegon	2.028.823.000,00	2.206.146.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.234.969.260,00	
24	MusikHibahBungaran? HibahPeninggalan	12.754.226.371,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.754.226.371,62	
25	Asrama	54.408.528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.408.528.000,00	
26	Bangunan Gedung Tempat TinggalLampung	7.281.487.400,00	1.543.528.811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.128.580,00	80.947.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.428.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.133.955.620,20
27	Tugu	327.987.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.735.000,00	0,00	804.800,00	0,00	175.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.232.852,00	
28	Bangunan Peninggalan	2.882.388.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882.388.207,00	
29	CandiTugu PeninggalanPrawata Lampung	320.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.730.000,00	
30	Bangunan Nelayan Peninggalan Peninggalan Peninggalan	6.806.473.121,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.806.473.121,58	
31	Bangunan Peninggalan Peninggalan Peninggalan	35.839.696.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.839.696.800,00	
32	TuguTenda Baitas Adhikarya	888.143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522.773.000,00	
33	Pagar	30.320.524.400,00	5.880.797.787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17.209.495,00	930.086.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.081.330,00	389.785.700,00	1.434.400.281,15	2.862.400,00	0,00	0,00	46.941.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.980.470.890,30
34	TuguTenda Baitas Lainnya	2.081.148.902,00	9.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.061.128.902,00	
Jumlah			1.311.987.408.000,47	30.206.591.251,14	247.021.500,00	91.787.712,00	2.110.488.063,18	54.607.036.044,99	9.666.747.430,00	788.334.075,00	1.483.799.511,00	3.509.818.505,00	1.000.390.000,00	13.229.779.745,63	14.608.976.102,00	7.816.976.287,14	4.760.800,00	106.261.842,00	6.802.982.000,00	186.881.400,00	436.313.800,00	172.272.000,00	9.379.955.180,00	438.973.719,07	878.383.000,00	14.608.976.102,00	1.381.881.817.227,70

Penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp101.960.789.838,94 terdiri dari:

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	35.255.591.251,14
Koreksi pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	247.021.500,00
Koreksi atas utang tahun sebelumnya	Rp	81.783.713,00
Utang Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2022	Rp	2.110.488.063,18
Pendapatan Hibah	Rp	34.607.036.044,99
Revaluasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	9.666.747.430,00
Reklasifikasi dari Beban Hibah	Rp	768.334.075,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan Mesin	Rp	1.483.799.511,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	3.509.818.505,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	Rp	1.000.390.000,00
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	13.229.779.745,63
Jumlah	Rp	101.960.789.838,94

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2022 sebesar Rp35.255.591.251,14 berasal dari SKPD :

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	10.494.551.132,82
Dinas Kesehatan	Rp	17.716.400.718,38
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	1.999.780.487,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	559.931.680,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	2.617.169.412,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	464.926.506,00
Dinas Perhubungan	Rp	69.719.100,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	202.346.400,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	Rp	803.002.957,00
Sekretariat DPRD	Rp	327.762.857,94

Utang Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2022 sebesar Rp2.110.488.063,18 yang telah diakui sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan. Revaluasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp9.666.747.430,00 berada pada Sekretariat Daerah dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Pendapatan Hibah sebesar Rp34.607.036.044,99 Merupakan hibah dari KEMENDIKBUD berdasarkan SK No. 386 Tahun 2022.

Koreksi Pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp247.021.500, koreksi atas utang tahun 2021 yang baru tercatat Rp81.783.713,00 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Penambahan dari reklasifikasi sebesar Rp13.087.354.643,00 terdiri dari Reklasifikasi Beban Hibah sebesar Rp768.334.075,00 berasal dari Dinas Pemuda dan Olah Raga. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan Mesin sebesar Rp1.483.799.511,00, Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.509.818.505,00, Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.000.390.000,00 dan Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp13.229.779.745,63.

Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp21.982.440.601,66 terdiri dari:

Pelunasan Utang Belanja Modal	Rp	7.814.976.387,44
Koreksi lebih catat utang tahun 2021	Rp	4.769.908,00
Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	878.393.000,00
Hibah	Rp	6.602.982.800,00
Pengurangan Nilai Aset	Rp	106.391.643,25
Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	186.991.400,00
Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	416.163.500,00
Reklasifikasi ke Aset lain-lain	Rp	5.379.925.169,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel	Rp	172.273.000,00
Temuan BPK RI atas Kelebihan Volume Pekerjaan	Rp	419.573.793,97
Jumlah	Rp	21.982.440.601,66

Pengurangan dari pelunasan Utang Belanja Modal tahun 2021 sebesar Rp7.814.976.387,44 merupakan pengurangan dari Belanja Modal tahun 2022 yang asetnya telah diakui di tahun 2021. Koreksi lebih catat utang tahun 2021 sebesar Rp4.769.908,00 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp878.393.000,00 pada Dinas Kesehatan. Pengurangan aset atas Hibah sebesar Rp6.602.982.800,00 yang terdiri dari hibah aset Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp53.731.800,00, Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara sebesar Rp5.579.271.000,00, Bangunan Peternakan/Perikanan sebesar Rp799.010.000,00 dan Tugu sebesar Rp170.970.000,00. Pengurangan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp106.391.643,25 berasal dari LHP BPK RI Nomor: 79.A/LHP/XVIII.TJP/05/2022 atas Kekurangan Volume Pekerjaan. Pengurangan dari reklasifikasi sebesar Rp16.343.249.760,00 terdiri dari Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp186.991.400,00, Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp416.163.500,00 Reklasifikasi ke aset lain-lain Rp5.379.925.169,00, dan Reklasifikasi ke Aset *Ekstrakomtabel* Rp172.273.000,00. Pengurangan aset tetap sebesar Rp419.573.793,97 merupakan pengurangan nilai aset gedung dan bangunan atas kelebihan volume pekerjaan temuan BPK RI. Reklas Antar Aset Tetap Gedung dan Bangunan merupakan perbaikan pencatatan antar sub rincian objek Aset Tetap Gedung dan Bangunan sesuai dengan *output* dan menyamakan informasi yang disajikan dengan dokumen administrasi penatausahaan aset tetap.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.391.845.817.237,75 yang berada pada:

Tabel 7.5.94 Rincian Gedung dan Bangunan per SKPD

No.	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	401.465.370.502,66
2	Dinas Kesehatan	160.347.696.668,00

No.	SKPD	Jumlah
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	202.117.389.259,69
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	271.055.056.698,00
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.271.940.805,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.087.606.060,09
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.402.182.811,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	19.862.687.097,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99.944.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.018.800.000,00
11	Dinas Perhubungan	38.447.506.177,12
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.612.346.400,00
13	Dinas Pemuda dan Olahraga	30.075.776.553,07
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.107.759.300,00
15	Dinas Perikanan	11.581.864.703,00
16	Dinas Pariwisata	7.855.960.842,00
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	19.635.101.142,82
18	Sekretariat Daerah	98.885.440.423,00
19	Sekretariat DPRD	36.662.307.934,12
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.907.072.179,00
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.443.800.000,00
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	43.450.000,00
23	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.328.075.000,00
24	Kecamatan Bunguran Timur	3.420.481.650,00
25	Kecamatan Bunguran Barat	5.396.477.654,00
26	Kecamatan Bunguran Utara	3.443.004.000,00
27	Kecamatan Pulau Laut	1.526.625.000,00
28	Kecamatan Midai	3.177.793.000,00
29	Kecamatan Serasan	1.888.877.000,00
30	Kecamatan Subi	3.541.525.000,00
31	Kecamatan Pulau Tiga	5.129.866.511,60
32	Kecamatan Bunguran Tengah	2.013.281.454,58
33	Kecamatan Bunguran Timur Laut	4.314.650.000,00
34	Kecamatan Bunguran Selatan	1.275.870.000,00
35	Kecamatan Serasan Timur	5.070.304.981,00
36	Kecamatan Suak Midai	3.432.671.130,00
37	Kecamatan Bunguran Batubi	3.261.040.000,00
38	Kecamatan Pulau Tiga Barat	3.638.215.301,00
JUMLAH		1.391.845.817.237,75

7.5.3.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2022 sebesar Rp2.030.388.415.732,09 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp 2.002.601.694.073,74
Penambahan Tahun 2022	Rp 112.369.473.780,25
Jumlah	Rp 2.114.971.167.853,99
Pengurangan Tahun 2022	Rp 84.582.752.121,90
Saldo Akhir per 31 Desember 2022	Rp 2.030.388.415.732,09

Jumlah tersebut merupakan rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Natuna yang terdiri dari:

Tabel 7.5.95 Daftar Mutasi Masuk dan Keluar Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)

[illegible]

Penambahan nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp112.369.473.780,25 terdiri dari:

Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp	93.570.889.388,89
Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 2022	Rp	15.723.680.290,36
Koreksi Kurang Catat Utang Tahun Sebelumnya	Rp	2.415.869,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	473.000.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung Bangunan	Rp	186.991.400,00
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	2.412.496.832,00
Jumlah	Rp	112.369.473.780,25

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2022 sebesar Rp93.570.889.388,89 berasal dari:

Dinas Pendidikan	Rp	2.155.034.056,15
------------------	----	------------------

Dinas Kesehatan	Rp	1.744.265.929,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	72.731.330.675,53
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Rp	15.972.062.989,00
Dinas Sosial	Rp	1.253.831,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	235.727.435,00
Dinas Perhubungan	Rp	492.526.369,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp	49.339.400,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Rp	39.777.839,00
Sekretariat DPRD	Rp	149.570.865,21
Jumlah	Rp	93.570.889.388,89

Pemerintah Kabupaten Natuna mencatat Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan di Tahun 2022 sebesar Rp15.723.680.290,36 dan kurang catat utang tahun sebelumnya sebesar Rp2.415.869,00 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan nilai tersebut diakui sebagai penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Jumlah reklasifikasi tambah ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp659.991.400,00 diantaranya reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp473.000.000,00, reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp186.991.400,00 dan reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp 2.412.496.832,00

Pengurangan nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp84.499.740.523,13 terdiri dari:

Koreksi lebih catat utang tahun sebelumnya	Rp	1.265.174,00
Pelunasan Utang Tahun 2021	Rp	71.816.841.186,15
Koreksi Kelebihan pencatatan Aset Tahun Sebelumnya	Rp	1.041.794.511,85
Menyesuaikan Kelebihan Bayar Audit BPK		
Hibah	Rp	2.795.313.415,90
Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	3.509.818.505,00
Reklasifikasi Ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	2.275.970.485,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	Rp	3.141.748.844,00
Jumlah	Rp	84.582.752.121,90

Koreksi Saldo Awal Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2022 sebesar Rp1.265.174,00 adalah lebih catat utang tahun sebelumnya pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Pelunasan Utang Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2021 sebesar Rp71.816.841.186,15.

Jumlah Laporan Hasil Temuan BPK RI atas Kelebihan Pembayaran/Kekurangan Volume Pekerjaan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten tahun 2022 sebesar Rp1.041.794.511,85. Hibah Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp 2.795.313.415,90 antara lain ke Pemerintah Desa Air Ringau Kecamatan Serasan Timur berdasarkan SK Nomor 376 Tahun 2022 sebesar Rp105.309.731,00 dan Pemerintah Desa Kelanga Kecamatan Bunguran Timur Laut berdasarkan SK Nomor 472 Tahun 2022 sebesar Rp1.928.316.000,00, Hibah Barang Milik Daerah kepada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Ranai Dengan SK No.338 Tahun 2022 sebesar Rp383.749.084,90 pada Dinas Perhubungan, Hibah ke Pemerintah Desa Sepampang Kec. Bunguran Timur berdasarkan SK Nomor 473 Tahun

2022 sebesar Rp230.338.600,00 dan ke Pemerintah Desa Tanjung Kumbik Kec. Pulau Tiga berdasarkan SK Nomor 42 Tahun 2022 sebesar Rp147.600.000,00 pada Dinas Perikanan.

Jumlah reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp8.903.233.554,00 diantaranya reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.509.818.505,00 reklasifikasi ke Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp2.275.970.485,00 dan reklasifikasi ke Aset Lain-Lain sebesar Rp3.141.748.844,00. Reklasifikasi Antar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan perbaikan pencatatan antar sub rincian objek Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sesuai dengan *output* dan menyamakan informasi yang disajikan dengan dokumen administrasi penatausahaan aset tetap.

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.030.388.415.732,09 yang berada pada:

Tabel 7.5.96 Rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.414.317.289,24
2	Dinas Kesehatan	11.535.304.371,34
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.750.077.380.271,73
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	167.432.472.467,30
5	Dinas Sosial	1.253.831,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	321.047.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	39.560.200,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.402.101.321,36
9	Dinas Lingkungan Hidup	1.129.348.384,00
10	Dinas Perhubungan	54.045.180.924,82
11	Dinas Pemuda dan Olahraga	544.164.373,00
12	Dinas Perikanan	12.277.785.345,00
13	Dinas Pariwisata	11.010.283.933,09
14	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	48.777.839,00
15	Sekretariat Daerah	1.185.361.100,00
16	Sekretariat DPRD	238.557.865,21
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	35.174.000,00
18	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	10.584.269.000,00
19	Kecamatan Bunguran Timur	2.161.272.200,00
20	Kecamatan Midai	185.000.000,00
21	Kecamatan Serasan	389.159.000,00
22	Kecamatan Pulau Tiga	330.645.016,00
JUMLAH		2.030.388.415.732,09

7.5.3.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2022 sebesar Rp69.345.782.211,12 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	70.059.198.316,12
Penambahan Tahun 2022	Rp	623.251.846,00
Jumlah	Rp	70.682.450.162,12

Pengurangan Tahun 2022
Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2022

Rp 1.336.667.951,00
Rp 69.345.782.211,12

Jumlah tersebut merupakan rincian Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Natuna yang terdiri dari:

Tabel 7.5.97 Daftar Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SALDO AKHIR 2021	PENAMBAHAN				PENGURANGAN							SALDO AKHIR 2022
			REALISASI BELANJA	UTANG 2022	REKLAS DARI PERALATAN DAN MESIN	REKLAS SESAMA ASET TETAP LAINNYA	HIBAH	REKLAS KE PERALATAN DAN MESIN	REKLAS KE GEDUNG DAN BANGUNAN	REKLAS KE ASET TAK BERWUJUD	REKLAS KE EKSTRAKOMBAN	REKLAS KE ASET LAIN-LAIN	REKLAS SESAMA ASET TETAP LAINNYA	
1	Buku Umum	35.669.877.917,32	0,00	0,00	4.398.636,00	248.150.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.305.000,00	0,00	35.915.121.740,32
2	Buku Filsafat	16.562.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.562.258,00
3	Buku Agama	115.305.050,00	0,00	0,00	0,00	22.117.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.422.588,00
4	Buku Ilmu Sosial	250.833.386,00	0,00	0,00	193.500,00	29.823.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.295.000,00	0,00	260.555.632,00
5	Buku Ilmu Bahasa	265.068.085,00	358.111.559,00	0,00	1.151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.538.364,00	280.792.780,00
6	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	10.333.870,00	0,00	0,00	407.000,00	20.732.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.473.602,00
7	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	478.423.250,00	0,00	0,00	6.400.000,00	14.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.837.997,00
8	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	1.088.793.445,00	0,00	0,00	0,00	11.481.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.980.000,00	0,00	1.080.295.359,00
9	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	25.005.534,00	0,00	0,00	247.500,00	11.217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.470.534,00
10	Buku Laporan	8.915.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575.000,00	0,00	5.340.275,00
11	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	48.683.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.683.755,00
12	Bentuk Mikro (Microform)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
13	Bahan Kartografi	34.981.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	0,00	30.031.360,00
14	Karya Grafika (Graphic Material)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
15	Alat Musik	2.512.288.000,00	0,00	199.831.000,00	7.094.500,00	0,00	0,00	187.522.765,00	0,00	0,00	12.308.235,00	0,00	0,00	2.519.382.500,00
16	Lukisan	18.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.590.000,00
17	Alat Peraga Kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	160.764.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.764.778,00
19	Barang Kerajinan	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00
20	Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	11.222.469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.222.469,80
21	Ternak Potong	89.727.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.727.273,00
22	Ikan Budidaya	3.800.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750.000,00
23	Tanaman	5.449.868.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.875.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409.993.625,00
24	Tanaman Koleksi	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
25	Aset Tetap Dalam Renovasi	23.790.903.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.790.513.685,00
26	Aset Tetap Lainnya	0,00	40.466.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.466.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		70.059.198.316,12	403.528.210,00	199.831.000,00	19.892.636,00	343.538.364,00	39.875.300,00	187.522.765,00	1.000.390.000,00	40.466.651,00	12.308.235,00	56.105.000,00	343.538.364,00	69.345.782.211,12

Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2022 sebesar Rp623.251.846,00 terdiri dari:

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp 403.528.210,00
 Utang Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 Rp 199.831.000,00
 Reklasifikasi Dari Peralatan dan Mesin Rp 19.892.636,00
Jumlah Rp 623.251.846,00

Realisasi belanja modal pengadaan Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2022 sebesar Rp403.528.210,00 termasuk didalamnya Belanja BOS dan BOP Aset Tetap Lainnya berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp358.111.559,00.

Penambahan Utang Belanja Aset Tetap Lainnya 2022 sebesar Rp199.831.000,00 berada pada Dinas Pemuda dan Olahraga dan penambahan dari reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp19.892.636,00.

Pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp1.336.667.951,00 terdiri dari:

Hibah Barang milik Daerah Dari Dinas Perhubungan Kab. Natuna Kepada Kantor unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Ranai	Rp	39.875.300,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	199.831.000,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	1.000.390.000,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	Rp	56.105.000,00
Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud	Rp	40.466.651,00
Jumlah	Rp	1.336.667.951,00

Pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp1.336.667.951,00 berasal dari penghapusan atas hibah barang milik daerah kepada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Ranai dengan SK No. 338 Tahun 2022 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp39.875.300,00.

Kemudian Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-lain sebesar Rp56.105.000,00. Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp1.000.390.000,00 berasal dari Sekretariat DPRD, Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebesar Rp199.831.000,00, Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp40.466.651,00 pada Sekretariat Daerah serta Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Ekstrakomtabel sebesar Rp12.308.235,00 berada pada Dinas Pemuda dan Olahraga yang berasal dari penambahan utang belanja Tahun 2022. Reklas Antar Aset Tetap Lainnya merupakan perbaikan pencatatan antar sub rincian objek Aset Tetap Lainnya sesuai dengan *output* dan menyamakan informasi yang disajikan dengan dokumen administrasi penatausahaan aset tetap.

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Natuna per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp69.345.782.211,12 berada pada :

Tabel 7.5.98 Rincian Aset Tetap Lainnya per SKPD

<i>(dalam rupiah)</i>		
No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	47.940.198.820,12
2.	Dinas Kesehatan	83.176.700,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.560.539.885,00
4.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	35.750.000,00
5.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	644.499.898,00
6.	Dinas Lingkungan Hidup	4.862.836.000,00
7.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.720.277.630,00
8.	Dinas Perikanan	206.120.000,00
9.	Dinas Pariwisata	176.179.778,00
10.	Bagian Umum	54.465.000,00
11.	Sekretariat DPRD	49.999.000,00
12.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	4.869.500,00
13.	Kecamatan Bunguran Timur Laut	3.870.000,00
14.	Kecamatan Bunguran Selatan	3.000.000,00
		69.345.782.211,12

7.5.3.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Natuna per 31 Desember 2022 sebesar Rp57.050.297.434,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	71.260.258.903,63
Penambahan tahun 2022	Rp	3.265.345.758,00
Jumlah	Rp	74.525.604.661,63
Pengurangan tahun 2022	Rp	17.475.307.227,63
Nilai Aset Tetap Tahun 2022	Rp	57.050.297.434,00

Jumlah tersebut merupakan rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Pemerintah Kabupaten Natuna yang terdiri dari:

Tabel 7.5.99 Daftar Mutasi Masuk dan Keluar Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

NO.	Uraian	Saldo akhir 2021	penambahan						pengurangan					Saldo Akhir 2022
			Beban barang dan jasa	Reklas dari aset tetap tanah	Reklas dari aset tetap gedung dan bangunan	Reklas dari aset tetap jalan, irigasi dan jaringan	Reklas dari beban hibah	Reklas antar kdp	Reklas ke tanah	Reklas ke aset tetap gedung dan bangunan	Reklas antar kdp	Reklas ke jji	Reklas ke aset lain-lain	
1.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	58.371.102.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.471.000,00	6.731.495.484,00	49.896.000,00	2.412.496.832,00	1.472.506.600,00	47.618.236.403,00
2.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung sarana Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.942.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.942.655,00
3.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.927.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.927.000,00
4.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	6.467.866.476,63	30.878.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.418.516.076,63	0,00	0,00	49.350.400,00	30.878.068,00
5.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	6.963.000,00	99.935.200,00	0,00	0,00	0,00	30.771.700,00	0,00	0,00	6.963.000,00	0,00	0,00	0,00	130.706.900,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/pasar	0,00	0,00	193.001.250,00	99.077.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.078.740,00
7.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar &	0,00	0,00	0,00	68.179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.179.000,00
8.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	420.806.100,00	0,00	0,00	202.965.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.496.100,00	563.822.000,00
9.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896.000,00
10.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Pagar	0,00	0,00	0,00	49.941.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.351.868,00	0,00	0,00	0,00	21.589.825,00
11.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Nasional	4.854.417.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.927.000,00	0,00	0,00	4.806.490.108,00
12.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	0,00	0,00	0,00	833.666.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.666.040,00
13.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Desa	1.122.086.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.206.550,00	908.880.350,00
14.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Lainnya	0,00	194.682.900,00	0,00	0,00	1.174.816.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.499.362,00
15.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	253.629.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.629.056,00
16.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	17.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.017.000,00
17.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	13.858.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.858.927,00
JUMLAH		71.260.258.903,63	326.496.168,00	193.001.250,00	416.163.500,00	2.275.970.485,00	54.714.355,00	97.823.000,00	86.471.000,00	13.229.779.745,63	97.823.000,00	2.412.496.832,00	1.746.559.650,00	57.050.297.434,00

Penambahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp3.265.345.758,00 terdiri dari:

Reklasifikasi dari Beban Jasa	Rp	294.618.100,00
Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan	Rp	30.878.068,00
Reklasifikasi dari Beban Hibah	Rp	54.714.355,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah	Rp	193.001.350,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	416.163.500,00
Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	2.275.970.485,00
Jumlah	Rp	3.265.345.758,00

Reklasifikasi dari Beban Jasa sebesar Rp194.682.900,00 berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp99.935.200,00. Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan sebesar Rp30.878.068,00 berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Reklasifikasi dari Beban Hibah sebesar Rp54.714.355,00 berasal dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah sebesar Rp193.001.350,00 berasal dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp416.163.5000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp202.965.317,00, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp45.941.693,00, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro sebesar Rp99.077.490,00 dan Dinas Perhubungan sebesar Rp68.179.000,00. Sedangkan Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.275.970.485,00 berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pengurangan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp17.475.307.227,63 dengan rincian sebagai berikut :

Relasifikasi ke Aset Tanah	Rp	86.471.000,00
Reklasifikasi ke Gedung Bangunan	Rp	13.229.779.745,63
Reklasifikasi Ke Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp	2.412.496.832,00
Reklasifikasi Ke Aset lain-lain	Rp	1.746.559.650,00
Jumlah	Rp	17.475.307.227,63

Saldo Akhir Konstruksi dalam pengerjaan Pemerintah Kabupaten Natuna per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp57.050.297.434,00 terdiri dari :

Tabel 7.5.100 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD

<i>(dalam rupiah)</i>		
NO.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	580.839.000,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	53.644.747.688,00
3.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8.261.000,00
4.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	21.589.825,00
5.	Dinas Lingkungan Hidup	49.896.000,00
6.	Dinas Perhubungan	2.250.308.626,00
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika	47.927.000,00
8.	Dinas Pemuda dan Olahraga	154.649.555,00
9.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	292.078.740,00
Jumlah		57.050.297.434,00

Aset-aset tetap sebagaimana dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan ini adalah aset-aset mempunyai nilai batasan kapitalisasi yang diatur dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yaitu untuk peralatan dan mesin mempunyai nilai minimal Rp1.000.000,00 dan pada gedung dan bangunan Rp10.000.000,00.

7.5.3.3.7 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan sebesar Rp1.813.801.491.834,18 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp 1.681.347.478.807,05
Penambahan Tahun 2022	Rp 166.154.355.040,12
Jumlah	Rp 1.847.501.833.847,17

Pengurangan Tahun 2022
Saldo per 31 Desember 2022

Jumlah tersebut merupakan rincian Akumulasi Penyusutan milik Pemerintah Kabupaten Natuna yang terdiri dari:

Tabel 7.5.101 Rincian Akumulasi Penyusutan

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SALDO AKHIR 2021	PENAMBAHAN				PENGURANGAN						SALDO AKHIR 2022
			KOREKSI KURANG CATAT SALDO AWAL	REKLAS DARI ASET LAIN-LAIN	REKLAS ANTAR RINCIAN OBJEK AKUMULASI	BEBAH PENYUSUTAN	KOREKSI LEBIH CATAT SALDO AWAL	PENGHAPUSAN	REKLAS KE ASET LAIN-LAIN	HIBAH	REKLAS KE EKSTRAKOTABLE	REKLAS ANTAR RINCIAN OBJEK AKUMULASI	
1	Akumulasi Penyusutan Aset Besar	1.568.859.224,47	1.230.952,38	0,00	335.525.129,92	130.580.525,39	0,00	13.011.607,14	31.230.000,00	0,00	0,00	277.173.587,71	1.714.780.657,31
2	Akumulasi Penyusutan Aset Angkutan	82.625.484.145,49	499.592.464,28	0,00	6.320.241.482,98	7.453.604.112,44	55.556.863,10	4.520.228.750,00	1.945.202.291,87	1.441.099.965,00	0,00	1.238.145.142,85	87.708.689.192,57
3	Akumulasi Penyusutan Aset Bengkel dan Alat Usur	2.990.570.587,75	8.303.800,01	0,00	129.408.359,22	339.105.667,43	18.273.320,50	29.476.250,00	0,00	0,00	0,00	5.676.998,89	3.413.961.845,02
4	Akumulasi Penyusutan Aset Pertanian	5.101.281.462,26	723.437,52	0,00	0,00	203.265.502,95	1.066.770,83	0,00	0,00	0,00	0,00	310.750.000,00	4.993.453.631,90
5	Akumulasi Penyusutan Aset Kantor dan Rumah Tinggal	73.823.229.489,58	870.436.102,38	30.250.000,00	4.224.926.667,21	7.911.579.381,33	46.087.449,49	8.823.133.989,53	283.636.273,34	717.697.500,00	0,00	2.723.643.841,01	74.266.222.587,13
6	Akumulasi Penyusutan Aset Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.330.684.526,55	35.732.805,20	3.795.000,00	897.255.034,10	985.059.234,00	0,00	347.768.516,67	281.802.916,68	0,00	0,00	802.145.745,25	12.820.809.421,25
7	Akumulasi Penyusutan Aset Kodokteran dan Kesehatan	98.348.729.415,65	1.986.733,34	0,00	70.485.483.395,02	7.958.846.211,88	1.203.722,67	147.515.000,00	0,00	0,00	0,00	78.203.828.112,76	98.442.498.920,46
8	Akumulasi Penyusutan Aset Laboratorium	16.552.826.229,79	8.279.088,77	0,00	85.895.176.076,75	875.451.065,02	2.163.169.379,92	245.300.498,12	0,00	0,00	0,00	85.009.486.503,97	15.913.778.078,32
9	Akumulasi Penyusutan Aset Peralatan	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
10	Akumulasi Penyusutan Komputer	32.274.461.181,29	1.185.431.201,96	11.627.000,00	1.542.632.873,00	6.423.206.228,16	52.020,83	2.510.403.903,34	479.139.552,93	505.208,34	0,00	1.233.198.879,40	37.214.058.919,57
11	Akumulasi Penyusutan Aset Eksploasi	93.151.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.151.856,00
12	Akumulasi Penyusutan Aset Kelembagaan Kerja	31.871.189,17	58.333,33	0,00	0,00	13.849.166,67	1.515.772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.262.916,67
13	Akumulasi Penyusutan Aset Peraga	176.375.764,56	13.366,67	0,00	81.242.193,83	31.702.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.286.263,33	281.047.842,75
14	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	1.899.588.337,29	0,00	0,00	1.006.595.000,00	226.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599.162.503,96	1.533.645.833,33
15	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu	820.563.112,10	0,00	0,00	0,00	159.355.183,14	219.315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.698.978,64
16	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	140.859.763,71	173.243.298,52	0,00	0,00	117.443.322,85	20.125.088,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.421.237,85
17	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	207.821.061.807,28	1.970.681.549,50	0,00	761.550.891,18	25.212.613.253,13	3.036.417.201,38	174.811.588,32	1.204.901.807,89	765.327.615,33	63.324.166,67	100.443.747,88	230.221.681.373,62
18	Akumulasi Penyusutan Meubelen	464.058.843,11	289.095.792,51	0,00	0,00	66.172.621,40	259.619.275,52	0,00	11.063.383,33	24.220.750,00	0,00	42.046.907,61	482.376.940,56
19	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	8.892.948.540,36	0,00	0,00	0,00	591.159.248,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.484.107.788,41
20	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	4.542.430.486,64	59.188.518,39	0,00	103.998.190,35	738.828.234,01	62.883.513,44	0,00	0,00	0,00	0,00	102.483.505,06	5.279.078.280,89
21	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.011.587.880.483,96	501.165.174,19	0,00	495.285.790,72	84.758.942.573,07	66.249.713,40	0,00	353.045.044,57	1.928.316.000,00	0,00	326.651.720,00	1.084.689.021.543,97
22	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	86.623.972.709,96	30.938.563,41	0,00	619.490.186,94	9.119.857.373,47	494.481.464,28	0,00	0,00	45.293.597,85	0,00	58.080.948,38	95.796.402.823,27
23	Akumulasi Penyusutan Instalasi	28.256.337.055,28	1.148.422.680,24	0,00	645.343.532,28	4.473.785.130,88	313.982.220,99	0,00	712.273.983,85	14.604.695,79	0,00	1.120.198.996,91	32.362.778.491,34
24	Akumulasi Penyusutan Jaringan	4.568.262.614,78	369.959.567,30	0,00	3.293.347,35	1.163.217.852,95	0,00	0,00	46.104.054,15	0,00	0,00	386.044.765,88	5.672.584.562,35
Jumlah		1.681.347.478.807,05	7.154.483.370,90	45.672.000,00	173.547.448.150,85	158.954.199.669,22	6.540.903.092,68	16.811.650.103,12	5.302.295.264,06	4.983.169.386,46	62.324.166,67	173.547.448.150,85	1.813.801.491.834,18

Penambahan akumulasi penyusutan tahun 2022 sebesar Rp166.154.355.040,12 terdiri dari:

1.	Penambahan dari Beban Penyusutan Tahun 2022	Rp	158.954.199.669,22
2.	Penambahan dari Reklasifikasi Aset Lain-Lain ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	45.672.000,00
3.	Kekurangan pencatatan Akumulasi Peralatan dan Mesin	Rp	2.785.031.525,36
4.	Kekurangan pencatatan Akumulasi Gedung dan Bangunan	Rp	2.318.965.860,40
5.	Kekurangan pencatatan Akumulasi Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp	2.050.485.985,14
Jumlah Penambahan		Rp	166.154.355.040,12

Pengurangan akumulasi penyusutan tahun 2022 sebesar Rp33.700.342.012,99 terdiri dari:

1	Kelebihan pencatatan Akumulasi Peralatan dan Mesin	Rp	2.307.269.703,67
2	Kelebihan pencatatan Akumulasi Gedung dan Bangunan	Rp	3.358.919.990,34
3	Kelebihan pencatatan Akumulasi Jalan Irigasi dan jaringan	Rp	874.713.398,67
4.	Penghapusan Aset Tetap	Rp	16.811.650.103,12
5.	Pencatatan Aset Tetap ke Aset Lain-Lain	Rp	5.302.295.264,06

6. Pengurangan atas Aset tetap yang telah dihibahkan	Rp	4.983.169.386,46
7. Reklasifikasi Aset Tetap ke Ekstrakomtable	Rp	62.324.166,67
Jumlah Pengurangan	Rp	33.700.342.012,99

Reklas Antar Rincian Objek Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan perbaikan pencatatan antar Rincian Objek kumulasi Penyusutan Aset Tetap sesuai dengan *output* dan menyamakan informasi yang disajikan dengan dokumen administrasi penatausahaan aset tetap.

7.5.3.3.8 Aset Ekstrakomtable

Aset-aset yang nilai perolehannya dibawah nilai Kapitalisasi Aset tetap dan aset yang tidak diyakini keberadaannya sesuai yang ditetapkan dalam kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah disajikan sebagai Aset *Ekstrakomtable*. Aset *Ekstrakomtable* tetap disajikan dalam Dokumen penatusahaan Barang Milik Daerah tetapi tidak disajikan di Neraca Pemerintah. Aset *Ekstrakomtable* untuk Peralatan dan mesin adalah dengan nilai dibawah Rp1.000.000,00, sedangkan untuk gedung dan bangunan dengan nilai dibawah Rp10.000.000,00

Nilai Aset *Ekstrakomtable* Peralatan dan Mesin sebesar Rp119.962.423.652,23 sebagai berikut:

Tabel 7.5.102 Aset Ekstrakomtable Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)					
No.	Nama SKPD	Saldo Awal 2022	Mutasi		Saldo Akhir 2022
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan	70.801.065.250,00	889.350.431,00	0,00	71.690.415.681,00
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	13.650.000,00	23.944.535,00	0,00	37.594.535,00
3	Dinas Kesehatan	6.010.410.000,13	510.973.599,87	0,00	6.521.383.600,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	140.593.100,00	0,00	0,00	140.593.100,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	58.548.700,00	0,00	0,00	58.548.700,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	53.306.900,00	0,00	0,00	53.306.900,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	18.150.000,00	0,00	18.150.000,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	99.613.366,69	0,00	0,00	99.613.366,69
9	Dinas Pemadam Kebakaran	102.610.800,00	0,00	0,00	102.610.800,00
10	Dinas Sosial	9.800.000,00	10.600.000,00	0,00	20.400.000,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	356.810.900,00	0,00	0,00	356.810.900,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	59.241.000,00	0,00	0,00	59.241.000,00
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	258.855.067,91	52.674.798,10	0,00	311.529.866,01
14	Dinas Lingkungan Hidup	31.646.900,00	0,00	0,00	31.646.900,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28.654.800,00	0,00	0,00	28.654.800,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	120.735.726,00	0,00	0,00	120.735.726,00
17	Dinas Perhubungan	150.723.100,00	0,00	36.279.100,00	114.444.000,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	77.200.701,00	0,00	0,00	77.200.701,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	164.100.217,00	0,00	0,00	164.100.217,00
21	Dinas Perikanan	739.157.900,00	0,00	0,00	739.157.900,00
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	124.085.200,00	4.998.000,00	0,00	129.083.200,00
24	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	342.597.664,00	0,00	0,00	342.597.664,00
25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	110.925.100,00	0,00	0,00	110.925.100,00
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	72.102.500,00	8.779.000,00	0,00	80.881.500,00
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	15.577.104,03	0,00	0,00	15.577.104,03
28	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	26.475.366,00	0,00	0,00	26.475.366,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	32.297.000,00	6.000.000,00	0,00	38.297.000,00
30	Sekretariat Daerah	35.271.621.058,00	155.039.749,50	0,00	35.426.660.807,50
31	Sekretariat DPRD	913.203.308,00	140.564.850,00	0,00	1.053.768.158,00
32	Inspektorat	32.928.050,00	0,00	0,00	32.928.050,00
33	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	12.726.000,00	0,00	0,00	12.726.000,00
34	Kecamatan Bunguran Timur	194.934.000,00	7.056.000,00	0,00	201.990.000,00
35	Kecamatan Bunguran Barat	33.178.250,00	24.000.000,00	0,00	57.178.250,00
36	Kecamatan Bunguran Utara	207.336.960,00	0,00	0,00	207.336.960,00
37	Kecamatan Pulau Laut	245.588.500,00	0,00	0,00	245.588.500,00
38	Kecamatan Midai	127.134.500,00	0,00	0,00	127.134.500,00
39	Kecamatan Serasan	61.604.500,00	0,00	0,00	61.604.500,00
40	Kecamatan Subi	185.736.500,00	3.951.600,00	0,00	189.688.100,00
41	Kecamatan Pulau Tiga	220.053.250,00	0,00	0,00	220.053.250,00
42	Kecamatan Bunguran Tengah	40.934.500,00	0,00	0,00	40.934.500,00
43	Kecamatan Bunguran Timur Laut	302.842.500,00	4.820.000,00	0,00	307.662.500,00
44	Kecamatan Bunguran Selatan	60.124.450,00	0,00	0,00	60.124.450,00
45	Kecamatan Serasan Timur	37.124.500,00	0,00	0,00	37.124.500,00
46	Kecamatan Suak Midai	31.475.000,00	0,00	0,00	31.475.000,00
47	Kecamatan Bunguran Batubi	56.720.000,00	0,00	0,00	56.720.000,00
48	Kecamatan Pulau Tiga Barat	101.750.000,00	0,00	0,00	101.750.000,00
Total		118.137.800.188,76	1.860.902.563,47	36.279.100,00	119.962.423.652,23

Nilai Aset *Ekstrakomtable* Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.074.937.630,07 sebagai berikut:

Tabel 7.5.103 Aset Ekstrakomtable Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No.	Nama SKPD	Saldo Awal 2022	Mutasi		Saldo Akhir 2022
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan	311.559.043,00	9.990.000,00	0,00	321.549.043,00
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	21.647.735,00	0,00	0,00	21.647.735,00
3	Dinas Kesehatan	42.228.400,00	149.578.000,00	0,00	191.806.400,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	6.468.000,00	0,00	0,00	6.468.000,00
5	Dinas Pemadam Kebakaran	9.990.750,00	0,00	0,00	9.990.750,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.975.000,00	0,00	0,00	18.975.000,00
7	Dinas Perhubungan	5.612.714.222,07	0,00	0,00	5.612.714.222,07
8	Dinas Perikanan	87.649.880,00	0,00	0,00	87.649.880,00
9	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	13.475.000,00	0,00	0,00	13.475.000,00
10	Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	251.795.500,00	0,00	0,00	251.795.500,00
12	Sekretariat Daerah	275.595.200,00	12.705.000,00	0,00	288.300.200,00
13	Sekretariat DPRD	220.315.900,00	0,00	0,00	220.315.900,00
14	Kecamatan Bunguran Timur Laut	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00
15	Kecamatan Bunguran Selatan	23.850.000,00	0,00	0,00	23.850.000,00
Total		6.902.664.630,07	172.273.000,00	0,00	7.074.937.630,07

7.5.3.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	<u>52.121.929.639,10</u>	<u>47.820.223.902,65</u>

Saldo Aset Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2022 sebesar Rp 52.121.929.639,10 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo Akhir per 31 Desember 2021	Rp	94.001.396.161,01
Penambahan Tahun 2022	Rp	33.564.235.911,67
Jumlah	Rp	127.565.632.072,68
Pengurangan Tahun 2022	Rp	70.604.422.297,03
Saldo Aset Lainnya	Rp	56.961.209.775,65
Akumulasi Per 31 Desember 2022	Rp	(4.839.280.136,55)
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	52.121.929.639,10

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 52.121.929.639,10. Aset Lainnya pada tahun 2022 bertambah sebesar Rp 33.564.235.911,67 dan berkurang sebesar Rp 70.604.422.297,03 atau dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.104 Rincian Aset Lainnya

(dalam rupiah)

Jenis	Saldo per 31 Desember 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo per 31 Desember 2022
Tagihan Jangka Panjang	17.832.208.163,02	2.699.399.065,74	7.841.652.769,89	12.689.954.458,87
Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	14.215.602.000,00	0,00	14.215.602.000,00	0,00

Jenis	Saldo per 31 Desember 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo per 31 Desember 2022
Aset Tidak Berwujud	6.566.344.275,00	2.103.181.819,00	0,00	8.669.526.094,00
Aset Lain-Lain	55.387.241.722,99	13.540.760.630,93	48.547.167.527,14	20.380.834.826,78
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	15.220.894.396,00	0,00	15.220.894.396,00
Saldo Aset Lainnya	94.001.396.161,01	33.564.235.911,67	70.604.422.297,03	56.961.209.775,65
Akumulasi Penyusutan Aset Lain lain	(42.210.842.208,78)	0,00	(42.210.842.208,78)	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.970.330.049,58)	(1.158.000.286,97)	(289.050.200,00)	(4.839.280.136,55)
Jumlah	47.820.223.902,65	32.406.235.624,70	28.104.529.888,25	52.121.929.639,10

Penambahan dan pengurangan nilai Aset Lainnya disajikan sesuai dengan klasifikasi pada Berita Acara Rekonsiliasi Aset.

7.5.3.4.1 Tagihan Jangka Panjang

	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
Tagihan Jangka Panjang	12.689.954.458,87	17.832.208.163,02

Tagihan Jangka Panjang pada Pemerintah Kabupaten Natuna di tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.5.105 Rincian Tagihan Jangka Panjang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan Tagihan	Pengurangan		Saldo Akhir
			Koreksi Pencatatan	Pelunasan	
Tuntutan Perbendaharaan	3.867.362.944,00	0,00	0,00	0,00	3.867.362.944,00
Tuntutan Ganti Rugi	13.964.845.219,02	2.699.399.065,74	5.884.183.407,32	1.957.469.362,57	8.822.591.514,87
Jumlah	17.832.208.163,02	2.699.399.065,74	5.884.183.407,32	1.957.469.362,57	12.689.954.458,87

Selama tahun 2022 terdapat penambahan tagihan jangka panjang Rp1.755.886.386,33. dan penambahan tagihan jangka panjang atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LKPD 2022 sebesar Rp943.512.679,41. Selain itu juga terdapat koreksi pencatatan menyesuaikan SIPTL BPK sebesar Rp5.884.183.407,32. Pelunasan tagihan jangka panjang selama tahun 2022 berdasarkan data Inspektorat Kabupaten Natuna sebesar Rp1.957.469.362,57.

7.5.3.4.2 Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	14.215.602.000,00

Saldo Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 Rp0,00. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp14.215.602.000,00. Penurunan tersebut dikarenakan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga telah dihibahkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan SK Bupati Natuna Nomor 344 Tahun 2022 sebesar Rp13.255.341.000, Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Rp750.205.000,00 dan Reklasifikasi pencatatan ke ekstrakomtable sebesar Rp210.056.000,00.

7.5.3.4.3 Aset Tidak Berwujud

	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
Aset Tidak Berwujud	8.669.526.094,00	6.566.344.275,00

Perhitungan Aset Tidak Berwujud sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp 6.566.344.275,00
Jumlah Penambahan	Rp 2.103.181.819,00
Jumlah Pengurangan	Rp 0,00
Saldo Akhir	Rp 8.669.526.094,00

Peningkatan nilai Aset Tidak Berwujud tahun 2022 terdiri dari:

Tabel 7.5.106 Daftar Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tidak Terwujud

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SALDO AKHIR 2021	PENAMBAHAN			PENGURANGAN	SALDO AKHIR 2022
			REKLAS DARI ASET TETAP LAINNYA	HIBAH	REKLAS DARI BEBAN JASA		
1.	Software	1.009.217.500,00	40.466.651,00	33.000.000,00	0,00	0,00	1.082.684.151,00
2.	Kajian	5.557.126.775,00	0,00	0,00	2.029.715.168,00	0,00	7.586.841.943,00
JUMLAH		6.566.344.275,00	40.466.651,00	33.000.000,00	2.029.715.168,00	0,00	8.669.526.094,00

Penambahan Aset Tidak Berwujud tahun 2022 sebesar Rp2.103.181.819,00 adalah sebagai berikut:

Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	Rp 40.466.651,00
Pendapatan Hibah	Rp 33.000.000,00
Reklasifikasi dari Beban Jasa	Rp 2.029.715.168,00
Jumlah Penambahan	Rp 2.103.181.819,00

Hibah Aset Tidak Berwujud sebesar Rp33.000.000,00 yang berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa *software/aplikasi*, sedangkan reklasifikasi Aset Tidak Berwujud tahun 2022 sebesar Rp2.029.715.168,00 merupakan reklasifikasi dari beban jasa konsultasi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp1.550.692.860,00 dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro sebesar Rp 479.022.308,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.669.526.094,00 berdasarkan SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.107 Rincian Aset Tidak Berwujud per SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	288.475.000,00
2	Dinas Kesehatan	833.423.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	842.012.900,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.605.442.860,00
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	320.347.500,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	49.900.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	1.185.855.000,00
8	Dinas Perhubungan	817.410.000,00
9	Dinas Pemuda dan Olahraga	734.575.875,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	149.900.000,00
11	Dinas Pariwisata	635.315.000,00
12	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	778.282.308,00
13	Sekretariat Daerah	40.466.651,00
14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	388.120.000,00
Jumlah		8.669.526.094,00

7.5.3.4.4 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	20.380.834.826,78	55.387.241.722,99

Aset Lain-lain merupakan Aset tetap dihentikan dari penggunaan aktif oleh pemerintah karena kondisinya yang rusak berat, hilang, atau sebab lain yang mengakibatkan aset tetap tersebut tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional dan merupakan aset yang dicadangkan untuk dilakukan penghapusan menunggu dokumen keputusan penghapusan terbit. Perhitungan Aset Lain-lain sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	55.387.241.722,99
Penambahan		
Koreksi pencatatan saldo awal aset lain-lain	Rp	43.861.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	3.172.560.967,93
Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	5.379.925.169,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	3.141.748.844,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	Rp	56.105.000,00
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	1.746.559.650,00
Jumlah	Rp	68.928.002.353,92
Pengurangan		
Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	45.672.000,00
Penghapusan berdasarkan SK No. 280 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Daerah	Rp	1.043.714.000,00
Penghapusan berdasarkan SK No. 388 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Barang Pemerintah Daerah Berupa Aset Lain-lain	Rp	410.117.909,00
Penghapusan berdasarkan SK No. 425 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Aset Lain-Lain Tahap II Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Rp	3.423.342.033,00
Penghapusan berdasarkan SK No. 397 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Roda Empat Milik Pemerintah Kabupaten Natuna Yang Dihilangkan Kepada Kejaksaan Negeri Natuna	Rp	174.250.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain yang masih memiliki masa manfaat (nilai buku)	Rp	5.614.135.980,22
Reklasifikasi Pencatatan Aset Lain-Lain ke Ekstrakomtable	Rp	37.835.935.604,92
Jumlah Pengurangan	Rp	48.547.167.527,14
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	20.380.834.826,78

Koreksi pencatatan saldo awal aset lain-lain yang menambah nilai aset lain-lain sebesar Rp43.861.000,00 berada pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah sebesar Rp42.431.000,00 dan Dinas Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp1.430.000,00. Penambahan Aset Lain-lain pada tahun 2022 yang berasal dari reklasifikasi aset tetap yang kondisinya rusak berat sebesar Rp11.750.339.980,93 antara lain penambahan dari reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp3.172.560.967,93, penambahan dari reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan

sebesar Rp5.379.925.169,00, penambahan dari reklasifikasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp3.141.748.844,00, penambahan dari reklasifikasi aset tetap lainnya sebesar Rp56.105.000,00 dan penambahan dari aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp1.746.559.650,00 sedangkan pengurangan sebesar Rp48.547.167.527,14 antara lain terdiri dari reklasifikasi ke aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp45.672.000,00, penghapusan sebesar Rp4.877.173.942,00 dan hibah ke Kejaksaan Negeri Natuna sebesar Rp174.250.000,00, Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain yang nilai bukunya tercatat pada neraca sebesar Rp5.614.135.980,22 dan reklasifikasi pencatatan aset lain-lain ke ekstrakomtable sebesar Rp37.835.935.604,92.

Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp63.830.906.411,92, namun yang disajikan di neraca adalah nilai buku aset lain-lain yaitu sebesar Rp20.380.834.826,78 sedangkan aset lain-lain yang telah habis manfaatnya namun belum dilakukan penghapusan dicatat secara ekstrakomtable.

Tabel 7.5.108 Daftar Mutasi Masuk dan Keluar Aset Lain-Lain

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Saldo Awal	Penambahan							Pengurangan				Saldo Akhir
			Koreksi Pencatatan Saldo Awal	Mutasi antar Pengguna	Reklas dari					Penghapusan	Hibah	Mutasi antar Pengguna	Reklas ke Peralatan dan Mesin	
					Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Aset Tetap Lainnya					
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.408.370.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.496.100,00	0,00	59.115.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.751.645,00
2	Dinas Kesehatan	20.245.515.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.350.400,00	0,00	2.364.260.060,00	0,00	0,00	0,00	17.930.606.175,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31.281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.206.550,00	0,00	31.281.000,00	0,00	0,00	0,00	213.206.550,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	589.624.000,00	0,00	0,00	45.200.000,00	3.903.495.169,00	251.260.900,00	930.938.800,00	0,00	12.345.000,00	0,00	0,00	0,00	5.708.173.869,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	900.684.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.134.500,00	0,00	337.550.000,00	0,00	455.000.000,00
6	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	26.445.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.445.050,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan	0,00	1.430.000,00	0,00	15.078.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.508.825,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	335.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.650.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	242.650.000,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	98.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	29.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	122.753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	183.148.250,00	0,00	0,00	22.793.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.783.250,00	0,00	0,00	0,00	36.158.136,00
13	Dinas Perhubungan	9.605.385.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.170.800,00	36.125.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	14.750.000,00	10.002.930.967,00
14	Dinas Perikanan	68.440.000,00	0,00	0,00	591.789.566,68	267.303.000,00	2.251.754.944,00	0,00	2.330.000,00	68.440.000,00	0,00	0,00	0,00	3.113.177.510,67
15	Dinas Pariwisata	623.500.600,00	0,00	0,00	452.041.625,00	49.910.000,00	49.898.000,00	133.397.000,00	0,00	244.354.800,00	0,00	0,00	0,00	1.064.392.425,00
16	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pertanian	108.396.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.998.500,00	0,00	0,00	0,00	46.398.000,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	24.763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.763.000,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	61.748.500,00	0,00	0,00	317.042.500,25	0,00	0,00	0,00	0,00	61.748.500,00	0,00	0,00	0,00	317.042.500,25
22	Sekretariat Daerah	3.039.969.200,00	0,00	337.550.000,00	25.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	174.250.000,00	0,00	0,00	3.118.349.200,00
23	Sekretariat DPRD	302.465.150,00	0,00	0,00	48.931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.988.400,00	0,00	0,00	0,00	232.407.750,00
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	103.990.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.990.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	15.133.240.644,00	42.431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.300.200,00	0,00	0,00	0,00	14.959.371.444,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.625.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.625.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
27	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	9.955.000,00	0,00	0,00	156.502.500,00	1.033.927.000,00	499.075.000,00	0,00	0,00	9.955.000,00	0,00	0,00	0,00	1.689.504.500,00
28	Inspektorat	26.149.000,00	0,00	0,00	140.299.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.149.000,00	0,00	0,00	0,00	140.299.850,00
29	Kecamatan Bunguran Timur	158.910.200,00	0,00	0,00	31.399.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.676.200,00	0,00	0,00	30.922.000,00	135.711.500,00
30	Kecamatan Bunguran Barat	161.799.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	67.799.000,00
31	Kecamatan Bunguran Utara	202.294.800,00	0,00	0,00	37.587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.074.000,00	0,00	0,00	0,00	183.807.800,00
32	Kecamatan Pulau Laut	600.200.200,00	0,00	0,00	455.891.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.287.000,00	0,00	0,00	0,00	901.805.165,00
33	Kecamatan Midai	124.822.000,00	0,00	0,00	21.422.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.023.000,00	0,00	0,00	0,00	89.221.500,00
34	Kecamatan Serasan	593.375.653,00	0,00	0,00	493.668.450,00	125.290.000,00	0,00	0,00	0,00	191.776.653,00	0,00	0,00	0,00	1.020.557.450,00
35	Kecamatan Subi	130.399.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	31.399.500,00
36	Kecamatan Pulau Tiga	31.399.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.159.500,00
37	Kecamatan Bunguran Tengah	34.252.806,00	0,00	0,00	16.164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853.306,00	0,00	0,00	0,00	47.564.000,00
38	Kecamatan Bunguran Timur Laut	51.651.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.251.653,00	0,00	0,00	0,00	31.399.500,00
39	Kecamatan Bunguran Selatan	44.141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.141.500,00
40	Kecamatan Serasan Timur	59.781.200,00	0,00	0,00	240.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.150.000,00	0,00	0,00	0,00	269.091.200,00
41	Kecamatan Pulau Tiga Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Kecamatan Bunguran Batubi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	157.111.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.111.400,00
Total		55.387.241.723,00	43.861.000,00	337.550.000,00	3.172.560.967,83	5.379.925.169,00	3.141.748.844,00	1.746.559.650,00	56.105.000,00	4.877.173.942,00	174.250.000,00	337.550.000,00	45.672.000,00	63.830.906.411,92

Aset lain-lain yang masih memiliki nilai buku dan disajikan di neraca berada pada:

Tabel 7.5.109 Rincian Aset Lain-lain per SKPD yang masih memiliki nilai buku*(dalam rupiah)*

No.	SKPD	Nilai Aset Lain-lain	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.496.100,00	0,00	11.496.100,00
2	Dinas Kesehatan	49.350.400,00	0,00	49.350.400,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	213.206.550,00	0,00	213.206.550,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	5.085.694.869,00	1.261.060.137,05	3.824.634.731,95
5	Dinas Sosial	1.292.500,00	1.055.541,67	236.958,33
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17.650.000,00	0,00	17.650.000,00
7	Dinas Perhubungan	444.295.800,00	0,00	444.295.800,00
8	Dinas Perikanan	2.893.912.944,00	991.163.460,15	1.902.749.483,85
9	Dinas Pariwisata	368.512.000,00	161.113.055,56	207.398.944,44
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	181.045.000,00	175.013.916,67	6.031.083,33
11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	14.868.120.144,00	2.682.838.434,10	12.185.281.709,90
12	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.618.059.500,00	224.438.901,68	1.393.620.598,32
13	Kecamatan Pulau Laut	5.455.000,00	3.496.916,67	1.958.083,33
14	Kecamatan Serasan	147.120.000,00	91.328.616,67	55.791.383,33
15	Kecamatan Pulau Tiga	89.760.000,00	22.627.000,00	67.133.000,00
JUMLAH		25.994.970.807,00	5.614.135.980,22	20.380.834.826,78

Sedangkan aset lain-lain yang tercatat secara *ekstrakomtable* sebesar Rp37.835.935.604,92 berada pada:

Tabel 7.5.110 Rincian Aset Lain-lain Ekstrakomtable per SKPD*(dalam rupiah)*

No.	SKPD	Nilai Aset Lain-Lain
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.349.255.545,00
2	Dinas Kesehatan	17.881.255.775,00
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	622.479.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	455.000.000,00
5	Dinas Sosial	25.152.550,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan	16.508.825,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	225.000.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	27.000.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	36.158.136,00
10	Dinas Perhubungan	9.558.635.167,00
11	Dinas Perikanan	219.264.566,66
12	Dinas Pariwisata	695.880.425,00
13	Dinas Pertanian	46.398.000,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	24.763.000,00
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	317.042.500,25
16	Sekretariat Daerah	2.937.304.200,00
17	Sekretariat DPRD	232.407.750,00
18	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	91.251.300,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.000.000,00

No.	SKPD	Nilai Aset Lain-Lain
20	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	71.445.000,00
21	Inspektorat	140.299.850,00
22	Kecamatan Bunguran Timur	135.711.500,00
23	Kecamatan Bunguran Barat	67.799.000,00
24	Kecamatan Bunguran Utara	183.807.800,00
25	Kecamatan Pulau Laut	896.350.165,00
26	Kecamatan Midai	89.221.500,00
27	Kecamatan Serasan	873.437.450,00
28	Kecamatan Subi	31.399.500,00
29	Kecamatan Pulau Tiga	31.399.500,00
30	Kecamatan Bunguran Tengah	47.564.000,00
31	Kecamatan Bunguran Timur Laut	31.399.500,00
32	Kecamatan Bunguran Selatan	44.141.500,00
33	Kecamatan Serasan Timur	269.091.200,00
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	157.111.400,00
JUMLAH		37.835.935.604,92

7.5.3.4.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain pada tahun 2022 senilai Rp0,00. Ini disebabkan karena pada tahun 2022 aset lain-lain disajikan sebesar nilai buku, sehingga akumulasi penyusutan aset lain-lain telah dilakukan koreksi pencatatan.

7.5.3.4.6 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (ATB)

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.839.280.136,55. Perhitungan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (ATB) Tahun 2022 sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	(3.970.330.049,58)
Penambahan		
Penambahan Beban Amortisasi Tahun 2022	Rp	(1.112.240.703,64)
Koreksi Pencatatan Saldo Tahun sebelumnya	Rp	(45.759.583,33)
Jumlah Penambahan	Rp	(1.158.000.286,97)
Pengurangan		
Koreksi Pencatatan Saldo Tahun sebelumnya	Rp	(289.050.200,00)
Jumlah Pengurangan	Rp	(289.050.200,00)
Saldo Akhir	Rp	(4.839.280.136,55)

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.839.280.136,55 menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.111 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (ATB)

<i>(dalam rupiah)</i>		
No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(106.447.916,67)
2.	Dinas Kesehatan	(539.961.366,66)
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(493.395.400,00)
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	(70.557.381,00)
5.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	(261.617.125,00)

No.	SKPD	Jumlah
6.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(45.741.666,66)
7.	Dinas Lingkungan Hidup	(1.185.855.000,00)
8.	Dinas Perhubungan	(782.926.100,00)
9.	Dinas Pemuda dan Olahraga	(306.073.281,25)
10.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(64.956.666,67)
11.	Dinas Pariwisata	(602.878.750,00)
12.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	(134.340.038,46)
13.	Bagian Umum	(674.444,18)
14.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	(243.855.000,00)
Jumlah		(4.839.280.136,55)

7.5.3.4.7 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	15.220.894.396,00	0,00

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) merupakan fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Alokasi yang diatur sesuai dengan raturan menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non tunai Melalui *Fasilitas Treasury Deposit Facility*. Penyaluran Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF) Milik Kabupaten Natuna terbentuk atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218 /PMK.07 /2022 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022. Jumlah Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF) Per 31 Desember 2022 Rp15.220.894.396,00 dengan rincian DBH PBB Rp4.134.701.192,00, DBH PPh Pasal 21 Rp 1.320.806.745,00, DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPND Rp 82.230.510,00, DBH CHT Rp1.280.541,00, DBH SDA Minyak Bumi Rp1.440.056.370,00, DBH SDA Gas Bumi Rp7.737.725.310,00, DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty Rp286.427.832,00, DBH SDA Kehutanan-PSDH Rp5.912.685,00,dan DBH SDA Perikanan Rp211.753.211,00.

7.5.3.5 Kewajiban

Kewajiban	Tahun 2022 Rp	Tahun 2021 Rp
	26.443.341.006,87	135.715.187.920,59

Saldo Kewajiban Pemerintah Kabupaten Natuna per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp26.443.341.006,87 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo Utang Per 31 Desember 2021	Rp	135.715.187.920,59
Penambahan Utang		
Penambahan Utang Tahun 2022	Rp	26.443.341.006,87
Koreksi Pencatatan Utang 2021	Rp	208.311.682,00
Jumlah	Rp	162.366.840.609,46
Pengurangan Utang		
Pelunasan Tahun 2022	Rp	135.491.200.971,93
Koreksi Pencatatan	Rp	432.298.630,66
Saldo Akhir Per 31 Desember 2022	Rp	26.443.341.006,87

Saldo Kewajiban sebesar Rp26.443.341.006,87 merupakan utang Pemerintah Kabupaten Natuna per 31 Desember 2022 yang terdiri dari:

7.5.3.5.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah utang yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Natuna per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp26.443.341.006,87 terdiri dari:

Tabel 7.5.112 Rincian Kewajiban

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2021	Penambahan Utang		Pengurangan Utang Tahun 2022		Saldo Akhir per 31 Desember 2022
			Utang Tahun 2022	Koreksi Pencatatan Tahun 2021	Pelunasan	Koreksi Pencatatan	
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	196.230.350,00	26.716.078,00	0,00	196.230.350,00	0,00	26.716.078,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	47.033.333,34	97.633.333,33	35.350.000,00	82.383.333,34	0,00	97.633.333,33
3	Utang Belanja	135.471.924.237,25	26.318.991.595,54	172.961.682,00	135.212.587.288,59	432.298.630,66	26.318.991.595,54
Jumlah		135.715.187.920,59	26.443.341.006,87	208.311.682,00	135.491.200.971,93	432.298.630,66	26.443.341.006,87

7.5.3.5.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang perhitungan pihak ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2022 sebesar Rp26.716.078,00 merupakan Utang Iuran Wajib Pegawai 3,25% atas Belanja Gaji Induk dan Tunjangan. Adapun Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.113 Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2021	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Per 31 Desember 2022
1	Asuransi Kesehatan	196.230.350,00	14.023.513.667,00	14.219.744.017,00	0,00
2	Iuran Wajib Pegawai	0,00	13.712.342.752,00	13.712.265.620,00	77.132,00
3	Jaminan Kecelakaan Kerja	0,00	283.276.280,00	283.276.280,00	0,00
4	Jaminan Kematian	0,00	849.827.075,00	849.827.075,00	0,00
5	PPN	0,00	18.722.950.197,00	18.699.297.665,00	23.652.532,00
6	PPh 21	0,00	12.704.573.944,00	12.703.604.604,00	969.340,00
7	PPh 22	0,00	403.864.646,00	403.864.646,00	0,00
8	PPh 23	0,00	298.264.285,00	296.247.211,00	2.017.074,00
9	PPh 4 (2)/ PPh 25	0,00	3.076.262.543,00	3.076.262.543,00	0,00
Jumlah		196.230.350,00	64.074.875.389,00	64.244.389.661,00	26.716.078,00

7.5.3.5.1.2 Pendapatan diterima dimuka

Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2022 sebesar Rp97.633.333,33 merupakan pendapatan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Natuna namun secara akuntansi akrual belum merupakan hak pemerintah Kabupaten Natuna yang merupakan Sewa ruangan ATM, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.114
Daftar Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2022

No.	SKPD	No. Surat Perjanjian	Tanggal Mulai Sewa	Tanggal Selesai Sewa	Biaya Sewa	Pendapatan LO s.d Tahun Sebelumnya	Pendapatan Terima dimuka per 31 Desember 2021 (Neraca)	Pendapatan Terima dimuka per 31 Desember 2021 Seharusnya	Koreksi Pencatatan	Pencatatan Pendapatan LO Tahun Berjalan	Pendapatan Diterima dimuka Per 31 Desember 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (6-7-11)
1	Rumah Sakit Umum Daerah	169/UMUM-SET/751/VI/2022 R01.Br.NTN/246/2022	01/07/2022	30/06/2024	40.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100.000,00	30.300.000,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	188/PKS/RSUD-NTN/VI/2019	01/07/2019	30/06/2022	60.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00

No.	SKPD	No. Surat Perjanjian	Tanggal Mulai Sewa	Tanggal Selesai Sewa	Biaya Sewa	Pendapatan LO s.d Tahun Sebelumnya	Pendapatan Terima dimuka per 31 Desember 2021 (Neraca)	Pendapatan Terima dimuka per 31 Desember 2021 Seharusnya	Koreksi Pencatatan	Pencatatan Pendapatan LO Tahun Berjalan	Pendapatan Diterima dimuka Per 31 Desember 2022
3	Rumah Sakit Umum Daerah	032/UUM-SET/750/IX/2021 025/RNI/2021	10/09/2021	10/09/2024	60.600.000,00	6.733.333,33	18.516.666,67	53.866.666,67	35.350.000,00	20.200.000,00	33.666.666,67
4	Sekretariat Daerah	032/UUM-SET/750/IX/2021 026/RNI/2021	10/09/2021	10/09/2024	60.600.000,00	6.733.333,33	18.516.666,67	53.866.666,67	35.350.000,00	20.200.000,00	33.666.666,67
Jumlah					221.600.000,00	63.466.666,67	47.033.333,34	117.733.333,34	70.700.000,00	60.500.000,00	97.633.333,33

Terdapat koreksi atas kekurangan pencatatan pendapatan diterima dimuka tahun 2022 sebesar Rp70.700.000,00 yang berasal dari sewa ruangan ATM Sekretariat Daerah dan Sewa ATM di RSUD Natuna. Pendapatan Sewa yang menjadi Pendapatan LO tahun berjalan sebesar Rp60.500.000,00. Sehingga Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2022 Sebesar Rp97.633.333,33.

7.5.3.5.1.3 Utang Belanja

Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2022 sebesar Rp26.318.991.595,54 dengan rincian sebagai berikut:

Utang Belanja Pegawai	Rp 43.996.367,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	Rp 4.331.334.488,00
Utang Belanja Hibah	Rp 1.759.476.216,00
Utang Belanja Modal	Rp 20.184.184.524,54
Jumlah	Rp 26.318.991.595,54

Adapun Utang Belanja per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp26.318.991.595,54 yang berada pada:

Tabel 7.5.115 Daftar Utang Belanja Per SKPD

<i>(dalam rupiah)</i>						
No	Nama SKPD	Utang Belanja Pegawai	Utang Belanja Barang dan Jasa	Utang Belanja Hibah	Utang Belanja Modal	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	899.166.700,00	500.802.738,00	430.078.995,00	1.830.048.433,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	2.561.826.081,00	0,00	2.054.491.671,00	4.616.317.752,00
3	Dinas Kesehatan	43.996.367,00	123.299.709,00	0,00	0,00	167.296.076,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	580.486.798,00	0,00	15.564.811.647,00	16.145.298.445,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	0,00	435.625.048,00	0,00	435.625.048,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	42.620.000,00	0,00	0,00	42.620.000,00
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	167.804.920,36	167.804.920,36
8	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	1.373.798.494,00	1.373.798.494,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
10	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	99.935.200,00	823.048.430,00	250.724.500,00	1.173.708.130,00
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00	99.077.490,00	99.077.490,00
12	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	198.596.807,18	198.596.807,18
13	Kecamatan Bunguran Barat	0,00	0,00	0,00	44.800.000,00	44.800.000,00
JUMLAH		43.996.367,00	4.331.334.488,00	1.759.476.216,00	20.184.184.524,54	26.318.991.595,54

7.5.3.5.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah utang yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan. Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Natuna Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0.00.

7.5.3.6 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

	Tahun 2022	Tahun 2021
Ekuitas	Rp	Rp
	2.735.355.050.743,56	2.661.600.251.945,35

Jumlah Ekuitas Pemerintah Kabupaten Natuna Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.735.355.050.743,56 dengan perhitungan:

Ekuitas Awal (Saldo Akhir Tahun 2021)	Rp	2.661.600.251.945,35
Penambahan Selama Tahun 2022	Rp	1.039.410.844.634,31
Jumlah	Rp	3.701.011.096.579,66
Pengurangan Selama Tahun 2022	Rp	965.656.045.836,09
Saldo Per 31 Desember 2022	Rp	2.735.355.050.743,56

7.5.4 LAPORAN OPERASIONAL

7.5.4.1 Pendapatan – LO

	Tahun 2022	Tahun 2021
Pendapatan-LO	(Rp)	(Rp)
	1.022.492.315.534,31	973.118.167.977,03

Pendapatan-LO tahun 2022 sebesar Rp1.022.492.315.534,31 atau meningkat sebesar 5,07% dibanding tahun 2021. Rincian Pendapatan-LO Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 7.5.116 Rincian Pendapatan-LO

<i>(dalam rupiah)</i>				
No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	62.585.443.896,23	52.689.472.072,98	18,78
2	Pendapatan Transfer – LO	917.299.013.732,00	830.530.850.070,00	10,45
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	42.607.857.906,08	89.897.845.834,05	(52,60)
Jumlah		1.022.492.315.534,31	973.118.167.977,03	5,07

7.5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Hak Pemerintah Daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp62.585.443.896,23 mengalami kenaikan sebesar 18,78% dibanding tahun sebelumnya. Kelompok Pendapatan Asli Daerah terdiri dari 4 (empat) jenis pendapatan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 7.5.117 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO

<i>(dalam rupiah)</i>				
No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	15.211.620.015,39	15.644.975.507,18	(2,77)
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	963.777.940,00	738.367.467,00	30,53
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	7.043.060.400,00	8.585.266.888,00	(17,96)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan (%)
	Dipisahkan-LO			
4	Lain-lain PAD Yang Sah-LO	39.366.985.540,84	27.720.862.210,80	42,01
	Jumlah	62.585.443.896,23	52.689.472.072,98	18,78

7.5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp15.211.620.015,39 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.118 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO

(dalam rupiah)				
No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pajak Hotel-LO	174.549.315,00	136.675.120,00	27,71
2	Pajak Restoran-LO	2.246.562.727,00	2.244.890.362,00	0,07
3	Pajak Hiburan-LO	8.943.600,00	11.462.800,00	(21,98)
4	Pajak Reklame-LO	111.250.800,00	71.209.000,00	56,23
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	7.607.124.621,00	7.333.290.770,00	3,73
6	Pajak Parkir-LO	5.251.500,00	6.042.000,00	(13,08)
7	Pajak Air Tanah-LO	3.800.000,00	2.900.000,00	31,03
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	279.702.646,00	453.821.907,50	(38,37)
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	4.027.188.857,00	3.909.810.164,00	3,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	747.245.949,39	1.474.873.383,68	(49,33)
	Jumlah	15.211.620.015,39	15.644.975.507,18	(2,77)

Penurunan pendapatan pajak ini dikarenakan berkurangnya hasil penjualan di tempat makan, tempat Hiburan, Pajak Parkir, pajak mineral logam dan Bantuan-LO, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sehingga pendapatan pajak daerah Kabupaten Natuna mengalami penurunan sebesar (2,77)% dari tahun sebelumnya. Penjelasan masing-masing Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a) Pajak Hotel-LO

Pajak Hotel-LO tahun 2022 sebesar Rp174.549.315,00 mengalami kenaikan sebesar 27,71% dibandingkan dengan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp136.675.120,00.

b) Pajak Restoran-LO

Pajak Restoran-LO tahun 2022 sebesar Rp2.246.562.727,00 mengalami kenaikan sebesar 0,07% dibandingkan dengan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp2.244.890.362,00.

c) Pajak Hiburan-LO

Pajak Hiburan-LO tahun 2022 sebesar Rp8.943.600,00 mengalami penurunan sebesar (21,98)% dibandingkan dengan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp11.462.800,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.119 Rincian Pajak Hiburan – LO

(dalam rupiah)				
No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	7.713.600,00	10.712.800,00	(28,00)
2	Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO	0,00	0,00	(0,00)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan (%)
3	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	1.230.000,00	750.000,00	64,00
Jumlah		8.943.600,00	11.462.800,00	(21,98)

d) Pajak Reklame-LO

Pajak Reklame-LO tahun 2022 sebesar Rp111.250.800,00 mengalami kenaikan sebesar 56,23% dibandingkan dengan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp71.209.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.120 Rincian Pajak Reklame-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	93.174.000,00	32.198.000,00	189,38
2	Pajak Reklame Kain-LO	18.076.800,00	28.207.000,00	(35,91)
3	Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO	0,00	9.125.000,00	(100,00)
4	Pajak Reklame Berjalan-LO	0,00	1.679.000,00	(100,00)
Jumlah		111.250.800,00	71.209.000,00	56,23

e) Pajak Penerangan Jalan-LO

Pajak Penerangan Jalan-LO tahun 2022 sebesar Rp7.607.124.621,00 mengalami kenaikan sebesar 3,73% dibandingkan dengan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp7.333.290.770,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.121 Rincian Pajak Penerangan Jalan-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	1.947.997.781,00	4.480.909.989,00	(56,53)
2	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	5.659.126.840,00	2.852.380.781,00	98,40
Jumlah		7.607.124.621,00	7.333.290.770,00	3,73

f) Pajak Parkir-LO

Pajak Parkir-LO tahun 2022 sebesar Rp5.251.500,00 mengalami penurunan sebesar (13,08)% dibandingkan dengan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp6.042.000,00.

g) Pajak Air Tanah-LO

Pajak Air Tanah-LO tahun 2022 sebesar Rp3.800.000,00 mengalami kenaikan sebesar 31,03% dibandingkan dengan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp2.900.000,00.

h) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO Tahun 2022 sebesar Rp279.702.646,00 mengalami penurunan sebesar (38,37)% dibandingkan dengan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp453.821.907,50 terdiri dari:

Tabel 7.5.122 Rincian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pajak Batu Apung-LO	1.380.000,00	0,00	(100,00)
2	Pajak Granit/Andesit-LO	16.546.463,00	144.916.014,00	(88,58)
3	Pajak Pasir dan Kerikil-LO	30.237.072,00	53.237.788,00	(43,20)
4	Pajak Pasir Kuarsa-LO	9.089.084,00	44.003.640,50	(79,34)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan (%)
6	Pajak Tanah Liat-LO	49.166.736,00	31.345.719,00	56,85
7	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	173.283.291,00	180.318.746,00	(3,90)
Jumlah		279.702.646,00	453.821.907,50	(38,37)

i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO Tahun 2022 sebesar Rp4.027.188.857,00 mengalami kenaikan sebesar 3,00% dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp3.909.810.164,00.

j) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO Tahun 2022 sebesar Rp747.245.949,39 mengalami penurunan sebesar (49,33)% dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp1.474.873.383,68.

7.5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp963.777.940,00 meningkat sebesar 30,53% dari tahun sebelumnya Rp738.367.467,00. Rincian masing-masing Pendapatan Retribusi Daerah-LO adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.123 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Retribusi Jasa Umum-LO	868.387.000,00	657.890.900,00	32,00
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	49.800.000,00	63.600.000,00	(21,70)
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	45.590.940,00	16.876.567,00	170,14
Jumlah		963.777.940,00	738.367.467,00	30,53

Rincian masing-masing Pendapatan Retribusi Daerah - LO pada Pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

a) Retribusi Jasa umum-LO

Retribusi Jasa umum-LO sebesar Rp868.387.000,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.124 Rincian Retribusi Jasa Umum-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	718.864.500,00	491.383.400,00	46,29
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	104.794.500,00	114.223.500,00	(8,25)
3	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	15.150.000,00	18.250.000,00	(16,99)
4	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	29.578.000,00	34.034.000,00	(13,09)
Jumlah		868.387.000,00	657.890.900,00	32,00

b) Retribusi Jasa Usaha-LO

Retribusi Jasa Usaha-LO di Tahun 2022 sebesar Rp49.800.000,00 mengalami penurunan (21,70)% dibandingkan tahun sebelumnya.

c) Retribusi Perizinan Tertentu-LO

Retribusi Perizinan Tertentu-LO sebesar Rp45.590.940,00 mengalami kenaikan 170,14% dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.125 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO	45.590.940,00	16.876.567,00	170,14
Jumlah		45.590.940,00	16.876.567,00	170,14

7.5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar Rp7.043.060.400,00 merupakan hasil dari investasi jangka panjang permanen yang ditanamkan pada Bank Riau Kepri (Dividen BUMD).

7.5.4.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Tahun 2022 sebesar Rp39.366.985.540,84 terdiri dari:

Tabel 7.5.126 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	517.743.762,00	217.032.889,00	138,56
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	20.200.000,00	78.233.333,33	(74,18)
3	Jasa Giro-LO	563.696.705,63	400.309.172,44	40,82
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	0,00	2.100.000,00	(100,00)
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	0,00	86.478.516,00	(100,00)
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	52.173.685,60	574.695.926,28	(90,92)
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	62.597.813,25	148.803.213,66	(57,93)
8	Pendapatan dari Pengembalian-LO	608.007.804,31	1.082.626.988,00	(43,84)
9	Pendapatan dari BLUD-LO	31.601.071.662,14	21.090.265.932,09	49,84
10	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	5.941.494.107,00	4.036.762.799,00	47,18
11	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	0,91	3.553.441,00	(100,00)
Jumlah		39.366.985.540,84	27.720.862.210,80	42,01

Rincian masing-masing Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a) Pendapatan dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO sebesar Rp517.743.762,00.
- b) Pendapatan dari Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO sebesar Rp20.200.000,00. Hasil Pemanfaatan BMD ini merupakan hasil pemanfaatan yang yang penyeterannya langsung ke Rekening Kas Umum Daerah. Untuk Pemanfaatan BMD yang dipisahkan yang dikelola oleh BLUD pencatatannya merupakan bagian dari pendapatan BLUD-LO.
- c) Jasa Giro-LO

Penerimaan Jasa Giro-LO Tahun 2022 sebesar Rp563.696.705,63 mengalami kenaikan sebesar 40,82% dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp400.309.172,44 terdiri dari:

Tabel 7.5.127 Rincian Penerimaan Jasa Giro-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	534.542.488,00	335.002.474,49	59,56
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	27.755.995,00	34.412.042,95	(19,34)
3	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO	177.358,63	0,00	100,00
4	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	1.220.864,00	30.894.655,00	(96,05)
Jumlah		563.696.705,63	400.309.172,44	40,82

d) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO Tahun 2022 sebesar Rp0,00.

e) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO sebesar Rp0,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.128 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	0,00	300.000,00	(100)
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	0,00	86.178.516,00	(100)
Jumlah		0,00	86.478.516,00	(100)

f) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO sebesar Rp52.173.685,60.

g) Pendapatan Denda Pajak-LO

Pendapatan Denda Pajak-LO sebesar Rp62.597.813,25 mengalami penurunan (57,93%) dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan Denda Pajak-LO terdiri dari:

Tabel 7.5.129 Rincian Pendapatan Denda Pajak-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	184.587,00	3.203.747,00	(94,24)
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO	4.062.132,00	2.193.144,75	85,22
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan-LO	44.896,00	175.212,00	(74,38)
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO	689.420,00	3.126.700,00	(77,95)
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	69.000,00	21.000,00	228,57
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	52.000,00	0,00	100
7	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	18.686,00	0,00	100
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	56.805.744,00	109.045.148,00	(47,91)
9	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	671.348,25	31.038.261,91	(97,84)
Jumlah		62.597.813,25	148.803.213,66	(57,93)

h) Pendapatan Dari Pengembalian-LO

Pendapatan Dari Pengembalian-LO sebesar Rp608.007.804,31 terdiri dari:

Tabel 7.5.130 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	182.423.430,93	27.549.964,00	582,15
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	50.759.911,00	1.055.077.024,00	(95,19)
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-LO	374.824.462,38	0,00	100,00
Jumlah		608.007.804,31	1.082.626.988,00	(43,84)

i) Pendapatan BLUD - LO

Pendapatan BLUD-LO Tahun 2022 sebesar Rp31.601.071.662,14 mengalami peningkatan sebesar 49,84%, dibandingkan dengan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp21.090.265.932,09. Pendapatan BLUD Rp31.601.071.662,14 pada tahun 2022 terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan BLUD Rp31.560.771.662,14 dan Pendapatan lainnya dari Pemanfaatan BMD hasil sewa ruangan ATM sebesar Rp40.300.000,00.

j) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO sebesar Rp5.941.494.107,00.

k) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO sebesar Rp0,91. Pelunasan Piutang Dana Bergulir yang dipungut oleh KPKNL 2022 yang lebih setor ke Kas di Kas Daerah.

Pendapatan transfer-LO yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp917.299.013.732,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.131 Rincian Pendapatan Transfer-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	832.115.429.682,00	779.585.654.393,00	6,74
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	85.183.584.050,00	50.945.195.677,00	67,21
Jumlah		917.299.013.732,00	830.530.850.070,00	10,45

Rincian masing-masing jenis penerimaan transfer-LO adalah sebagai berikut:

7.5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO pada Tahun 2022 sebesar Rp828.222.164.682,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.132 Rincian Transfer Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	329.865.843.047,00	240.322.287.086,00	37,26
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	390.559.258.000,00	390.697.487.000,00	(0,04)
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	57.090.150.721,00	72.269.893.628,00	(21,00)
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	50.706.912.914,00	34.707.996.679,00	46,10
Jumlah		828.222.164.682,00	737.997.664.393,00	12,23

7.5.4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak-LO

Dana Bagi Hasil Pajak-LO tahun 2022 sebesar Rp 79.837.575.375,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.133 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan (%)
1	DBH PBB-LO	67.081.406.149,00	95.998.896.613,00	(30,12)
2	DBH PPh Pasal 21-LO	1.320.806.745,00	12.358.905.400,00	(89,31)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan (%)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	11.424.495.510,00	627.961.000,00	1719,30
4	DBH CHT-LO	10.866.971,00	21.063.503,00	(48,41)
Jumlah		79.837.575.375,00	109.006.826.516,00	(26,76)

Dana Bagi Hasil Pajak-LO tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp109.006.826.516,00 atau sebesar 26,76%.

7.5.4.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil Pajak-LO tahun 2022 sebesar Rp250.028.267.672,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.134 Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan (%)
1	DBH SDA Minyak Bumi-LO	66.343.882.762,00	8.158.507.996,00	713,19
2	DBH SDA Gas Bumi-LO	177.687.676.897,00	119.583.794.406,00	48,59
3	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	0,00	329.836.000,00	(100,00)
4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	3.766.050.117,00	1.504.660.050,00	150,29
5	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	60.593.685,00	64.161.968,00	(5,56)
6	DBH SDA Perikanan-LO	2.170.064.211,00	1.674.500.150,00	29,59
Jumlah		250.028.267.672,00	131.315.460.570,00	90,40

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp131.315.460.570,00 atau sebesar 90,40%.

7.5.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum-LO

Dana Alokasi Umum-LO Tahun 2022 sebesar Rp390.559.258.000,00 mengalami penurunan sebesar (0,04)% dibandingkan dengan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp390.697.487.000,00.

7.5.4.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus-LO

Dana Alokasi Khusus-LO Tahun 2021 sebesar Rp57.090.150.721,00 terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Dana Alokasi Khusus Fisik terdiri dari:

Tabel 7.5.135 Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan (%)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	3.160.024.074,00	2.817.729.388,00	12,15
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	3.854.777.484,00	1.479.610.016,00	160,53
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO	763.625.702,00	0,00	100
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO	0,00	179.000.000,00	(100)
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	8.846.552.972,00	15.763.695.553,00	(43,88)
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO	0,00	2.739.266.080,00	(100)
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian-LO	3.564.988.978,00	3.514.117.343,00	1,45
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO	583.802.556,00	0,00	100

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan (%)
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas-LO	14.685.729.157,00	0,00	100
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO	94.072.500,00	1.256.842.270,00	(92,52)
11	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya-LO	0,00	1.070.703.000,00	(100)
12	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM-LO	0,00	7.438.573.204,00	(100)
13	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	1.170.791.504,00	700.000.000,00	67,26
14	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	2.163.832.346,00	1.138.326.339,00	90,09
15	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan-LO	0,00	2.184.424.000,00	(100,00)
16	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	8.430.609.354,00	8.785.509.612,00	(4,04)
17	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	0,00	3.417.549.185,00	(100,00)
18	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	4.245.200.000,00	0,00	100,00
19	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO	0,00	5.311.242.141,00	(100,00)
20	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	5.083.429.000,00	0,00	100,00
21	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO	0,00	7.313.796.000,00	(100,00)
22	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	442.715.094,00	2.346.971.698,00	(81,14)
23	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi-LO	0,00	4.812.537.799,00	(100,00)
Jumlah		57.090.150.721,00	72.269.893.628,00	(21,00)

Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO terdiri dari:

Tabel 7.5.136 Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO

<i>(dalam rupiah)</i>				
No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan (%)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	14.156.066.940,00	0,00	100,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	560.000.000,00	0,00	100,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	18.708.385.360,00	20.503.877.000,00	(8,76)
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	1.016.000.000,00	1.041.328.000,00	(2,43)
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	1.282.824.400,00	778.163.900,00	64,85
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	2.300.299.000,00	2.074.825.000,00	10,87
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	163.500.000,00	152.311.800,00	7,35
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	10.140.727.429,00	5.241.424.389,00	93,47
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	1.180.876.075,00	1.409.150.100,00	(16,20)
10	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	317.418.680,00	371.355.132,00	(14,52)
11	DAK Non Fisikâ€Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO	0,00	1.597.740.358,00	(100,00)
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata-LO	467.528.580,00	816.839.000,00	(42,76)
13	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS-LO	413.286.450,00	720.982.000,00	(42,68)
Jumlah		50.706.912.914,00	34.707.996.679,00	46,10

7.5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO pada Tahun 2022 sebesar Rp3.893.265.000,00 merupakan Dana Insentif Daerah. Pendapatan Dana Insentif Daerah tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (90,64)% dibandingkan dengan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp41.587.990.000,00.

7.5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Provinsi)-LO

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Provinsi)-LO di Tahun 2022 sebesar Rp85.183.584.050,00 terdiri dari:

- a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Provinsi) Tahun 2022 sebesar Rp83.895.084.050,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.137 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Provinsi)-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	11.120.394.469,00	10.351.276.778,00	7,43
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	7.742.855.605,00	5.375.391.606,00	44,04
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	54.654.683.397,00	26.398.317.831,00	107,04
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	35.244.696,00	32.940.277,00	7,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	10.341.905.883,00	8.787.269.185,00	17,69
JUMLAH		83.895.084.050,00	50.945.195.677,00	64,68

- b) Bantuan Keuangan-LO Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Provinsi) Tahun 2022 sebesar Rp1.288.500.000,00, mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp0,00.

7.5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2022 sebesar Rp42.607.857.906,08 merupakan Pendapatan hibah berupa uang maupun barang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Provinsi ataupun pihak lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.138 Rincian lain - lain Pendapatan yang Sah-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Hibah-LO	42.607.857.906,08	89.897.845.834,05	(52,60)
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00
Jumlah		42.607.857.906,08	89.897.845.834,05	(52,60)

Rincian masing-masing jenis penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah sebagai berikut :

7.5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah-LO pada Tahun 2022 sebesar Rp42.607.857.906,08 terdiri dari:

Tabel 7.5.139 Rincian Pendapatan Hibah-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	39.232.879.262,99	62.432.430.879,00	(37,16)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	3.374.978.643,09	963.992.516,00	250,10
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	358.456.800,00	(100,00)
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	0,00	4.317.584.233,05	(100,00)
5	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	0,00	2.192.332.000,00	(100,00)
6	Pendapatan Hibah Dana BOS-LO	0,00	15.977.462.000,00	(100,00)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan (%)
7	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	0,00	3.655.587.406,00	(100,00)
JUMLAH		42.607.857.906,08	89.897.845.834,05	(52,60)

Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp39.232.879.262,99 berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan TA 2022 sebesar Rp 37.757.546.044,99, Hibah dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp1.475.333.218,00.

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO pada Tahun 2022 sebesar Rp3.374.978.643,09 mengalami peningkatan sebesar 250,10% dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar Rp963.992.516,00.

Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO pada Tahun 2022 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar (100,00)% dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp2.192.332.000,00

7.5.4.2 Beban-LO

Beban-LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	956.027.511.310,41	962.841.669.943,34

Beban-LO Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2022 sebesar Rp956.027.511.310,41 mengalami penurunan sebesar (0,71)% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 962.841.669.943,34 . Rincian beban Tahun 2022 merupakan pengakuan Beban Operasi Tahun 2022 terinci sebagai berikut:

Tabel 7.5.140 Rincian Beban Operasi

<i>(dalam rupiah)</i>				
No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Pegawai	365.534.221.004,00	408.106.324.972,75	(10,43)
2	Beban Persediaan	59.382.215.958,37	92.829.158.793,66	(36,03)
3	Beban Jasa	180.601.767.609,32	181.292.416.426,78	(0,38)
4	Beban Pemeliharaan	7.973.505.261,37	11.893.192.862,41	(32,96)
5	Beban Perjalanan Dinas	44.932.177.286,00	37.597.237.948,00	19,51
9	Beban Hibah	75.116.998.912,20	19.994.400.593,12	275,69
10	Beban Bantuan Sosial	5.215.351.979,34	3.226.139.536,00	61,66
11	Beban Penyusutan dan Amortisasi	160.066.440.372,85	158.019.726.918,00	1,30
12	Beban Transfer	55.047.480.940,00	48.121.691.990,00	14,39
13	Beban Penyisihan Piutang	2.157.351.986,96	1.761.379.902,62	22,48
JUMLAH		956.027.511.310,41	962.841.669.943,34	(0,71)

7.5.4.2.1 Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai Tahun 2022 sebesar Rp365.534.221.004,00 mengalami penurunan sebesar 10,43% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.141 Rincian Beban Pegawai

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	186.317.141.444,00	177.817.074.492,00	4,78
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	136.215.553.506,00	177.681.155.049,00	(23,34)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	35.315.547.585,00	41.374.981.270,00	(14,65)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	6.204.427.787,00	8.163.765.424,00	(24,00)
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	747.932.682,00	805.247.519,75	(7,12)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	699.180.000,00	(26,93)
7	Beban Pegawai BOS	0,00	1.346.010.218,00	(100,00)
8	Beban Pegawai BLUD	222.738.000,00	218.911.000,00	1,75
JUMLAH		365.534.221.004,00	408.106.324.972,75	(10,43)

Realisasi Beban Pegawai Tahun 2022 sebesar Rp 365.534.221.004,00 terdiri dari:

a) Beban Gaji dan Beban tunjangan

Realisasi Beban Gaji dan Beban tunjangan tahun 2022 sebesar Rp186.317.141.444,00 naik 4.78% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.142 Rincian Beban Gaji dan Beban Tunjangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Gaji Pokok ASN	137.064.254.486,00	129.911.470.793,00	5,51
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	12.881.941.903,00	12.303.482.061,00	4,70
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	4.995.246.000,00	5.844.440.360,00	(14,53)
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	7.355.221.000,00	5.524.018.000,00	33,15
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.356.174.000,00	3.215.415.000,00	4,38
6	Beban Tunjangan Beras ASN	8.809.893.000,00	8.425.922.160,00	4,56
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	201.184.669,00	177.018.837,00	13,65
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	2.072.358,00	1.984.150,00	4,45
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	10.522.064.350,00	11.346.905.499,00	(7,27)
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	282.412.693,00	266.604.483,00	5,93
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	846.676.985,00	799.813.149,00	5,86
JUMLAH		186.317.141.444,00	177.817.074.492,00	4,78

b) Tambahan Penghasilan PNS

Realisasi Beban Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2022 sebesar Rp136.215.553.506,00 turun 23,24% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.143 Rincian Beban Tambahan Penghasilan PNS

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	42.261.450.174,00	55.458.246.444,00	(23,80)
2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	3.843.011.397,00	4.081.873.926,00	(5,85)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.987.557.654,00	2.931.562.725,00	36,02
4	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.111.533.744,00	4.846.924.326,00	(56,44)

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan (%)
5	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	84.012.000.537,00	110.362.547.628,00	(23,88)
JUMLAH		136.215.553.506,00	177.681.155.049,00	(23,34)

c) Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2022 sebesar Rp35.315.547.585,00 turun 14,65% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.144 Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	14.999.999,00	15.000.000,00	(0,00)
2	Beban TPG PNSD	19.394.722.000,00	20.517.434.020,00	(5,47)
3	Beban TKG PNSD	1.227.234.600,00	1.214.003.100,00	1,09
4	Beban Tamsil Guru PNSD	1.016.000.000,00	702.750.000,00	44,57
5	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.823.179.642,00	1.492.467.211,00	22,16
6	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.849.615.094,00	16.083.009.126,00	(32,54)
7	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	56.560.000,00	49.761.000,00	13,66
8	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	88.600.000,00	90.600.000,00	(2,21)
9	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	9.625.000,00	0,00	100,00
10	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	835.011.250,00	1.209.956.813,00	(30,99)
JUMLAH		35.315.547.585,00	41.374.981.270,00	(14,65)

d) Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

Beban Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2022 sebesar Rp6.204.427.787,00 turun sebesar 24% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.145 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan DPRD-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Uang Representasi DPRD	451.290.000,00	0,00	100,00
2	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	60.197.200,00	60.197.200,00	0,00
3	Beban Tunjangan Beras DPRD	65.090.880,00	64.221.840,00	1,35
4	Beban Uang Paket DPRD	38.682.000,00	38.682.000,00	0,00
5	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00	654.370.500,00	0,00
6	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	63.396.900,00	57.429.384,00	10,39
7	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	16.914.975,00	24.664.500,00	(31,42)
8	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.512.000.000,00	3.528.000.000,00	(57,14)
9	Beban Tunjangan Reses DPRD	378.000.000,00	882.000.000,00	(57,14)
10	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	66.599.596,00	0,00	100,00
11	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	143.885.736,00	100.200.000,00	43,60
12	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	2.754.000.000,00	2.754.000.000,00	0,00
JUMLAH		6.204.427.787,00	8.163.765.424,00	(24,00)

e) Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO

Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO Tahun 2022 sebesar Rp747.932.682,00 terjadi penurunan 7,12% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.146 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00
2	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000,00	7.140.000,00	7,06
3	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00
4	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.531.680,00	7.242.000,00	4,00
5	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	920.400,00	709.661,00	29,70
6	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.000,00	980	2,04
7	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	32.446.322,00	14.376.880,00	125,68
8	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	0,00
9	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00	0,00
10	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	546.060.000,00	622.448.718,75	(12,27)
JUMLAH		747.932.682,00	805.247.519,75	(7,12)

f) **Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp.510.880.000,00 turun 26,93% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.147 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	312.480.000,00	(64,52)
2	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	386.700.000,00	3,44
JUMLAH		510.880.000,00	699.180.000,00	(26,93)

g) **Beban Pegawai BOS**

Beban Pegawai BOS Tahun 2022 sebesar Rp0,00 atau tidak ada realisasi dengan mengalami penurunan 100% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.346.010.218,00.

h) **Beban Pegawai BLUD**

Beban Pegawai BLUD Tahun 2022 sebesar Rp222.738.000,00 atau mengalami kenaikan 1,75% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp218.911.000,00

7.5.4.2.2 Beban Persediaan

Pengakuan Beban Persediaan pada Tahun 2022 sebesar Rp59.382.215.958,37 turun 35,83% dari tahun sebelumnya Rp92.829.158.793,66 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.148 Rincian Beban Persediaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	280.899.460,00	41.960.000,00	569,45
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	780.337.019,93	840.557.869,00	(7,16)
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.805.435.132,50	5.046.214.175,86	(4,77)
4	Beban Bahan-Bahan Baku	9.679.000,00	0,00	100,00
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	707.177.000,00	0,00	100,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	8.628.000,00	85.075.000,00	(89,86)

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan (%)
7	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00
8	Beban Bahan-Bahan Lainnya	2.696.838.906,50	2.522.450.485,00	6,91
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.552.037.951,00	1.781.113.258,00	(12,86)
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	7.103.678.085,20	(100,00)
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	45.715.000,00	0,00	100,00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	161.533.400,00	18.572.000,00	769,77
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.136.983.204,00	5.781.770.736,66	(28,45)
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.500.000,00	0,00	100,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	8.918.098.307,93	15.970.712.222,38	(44,16)
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	647.358.000,00	687.757.500,00	(5,87)
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	6.967.600,00	7.495.000,00	(7,04)
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.775.000,00	0,00	100,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	549.221.094,00	558.171.309,00	(1,60)
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	396.176.150,00	20.548.500,00	1.828,01
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	246.817.844,00	269.715.500,00	(8,49)
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	95.050.000,00	15.480.000,00	514,02

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan (%)
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	98.969.500,00	1.014.763.700,00	(90,25)
24	Beban Obat-Obatan-Obat	8.273.995.075,77	15.415.636.171,95	(46,33)
25	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.985.866.732,74	8.248.922.559,61	(75,93)
26	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.223.874.280,00	3.592.233.240,00	(65,93)
27	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	102.100.889,00	47.800.000,00	113,60
28	Beban Natura dan Pakan-Natura	24.587.799,00	0,00	100,00
29	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	41.849.324,00	7.680.000,00	444,91
30	Beban Makanan dan Minuman Rapat	3.955.802.100,00	4.847.878.292,00	(18,40)
31	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.059.367.920,00	9.802.148.108,00	(7,58)
32	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	878.835.525,00	139.008.000,00	532,22
33	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	246.545.000,00	0,00	100,00
34	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.773.404.670,00	4.751.945.790,00	(20,59)
35	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	80.530.000,00	69.980.000,00	15,08
36	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	14.250.000,00	27.500.000,00	(48,18)
37	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	187.050.000,00	232.990.700,00	(19,72)
38	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	118.513.000,00	637.106.871,00	(81,40)
39	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	47.625.000,00	49.940.000,00	(4,64)
40	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	16.950.000,00	0,00	100,00
41	Beban Pakaian Siaga	69.774.600,00	0,00	100,00
42	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	129.925.000,00	195.019.750,00	(33,38)
43	Beban Pakaian Adat Daerah	527.786.010,00	256.429.370,00	105,82
44	Beban Pakaian Batik Tradisional	10.000.000,00	9.000.000,00	11,11
45	Beban Pakaian Olahraga	654.018.004,00	23.850.000,00	2.642,21

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan (%)
46	Beban Pakaian Paskibraka	419.202.825,00	295.049.600,00	42,08
47	Beban Komponen-Komponen Peralatan	32.789.409,00	0,00	100,00
48	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	569.525.225,00	113.230.000,00	402,98
49	Beban Beasiswa	387.700.000,00	575.500.000,00	(32,63)
50	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	63.700.000,00	319.175.000,00	(80,04)
51	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	75.000.000,00	940.000.000,00	(92,02)
52	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	262.450.000,00	465.100.000,00	(43,57)
JUMLAH		59.382.215.958,37	92.829.158.793,66	(36,03)

7.5.4.2.3 Beban Jasa

Pengakuan Beban Jasa pada Tahun 2022 sebesar Rp180.601.767.609,32 turun 4.93% dari tahun sebelumnya Rp181.292.416.426,78 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.149 Rincian Beban Jasa

<i>(dalam rupiah)</i>				
No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	675.000,00	0,00	100,00
2	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.857.634.880,00	6.910.403.875,00	(44,18)
3	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.721.922.000,00	1.074.840.000,00	246,28
4	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.846.960.000,00	151.100.000,00	1.122,34
5	Beban Honorarium Rohaniwan	7.200.000,00	6.000.000,00	20,00
6	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	4.200.000,00	20.100.000,00	(79,10)
7	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	22.750.000,00	0,00	100,00
8	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	10.433.350.000,00	3.000.000,00	347.678,33
9	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	25.683.688.934,00	14.028.064.990,00	83,09
10	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	31.465.000,00	21.350.000,00	47,38
11	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.241.450.000,00	87.750.000,00	1.314,76
12	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	108.000.000,00	0,00	100,00
13	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	46.150.000,00	0,00	100,00
14	Beban Jasa Tenaga Administrasi	32.982.415.768,00	80.019.103.910,00	(58,78)
15	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	20.000.000,00	121.055.000,00	(83,48)
16	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	16.255.650.000,00	0,00	100,00
17	Beban Jasa Tenaga Ahli	880.100.000,00	1.628.345.887,00	(45,95)
18	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	2.669.026.896,00	5.009.794.050,00	(46,72)
19	Beban Jasa Tenaga Keamanan	353.450.000,00	42.400.000,00	733,61
20	Beban Jasa Tenaga Supir	827.500.000,00	1.800.000,00	45.872,22
21	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	63.750.000,00	0,00	100,00
22	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	159.000.000,00	0,00	100,00
23	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.422.400.000,00	127.287.500,00	1.017,47

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan (%)
24	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	28.236.500,00	7.800.000,00	262,01
25	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	920.193.048,00	1.002.359.016,00	(8,20)
26	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	4.866.651,34	32.500.685,10	(85,03)
27	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	33.200.000,00	59.500.000,00	(44,20)
28	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	15.300.000,00	0,00	100,00
29	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	26.696.000,00	23.700.000,00	12,64
30	Beban Jasa Kalibrasi	0,00	199.244.100,00	(100,00)
31	Beban Jasa Pengolahan Sampah	1.301.800.000,00	1.208.200.000,00	7,75
32	Beban Jasa Pengukuran Tanah	7.384.676,00	0,00	100,00
33	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	4.907.920.000,00	46.695.920,00	10.410,38
34	Beban Jasa Operator Kapal	862.500.000,00	0,00	100,00
35	Beban Tagihan Telepon	113.825.949,00	117.288.149,00	(2,95)
36	Beban Tagihan Air	770.650.707,00	609.067.740,00	26,53
37	Beban Tagihan Listrik	5.278.011.416,00	4.574.306.860,00	15,38
38	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	463.229.000,00	475.228.000,00	(2,52)
39	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.272.258.245,00	3.040.259.124,00	7,63
40	Beban Paket/Pengiriman	177.361.264,00	196.366.440,00	(9,68)
41	Beban Registrasi/Keanggotaan	108.000.000,00	0,00	100,00
42	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	355.141.953,00	376.880.621,00	(5,77)
43	Beban Medical Check Up	65.530.000,00	0,00	100,00
44	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	2.782.048.500,00	(100,00)
45	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	14.127.567.400,00	21.346.599.100,00	(33,82)
46	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.264.911.047,00	3.371.456.295,36	(3,16)
47	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	109.107.154,60	28.302.360,00	285,51
48	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	128.118.058,00	29.809.200,00	329,79
49	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	4.500.000,00	0,00	100,00
50	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	369.343.000,00	1.562.741.207,00	(76,37)
51	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5.700.000,00	4.000.000,00	42,50
52	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	15.220.000,00	0,00	100,00
53	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	1.250.000,00	(100,00)
54	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	179.389.000,00	20.325.000,00	782,60
55	Beban Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	4.000.000,00	0,00	100,00
56	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.195.832.400,00	260.793.340,00	358,54
57	Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	100,00
58	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	208.250.000,00	0,00	100,00
59	Beban Sewa Mebel	2.500.000,00	0,00	100,00
60	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00	0,00	100,00
61	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	124.700.000,00	0,00	100,00
62	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	15.250.000,00	0,00	100,00
63	Beban Sewa Alat Komunikasi Khusus	11.196.407,00	9.200.000,00	21,70
64	Beban Sewa Peralatan Umum	4.000.000,00	0,00	100,00
65	Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	37.972.622,00	0,00	100,00
66	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	0,00	12.764.661,00	(100,00)

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan (%)
67	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	486.503.333,34	913.635.333,32	(46,75)
68	Beban Sewa Bangunan Gudang	201.416.666,67	150.508.333,33	33,82
69	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	124.296.666,67	56.100.000,00	121,56
70	Beban Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool	7.200.000,00	0,00	100,00
71	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	108.000.000,00	0,00	100,00
72	Beban Sewa Rumah Negara Golongan I	129.309.000,00	44.750.000,00	188,96
73	Beban Sewa Asrama	516.950.000,00	0,00	100,00
74	Beban Sewa Hotel	590.958.410,00	194.673.500,00	203,56
75	Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun	11.000.000,00	0,00	100,00
76	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	17.416.666,67	113.166.666,67	(84,61)
77	Beban Sewa Jaringan Telepon Lainnya	0,00	650.000,00	(100,00)
78	Beban Sewa Alat Peraga Kesenian	30.800.000,00	35.000.000,00	(12,00)
79	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	79.180.740,00	0,00	100,00
80	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	140.000.000,00	23.969.000,00	484,09
81	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	2.985.900,00	0,00	100,00
82	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	0,00	100,00
83	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	697.272.820,00	(100,00)
84	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	0,00	0,00	100,00
85	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	100.000.000,00	50.000.000,00	100,00
86	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	0,00	0,00	100,00
87	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	89.707.940,00	407.448.800,00	(77,98)
88	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.100.793.760,00	0,00	100,00
89	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	301.376.100,00	0,00	100,00
90	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	194.472.000,00	0,00	100,00
91	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	282.294.000,00	0,00	100,00
92	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	305.051.329,98	0,00	100,00
93	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	99.470.932,00	0,00	100,00
94	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0,00	0,00	100,00
95	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.000.000,00	0,00	100,00
96	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	198.830.232,96	0,00	100,00
97	Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata	0,00	100.000.000,00	(100,00)
98	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	0,00	48.000.000,00	(100,00)
99	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00
100	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	379.782.000,00	585.329.204,00	(35,12)
101	Beban Sosialisasi	78.136.500,00	182.516.000,00	(57,19)
102	Beban Bimbingan Teknis	71.450.000,00	138.268.300,00	(48,33)
103	Beban Diklat Kepemimpinan	2.650.000,00	151.319.500,00	(98,25)
104	Beban Barang dan Jasa Bos	11.751.546.711,80	9.202.290.465,00	27,70
105	Beban Barang dan Jasa BLUD	21.804.787.743,29	17.411.436.974,00	25,23
JUMLAH		180.601.767.609,32	181.292.416.426,78	(0,38)

7.5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

Pengakuan Beban Pemeliharaan pada Tahun 2022 sebesar Rp7.973.505.261,37 turun 32,96% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp11.893.192.862,41 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.150 Rincian Beban Pemeliharaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	0,00	19.987.000,00	(100,00)
2	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam	0,00	1.440.000,00	(100,00)
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	828.027.023,00	995.887.200,00	(16,86)
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	142.068.000,00	6.500.000,00	2.085,66
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	22.801.000,00	57.435.200,00	(60,30)
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.885.000,00	0,00	100,00
7	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	750.000,00	(100,00)
8	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	180.885.000,00	159.445.000,00	13,45
9	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	7.865.000,00	0,00	100,00
10	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	3.670.000,00	12.800.000,00	(71,33)
11	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	3.800.000,00	0,00	100,00
12	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	39.975.000,00	0,00	100,00
13	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	29.882.500,00	(100,00)
14	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	250.000,00	(100,00)
15	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	566.578.421,77	246.837.557,00	129,53
16	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	645.203.501,00	665.378.942,00	(3,03)
17	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	6.350.000,00	9.750.000,00	(34,87)

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan (%)
18	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	12.527.500,00	1.000.000,00	1.152,75
19	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	210.734.600,00	315.079.100,00	(33,12)
20	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	36.755.000,00	0,00	100,00
21	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	100,00
22	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	100,00
23	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0,00	0,00	100,00
24	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	181.316.300,00	(100,00)
25	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	65.655.000,00	11.500.000,00	470,91
26	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	100,00
27	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	25.340.000,00	46.750.000,00	(45,80)
28	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	216.213.000,00	68.822.250,00	214,16
29	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	20.990.000,00	50.017.000,00	(58,03)
30	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	0,00	24.256.800,00	(100,00)
31	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker	0,00	283.104.800,00	(100,00)
32	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	136.028.085,00	209.066.418,00	(34,94)
33	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	98.207.000,00	0,00	100,00

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan (%)
34	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.128.652.886,00	2.426.850.264,37	(53,49)
35	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	0,00	150.000.000,00	(100,00)
36	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	0,00	10.975.000,00	(100,00)
37	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	321.482.000,00	529.499.334,80	(39,29)
38	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium	9.570.000,00	29.697.000,00	(67,77)
39	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.582.072.392,00	0,00	100,00
40	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	298.300.903,00	183.262.541,00	62,77
41	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	573.162.800,00	1.789.895.720,84	(67,98)
42	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	99.260.907,60	0,00	100,00
43	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	0,00	100,00
44	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Masyarakat	15.000.000,00	0,00	100,00
45	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan	0,00	91.651.300,00	(100,00)
46	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	188.577.900,00	0,00	100,00
47	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	115.114.000,00	41.396.000,00	178,08
48	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	0,00	78.689.913,00	(100,00)
49	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	64.335.860,00	0,00	100,00
50	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	19.950.000,00	0,00	100,00
51	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	0,00	270.633.981,00	(100,00)
52	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	100.332.705,00	950.299.315,00	(89,44)
53	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus	0,00	417.536.799,00	(100,00)
54	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	26.133.347,00	29.926.908,00	(12,68)
55	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	188.011.433,00	(100,00)
56	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	0,00	13.915.000,00	(100,00)

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan (%)
57	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	199.486.635,00	(100,00)
58	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	26.587.830,00	0,00	100,00
59	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	0,00	874.194.946,00	(100,00)
60	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	2.700.000,00	0,00	100,00
61	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	52.572.000,00	129.293.422,00	(59,34)
62	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	74.141.600,00	90.721.282,40	(18,28)
JUMLAH		7.973.505.261,37	11.893.192.862,41	(32,96)

7.5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Pengakuan Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2022 sebesar Rp44.932.177.286,00 naik 19,51% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.151 Rincian Beban Perjalanan Dinas

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	43.034.685.670,00	36.725.595.548,00	17,18
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.674.885.116,00	681.862.400,00	145,63
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	222.606.500,00	189.780.000,00	17,30
JUMLAH		44.932.177.286,00	37.597.237.948,00	19,51

7.5.4.2.6 Beban Hibah

Pengakuan Beban Hibah Tahun 2022 sebesar Rp75.116.998.912,20 naik 275,69% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.152 Rincian Beban Hibah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	463.140.000,00	0,00	100,00
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	21.436.295.514,13	3.962.729.701,12	440,95
3	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	518.789.834,15	1.964.450.580,00	(73,59)
4	Beban Hibah Barang kepada BUMN	321.755.000,00	0,00	100,00
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.020.000.000,00	130.000.000,00	684,62
6	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	94.072.500,00	0,00	100,00
7	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.491.522.000,00	1.440.300.000,00	3,56
8	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	39.364.152.291,92	11.658.883.119,00	237,63
9	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	212.500.000,00	(100,00)
10	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial	9.883.838.929,00	102.104.350,00	9.580,14

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan (%)
11	Kemasyarakatan			
	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	523.432.843,00	523.432.843,00	0,00
JUMLAH		75.116.998.912,20	19.994.400.593,12	275,69

7.5.4.2.7 Beban Bantuan Sosial

Pengakuan Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 sebesar Rp5.215.351.979,34 naik 61,66% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.153 Rincian Beban Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	635.895.683,00	1.907.774.902,00	(66,67)
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	119.255.200,00	2.153.800,00	5.436,97
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.074.800.000,00	0,00	100,00
4	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.385.401.096,34	1.316.210.834,00	81,23
JUMLAH		5.215.351.979,34	3.226.139.536,00	61,66

7.5.4.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 sebesar Rp160.066.440.372,85 mengalami kenaikan sebesar 1,30% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.154 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	32.829.673.382,25	30.131.813.797,51	8,95
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	26.608.773.356,59	25.919.320.442,47	2,66
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	99.515.752.930,37	100.937.106.756,35	(1,41)
4	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.112.240.703,64	1.031.485.921,67	7,83
JUMLAH		160.066.440.372,85	158.019.726.918,00	1,30

7.5.4.2.9 Beban Transfer

Pengakuan Beban Transfer Tahun 2022 sebesar Rp55.047.480.940,00 mengalami kenaikan 14,39% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.155 Rincian Beban Transfer

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.199.999.990,00	480.000.010,00	150
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	50.699.950,00	20.279.980,00	150
3	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	53.796.781.000,00	47.621.412.000,00	12,97
4	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		55.047.480.940,00	48.121.691.990,00	14,39

7.5.4.2.10 Beban Penyisihan Piutang

Pengakuan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 sebesar Rp2.157.351.986,96 naik 22,48% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.156 Rincian Beban Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	3.966.995,00	5.402.945,00	(26,58)
2	Beban Penyisihan Piutang PBBP2	2.141.002.027,09	1.514.097.009,20	41,40
3	Beban Penyisihan Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru	12.382.964,87	18.220.289,91	(32,04)
4	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	173.395.763,00	(100,00)
5	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	14.567.074,57	(100,00)
6	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	35.696.820,94	(100,00)
JUMLAH		2.157.351.986,96	1.761.379.902,62	22,48

7.5.4.2.11 Beban Lain-lain

Beban lain-lain Tahun 2022 sebesar Rp0,00 sama halnya dengan tahun 2021, dikarenakan pengakuan beban lain-lain dicatat pada beban luar biasa.

7.5.4.2.12 Beban Penyisihan Dana Bergulir

Beban penyisihan dana bergulir Tahun 2022 sebesar Rp0,00 sama halnya dengan tahun 2021.

7.5.4.3 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional

Surplus dari Kegiatan Operasional Tahun 2022 sebesar Rp66.464.804.223,90 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.157 Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan	1.022.492.315.534,31	973.118.167.977,03	5,07
2	Beban	956.027.511.310,41	962.841.669.943,34	(0,71)
Jumlah		66.464.804.223,90	10.276.498.033,69	546,77

7.5.4.4 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Pada Tahun 2022 Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp(5.881.996.703,20) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.158 Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	1.380.000.000,00	57.466.670,00	2.301,39
2	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	255.300,00	0,00	100,00
3	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	(5.771.759.427,20)	(61.636.413.731,69)	(90,64)
4	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	(1.490.492.576,00)	0,00	100,00
JUMLAH		(5.881.996.703,20)	(61.578.947.061,69)	(90,45)

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp(5.881.996.703,20) mengalami penurunan sebesar 90,45% dibanding Tahun 2021 sebesar Rp61.578.947.061,69

Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp1.380.000.000,00 terjadi atas Investasi Jangka Panjang Permanen Penyertaan Modal Tanah Ke Bank Riau Kepri.

Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2022 dan SK Bupati Nomor 60 dan 150 Tahun 2022 dicatat dengan nilai buku sebesar Rp700.000.000,00 dan dengan nilai penyertaan modal sebesar Rp2.080.000.000,00.

Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO sebesar Rp255.300,00 terjadi karena penambahan nilai persediaan bibit ikan pada UPTD Balai Benih Ikan Dinas Perikanan Kab. Natuna karena adanya penyesuaian harga karena perbedaan ukuran dari bibit ikan.

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp(5.771.759.427,20) terjadi atas penghapusan aset tetap dan aset lain-lain dengan kondisi rusak berat, dan pencatatan aset tetap Peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan yang memiliki nilai perolehan dibawah batasan minimal kapitalisasi yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi yang pencatatannya dilakukan secara *ekstrakomtable*.

Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp(1.490.492.576) adalah pencatatan kerugian yang terjadi atas Investasi Jangka Panjang Permanen pada Perusahaan Umum Daerah Siri Serindit dan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa.

7.5.4.5 Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa

Defisit Dari Pos Luar Biasa pada Tahun 2022 sebesar Rp0,00 atau turun 100,00% dibanding defisit Tahun 2021 sebesar Rp12.767.768,35. Defisit Pos Luar Biasa pada Tahun 2022 merupakan Beban Luar Biasa sebesar Rp0,00.

7.5.4.6 Surplus/Defisit LO

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Surplus/Defisit-LO	(Rp)	(Rp)
	60.582.807.520,70	(51.315.216.796,35)

Surplus - LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp60.582.807.520,70 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.159 Rincian Surplus/Defisit-LO

(dalam rupiah)				
No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	66.464.804.223,90	10.276.498.033,69	546,77
2	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(5.881.996.703,20)	(61.578.947.061,69)	(90,45)
3	Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	0,00	(12.767.768,35)	100,00
JUMLAH		60.582.807.520,70	(51.315.216.796,35)	(218,06)

7.5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

7.5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam

menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Arus Kas Masuk	988.757.532.106,02	968.422.229.160,31
Arus Kas Keluar	835.783.697.994,69	827.705.121.751,09
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	152.973.834.111,33	140.717.107.409,22

Pada tahun 2022, terdapat Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi sebesar Rp152.973.834.111,33 yang merupakan selisih antara Arus Kas Masuk sebesar Rp988.757.532.106,02 dengan Arus Kas Keluar sebesar Rp835.783.697.994,69. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 7.5.160 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Uraian	(dalam rupiah)	
	Tahun 2022	Tahun 2021
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pajak Daerah	12.561.988.365,52	13.107.684.837,31
Penerimaan Retribusi Daerah	963.777.940,00	738.367.467,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.043.060.400,00	8.585.266.888,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	45.592.302.989,50	19.964.869.719,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	74.298.556.387,00	109.006.826.516,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	240.346.392.264,00	131.315.460.570,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	390.559.258.000,00	390.697.487.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	107.797.063.635,00	106.977.890.307,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	3.893.265.000,00	41.587.990.000,00
Penerimaan Dana Desa	50.958.282.000,00	66.022.285.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	53.455.085.125,00	60.785.051.450,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Hibah	0,00	19.633.049.406,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	1.288.500.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	988.757.532.106,02	968.422.229.160,31
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai	380.605.113.177,00	395.339.136.561,75
Pembayaran Barang	314.912.697.738,35	277.840.642.734,99
Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	27.753.967.108,00	8.640.230.595,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.174.294.368,34	10.242.658.356,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Pembayaran Tak Terduga	1.331.862.663,00	11.623.472.663,35
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	1.199.999.990,00	480.000.010,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	50.699.950,00	20.279.980,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	104.755.063.000,00	123.518.700.850,00
Jumlah Arus Kas Keluar	835.783.697.994,69	827.705.121.751,09
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	152.973.834.111,33	140.717.107.409,22

Terdapat perbedaan antara Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi dengan Pendapatan LRA sebesar Rp517.743.762,00, yaitu:

Arus Kas Masuk	Pendapatan LRA	Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi	Selisih
	989.275.275.868,02	988.757.532.106,02	517.743.762,00

Selisih Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi dengan Pendapatan LRA sebesar Rp517.743.762,00 yang merupakan Penjualan Kendaraan Dinas yang masuk dalam Aktivitas Investasi.

7.5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan Aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas Arus kas dari aktivitas investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Arus Kas Masuk	517.743.762,00	552.604.741,00
Arus Kas Keluar	180.851.143.808,59	124.908.898.038,31
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(180.333.400.046,59)	(124.356.293.297,31)

Penurunan Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi sebesar Rp(180.333.400.046,59) merupakan selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp517.743.762,00 dan Arus kas keluar sebesar Rp180.851.143.808,59. Rincian aliran kas dari aktivitas investasi tahun 2022 dan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.161 Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)		
Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Arus Kas Masuk		
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	517.743.762,00	217.032.889,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		335.571.852,00
Jumlah Arus Kas Masuk	517.743.762,00	552.604.741,00
Arus Kas Keluar		
Perolehan Tanah	14.947.363.488,00	3.524.035.600,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	36.673.771.470,56	31.700.356.343,36
Perolehan Gedung dan Bangunan	35.255.591.251,14	20.532.700.088,84
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	93.570.889.388,89	67.929.465.806,11
Perolehan Aset Tetap Lainnya	403.528.210,00	1.222.340.200,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	180.851.143.808,59	124.908.898.038,31
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(180.333.400.046,59)	(124.356.293.297,31)

Tidak ada perbedaan antara Belanja Modal LRA dengan Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi.

7.5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk melakukan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Natuna yang mempengaruhi Pembiayaan pada LRA. Pada Tahun Anggaran 2022, jumlah total arus kas dari aktivitas pembiayaan adalah Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Arus Kas Keluar	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

7.5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan

pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Arus Kas Masuk	64.048.236.443,00	57.519.124.166,00
Arus Kas Keluar	64.244.389.661,00	57.322.893.816,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(196.153.218,00)	196.230.350,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp(196.153.218,00). Rincian aliran Kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2022 dan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.162 Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Transitoris

Uraian	(dalam rupiah)	
	Tahun 2022	Tahun 2021
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	64.048.236.443,00	57.519.124.166,00
Kiriman Uang Masuk	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	64.048.236.443,00	57.519.124.166,00
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	64.244.389.661,00	57.322.893.816,00
Kiriman Uang Keluar	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	64.244.389.661,00	57.322.893.816,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(196.153.218,00)	196.230.350,00

Perhitungan fihak ketiga (PFK) belanja gaji pegawai dan perhitungan pajak belanja yang harus disetorkan ke Kas Negara dan Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.163 Rincian Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

(dalam rupiah)					
No	Uraian	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	Asuransi Kesehatan	196.230.350,00	14.023.513.667,00	14.219.744.017,00	0,00
2	Iuran Wajib Pegawai	0,00	13.712.342.752,00	13.712.265.620,00	77.132,00
3	Jaminan Kecelakaan Kerja	0,00	283.276.280,00	283.276.280,00	0,00
4	Jaminan Kematian	0,00	849.827.075,00	849.827.075,00	0,00
5	PPN	0,00	18.699.297.665,00	18.699.297.665,00	0,00
6	PPh 21	0,00	12.703.604.604,00	12.703.604.604,00	0,00
7	PPh 22	0,00	403.864.646,00	403.864.646,00	0,00
8	PPh 23	0,00	296.247.211,00	296.247.211,00	0,00
9	PPh 4 (2)/ PPh 25	0,00	3.076.262.543,00	3.076.262.543,00	0,00
Jumlah		196.230.350,00	64.048.236.443,00	64.244.389.661,00	77.132,00

7.5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kenaikan / (Penurunan) Kas	(27.555.719.153,26)	16.557.044.461,91

Kenaikan kas bersih selama periode tahun 2022 sebesar Rp(27.555.719.153,26) menunjukkan adanya defisit realisasi APBD tahun 2022 atau pendapatan dan penerimaan pembiayaan lebih kecil dari belanja dan pengeluaran pembiayaan. Perhitungan Kenaikan Kas Bersih adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.164 Perhitungan Kenaikan/Penurunan Bersih Kas

(dalam rupiah)		
Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	152.973.834.111,33	140.717.107.409,22
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(180.333.400.046,59)	(124.356.293.297,31)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(196.153.218,00)	196.230.350,00
Kenaikan / (Penurunan) Kas	(27.555.719.153,26)	16.557.044.461,91

7.5.5.6 Saldo Awal Kas di BUD

Saldo Awal Kas di BUD	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	32.523.422.082,15	16.018.514.944,83

Saldo Awal Kas di BUD dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.165 Perhitungan Saldo Awal BUD

<i>(dalam rupiah)</i>		
No	Uraian Saldo	Jumlah
1	Saldo Awal Kas di BUD	29.896.697.590,30
2	Saldo Awal Kas di BLUD	1.871.843.974,05
3	Saldo Kas Dana BOS	754.880.517,80
4	Saldo Awal Kas Lainnya	0,00
Jumlah Saldo Kas Awal		32.523.422.082,15

Terdapat perbedaan saldo awal Kas sebesar Rp52.137.324,59 dengan saldo akhir tahun 2021 Rp32.575.559.406,74. Perbedaan terjadi karena koreksi pencatatan saldo awal Dana BOS .

7.5.5.7 Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, Bendahara Penerimaan & Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya

Saldo Akhir Kas di BUD	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	4.967.702.928,89	32.575.559.406,74

Saldo Kas Akhir sebesar Rp 4.967.702.928,89 merupakan jumlah saldo kas/setara kas Pemerintah Daerah dengan rincian:

Tabel 7.5.426 Perhitungan Saldo Akhir BUD

<i>(dalam rupiah)</i>		
No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Akhir Kas di BUD	2.558.239.608,75
2	Saldo Akhir Kas di BLUD	1.859.924.388,90
3	Saldo Kas Dana BOS	161.388.786,00
4	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	386.955.981,24
5	Kas Lainnya	1.194.164,00
Jumlah Kas Akhir		4.967.702.928,89

Terdapat selisih antara saldo kas Laporan Arus Kas dengan Kas dan Setara Kas pada neraca yang merupakan sebesar Rp158.040.954,00 yang terdiri dari Saldo Kas Piutang Dana Bergulir Rp111.603.019,00 yang terdapat pada rekening Dana Bergulir, Saldo Kas Dana BROS Rp13.280.009,00 yang terdapat pada rekening BROS di Sekolah, Saldo Utang PFK Pada Bendahara BOS di Sekolah Rp26.638.946,00 dan Pungutan Pajak Restoran yang belum dilakukan penyeteroran pada Rekening Kas Umum Daerah Rp6.518.980,00.

7.5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang memberi informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo awal ekuitas tahun 2022 sebesar Rp2.661.600.251.945,35 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2021.

7.5.6.2 Surplus/defisit - LO

Surplus - LO sebesar Rp60.582.807.520,70 merupakan Surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2022.

7.5.6.3 Koreksi-koreksi

Selisih sebesar Rp13.171.991.277,52 merupakan koreksi-koreksi sebagai dampak akumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar dengan rincian:

1. Koreksi Ekuitas Lainnya

Jumlah koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp(2.366.282.522,48) dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.167 Daftar Koreksi Pencatatan Ekuitas Lainnya

(dalam rupiah)		
No	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Kekurangan Pencatatan Gedung dan Bangunan	247.021.500,00
3	Kekurangan pencatatan aset tanah	1.576.308.056,00
4	Kekurangan Pencatatan Peralatan dan Mesin	958.740.080,00
5	Kekurangan Pencatatan Peralatan dan Mesin Dari Hibah Tahun Sebelumnya	847.652.000,00
6	Kelebihan pencatatan Akumulasi Peralatan dan Mesin	2.307.269.703,67
7	Kelebihan pencatatan akumulasi gedung dan bangunan	3.358.919.990,34
8	Kelebihan pencatatan akumulasi Jalan Irigasi dan jaringan	874.713.398,67
9	Kelebihan Pencatatan Akumulusi Penyusutan Aset lain-lain	2.327.796.917,88
10	Kelebihan Pencatatan Amortisasi Aset Tidak berwujud	289.050.200,00
11	Kelebihan pencatatan penyisihan piutang dana bergulir	191.412.635,09
12	Kelebihan Pencatatan Penyisihan Piutang Kelebihan Gaji dan Tunjangan	43.640.000,00
13	Kelebihan pencatatan penyisihan piutang blud	25.951.225,28
14	Kelebihan Pencatatan Utang	432.298.630,66
15	Penambahan TGR dari Temuan Selain Belanja Modal	690.711.830,00

No	Uraian	Jumlah
16	Koreksi mutasi sisa kas dana BROS pada rekening sekolah ke Kas di Kas Daerah	13.280.009,00
17	Jumlah penambahan	14.184.766.176,60
18	Kelebihan pencatatan investasi jangka panjang permanen	374.893.460,00
19	Kelebihan Pencatatan Piutang Kelebihan Gaji dan Tunjangan	30.900.000,00
20	Kelibahan pencatatan saldo awal dana bos	52.137.324,59
21	Kekurangan pencatatan akumulasi Amortisasi ATB	45.759.583,34
22	Kekurangan Pencatatan akumulasi Peralatan dan Mesin	2.787.200.156,69
23	Kekurangan pencatatan akumulasi Gedung dan Bangunan	2.318.965.860,40
24	Kekurangan pencatatan akumulasi Jalan Irigasi dan Jaringan	2.048.317.353,82
25	Kekurangan Pencatatan akumulasi Aset Lain-lain	1.480.851.819,92
26	Kelebihan pencatatan aset tanah	205.713.837,00
27	Kelebihan Pencatatan Aset Tanah yang telah dihibahkan Tahun 2021	564.217.592,00
28	Kelebihan Pencatatan Peralatan dan Mesin	147.685.480,00
29	Kelebihan Pencatatan piutang BLUD	446.533.342,00
30	Kelebihan pencatatan piutang dana bergulir	92.989.482,00
31	Kelebihan pencatatan TGR	5.884.183.407,32
32	Kurang catat pendapatan diterima dimuka	70.700.000,00
33	Jumlah pengurangan	16.551.048.699,08
34	Jumlah Selisih (17-34)	(2.366.282.522,48)

2. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp15.538.273.800,00 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.168 Daftar Selisih revaluasi Aset Tetap

(dalam rupiah)	
Uraian	Jumlah
Revaluasi Tanah	5.871.526.370,00
Revaluasi Gedung dan Bangunan	9.666.747.430,00
Total	15.538.273.800,00

7.5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir adalah sebesar Rp2.735.355.050.743,56

7.5.7 Pengungkapan atas pos-pos Aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya

7.5.7.1 Pengungkapan Perbedaan Pendapatan-LO dengan Pendapatan –LRA

a. Pendapatan Asli Daerah

	Pendapatan	LO	LRA	Selisih
1.	Pajak Daerah	15.211.620.015,39	12.561.988.365,52	2.649.631.649,87

Selisih antara Pendapatan Pajak Daerah - LO dengan Pendapatan Pajak Daerah - LRA Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.649.631.649,87 merupakan selisih antara pendapatan Pajak Daerah LO yang berasal dari penambahan piutang dikurangi dengan pelunasan piutang tahun sebelumnya yang dilakukan pada tahun berjalan. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.169 Selisih Pendapatan Pajak Daerah

<i>(dalam rupiah)</i>		
No	Uraian	Jumlah
1	Penambahan Piutang Pajak Reklame Tahun 2022	1.898.000,00
2	Penambahan Piutang BPHTB Tahun 2022	101.220,00
3	Penambahan Piutang PBB-P2 Tahun 2022	3.103.556.708,00
4	Penambahan dari Pemungutan Pajak Restoran yang dipungut oleh pengelola Dana BOS	6.518.980,00
5	Jumlah penambahan (1-4)	3.112.074.908,00
6	Pelunasan Piutang Pajak Reklame Tahun Berjalan	1.563.000,00
7	Pelunasan Piutang BPHTB Tahun berjalan	1.114.723,13
8	Pelunasan Piutang PBB-P2 Tahun Berjalan	459.765.535,00
9	Jumlah Pengurangan (5-8)	462.443.258,13
10	Jumlah (5-9)	2.649.631.649,87

	Pendapatan	LO	LRA	Selisih
2.	Retribusi Daerah	963.777.940,00	963.777.940,00	0,00

Tidak terdapat selisih antara Pendapatan Retribusi Daerah-LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA, ini dikarenakan tidak adanya transaksi yang mempengaruhi Pendapatan Retribusi Daerah-LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

	Pendapatan Hasil	LO	LRA	Selisih
3	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.043.060.400,00	7.043.060.400,00	0,00

Tidak terdapat selisih antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA, ini dikarenakan tidak adanya transaksi yang mempengaruhi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA.

	Lain-lain	LO	LRA	Selisih
4	PAD yang Sah	39.366.985.540,84	46.110.046.751,50	(6.743.061.210,66)

Selisih sebesar Rp(6.743.061.210,66) antara Lain-lain PAD yang Sah-LO dengan Lain-lain PAD yang Sah-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.170 Selisih Lain-lain PAD yang Sah

<i>(dalam rupiah)</i>		
No	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Penambahan dari Pendapatan diterima dimuka	82.383.333,34
3	Penambahan Piutang BLUD	5.035.530.445,00
4	Jumlah Penambahan	5.117.913.778,34

5	Pengurangan	
6	Pelunasan Piutang BLUD	9.779.242.159,00
7	Pelunasan Piutang Dana Bergulir	12.406.059,09
8	Pelunasan Piutang Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	23.250.000,00
9	Pelunasan TGR	1.957.469.362,57
10	Reklasifikasi ke Pendapatan Diterima Dimuka	54.988.888,89
11	Kurang catat pendapatan dibayar dimuka BLUD	7.294.444,45
12	Pencatatan Mutasi Saldo Kas Dana Bergulir Perikanan	20.324.075,00
13	Kurang catat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan gaji dan tunjangan	6.000.000,00
13	Jumlah Pengurangan	11.860.974.989,00
14	Jumlah Selisih (4-13)	(6.743.061.210,66)

Pendapatan Transfer

	Pendapatan	LO	LRA	Selisih
1.	Transfer Pemerintah			
	Pusat-Dana			
	Perimbangan	828.222.164.682,00	813.001.270.286,00	15.220.894.396,00

Terdapat selisih sebesar Rp15.220.894.396,00 antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO dan LRA merupakan Dana Transfer Terasury Deposit Facility (TDF) Tahun 2022.

	Pendapatan	LO	LRA	Selisih
2.	Transfer			
	Pemerintah			
	Pusat - Lainnya	3.893.265.000,00	54.851.547.000,00	(50.958.282.000,00)

Selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA sebesar Rp(50.958.282.000,00) merupakan Pendapatan atas Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Natuna yang langsung disalurkan ke desa di Tahun 2022 yang dicatat sebagai utang pada saat dibukukan.

	Pendapatan	LO	LRA	Selisih
3.	Transfer			
	Pemerintah	85.183.584.050,00	54.743.585.125,00	30.439.998.925,00
	Daerah			
	Lainnya			

Selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA sebesar Rp30.439.998.925,00. Sebesar Rp37.072.526.475,00 merupakan koreksi kurang catat Piutang Pajak Provinsi ke Kabupaten Tahun 2022 dan Rp(6.632.527.550,00) merupakan pelunasan piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2021 yang terdiri dari Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Rp3.027.705.006,00, Piutang Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp1.587.882.917,00, Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp8.846.634,00, dan Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp2.008.092.993,00.

b. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah

	Pendapatan	LO	LRA	Selisih
1.	Hibah			
		42.607.857.906,08	0,00	42.607.857.906,08

Selisih sebesar Rp42.607.857.906,08 antara Pendapatan Hibah-LO dengan Pendapatan Hibah-LRA merupakan pendapatan hibah barang yang tidak disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan tersebut adalah:

Tabel 7.5.171 Rincian Pendapatan Hibah

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Pendapatan Hibah Persediaan	3.260.622.411,09
Pendapatan Hibah Peralatan dan Mesin	4.707.199.450,00
Pendapatan Hibah Gedung dan Bangunan	34.607.036.044,99
Pendapatan Hibah Aset Tidak Berwujud	33.000.000,00
Jumlah	42.607.857.906,08

7.5.7.2 Pengungkapan Perbedaan Beban-LO dengan Belanja-LRA

a. Belanja Operasi

	Beban	LO	LRA	Selisih
1.	Pegawai - Belanja Pegawai	365.534.221.004,00	380.605.113.177,00	(15.070.892.173,00)

Selisih antara Beban Pegawai-LO dan Belanja Pegawai-LRA Tahun 2022 sebesar Rp15.070.892.173,00 merupakan selisih antara penambahan utang belanja pegawai sebesar Rp43.996.367,00 dengan pelunasan utang belanja pegawai Tahun 2021 sebesar Rp15.114.888.540,00.

	Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas- Belanja Barang dan Jasa	LO	LRA	Selisih
2.		292.889.666.115,06	314.912.697.738,35	(22.023.031.623,29)

Terdapat perbedaan nilai Beban Barang dan Jasa pada LO dengan nilai Belanja Barang dan Jasa pada LRA sebesar Rp(22.023.031.623,29) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.172 Perbedaan Beban Barang dan Jasa LO dan LRA

(dalam rupiah)

No.	Nama Beban/Belanja	LO	LRA	Selisih
1.	Beban/Belanja Persediaan	59.382.215.958,37	57.743.426.021,01	1.638.789.937,36
2.	Beban Jasa /Belanja Jasa	180.601.767.609,32	198.359.461.231,97	(17.757.693.622,65)
3.	Beban/Belanja Pemeliharaan	7.973.505.261,37	12.513.182.169,37	(4.539.676.908,00)
4.	Beban/Belanja Perjalanan Dinas	44.932.177.286,00	46.296.628.316,00	(1.364.451.030,00)
	Jumlah	292.889.666.115,06	314.912.697.738,35	(22.023.031.623,29)

- 1) Selisih antara Beban Persediaan dengan Belanja Persediaan Tahun 2022 adalah senilai Rp1.638.789.937,36 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 7.5.173 Perbedaan Beban Persediaan LO dan Belanja yang menjadi Persediaan LRA

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Penambahan	
2.	Pendapatan Hibah LO	3.260.622.411,09
3.	Reklasifikasi dari Beban Hibah	3.204.247.184,00
4.	Reklasifikasi dari Beban Tidak Terduga	1.009.244.480,00
5.	Penambahan Dari Peralatan dan Mesin	58.021.153,04
6.	Penambahan Utang 2022	42.620.000,00
7.	Reklas dari Beban BLUD	170.894.696,67
8.	Penyesuaian Harga	255.300,00
9.	Koreksi Pencatatan Saldo Awal Persediaan	88.762.100,00
10.	Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan	89.910.000,00
11.	Selisih antara Persediaan Awal tahun yang menjadi Beban dengan penambahan Persediaan Tahun 2022 yang masuk menjadi Beban Persediaan	35.020.993.665,50
12.	Jumlah Penambahan	42.945.570.990,29
13.	Pengurangan	
14.	Reklas Ke Peralatan dan Mesin	139.808.300,00
15.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	34.782.583.916,00
16.	Kekurangan Volume Pekerjaan (Temuan BPK)	66.550.419,93
17.	Pelunasan Utang	6.317.838.417,00
18.	Jumlah Pengurangan	41.306.781.052,93
19.	Jumlah Perbedaan (12-18)	1.638.789.937,36

- 2) Selisih antara Beban Jasa dengan Belanja Jasa Tahun 2022 adalah senilai Rp(17.757.693.622,65) dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 7.5.174 Perbedaan Beban Jasa LO dan Belanja yang menjadi Jasa LRA

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Penambahan	
2.	Reklasifikasi dari Beban dibayar dimuka	171.250.000,01
3.	Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	19.742.000,00
4.	Penambahan Beban Jasa dari timbulnya Utang	2.881.440.189,00
5.	Reklasifikasi dari Beban Pegawai	1.026.819.801,00
6.	Reklasifikasi dari Beban Tidak Terduga	240.000,00
7.	Jumlah Penambahan	4.099.491.990,01
8.	Pengurangan	
9.	Reklasifikasi ke Beban Dibayar di Muka	284.791.666,66
10.	Reklasifikasi ke Tanah	49.850.100,00
11.	Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	294.618.100,00
12.	Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud	2.029.715.168,00
13.	Kelebihan pembayaran honorarium	219.984.000,00
14.	Pelunasan Utang Tahun 2021	18.978.226.578,00
15.	Jumlah Pengurangan	21.857.185.612,66
16.	Jumlah Perbedaan (7-15)	(17.757.693.622,65)

- 3) Selisih antara Beban Pemeliharaan dengan Belanja Pemeliharaan Tahun 2022 adalah senilai Rp(4.539.676.908,00) dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.175 Perbedaan Beban Pemeliharaan LO dan Belanja Pemeliharaan LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Penambahan	
2.	Penambahan Beban Pemeliharaan dari timbulnya Utang	380.454.498,00
3.	Penambahan dari Beban Tidak Terduga	49.232.500,00
4.	Jumlah Penambahan	429.686.998,00
5.	Pengurangan	
6.	Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	30.878.068,00
7.	Reklasifikasi ke Persediaan	89.910.000,00
8.	Pelunasan Utang Tahun 2021	4.848.575.838,00
9.	Jumlah Pengurangan	4.969.363.906,00
10.	Jumlah Perbedaan (4-9)	(4.539.676.908,00)

- 4) Selisih antara Beban Perjalanan Dinas dengan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2022 adalah senilai Rp(1.364.451.030,00), sebesar Rp(1.217.207.832,00) merupakan pelunasan utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan sisanya sebesar Rp(147.243.198,00) merupakan temuan BPK RI atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas tahun 2022.

	<u>LO</u>	<u>LRA</u>	<u>Selisih</u>
3. Beban Subsidi	0.00	0.00	0.00

Selisih antara Beban Subsidi LO dengan Belanja Subsidi LRA dengan Belanja Bantuan Sosial senilai Rp0,00.

	<u>LO</u>	<u>LRA</u>	<u>Selisih</u>
4. Beban Hibah	75.116.998.912,20	27.753.967.108,00	47.363.031.804,20

Selisih antara Beban Hibah LO dengan Belanja Hibah LRA dengan Belanja Bantuan Sosial senilai Rp47.363.031.804,20 dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 7.5.176 Perbedaan Beban Hibah LO dan Belanja Hibah LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Penambahan Hibah dari pemberian Hibah Tanah	1.533.094.545,50
3	Penambahan Hibah dari pemberian Hibah Peralatan dan Mesin	23.744.791,66
4	Penambahan Hibah dari pemberian Hibah Gedung dan Bangunan	5.813.434.434,67
5	Penambahan Hibah dari pemberian Hibah Jalan, Irigasi dan Jaringan	760.995.068,11
6	Penambahan Hibah dari pemberian Hibah Aset Tetap Lainnya	39.875.300,00
7	Penambahan Hibah dari pemberian Hibah Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	13.255.341.000,00
8	Penambahan Hibah dari timbulnya Utang Tahun 2022	1.759.476.216,00
9	Penambahan Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	34.782.583.916,00
10	Jumlah Penambahan	57.968.545.271,94
11	Pengurangan	
12	Reklasifikasi ke Persediaan	3.204.247.184,00
13	Reklasifikasi dari Hibah ke Gedung dan Bangunan	768.334.075,00

No	Uraian	Jumlah
14	Reklasifikasi dari Hibah ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	54.714.355,00
15	Pelunasan Utang Hibah Tahun 2021	6.571.068.185,00
16	Pengurangan nilai karena temuan kurval BPK RI	7.149.668,74
17	Jumlah Pengurangan	10.605.513.467,74
18	Jumlah Perbedaan (10-17)	47.363.031.804,20

5.	Beban Bantuan Sosial	LO	LRA	Selisih
		5.215.351.979,34	5.174.294.368,34	41.057.611,00

Selisih antara Beban Bantuan Sosial dengan Belanja Bantuan Sosial senilai Rp41.057.611,00 dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 7.5.177 Perbedaan Beban Bantuan Sosial LO dan Belanja Bantuan Sosial LRA

(dalam rupiah)		
No	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Reklas dari Beban Luar Biasa	113.895.683,00
3	Jumlah Penambahan	113.895.683,00
4	Pengurangan	
5	Pelunasan Utang Tahun 2021	72.838.072,00
6	Jumlah Pengurangan	72.838.072,00
7	Jumlah Perbedaan (3-6)	41.057.611,00

6.	Beban Penyusutan	LO	LRA	Selisih
		160.066.440.372,85	0,00	160.066.440.372,85

Selisih antara Beban Penyusutan LO dengan LRA adalah sebesar Rp160.066.440.372,85. Ini disebabkan karena Beban Penyusutan adalah akun LO yang merupakan Belanja Operasional dan bukan merupakan akun LRA.

7.	Beban Transfer dan Belanja Transfer	LO	LRA	Selisih
		55.047.480.940,00	106.005.762.940,00	(50.958.282.000,00)

Selisih antara Beban Transfer LO dan Belanja Transfer LRA sebesar Rp (50.958.282.000,00) merupakan pengurangan beban Transfer Dana Desa yang dicatat sebagai utang dan pelunasan utang pada saat disalurkan ke rekening desa sebesar Rp50.958.282.000,00.

8.	Beban Penyisihan Piutang	LO	LRA	Selisih
		2.157.351.986,96	0,00	2.157.351.986,96

Selisih antara Beban Penyisihan Piutang adalah sebesar Rp2.157.351.986,96. Ini disebabkan karena Beban Penyisihan Piutang adalah akun LO yang merupakan akun dari Laporan Operasional dan bukan merupakan akun LRA.

b. Belanja Modal

Belanja Modal	LO	LRA	Selisih
	0,00	180.851.143.808,59	(180.851.143.808,59)

Selisih antara Belanja Modal adalah sebesar Rp(180.851.143.808,59). Ini disebabkan karena Belanja Modal bukanlah akun LO karena bukan merupakan Belanja Operasional.

c. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional

	Surplus Penjualan	LO	LRA	Selisih
1.	Aset Non Lancar - LO	1.380.000.000,00	0,00	1.380.000.000,00

Selisih antara Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO adalah sebesar Rp1.380.000.000,00 merupakan surplus dari Investasi jangka panjang permanen penyertaan modal tanah ke Bank Riau Kepri Syariah. Selisih ini disebabkan karena Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO adalah akun LO yang merupakan akun dari Laporan Operasional dan bukan merupakan akun LRA.

	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	LO	LRA	Selisih
2.		255.300,00	0,00	255.300,00

Selisih antara Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO adalah sebesar Rp255.300,00 merupakan surplus dari nilai persediaan ikan lele yang berubah nilai karena berubah ukurannya pada Dinas Perikanan. Selisih ini disebabkan karena Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO adalah akun LO yang merupakan akun dari Laporan Operasional dan bukan merupakan akun LRA.

	Defisit Penjualan	LO	LRA	Selisih
3.	Aset Non Lancar - LO	(5.771.759.427,20)	0,00	(5.771.759.427,20)

Selisih antara Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO adalah sebesar Rp5.771.759.427,20. Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 7.5.178 Perbedaan Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO

<i>(dalam rupiah)</i>		
No.	Uraian	Jumlah
1.	Defisit Penghapusan atas pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Ekstrakomtabel	1.860.902.563,47
2.	Defisit Penghapusan atas pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Ekstrakomtabel	109.948.833,33
3.	Defisit Penghapusan atas pencatatan Aset Lainnya Kemitraan dengan Pihak Ketiga ke Ekstrakomtabel	210.056.000,00
4.	Defisit Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin-LO	1.050.156.466,45
5.	Defisit Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan-LO	703.581.411,68
6.	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain	1.837.114.152,27
Jumlah		5.771.759.427,20

Selisih ini disebabkan karena Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO adalah akun LO yang merupakan akun dari Laporan Operasional dan bukan merupakan akun LRA.

	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	LO	LRA	Selisih
4.		(1.490.492.576,00)	0,00	(1.490.492.576,00)

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO merupakan kerugian investasi jangka panjang permanen yang dicatat dengan metode ekuitas yang terdiri dari kerugian PDAM Tirta Nusa Rp792.515.240,00, dan Kerugian Perusahaan Daerah Sri Serindit Rp697.977.336,00. Perbedaan Selisih ini disebabkan karena Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO adalah akun LO yang merupakan akun dari Laporan Operasional dan bukan merupakan akun LRA.

d. Pos Luar Biasa

Beban Luar Biasa	LO	LRA	Selisih
	0,00	1.331.862.663,00	(1.331.862.663,00)

Selisih antara Beban Luar Biasa dengan Belanja Tidak Terduga LRA senilai Rp(1.331.862.663,00) terdiri dari :

Tabel 7.5.179 Perbedaan Beban Luar Biasa - LO

		(dalam rupiah)
No	Uraian	Jumlah
1	Reklasifikasi ke Perlengkapan Kebakaran Hutan	21.800.000,00
2	Reklasifikasi ke Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	105.000.000,00
3	Reklasifikasi ke Alat Dapur	7.450.000,00
4	Reklasifikasi ke Alat Penolong	25.000.000,00
5	Reklasifikasi ke Beban Bahan-Bahan Kimia	333.042.480,00
6	Reklasifikasi ke Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.200.000,00
7	Reklasifikasi ke Beban Bahan-Isi Tabung Gas	700.000,00
8	Reklasifikasi ke Beban Bahan-Bahan Lainnya	3.140.000,00
9	Reklasifikasi ke Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.000.000,00
10	Reklasifikasi ke Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.100.000,00
11	Reklasifikasi ke Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.800.000,00
12	Reklasifikasi ke Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	156.500.000,00
13	Reklasifikasi ke Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	11.700.000,00
14	Reklasifikasi ke Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	175.637.000,00
15	Reklasifikasi ke Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	760.000,00
16	Reklasifikasi ke Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	246.545.000,00
17	Reklasifikasi ke Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.420.000,00
18	Reklasifikasi ke Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	240.000,00
19	Reklasifikasi ke Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	63.700.000,00
20	Reklasifikasi ke Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	113.895.683,00
21	Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	49.232.500,00
Jumlah		1.331.862.663,00

7.6 Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

7.6.1 Domisili dan Operasional Entitas

Natuna disamping sebagai nama pulau juga sebagai nama salah satu kabupaten yang tergabung dalam Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Kabupaten Natuna. Pulau yang tergabung dalam gugusan Pulau Tujuh ini berada di lintasan jalur pelayaran internasional dari dan atau ke Hongkong, Taiwan dan Jepang. Kabupaten yang langsung berbatasan dengan negara tetangga ini, berada pada posisi 1016'- 7019' Lintang Utara dan 1050 00'-110000' Bujur Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Bintan
- Sebelah timur : berbatasan dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat
- Sebelah barat : berbatasan dengan Semenanjung Malaysia dan Pulau Bintan

Luasnya mencapai 141.901,20 Km² dengan rincian 138.666,0 Km² perairan (lautan) dan 3.235,20 Km² daratan. Ini berarti bahwa wilayah Kabupaten Natuna sebagian besar berupa lautan. Daratannya pun bukan hanya satu pulau, tetapi berpulau-pulau yang struktur tanahnya berupa padosolik merah kuning, alluvial, organosol, dangley humus.

Kabupaten yang berada di ketinggian 3 - 959 Meter dari permukaan air laut ini ber ibu kota di Ranai. Jarak kota ini dengan kota-kota lainnya yang berada di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut: Tanjung Pinang (562 Km), Tanjung Balai Karimun (642 Km), Batam (589 Km), Sedanau (58 Km), Midai (139 Km), Serasan (177 Km), Tarempa (258 Km), Letung (322 Km), Tambelan (344 Km), Kijang (545 Km), Tanjung Uban (561 Km), Moro (618 Km), Tanjung Batu (654 Km), Senayang (593 Km), Dabo (954 Km), dan Daik (626 Km).

Pemerintah Kabupaten Natuna menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Natuna mencakup urusan:

1. Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat, kawasan permukiman dan Pertanahan
5. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
6. Sosial
7. Tenaga kerja dan Transmigrasi
8. Pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Ketahanan Pangan dan Pertanian
10. Lingkungan Hidup
11. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13. Perhubungan

14. Komunikasi dan Informatika
15. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Kepemudaan dan Olahraga
17. Perpustakaan dan Kearsipan
18. Pemadam Kebakaran dan Keselamatan

Selain urusan wajib tersebut Pemerintah Kabupaten Natuna juga melaksanakan urusan pilihan dan urusan lainnya yang mencakup:

- a. Urusan Pilihan
 1. Kelautan dan perikanan
 2. Pariwisata
 3. Perindustrian
- b. Urusan Pemerintahan
 1. Sekretariat daerah
 2. Sekretariat DPRD
 3. Perencanaan
 4. Keuangan
 5. Kepegawaian
 6. Pengelola perbatasan
 7. Inspektorat daerah
 8. Kesatuan bangsa dan politik
 9. Penanggulangan Bencana
- c. Urusan Kewilayahan
 1. Kecamatan

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki tugas pokok masing-masing yang merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap SKPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Natuna yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Natuna sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna.

7.6.2 Penerapan IPSAP Nomor 02

Dalam upaya penerapan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah terdapat tambahan pengakuan realisasi pada penyajian beberapa pos Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2022 yaitu:

- a. Pengakuan penerimaan dan pengeluaran Dana Jaminan Kesehatan Nasional
- b. Pengakuan penerimaan dan pengeluaran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah);

Dalam pengelolaan keuangan tidak semua pendapatan dalam bentuk kas diterima oleh RKUD. Pada tahun 2022 terdapat beberapa pendapatan yang diterima langsung oleh entitas selain Bendahara Umum Daerah, bahkan ada yang langsung digunakan oleh SKPD. Pendapatan tersebut terjadi pada:

a. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Jumlah Pendapatan/Dana Kapitasi JKN Tahun 2022 dari 14 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) se-Kabupaten Natuna sebesar Rp5.942.714.971,00 dan sudah dikeluarkan/digunakan sebesar Rp6.298.698.586,33 sehingga sisa dana JKN sebesar Rp386.955.981,24 dicatat kas di kasda dan diungkapkan secara memadai pada penjelasan akun kas di kasda pada catatan atas laporan keuangan ini.

Tabel 7.6.180 Daftar Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi JKN

NO.	NAMA FKTP	SALDO AWAL	PENDAPATAN	TOTAL BELANJA	SALDO AKHIR
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Puskesmas Ranai	132.111.583,00	1.411.367.847,00	1.543.446.483,00	32.947,00
2	Puskesmas Bunguran Timur Laut	31.610.238,00	307.027.334,00	314.482.295,00	24.155.277,00
3	Puskesmas Bunguran Tengah	123.566.757,00	179.356.968,00	302.923.718,00	7,00
4	Puskesmas Bunguran Selatan	2.087.609,00	238.902.864,00	236.076.001,00	4.914.472,00
5	Puskesmas Kelarik	3.121.840,00	476.064.828,00	471.380.408,00	7.806.260,00
6	Puskesmas Sedanau	131.874.150,57	628.490.724,00	679.208.479,00	81.156.395,57
7	Puskesmas Pulau Tiga	211.898.304,00	300.982.559,00	416.314.491,00	96.566.372,00
8	Puskesmas Pulau Laut	24.583.740,00	246.785.026,00	271.368.766,00	0,00
9	Puskesmas Midai	26.164.677,00	563.445.823,00	469.871.779,00	119.738.721,00
10	Puskesmas Serasan	7.968.026,00	602.148.920,00	600.989.233,54	9.127.712,46
11	Puskesmas Serasan Timur	3.246.610,00	372.479.722,00	373.848.990,00	1.877.342,00
12	Puskesmas Subi	6.488.802,00	336.727.579,00	332.653.156,00	10.563.225,00
13	Puskesmas Batubi Jaya	38.217.260,00	207.800.777,00	215.959.286,79	30.058.750,21
14	Puskesmas Pulau Tiga Barat	0	71.134.000,00	70.175.500,00	958.500,00
JUMLAH		742.939.596,57	5.942.714.971,00	6.298.698.586,33	386.955.981,24

b. Bantuan Operasional Sekolah

Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana Urusan Pendidikan menengah beralih dari Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi urusan Provinsi, maka untuk Pendapatan dan Belanja BOS Tingkat SLTA sederajat tidak disajikan dan diungkapkan. Yang disajikan dan diungkapkan hanya untuk urusan pendidikan Dasar. Untuk Dana BOS mengikuti Pendapatan dan Belanja yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2022. Untuk pendapatan dicatat pada kode rekening Pendapatan Dana BOS, sedangkan untuk belanja dicatat pada belanja pegawai BOS, belanja barang dan jasa BOS dan belanja modal BOS.

Total Dana BOS yang diterima oleh sekolah SD dan SMP Negeri se-Kabupaten Natuna sebesar Rp14.716.066.940,00 dan sudah digunakan sebagai realisasi belanja sebesar Rp15.309.558.671,80. Realisasi terhadap penerimaan dan pengeluaran BOS dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal BOS TA 2022	Rp	807.017.842,39
Koreksi Saldo awal	Rp	52.137.324,59
Saldo awal setelah dikoreksi	Rp	754.880.517,80
Penerimaan Dana BOS Tahun 2022	Rp	14.716.066.940,00
Belanja Dana Bos TA 2022	Rp	15.309.558.671,80
Saldo Akhir Dana BOS Tahun 2022	Rp	161.388.786,00

7.7 Penutup

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2022 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini atau pun nanti.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nalanda Tahun 2022 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Nalanda dalam penyampaian laporan keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian laporan keuangan masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan laporan keuangan berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 disajikan sesuai dengan kondisi objektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Dengan segala kekurangan, kami meyakini bahwa pengelolaan keuangan tahun 2022 secara umum telah memenuhi target dan sasaran.

Kami berharap dengan penerapan akuntansi berbasis akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2022, pengungkapan yang kami sajikan dalam laporan keuangan ini, dapat lebih berguna bagi *stakeholder* dan seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran selalu kami harapkan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Natuna di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan, dan mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola Pemerintah Kabupaten Natuna yang lebih baik.

